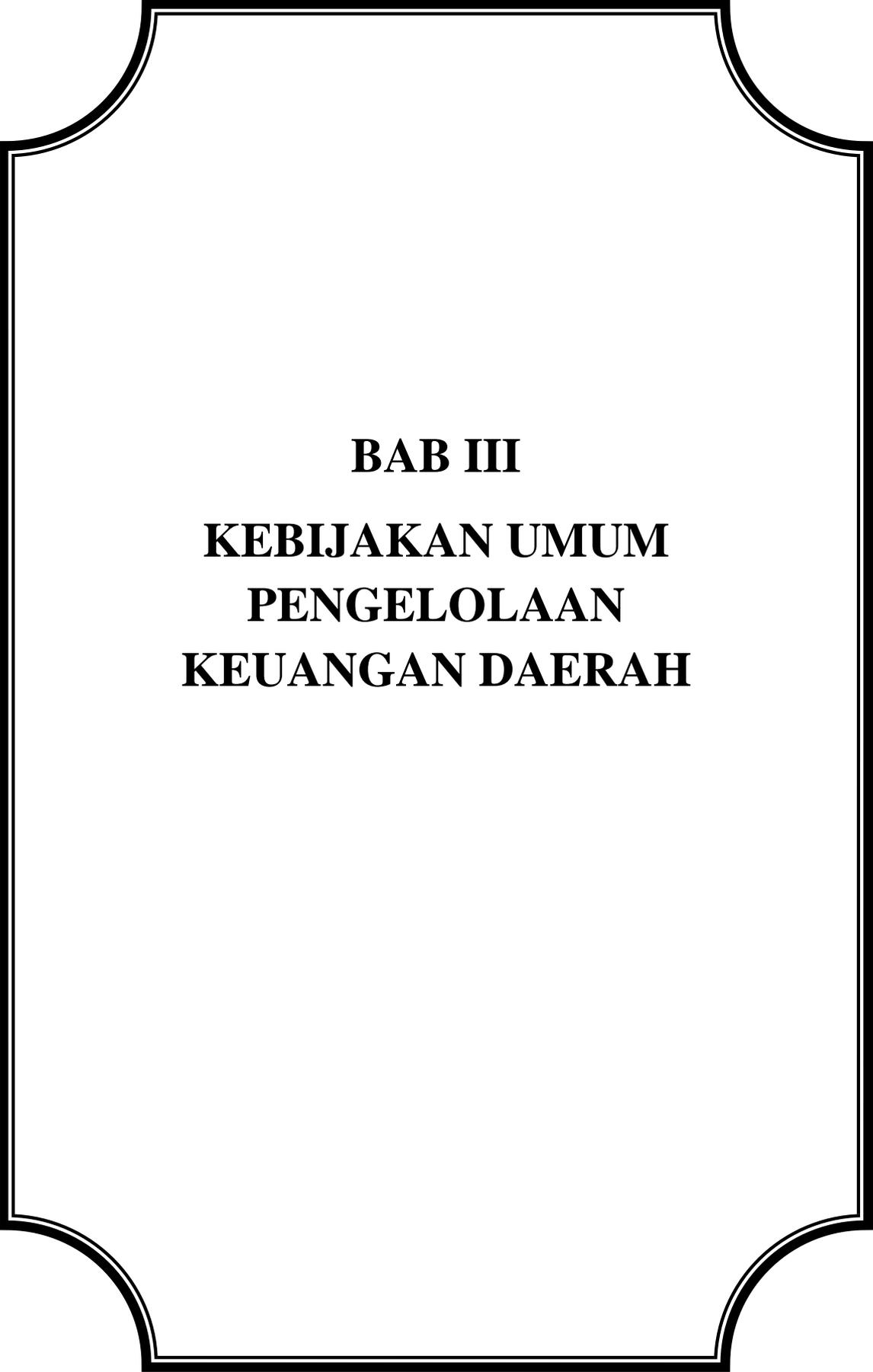


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
RPJMD 2011-2015
UNTUK TAHUN 2015
BERDASARKAN MISI KABUPATEN GRESIK



BAB II
KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH

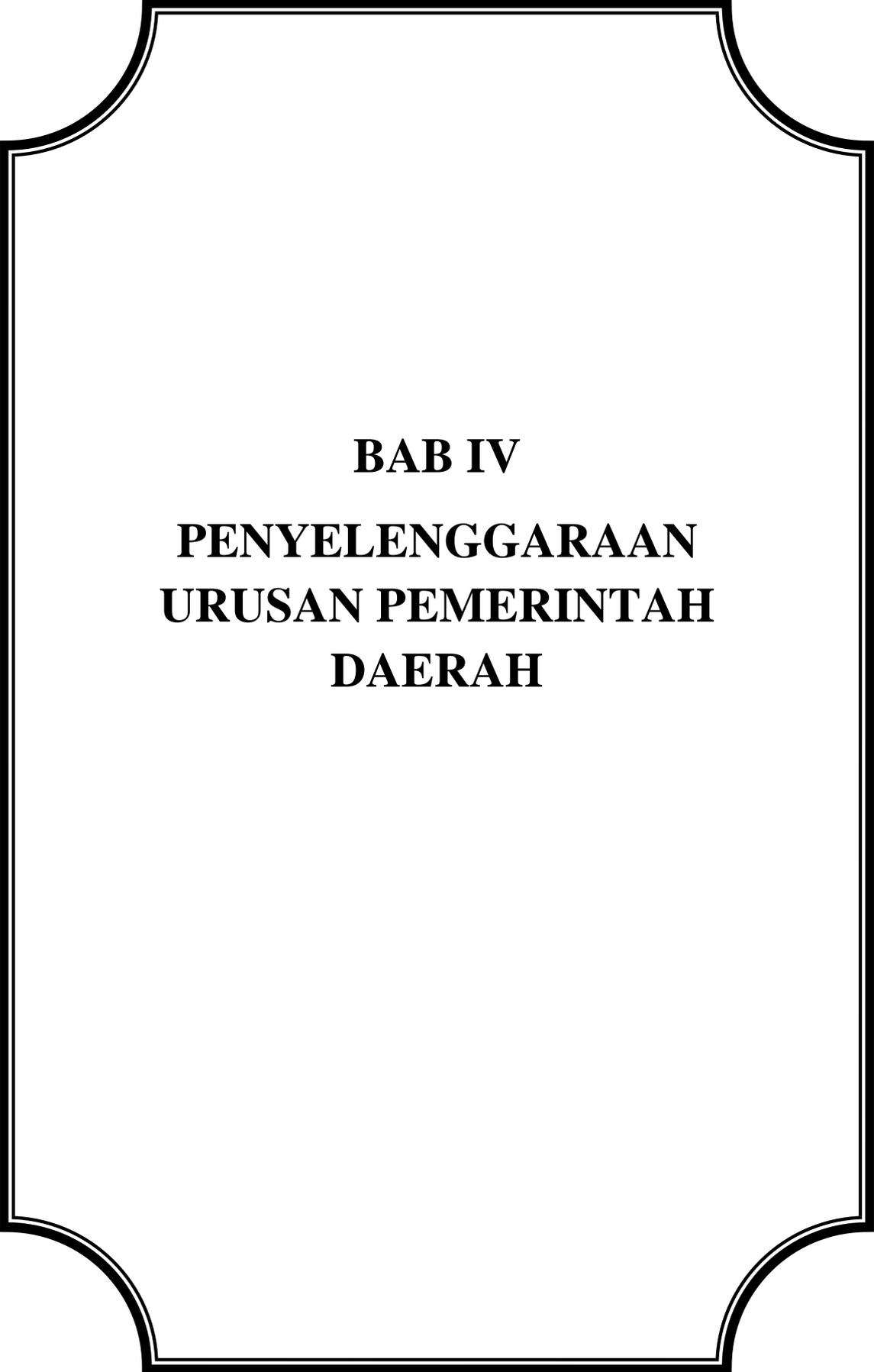


BAB III

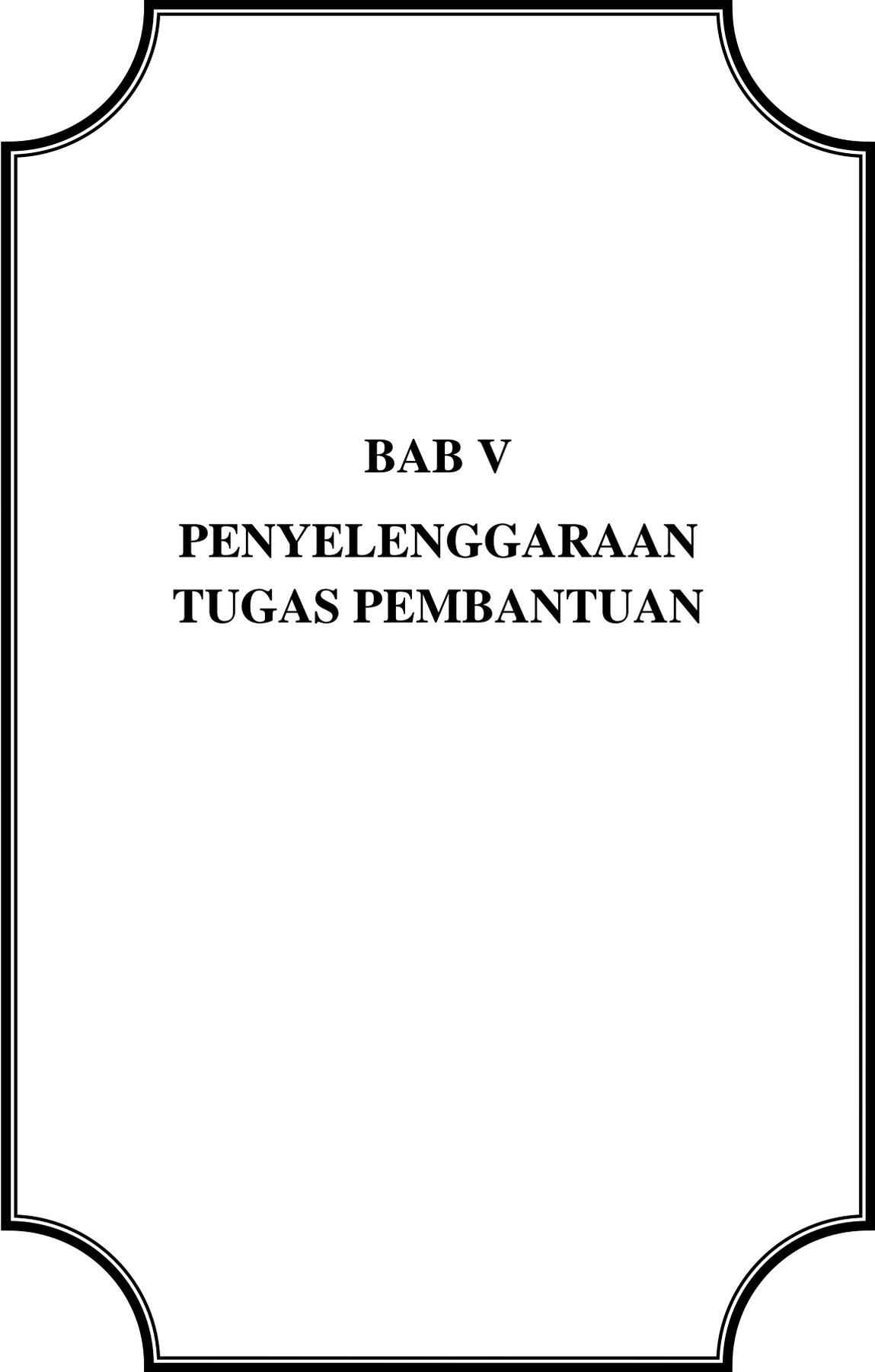
KEBIJAKAN UMUM

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

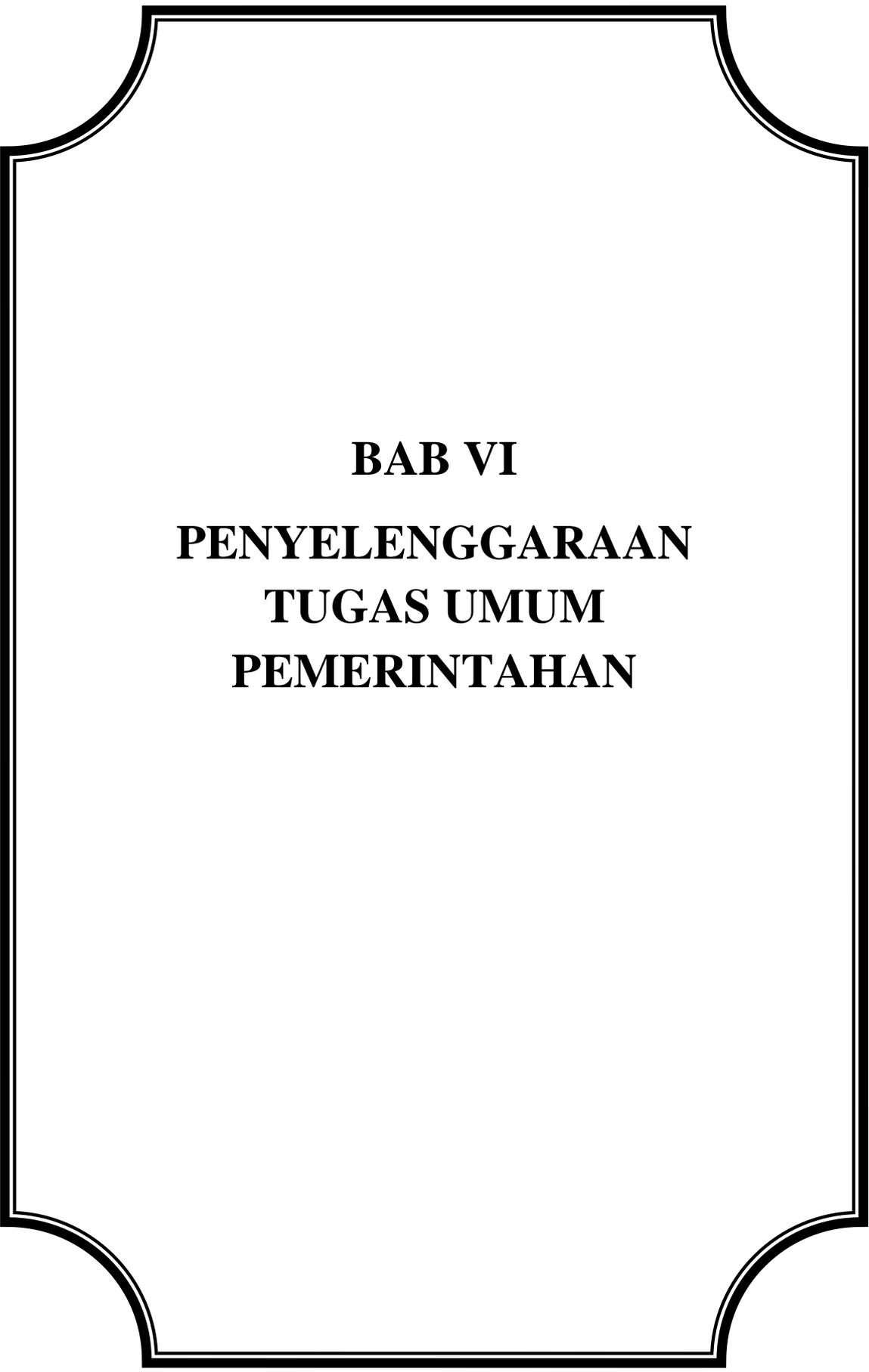


BAB IV
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAH
DAERAH

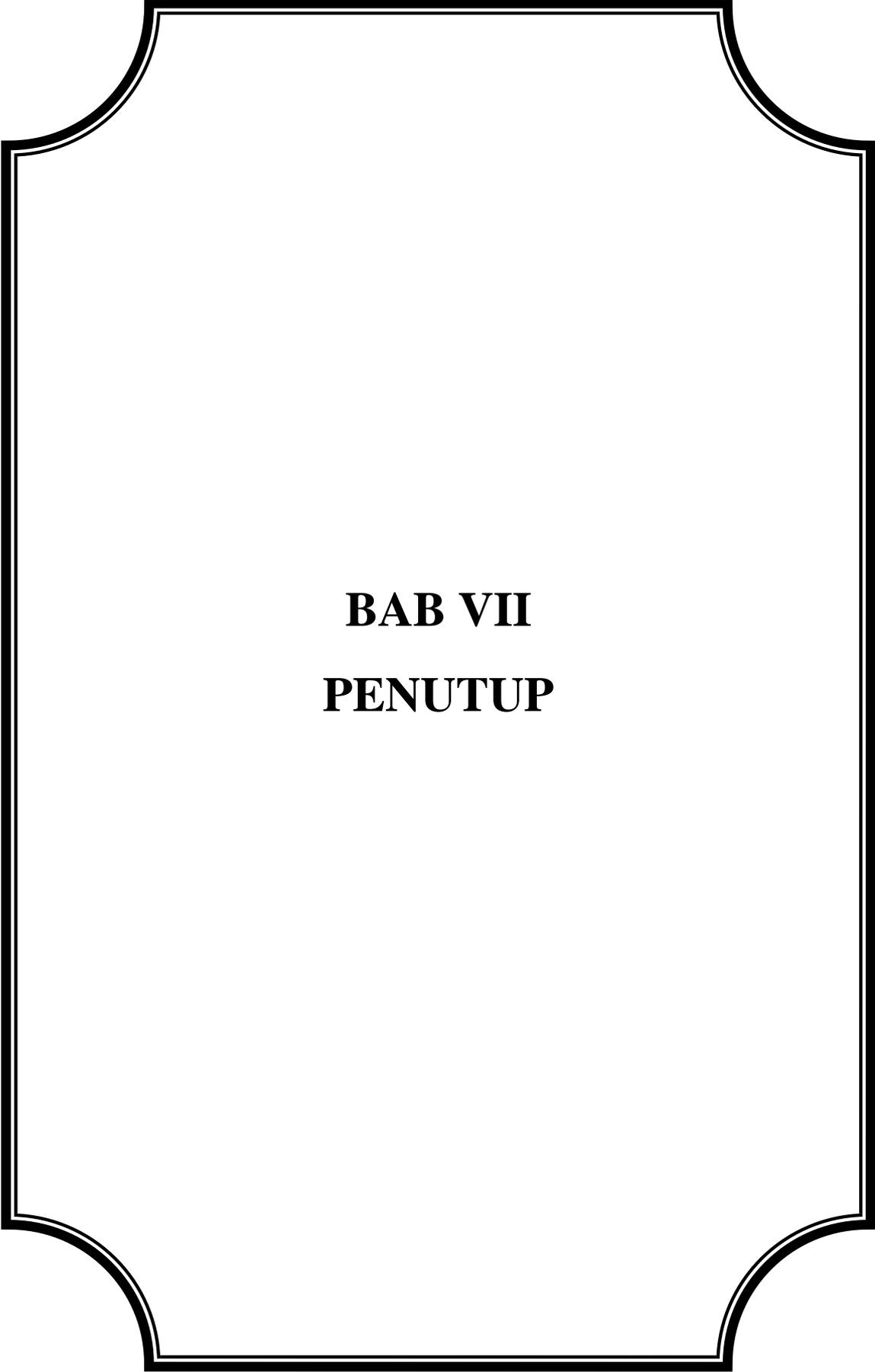


BAB V

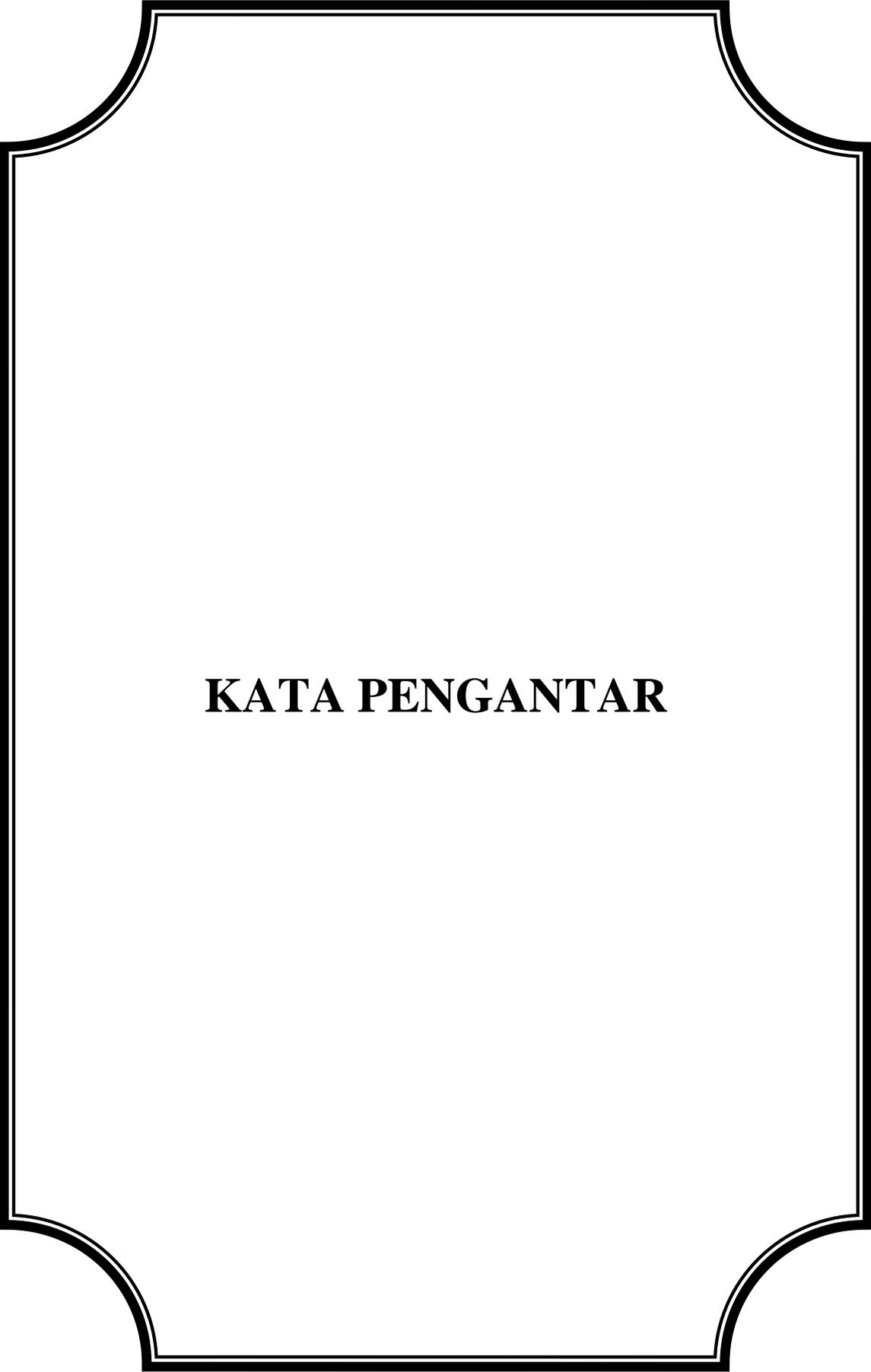
PENYELENGGARAAN
TUGAS PEMBANTUAN



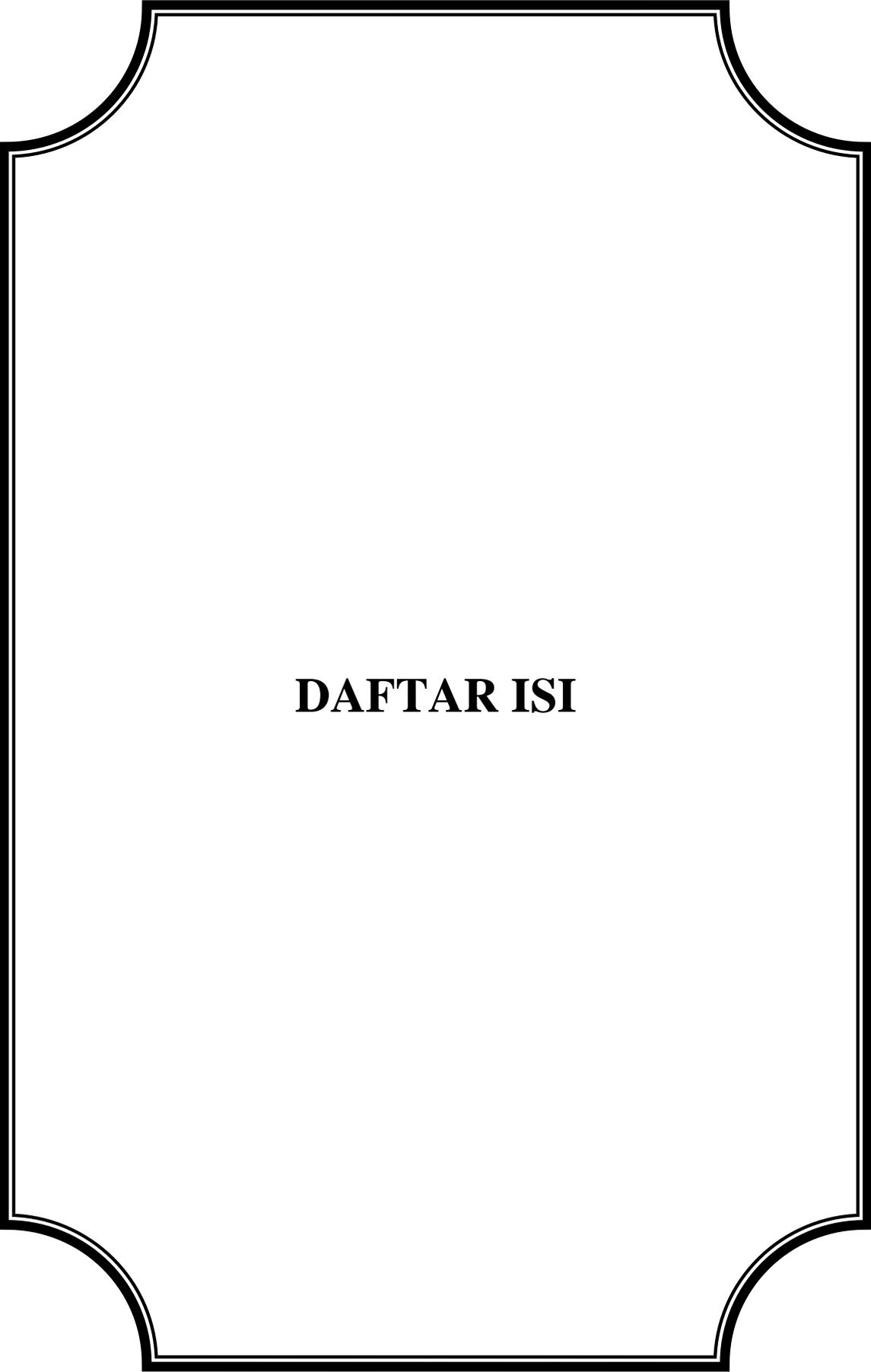
BAB VI
PENYELENGGARAAN
TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN



BAB VII
PENUTUP



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturpkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat ridlo dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dapat selesai sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pada Pasal 69 ayat (1), bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum ditetapkan, maka dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini masih didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 408 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa semua peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang–undang ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, bahwa sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
 - BAB VI : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
 - BAB VII : PENUTUP
- LAMPIRAN BUKU I DAN BUKU II

Secara substansial, pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2015 periode Januari hingga Maret Tahun 2015 telah disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Masa Bhakti 2011-2015 pada Sidang Paripurna tanggal 20 April 2015. Sebagaimana wujud keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan hingga purna bhakti kepemimpinan kami pada tanggal 27 September 2015 yang dilanjutkan oleh Penjabat Bupati maka Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015 merupakan informasi gambaran kinerja pemerintah daerah secara utuh sepanjang Tahun 2015, berdasarkan tolok ukur kinerja pemerintah daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2011–2015 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015 yang memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dalam Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015 ini, penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015 ini. Saya berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan, menjadi telaah pertimbangan yang strategis dalam menentukan kebijakan daerah, dan menguatkan Gresik yang telah baik untuk semakin baik, berdikari dalam perekonomian, dan sejahtera.

Gresik, Maret 2016

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Dasar Hukum	I-1
1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah	I-1
2. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	I-1
B. Gambaran Umum Daerah	I-4
1. Kondisi Geografis Daerah	I-4
2. Kondisi Demografis	I-7
3. Kondisi Ekonomi	I-11
a. Potensi Unggulan Daerah	I-11
b. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah	I-18
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
A. Visi, Misi, dan Motto	II-1
B. Strategi Daerah	II-38
C. Arah Kebijakan Daerah	II-40
D. Prioritas Daerah.....	II-45
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III-4
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	III-4
2. Target dan Realisasi Pendapatan	III-6
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-7
1) Pajak Daerah	III-9

2) Retribusi Daerah	III-11
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	III-13
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	III-15
b. Dana Perimbangan	III-16
1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	III-17
2) Dana Alokasi Umum (DAU)	III-19
3) Dana Alokasi Khusus (DAK)	III-19
c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	III-20
1) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	III-21
2) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	III-22
3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	III-23
3. Permasalahan dan Solusi	III-23
B. Pengelolaan Belanja Daerah	III-24
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-24
2. Permasalahan dan Solusi	III-28
C. Rencana dan Realisasi Pembiayaan	III-29

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	IV-1
DAERAH	
A. Urusan Wajib	IV-3
1. Urusan Pendidikan	IV-3
2. Urusan Kesehatan	IV-14
3. Urusan Pekerjaan Umum	IV-27
4. Urusan Perumahan Rakyat	IV-33
5. Urusan Penataan Ruang	IV-36
6. Urusan Perencanaan Pembangunan	IV-40
7. Urusan Perhubungan	IV-46
8. Urusan Lingkungan Hidup	IV-51

9. Urusan Pertanahan	IV-57
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-59
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-64
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	IV-70
13. Urusan Sosial	IV-74
14. Urusan Ketenagakerjaan.....	IV-79
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	IV-85
16. Urusan Penanaman Modal	IV-91
17. Urusan Kebudayaan	IV-96
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	IV-99
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	IV-106
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	IV-115
21. Urusan Ketahanan Pangan	IV-135
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-139
23. Urusan Statistik	IV-145
24. Urusan Kearsipan	IV-149
25. Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-152
26. Urusan Perpustakaan	IV-156
B. Urusan Pilihan	IV-159
1. Urusan Pertanian	IV-159
2. Urusan Kehutanan	IV-168
3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	IV-171
4. Urusan Pariwisata	IV-174
5. Urusan Kelautan dan Perikanan	IV-176
6. Urusan Perdagangan	IV-181
7. Urusan Industri.....	IV-185
C. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	IV-188
D. Pelaksanaan Bantuan Keuangan	IV-193

	E. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik	IV-193
	F. Pelaksanaan Bantuan Belanja Tidak Terduga	IV-196
BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	V-1
	A. Urusan Kelautan dan Perikanan	V-1
	B. Urusan Ketenagakerjaan	V-5
	C. Urusan Kesehatan	V-6
	D. Urusan Pertanian	V-8
	E. Urusan Perdagangan	V-12
	F. Urusan Kependudukan	V-13
BAB VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	VI-1
	A. Kerjasama Antar Daerah	VI-1
	1. Kebijakan	VI-1
	2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-2
	B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	VI-3
	1. Kebijakan	VI-3
	2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-3
	C. Pembinaan Batas Wilayah	VI-15
	1. Kebijakan	VI-15
	2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI-15
	D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	VI-16
	1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya	VI-16
	a. Bencana Kekeringan	VI-16
	b. Bencana Banjir	VI-16
	c. Bencana Kebakaran.....	VI-19
	d. Angin Puting Beliuang	VI-21
	e. Tanah Longsor	VI-21
	2. Status Bencana	VI-22
	3. Sumber dan Jumlah Anggaran	VI-22
	4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana	VI-22
	5. Satuan kerja perangkat daerah yang menangani bencana	VI-23

E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	VI-23
1. Gangguan yang terjadi	VI-23
2. SKPD yang menangani ketentraman dan Ketertiban Umum	VI-23
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan	VI-24
4. Sumber dan Jumlah Anggaran	VI-25
5. Penanggulangan dan Kendalanya	VI-25
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan	VI-25
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2014	I-7
Tabel I.2.	Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2013-2014	I-9
Tabel I.3.	Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2015.....	I-10
Tabel I.4.	Jumlah Indusri dan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) di Kabupaten GresikTahun 2014-2015.....	I-11
Tabel I.5.	Jumlah SIUP, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015.....	I-12
Tabel I.6.	Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015.....	I-12
Tabel I.7.	Populasi Ternak dan Produksi hasil Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015.....	I-13
Tabel I.8.	Produksi Perikanan, Produktivitas, Jumlah Kapal Dan Areal Budidaya Perikanan di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015.....	I-14
Tabel I.9.	Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015.....	I-15
Tabel I.10.	PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015.....	I-19
Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015	II-4
Tabel II.2	Misi dan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015	II-40
Tabel II.3	Penjelasan Program Kabupaten Gresik Tahun 2014	II-46
Tabel III.3	Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-9
Tabel III.4	Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-11
Tabel III.5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-13
Tabel III.6	Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-15
Tabel III.7	Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-17

Tabel III.8	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-18
Tabel III.9	Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-19
Tabel III.10	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-20
Tabel III.11	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-21
Tabel III.12	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-23
Tabel III.13	Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-33
Tabel III.14	Perincian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-27
Tabel III.16	Komposisi Pembiayaan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-32
Tabel III.17	Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-33
Tabel VI.1	Daftar Desa Yang Ditetapkan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan Katagori Kering Kritis Di Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2015.....	IV-16
Tabel VI.2	Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Gresik Tahun 2015.....	IV-18
Tabel VI.3	Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Gresik Tahun 2015	IV-20

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Administrasi Kabupaten Gresik	I-5
Gambar I.2	Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur	I-6
Gambar I.3	Peta Demografi Kabupaten Gresik	I-8
Gambar I.4	Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2015.....	I-9
Gambar I.5	Piramida Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2015.....	I-10
Gambar I.6	Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar selama 2011-2015..... Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Gresik, Jawa Timur, dan	I-15
Gambar I.7	Nasional.....	I-18
Gambar I.8	Lajun Inflasi Kab. Gresik Tahun 2014-2015..... Perkembangan Tingkat Pengangguran Kab. Gresik Tahun	I-18
Gambar I.9	2011-2015..... Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab. Gresik Tahun 2011-	I-22
Gambar I.10	2014.....	I-23
Gambar III.1	Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-2
Gambar III.2	Komponen APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015	III-3
Gambar III.3	Grafik Komposisi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015.....	III-6
Gambar III.4	Grafik Perincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015.....	III-9
Gambar III.5	Grafik Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015.....	III-14
Gambar III.8	Grafik Perincian Belanja Langsung Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015.....	III-29
Gambar 4.1	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Pendidikan Kabupaten Gresik	IV-12
Gambar 4.2	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Kesehatan Kabupaten Gresik	IV-25

Gambar 4.3	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik	IV-32
Gambar 4.4	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik	IV-35
Gambar 4.5	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Penataan Ruang Rakyat Kabupaten Gresik	IV-39
Gambar 4.6	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Rakyat Kabupaten Gresik	IV-45
Gambar 4.7	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Perhubungan Rakyat Kabupaten Gresik	IV-50
Gambar 4.8	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik	IV-56
Gambar 4.9	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Pertanahan Kabupaten Gresik	IV-58
Gambar 4.10	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik	IV-63
Gambar 4.11	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik	IV-69
Gambar 4.12	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Gresik	IV-73
Gambar 4.13	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Sosial Kabupaten Gresik	IV-79
Gambar 4.14	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik	IV-84
Gambar 4.15	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan K Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gresik	IV-90
Gambar 4.16	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Penanaman Modal Kabupaten Gresik	IV-94
Gambar 4.17	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik	IV-98

Gambar 4.18	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan K Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik	IV-103
Gambar 4.19	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Gresik	IV-114
Gambar 4.20	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Gresik	IV-133
Gambar 4.21	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik	IV-138
Gambar 4.22	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik	IV-146
Gambar 4.23	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Statistik Kabupaten Gresik	IV-148
Gambar 4.24	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik	IV-150
Gambar 4.25	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik	IV-155
Gambar 4.26	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Perpustakaan Kabupaten Gresik	IV-158
Gambar 4.27	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Pertaniann Kabupaten Gresik	IV-166
Gambar 4.28	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Kehutanan Kabupaten Gresik	IV-170
Gambar 4.29	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gresik	IV-173
Gambar 4.30	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Pariwisata Kabupaten Gresik	IV-175
Gambar 4.31	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik	IV-179
Gambar 4.32	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Perdagangan Kabupaten Gresik	IV-184
Gambar 4.33	Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Perindustrian Kabupaten Gresik	IV-186
Gambar III.7	Grafik Capaian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014	III-28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah

Pemerintah Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya.

2. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011–2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undang di Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2015;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2013;
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

B. Gambaran Umum Daerah

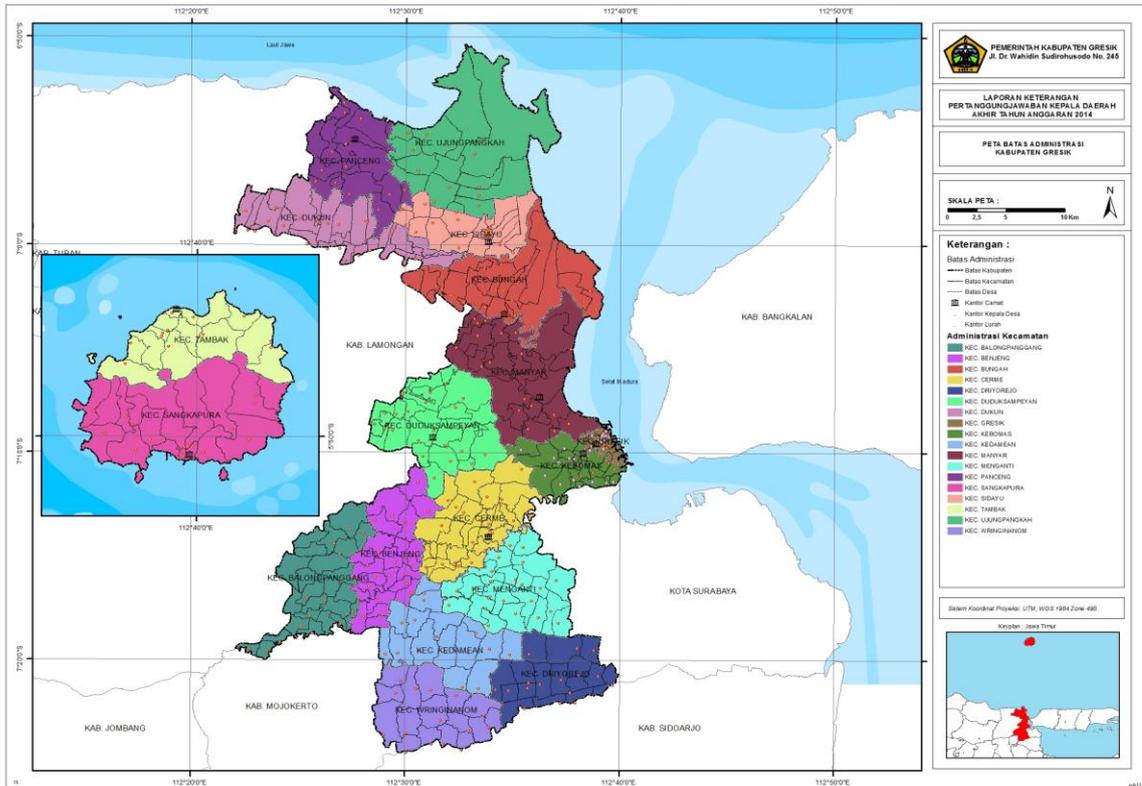
1. Kondisi Geografis Daerah

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan yang terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Peta administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar I.1
Peta Administrasi Kabupaten Gresik

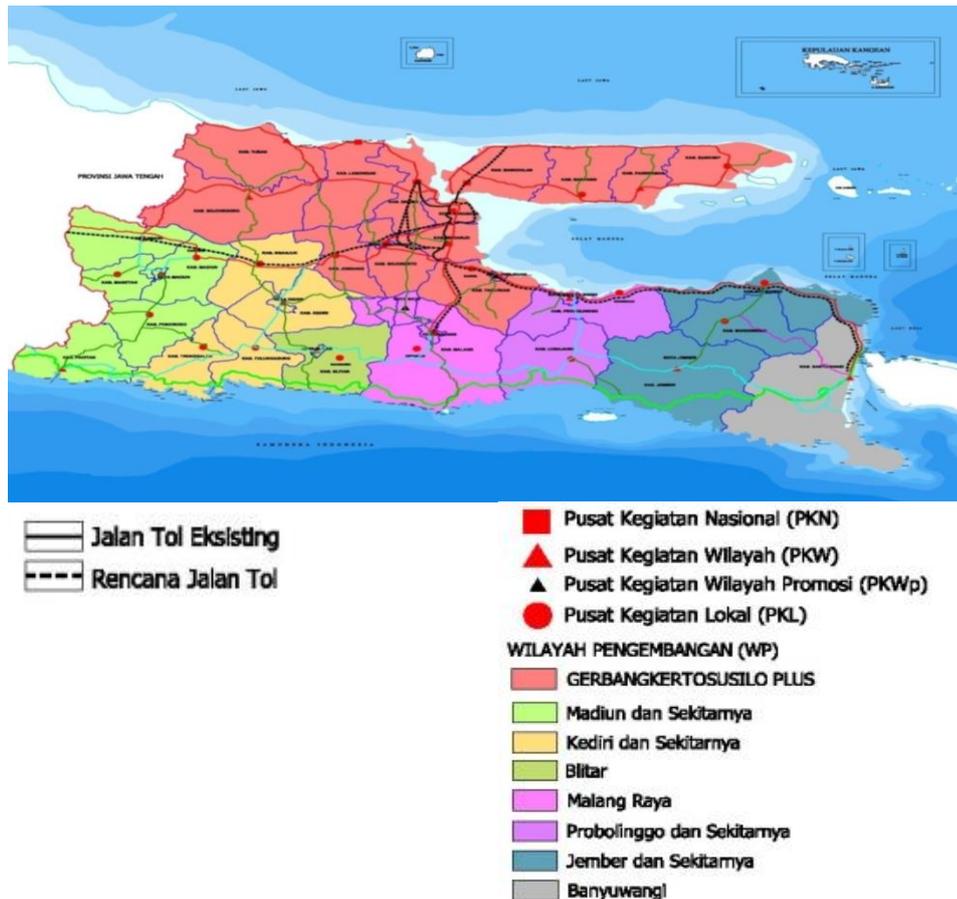


Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan).

Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur:

Gambar I.2
Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur



Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah yang ada disekitarnya.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2015 sebanyak 1,303,773 jiwa yang terdiri dari 655,460 laki-laki dan 648,313 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2015 sebesar 1,094.46 jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2015 sebesar 1:1,011. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

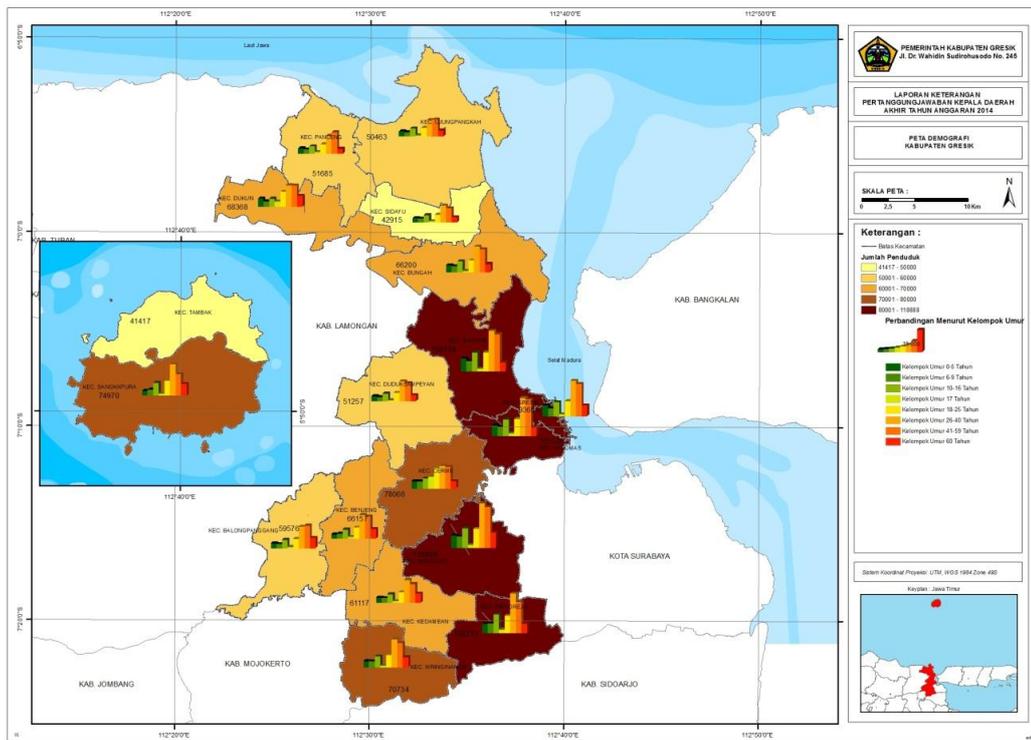
Tabel I.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik
Tahun 2015

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Per Desember 2015			Luas Wilayah
		L	P	Total	
1	DUKUN	33,826	33,317	67,143	59,03
2	BALONGPANGGANG	29,220	29,366	58,586	63,88
3	PANCENG	26,213	25,823	52,036	62,59
4	BENJENG	33,105	33,048	66,153	61,26
5	DUDUKSAMPEYAN	25,459	25,510	50,969	74,29
6	WRINGINANOM	36,382	35,968	72,350	62,62
7	UJUNGPAKHAH	25,538	25,378	50,916	94,82
8	KEDAMEAN	31,578	31,297	62,875	65,96
9	SIDAYU	21,946	21,622	43,568	47,13
10	MANYAR	56,475	54,730	111,205	95,42
11	CERME	39,232	39,251	78,483	71,73
12	BUNGAH	33,688	33,372	67,060	79,49
13	MENGANTI	61,035	59,898	120,933	68,71
14	KEBOMAS	52,371	51,321	103,692	30,06
15	DRIYOREJO	51,948	51,161	103,109	51,30
16	GRESIK	43,305	43,629	86,934	5,54
17	SANGKAPURA	34,855	34,796	69,651	118,72
18	TAMBAK	19,284	18,826	38,110	78,70
JUMLAH		655,460	648,313	1,303,773	1.191,25

sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016

Gambaran kepadatan dan sebaran penduduk dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.3
Peta Demografi Kabupaten Gresik



Sumber data: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2016

Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 sebanyak 366,554 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebanyak 364.374 keluarga maka terjadi kenaikan jumlah keluarga sebanyak 2.180 Keluarga atau 0,58%. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.2.
Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015

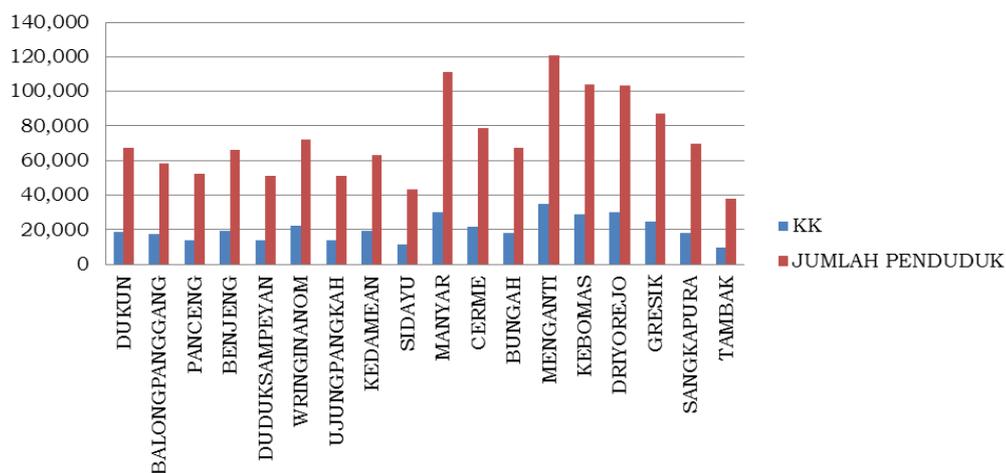
NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH KK	
			2014	2015
1	DUKUN	26	19.077	18,632
2	BALONGPANGGANG	25	17.596	17,403
3	PANCENG	14	14.250	14,124
4	BENJENG	23	19.384	19,32
5	DUDUKSAMPEYAN	23	14.171	14,02
6	WRINGINANOM	16	22.415	22,485

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH KK	
			2014	2015
7	UJUNGPAKHAH	13	13.987	14,103
8	KEDAMEAN	15	19.077	19,159
9	SIDAYU	21	11.476	11,52
10	MANYAR	23	29.958	30,237
11	CERME	25	21.460	21,488
12	BUNGAH	22	18.348	18,346
13	MENGANTI	22	34.862	34,775
14	KEBOMAS	21	28.603	28,839
15	DRIYOREJO	16	29.796	29,787
16	GRESIK	21	25.578	24,478
17	SANGKAPURA	17	19.643	18,147
18	TAMBAK	13	10.682	9,691
JUMLAH		356	364.374	366,554

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, berikut digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut;

Gambar I.4
Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Gresik Tahun 2015



Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2015, jumlah Keluarga terbanyak di Kecamatan menganti dengan 34,775 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 120,933 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9,691 KK dengan jumlah

penduduk sebanyak 38,110 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur produktif mendominasi piramida penduduk dengan persentase 8,86% untuk kelompok umur 35-39 tahun; 8,75% pada kelompok umur 30-34, dan 8,44% pada kelompok umur 40-44%. Sedangkan persentase terendah pada kelompok umur 70-74 tahun dengan 1,73%. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ;

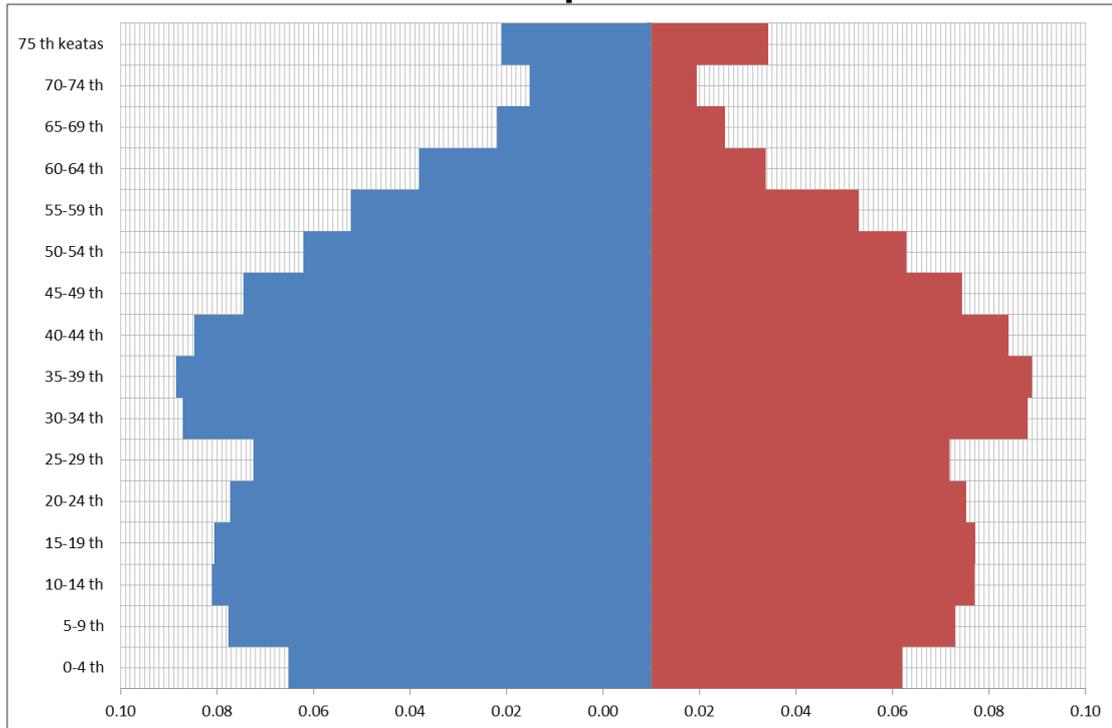
Tabel I.3
Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-Laki	Persentase terhadap Kelompok Umur Laki-Laki	Perempuan	Persentase terhadap Kelompok Umur Perempuan	Total	Persentase terhadap Kelompok Umur
0-4 th	42,766.00	6.53%	40,170.00	6.20%	82,936.00	6.36%
5-9 th	50,835.00	7.76%	47,302.00	7.30%	98,137.00	7.53%
10-14 th	53,183.00	8.12%	49,965.00	7.71%	103,148.00	7.91%
15-19 th	52,829.00	8.06%	50,015.00	7.71%	102,844.00	7.89%
20-24 th	50,693.00	7.74%	48,785.00	7.52%	99,478.00	7.63%
25-29 th	47,525.00	7.25%	46,567.00	7.18%	94,092.00	7.22%
30-34 th	57,039.00	8.70%	57,074.00	8.80%	114,113.00	8.75%
35-39 th	57,983.00	8.85%	57,590.00	8.88%	115,573.00	8.86%
40-44 th	55,522.00	8.47%	54,494.00	8.40%	110,016.00	8.44%
45-49 th	48,849.00	7.45%	48,274.00	7.44%	97,123.00	7.45%
50-54 th	40,726.00	6.21%	40,768.00	6.29%	81,494.00	6.25%
55-59 th	34,248.00	5.23%	34,349.00	5.30%	68,597.00	5.26%
60-64 th	25,063.00	3.82%	21,893.00	3.38%	46,956.00	3.60%
65-69 th	14,360.00	2.19%	16,381.00	2.53%	30,741.00	2.36%
70-74 th	9,966.00	1.52%	12,573.00	1.94%	22,539.00	1.73%
75 th keatas	13,776.00	2.10%	22,210.00	3.43%	35,986.00	2.76%
Jumlah	655,363.00	100%	648,410.00	100%	1,303,773.00	100.00%

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016

Berdasarkan data di atas kelompok umur penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2015 digambarkan dalam piramida penduduk sebagaimana berikut;

Gambar I.5
Piramida Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2015



Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Perkembangan potensi unggulan Kabupaten Gresik pada tahun 2015 antara lain:

- 1) Perindustrian di Kabupaten Gresik pada tahun 2015 meningkat 1,96% atau sebanyak 128 industri dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah industry pada tahun 2015 terdaftar sebanyak 6.653 industri, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 6.525 industri. Perkembangan industri dilihat dari penerbitan tanda daftar industri (TDI) juga meningkat sebanyak 11 tanda daftar industri, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.4.
Jumlah Industri dan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI)
di Kabupaten Gresik
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	Satuan	2014	2015
1	Industri	Industri	6.525	6.653
2	Tanda Daftar Industri (TDI)	Unit	30	41

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016

- 2) Dalam Bidang Perdagangan, penerbitan SIUP meningkat 19,6% pada Tahun 2015 atau sebanyak 264 SIUP. Penerbitan SIUP pada tahun 2015 sebanyak 1.612 SIUP sedangkan tahun 2014 sebanyak 1.348 SIUP. Hal ini selaras dengan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2015 yang tercatat sebanyak 175.131 orang atau mengalami peningkatan sebesar 26% dengan penambahan penyerapan sebanyak 36.128 jiwa dari penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 yang mencapai 138.955 jiwa. Sedangkan nilai investasi perdagangan pada tahun 2015 mencapai Rp19,766,408,000.00 atau mengalami pertumbuhan 185% sebanyak Rp12,829,886,000.00 dari nilai investai pada tahun 2014 yang mencapai Rp6,936,522,000.00 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.5.
Jumlah SIUP, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja
di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015

No.	Uraian	Satuan	2014	2015
1	Surat Izin Usaha Perdagangan	SIUP	1.348	1.612
-	SIUP Perusahaan Mikro	SIUP	286	342
-	SIUP Perusahaan Kecil	SIUP	858	968
-	SIUP Perusahaan Menengah	SIUP	193	290
-	SIUP Perusahaan Besar	SIUP	11	12
2	Investasi Perdagangan			
	Nilai Investasi	Rp.	6.936.522.000,00	19,766,408,000.00
	Investasi Tahun sebelumnya	Rp.	2.318.129.600,00	6,936,522,000.00
	Pertumbuhan Investasi	Rp.	4.618.392.400,00	12,829,886,000.00
3	Penyerapan tenaga kerja	Orang	138.955	175.083

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016

- 3) Dalam bidang pertanian di Kabupaten Gresik tahun 2015 total produksi pertanian sebanyak 549.764,19 ton sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 553.633 ton sehingga dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan

produksi pertanian sebanyak 3.868,81 ton, hal ini disebabkan karena lahan komoditas untuk tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar digunakan untuk komoditas yang lain karena harga jualnya rendah, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.6.
Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015

No.	Uraian	Satuan	2014	2015
1	Padi	Ton	395.594	403.906,02
2	Jagung	Ton	131.767	127.218,20
3	Kedelai	Ton	1.952	1.325,87
4	Kacang Tanah	Ton	3.451	2.924,94
5	Kacang Hijau	Ton	2.911	3.025,94
6	Ubi kayu	Ton	14.854	10.425,68
7	Ubi Jalar	Ton	3.104	937,54
	JUMLAH	Ton	553.633	549.764,19

Sumber data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik Tahun 2016

- 4) Dalam bidang peternakan, jumlah populasi ternak di Kabupaten Gresik pada tahun 2015 sebanyak 14.604.313 ekor sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 7.538.593 ekor sehingga dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 7.065.720 ekor, selain itu produksi ternak juga mengalami kenaikan sebesar 122 ton. Adapun jumlah populasi ternak dan produksi hasil ternak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.7.
**Populasi Ternak dan Produksi hasil Ternak
di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015**

No.	Uraian	Satuan	2014	2015
1	Populasi ternak	Ekor	7.538.593	14.604.313
	terdiri dari:			
-	Sapi	Ekor	47.697	50.514
-	Kerbau	Ekor	198	198
-	Kuda	Ekor	215	209
-	Kambing	Ekor	66.357	67.602
-	Domba	Ekor	30.898	32.533
-	Ayam ras petelur	Ekor	140.000	152.300

No.	Uraian	Satuan	2014	2015
-	Ayam bukan ras	Ekor	663.830	680.930
-	Ayam ras pedaging	Ekor	6.532.000	13.560.000
-	Itik	Ekor	27.920	29.145
-	Entok dan angsa	Ekor	29.478	30.882

2	Produksi hasil ternak	Ton	13.572,56	13.694,72
-	Terdiri dari:			
-	Telur	Ton	2.754,96	2.798,52
-	Susu	Ton	315,00	309,96
-	Daging	Ton	10.510,16	10.586,24

Sumber data : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2016

- 5) Dalam bidang perikanan, produksi bidang perikanan di Kabupaten Gresik pada tahun 2015 sebanyak 98.367,87 ton sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 97.222,79 ton sehingga dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 1.145 ton, selain itu produktivitas lahan tambak juga mengalami kenaikan sebesar 20 ton/ha serta sarana prasarana berupa perahu/kapal penangkap ikan juga mengalami kenaikan sebesar 406 unit, sedangkan areal budidaya tahun 2015 seluas 31.838,02 Ha. Adapun jumlah produksi perikanan, produktivitas, jumlah kapal dan areal budi daya perikanan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.8.
Produksi Perikanan, Produktivitas, Jumlah Kapal Dan Areal Budidaya Perikanan di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015

No.	Uraian	Satuan	2014	2015
1	Produksi perikanan	Ton	97.222,79	98.367,87
a.	Budi Daya :	Ton	78.010,06	79.759,41
	- Udang Windu	Ton	3.375,70	3.346,85
	- Udang Vanamae	Ton	6.237,08	6.181,54
	- Bandeng	Ton	65.975,68	67.998,24
	- Kerapu	Ton	66,71	125,89
	- Nila	Ton	2.354,89	2.106,89
b.	Penangkapan	Ton	17.379,23	18.122,28
c.	Perairan Umum	Ton	916,75	486,18
2	Produktivitas Lahan Tambak		599,56	619,28
	- Payau	Ton/Ha	277,96	286,76
	- Tawar	Ton/Ha	321,60	332,52

No.	Uraian	Satuan	2014	2015
3	Jumlah perahu/kapal penangkap ikan	Unit	4.519	4.925
4	Areal Budidaya	Ha	32.065,02	31.838,02
	- Tambak payau	Ha	17.335,02	17.335,02
	- Tambak tawar/kolam	Ha	14.730,00	14.503

Sumber data : Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2016

- 6) Investasi daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2014 berdasarkan realisasi persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 8.009.042.000.000,00 dan pada tahun 2015 menurun menjadi Rp671.413.600.000,00 atau turun 91,62%, sedangkan realisasi persetujuan Penanaman Modal Asing pada tahun 2014 sebesar US\$ 215.390.800 dan pada tahun 2015 menurun sebesar US\$ 152.925.400 atau menurun 29%. Adapun jumlah investasi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.9
Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015

No.	Uraian	Satuan	2014	2015	Pertumbuhan
1	Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Juta Rupiah	8.009.042,00	671.413,6	(91.62%)
2	Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMDA)	US\$	215.390.800	152.925.400	(29,00%)

Sumber data : Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun 2016

Penurunan investasi yang terjadi di Kabupaten Gresik baik dari sekyor penanaman modal dalam negeri maupun asing disebabkan kondisi perekonomian global yang sedang mengalami resesif pada tahun 2015. Keterpurukan ekonomi global berdampak secara massif terhadap pertumbuhan investasi terutama investasi padat modal sebagaimana di Kabupaten Gresik seperti nilai tukar rupiah yang terus melemah, meningkatnya suku bunga bank, menurunnya ekspor dan tingkat harga ekspor di pasar dunia, hingga keterpurukan harga komoditas. Salah satu indikator populer yang menunjukkan gejala perekonomian nasional adalah nilai tukar rupiah yang mencapai Rp.14.000 per US Dollar meskipun tidak mencapai nilai kurs terparah pada krisis ekonomi 1997.

Gambar I.6
Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar selama 2011-2015



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

7) Potensi Kepelabuhanan

Kabupaten Gresik memiliki wilayah pesisir pantai yang potensial untuk kegiatan kepelabuhanan. Keberadaan pelabuhan di Kabupaten Gresik cukup penting untuk mendukung akses penyediaan bahan baku dan pemasaran produk industri yang telah berkembang di Kabupaten Gresik. Di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Kebomas, Gresik, dan Manyar terdapat 1 (satu) pelabuhan umum yang dikelola oleh PT. Pelindo III Cabang Gresik dan 8 (delapan) terminal khusus yang dikelola oleh Perusahaan Swasta/BUMN untuk kepentingan sendiri dan melayani umum dalam kondisi tertentu. Adapun 8 (delapan) terminal khusus tersebut yaitu:

1. Terminal Khusus PT. Sumbermas Indah Playwood
2. Terminal Khusus PT. Wilmar Nabati
3. Terminal Khusus PT. Semen Gresik
4. Terminal Khusus PT. PLN PJB 2 Gresik
5. Terminal Khusus PT. Pertamina
6. Terminal Khusus PT. Petrokimia Gresik
7. Terminal Khusus PT. Smelthing
8. Terminal Khusus PT. Maspion

Pemerintah Kabupaten Gresik juga menggagas pembangunan Pelabuhan Internasional Kalimireng di Kecamatan Manyar yang pembangunannya sudah dilaksanakan mulai tahun 2014 oleh PT. BJTI (Berlian Jasa Terminal Indonesia) dan PT. AKR (Aneka Kimia Raya) dan sampai dengan tahun 2015 progres pembangunannya mencapai 35%.

8) Potensi Wisata

Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten di Wilayah Propinsi Jawa Timur yang memiliki Potensi pariwisata yang cukup beragam diantaranya: Wisata Alam, Peninggalan Sejarah, Wisata Seni dan Budaya. Beragamnya wisata ini merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Gresik. Potensi kepariwisataan perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya.

Adapun obyek wisata tersebut antara lain:

A. Wisata Alam

- ❑ Danau Kastoba (Kec. Tambak)
- ❑ Air Panas Kebondaya (Kec. Sangkapura)
- ❑ Telaga Ngipik/ Giri Wana Tirta (Kec. Kebomas)
- ❑ Bukit Surowiti (Kec. Panceng)
- ❑ Penangkaran Rusa Bawean (Kec. Sangkapura)
- ❑ Pantai Pulau Cina (Kec. Sangkapura)
- ❑ Air Terjun Patar Selamat (Kec. Sangkapura)
- ❑ Air Terjun Udhuk-udhuk (Kec. Tambak)
- ❑ Pantai Labuhan (Kec. Tambak)
- ❑ Pantai Nyimas (Kec. Sangkapura)
- ❑ Pantai Hutan Lindung (Kec. Sangkapura)
- ❑ Pantai Tinggen (Kec. Sangkapura)
- ❑ Pantai Dalegan (Kec. Panceng)
- ❑ Pulau Noko dan Pulau Gili (Kec. Sangkapura)
- ❑ Kawasan Pantai Selayar (Kec. Sangkapura)
- ❑ Air Terjun Laccar (Kec. Tambak)



Sumber data: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2015



Sumber data: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2015

B. Wisata Budaya/Religi

- Makam Maulana Malik Ibrahim (Kec. Gresik);
- Makam Sunan Giri (Kec. Kebomas);
- Makam Pusponegoro (Kec. Gresik);
- Makam Raden Santri (Kec. Gresik);
- Makam Nyai Ageng Pinatih (Kec. Gresik);
- Makam Sunan Prapen (Kec. Kebomas)
- Makam Siti Fatimah Binti Maimun (Kec. Manyar)
- Makam Kanjeng Sepuh (Kec. Sidayu)

C. Wisata Minat Khusus

- Kampung Kemasan (Kec. Gresik)
- Kampung Adenium (Kec. Kedamean)
- Sentra Industri Songkok dan Rebana
- Benteng Lodewijk (Kec. Bungah)
- Sentra Makanan Khas Gresik

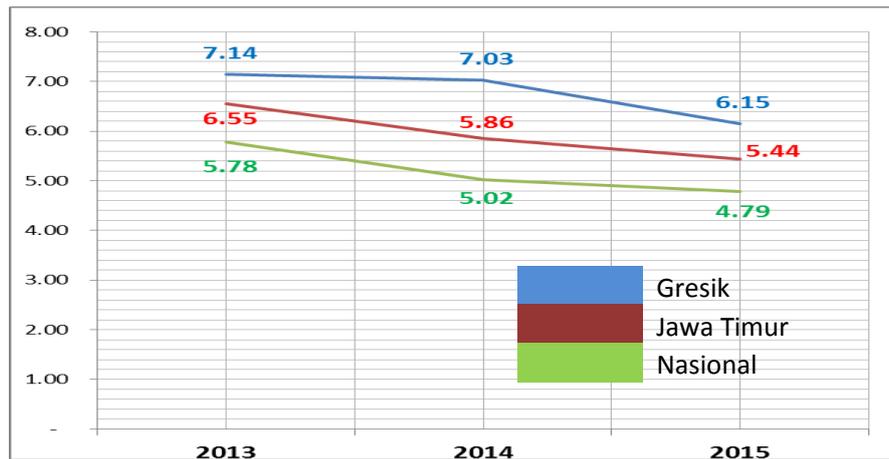
b. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan ekonomi makro dalam kerangka ekonomi daerah ditunjukkan pada pertumbuhan ekonomi, Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka hingga capaian pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Ekonomi Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% pada tahun 2015. Kondisi ini melambat 0,88 poin dibandingkan pada periode yang sama

pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 7,03%. Ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Gresik di atas ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5,44% pada tahun 2015 atau melambat 0,42 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,86%. Kondisi ini selaras bila ditinjau dari posisi relatif Gresik terhadap nasional pada tahun tahun 2015 yang tumbuh 4,79 persen atau melambat bila dibanding tahun 2014 yang mencapai 5,02 persen Posisi relatif pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada grafik berikut:

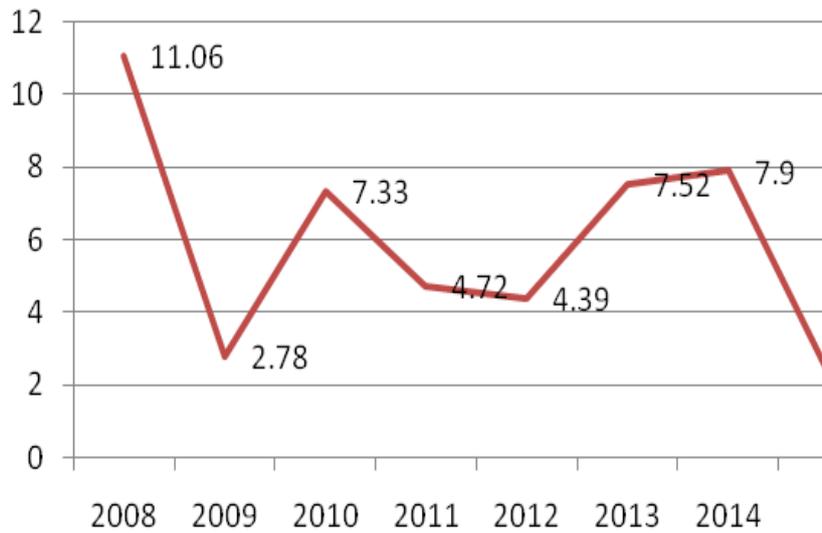
Gambar I.7
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Gresik, Jawa Timur, dan Nasional



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

Selama tahun 2011-2014, tingkat inflasi Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang tinggi yang disebabkan oleh pelbagai faktor baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional seperti kenaikan tarif dasar listrik, tarif angkutan, kenaikan harga BBM, kerusakan infrastuktur yang menghambat distribusi, hingga terjadinya force major seperti bencana alam. Pengendalian tingkat inflasi merupakan upaya dalam menciptakan ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah pengembangan ekonomi serta daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gambar I.8
Laju Inflasi Kab. Gresik
Tahun 2014-2015



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

Ditinjau dari kerangka ekonomi makro berdasarkan data termutakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai Rp76,340,445.19 atau mengalami peningkatan 7,06% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini selaras dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang mencapai Rp93,813,286.08rupiah atau meningkat 12,72% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun secara rinci PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.10
PDRB Kabupaten Gresik
Tahun 2014-2015

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	SATUAN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
			2013**	2014***	2013**	2014***
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rupiah	6,305,971.72	7,254,894.30	4,986,147.39	5,244,109.17
B	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rupiah	10,245,762.79	11,493,102.34	7,797,528.89	8,531,409.27
C	Industri Pengolahan	Juta Rupiah	39,960,124.34	45,213,679.15	34,834,077.53	37,263,961.91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Juta Rupiah	363,811.14	376,934.26	417,222.28	431,674.29
E	Pengadaan Air, Penelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Juta Rupiah	52,878.83	56,577.78	46,400.24	47,060.05
F	Konstruksi	Juta Rupiah	6,623,078.59	7,771,712.32	5,842,464.55	6,336,211.23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	Juta Rupiah	9,564,482.23	10,617,743.21	8,377,567.68	8,935,823.02

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	SATUAN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
			2013**	2014***	2013**	2014***
	Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	Juta Rupiah	1,794,461.81	2,045,565.11	1,528,906.37	1,619,184.73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Juta Rupiah	892,743.70	1,051,827.94	765,685.76	835,346.00
J	Informasi dan Komunikasi	Juta Rupiah	3,019,245.00	3,221,708.46	2,938,569.00	3,131,927.07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Juta Rupiah	888,457.38	997,535.45	768,801.00	811,255.13
L	Real Estate	Juta Rupiah	968,157.82	1,037,164.51	891,850.11	948,999.87
M,N	Jasa Perusahaan	Juta Rupiah	221,696.00	245,394.83	183,423.44	199,106.15
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Juta Rupiah	1,063,516.29	1,095,668.28	883,884.78	890,043.69
P	Jasa Pendidikan	Juta Rupiah	679,522.49	751,311.55	576,431.64	616,608.93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Juta Rupiah	292,050.94	332,783.24	261,977.00	282,844.95
R,S, T,U	Jasa Lainnya	Juta Rupiah	218,772.84	249,683.35	204,475.99	214,879.73
	Jumlah	Juta Rupiah	83,154,733.91	93,813,286.08	71,305,413.65	76,340,445.19

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

Catatan:

** Angka Sementara

*** Angka Sangat Sementara

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku didominasi oleh industri pengolahan dengan 48,20%. Sedangkan sektor dengan persentase terendah adalah Pengadaan Air, Penelolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan 0,06%. Adapun secara rinci Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.10.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gresik
Tahun 2013-2014

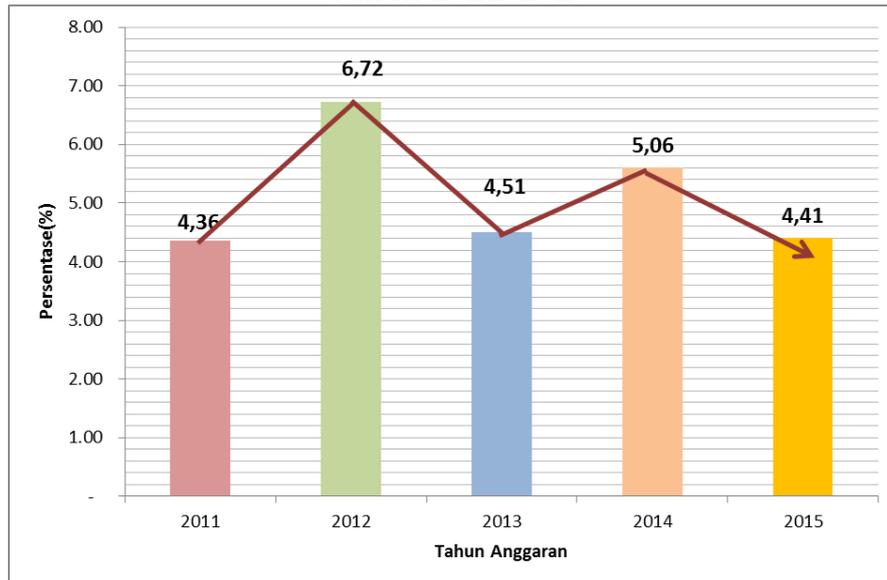
NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	SATUAN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
			2013**	2014***	2013**	2014***
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	7.58	7.73	5.41	5.17
B	Pertambangan dan Penggalian	%	12.32	12.25	-6.60	9.41
C	Industri Pengolahan	%	48.06	48.20	7.58	6.98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0.44	0.40	7.03	3.46
E	Pengadaan Air, Penelolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0.06	0.06	7.72	1.42
F	Konstruksi	%	7.96	8.28	8.24	8.45

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	SATUAN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
			2013**	2014***	2013**	2014***
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	11.50	11.32	9.47	6.66
H	Transportasi dan Pergudangan	%	2.16	2.18	6.64	5.90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1.07	1.12	7.45	9.10
J	Informasi dan Komunikasi	%	3.63	3.43	12.20	6.58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	1.07	1.06	11.89	5.52
L	Real Estate	%	1.16	1.11	6.62	6.41
M,N	Jasa Perusahaan	%	0.27	0.26	6.14	8.55
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	1.28	1.17	1.84	0.70
P	Jasa Pendidikan	%	0.82	0.80	6.78	6.97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	0.35	0.35	7.83	8.34
R,S,T,U	Jasa Lainnya	%	0.26	0.27	5.54	5.09
	Jumlah	Juta Rupiah	100.0	100.0	100.00	100.00

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015

Tingkat pengangguran Kabupaten Gresik pada tahun 2015 menunjukkan capaian yang positif pada level 4,41% atau menurun 0,65 poin dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5,06%. secara trendline Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik selama Tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik menekan angka pengangguran pada tahun 2013 hingga mencapai 4,51% dari 6,72% pada tahun 2012 ternyata tidak diiringi pada tahun berikutnya. Pengangguran meningkat tipis 0,15% atau mencapai 5,06% pada tahun 2014. Gejolak tingkat pengangguran ini disebabkan oleh pelbagai hal persaingan pencari kerja yang kompetitif antara masyarakat lokal dan masyarakat di luar Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, hingga bentuk investasi.

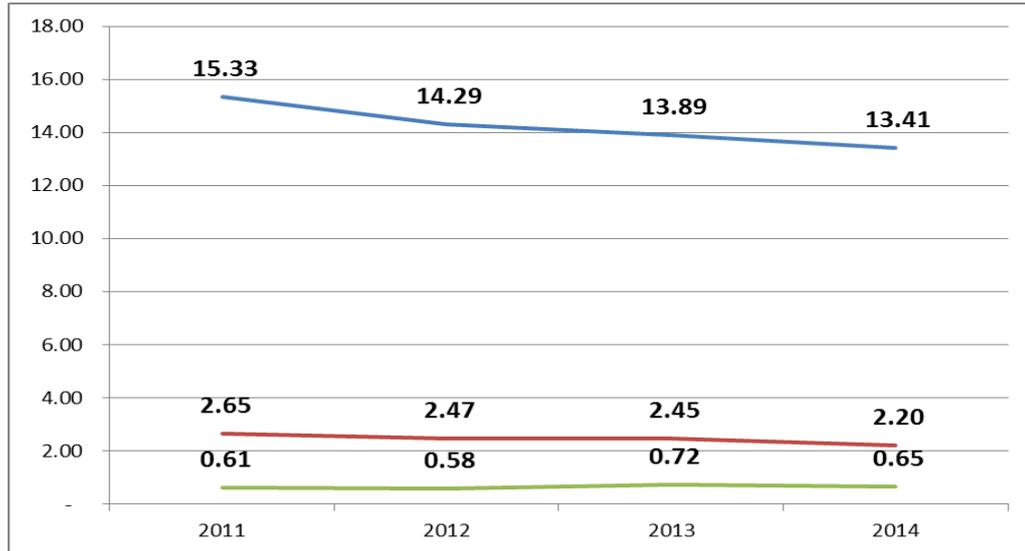
Gambar I.9
Perkembangan Tingkat Pengangguran Kab. Gresik
Tahun 2011-2015



Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016

Pada sektor pengentasan kemiskinan, Kabupaten Gresik telah meraih progress yang positif dengan penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap. Penurunan secara stabil tersebut masih menunjukkan capaian basis poin yang rendah atau dapat istilahkan mengalami perlambatan penurunan. Penyebab kondisi ini disetimasikan karena kondisi kemiskinan Kabupaten Gresik yang memasuki level kronis sehingga membutuhkan program dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Gresik. Berikut capaian pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik.

Gambar I.10
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab. Gresik
Tahun 2011-2014



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2015



P₀ tingkat Kemiskinan yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin sebanyak 181.700 jiwa pada tahun 2011 menurun 14.750 jiwa hingga menjadi 166,950.00 jiwa pada tahun 2014. Adapun **P₁** Indeks Kedalaman Kemiskinan yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Bila indeks kedalaman kemiskinan semakin menurun artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. Sedangkan **P₂** Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Bila, indeks semakin menurun maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang

BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah pada hakekatnya ditujukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan oleh dan untuk masyarakat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, semua aspirasi dan segala kepentingan daerah yang tumbuh dari masyarakat harus diarahkan untuk menjaga keserasian dan keselarasan antara Pembangunan Daerah, Pembangunan Regional dan Pembangunan Nasional.

Dalam upaya menjaga keserasian dan keselarasan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, yang kemudian telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (RPJMD) 2011–2015.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015 antara lain Visi, Misi, Motto, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Daerah sebagai berikut.

A. Visi, Misi, dan Motto

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah:

Visi : "Gresik yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan Yang Berkualitas".

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. **GRESIK** : adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.
2. **AGAMIS** adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya.
3. **ADIL** adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.
4. **MAKMUR** adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya.
5. **BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS** adalah hidup yang sehat dengan berlatarbelakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan yang memadai.

Dalam mencapai Visi tersebut juga dijunjung motto "Gresik Bisa Lebih Baik". Sebagai penjabaran visi termaksud, telah ditetapkan 4 (empat) Misi Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 yang merupakan rumusan-rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- Misi** : 1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri.
2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2015

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
1.	<p>Misi 1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati yang dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri, ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima Tahun sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun, saling menghormati dan demokratis <p>Perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati merupakan harapan setiap warga masyarakat. Kondisi ini selain akan menciptakan kesejahteraan batin bagi masyarakat, juga akan menjadi pendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Sehingga pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengamalan nilai-nilai agama dan moral menjadi sangat penting. Pentingnya pemahaman tentang kehidupan yang sejuk, santun dan saling menghormati harus senantiasa diberikan</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>kepada masyarakat.</p> <p>Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang tergabung dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan kebudayaan dan urusan social</p> <p>Untuk mencapai tujuan Meningkatkan perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati ditetapkan sasaran sebagai berikut:</p> <p>1) Meningkatkan aktivitas keagamaan</p> <p>Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengamalan nilai-nilai agama dan moral serta kesetiakawanan sosial sangat penting, karena dapat menciptakan kesejahteraan batin bagi masyarakat, dan menjadi pendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlah hari besar yang dirayakan pada Tahun 2015 ditargetkan 5 kegiatan; b) Persentase realisasi bantuan sarana ibadah pada Tahun 2015 ditargetkan 90%. <p>2) Meningkatkan suasana yang sejuk, santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>Meningkatkan suasana kehidupan yang sejuk, santun dan saling menghormati merupakan harapan seluruh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten akan melakukan upaya sosialisasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang kesatuan bangsa dan kerukunan kehidupan beragama.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah Parpol yang dibina pada Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 11 parpol; b) Jumlah LSM/Ormas/OKP yang dibina pada Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 164 LSM Ormas/OKP; c) Persentase konflik yang dapat diselesaikan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%. <p>3) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>Peraturan daerah sebagai produk hukum daerah yang mengatur kehidupan masyarakat pada lingkup kabupaten memerlukan pengawalan dan upaya penegakan agar dapat berfungsi secara efektif. Penegakan hukum tersebut melalui sosialisasi dan operasi oleh satuan kerja terkait.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan Perda di Kab. Gresik pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 80%; b) Persentase demo/protes terhadap Perda/Perbup yang dilaksanakan secara tertib pada Tahun 2015 ditargetkan 100%; c) Keberadaan Perda tentang penyelenggaraan Trantibum pada Tahun 2015 ditargetkan ada; d) Keberadaan Perda tentang PSK dan Miras pada Tahun 2015 ditargetkan ada; e) Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk pada Tahun 2015 ditargetkan 0,05% per 10.000 penduduk.

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p data-bbox="395 197 1377 293">4) Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan</p> <p data-bbox="477 327 1417 1171">Pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kampanye terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan melalui pemberdayaan perempuan. Perempuan seharusnya bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi dapat lebih aktif menjadi subyek pembangunan. Perempuan harus dipacu kemampuannya agar terwujud kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan dengan tetap menjaga martabat dan kehormatannya. Perlindungan lainnya dilakukan terhadap permasalahan tenaga kerja perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kemungkinan adanya kasus Perdagangan (<i>human trafficking</i>) terhadap perempuan dan anak. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 1196 1417 1406">a) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%; <li data-bbox="477 1431 1417 1581">b) Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 89,50%; <li data-bbox="477 1606 1417 1756">c) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>d) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan Rumah Sakit pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%;</p> <p>e) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%;</p> <p>f) Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 50%.</p> <p>5) Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah</p> <p>Untuk menjaga kekayaan seni dan budaya daerah harus ada upaya untuk melestarikan keberadaannya melalui pelaksanaan even budaya dan pemeliharaan cagar budaya.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <p>a) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya pada Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 9 kegiatan;</p> <p>b) Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang tersedia Pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 9 unit;</p> <p>c) Persentase peninggalan/Cagar Budaya (Situs) yang dilestarikan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 36,36%;</p> <p>2. Misi 2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima Tahun ke depan sebagai berikut:</p> <p>- Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata</p> <p>Peran utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanannya pemerintah kabupaten</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>harus berupaya memberikan yang terbaik, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan filosofi keberadaan pemerintah sebagai pelayan masyarakat sekaligus bentuk komitmen dari setiap kepala daerah yang berjanji akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap warganya.</p> <p>Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang tergabung dalam urusan Perdagangan, urusan perindustrian, urusan koperasi dan UKM, urusan penanaman modal, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan perikanan dan kelautan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan ketenagakerjaan, urusan pariwisata, urusan pekerjaan umum dan urusan energi dan sumber daya mineral</p> <p>Untuk mencapai tujuan Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata ditetapkan sasaran sebagai berikut:</p> <p>1) Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan</p> <p>Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan kepada golongan masyarakat miskin ekonomi lemah melalui lembaga kemasyarakatan desa berupa PKK dan Posyandu yang ada di masyarakat. Masyarakat dibimbing dan dibantu agar mampu mandiri secara ekonomi dan diberikan ketrampilan dan pelayanan dasar kesehatan.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Persentase PKK aktif pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 85,61%; b) Persentase Posyandu Aktif pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 99,3%; c) Persentase keluarga miskin pada Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 19,67%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p data-bbox="395 199 1374 237">2) Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial</p> <p data-bbox="480 259 1417 528">Pelayanan sosial oleh Pemerintah Kabupaten terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilaksanakan melalui pemberian bantuan dan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian secara ekonomi sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah PMKS yang ada.</p> <p data-bbox="480 551 1417 645">Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="480 667 1417 819">a) Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang tersedia pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 20 unit; <li data-bbox="480 842 1417 936">b) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Tahun 2015 ditargetkan 439 PMKS; <li data-bbox="480 958 1417 1052">c) Jumlah PMKS pada Tahun 2015 diestimasi sebanyak 65.122 jiwa; <li data-bbox="480 1075 1417 1169">d) Persentase realisasi bantuan santunan kematian pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%; <li data-bbox="480 1191 1417 1285">e) Penyaluran Raskin ditargetkan pada Tahun 2015 sebesar 100%. <p data-bbox="395 1368 1278 1406">3) Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman</p> <p data-bbox="480 1429 1417 1581">Sarana permukiman yang sehat dan layak merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya melalui program dan bantuan.</p> <p data-bbox="480 1603 1417 1697">Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="480 1720 1417 1814">a) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 80,00%; <li data-bbox="480 1836 1417 1930">b) Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 13,00%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>c) Persentase Rumah Layak Huni pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 92%;</p> <p>4) Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum</p> <p>Produk hukum daerah yang dihasilkan, baik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten atau lembaga legislatif harus mampu dijaga kualitasnya. Produk hukum yang baik harus dapat diaplikasikan di masyarakat sehingga efektivitasnya dapat diandalkan. Sedangkan untuk kepastian hukum diharapkan semua permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga harus ada upaya hukum yang jelas pada setiap masalah hukum yang dihadapi.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <p>a) Jumlah Perda yang ditetapkan Tahun 2011-2015 ditargetkan sebanyak 50 Perda;</p> <p>b) Jumlah Perda yang dibatalkan pada Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 0 Perda;</p> <p>c) Persentase Kasus hukum yang diselesaikan pada Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 80%;</p> <p>d) Persentase Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti/dilaksanakan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%;</p> <p>e) Persentase Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti pada Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 100%.</p> <p>5) Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>Guna memperoleh kepastian atas kesuksesan pembangunan daerah, pengawasan merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya bersifat penindakan (represif) tetapi juga bersifat pencegahan (preventif), sehingga diharapkan dapat terwujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan akuntabilitas tersebut dapat diukur tingkat keberhasilan kinerja dari setiap instansi pemerintahan.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%; b) Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi pada Tahun 2015 ditargetkan 100%;³ c) Persentase informasi pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%; <p>6) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, harus dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilan kinerjanya.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 34 kali; b) Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD) pada Tahun 2015 ditargetkan baik;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>7) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah</p> <p>Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik pula, sehingga seiring dengan standarisasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 maka pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan akurasi dan kecepatan pengolahan datanya. Produk akhir pengelolaan keuangan daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan harus selesai selambat lambatnya akhir Maret Tahun berikutnya. Selain itu Pengelolaan aset daerah adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban pengelolaan aset daerah ini sehingga pemanfaatannya dapat lebih maksimal. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Opini laporan keuangan Pada Tahun 2015 ditargetkan (Wajar Tanpa Pengecualian) WTP; b) Laporan keuangan yang disusun pada Tahun 2015 ditargetkan tepat waktu; c) Penetapan APBD pada Tahun 2015 ditetapkan tepat waktu; d) Keberadaan PERDA tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2015 ditetapkan ada; e) Persentase peningkatan PAD pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 6,68%; f) Rasio keberadaan kemandirian daerah pada Tahun 2015 ditargetkan 25,17%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>g) Jumlah Perusahaan Daerah dalam kondisi sehat pada Tahun 2015 ditargetkan 3 buah;</p> <p>h) Persentase Aset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan) Pada Tahun 2015 ditargetkan 99,5%;</p> <p>8) Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan</p> <p>Melalui sekretariat DPRD, Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan layanan atas kebutuhan administrasi dan keuangan lembaga legislatif. Sehingga diharapkan legislatif sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dapat berfungsi secara maksimal khususnya dalam hal penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berfihak kepada kepentingan publik serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <p>a) Pelaksanaan voting yang dilakukan dalam sidang paripurna pada Tahun 2015 ditargetkan 0%;</p> <p>b) Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembahasan ranPerda pada Tahun 2015 ditargetkan 100%;</p> <p>c) Jumlah Perda inisiatif DPRD Tahun 2011-2015 ditargetkan sebesar 5 Perda;</p> <p>9) Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional</p> <p>Jumlah SDM yang besar memerlukan pengelolaan yang baik sehingga akan terwujud sinergi yang positif serta menghasilkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut meliputi penetapan ketrampilan, keahlian, kesejahteraan sampai dengan sistem karir yang transparan.</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%; b) Rasio jabatan yang terisi pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%; c) Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%; d) Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%; e) Kesesuaian SOTK SKPD dengan Pedoman/Peraturan tentang SOTK pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%; f) Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan pada Tahun 2015 ditargetkan 80%; <p>10) Meningkatnya kerjasama Daerah</p> <p>Kerjasama Daerah diperlukan untuk semakin meningkatkan kemampuan sumber daya Kabupaten.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga pada Tahun 2015 ditargetkan 28 buah.</p> <p>11) Meningkatnya Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kabupaten harus dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>a) Keberadaan unit pelayanan pengadaan pada Tahun 2015 ditargetkan ada;</p> <p>b) Keberadaan E-procurement pada Tahun 2015 ditargetkan ada;</p> <p>c) Jumlah Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada Tahun 2015 ditargetkan 25 orang;</p> <p>12) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan</p> <p>Layanan administrasi kependudukan yang dilakukan berupa pelayanan KTP, KK dan akte catatan sipil harus terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan juga semakin meningkat.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <p>a) Kepemilikan KTP pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 96,00%;</p> <p>b) Cakupan Penerbitan Akta kelahiran pada Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 96,62%;</p> <p>c) Lama pengurusan KTP pada Tahun 2015 ditargetkan 1 hari;</p> <p>13) Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa</p> <p>Komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan dalam rangka mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, sehingga dapat terjadi sinergi yang positif dalam pembangunan. Mengingat banyaknya segmen masyarakat, maka sistem komunikasi yang dilakukan juga harus menggunakan</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>berbagai macam metode sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Keberadaan Website Pemerintah Daerah pada Tahun 2015 ditargetkan ada; b) Pengunjung website pada Tahun 2015 ditargetkan 665.113 netter; c) Jumlah Sistem informasi yang tersedia pada Tahun 2015 ditargetkan 27 buah; d) Jumlah pemberitaan di media pada Tahun 2015 ditargetkan 420 kali; e) Keberadaan Persuratan secara elektronik pada Tahun 2015 ditargetkan ada; <p>14) Meningkatnya penanganan pertanahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan pertanahan di daerah perlu dikoordinasikan antara pemerintah kabupaten dengan instansi pemerintah pusat badan pertanahan, sehingga diharapkan permasalahan pertanahan yang ada dapat diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat. b) Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: c) Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada Tahun 2015 ditargetkan 0 kasus.

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>15) Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW</p> <p>Kebijakan penataan ruang daerah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2011. Agar penerapan kebijakan pemanfaatan ruang dapat berhasil dalam pencapaian sasaran sesuai yang diharapkan, maka dalam implementasinya Pemerintah Daerah telah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) melalui Keputusan Bupati Gresik yang mempunyai tugas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Keberadaan Perda RTRW pada Tahun 2015 ditargetkan ada; b) Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan RTRW pada Tahun 2015 ditargetkan ada pada Tahun 2015 ditargetkan ada. <p>16) Meningkatnya efektifitas perencanaan Pembangunan</p> <p>Mengingat adanya keterbatasan sumber daya daerah baik SDM maupun keuangan maka perencanaan daerah harus disusun secara efektif dengan berupaya menyiapkan dokumen perencanaan yang baik sesuai dengan kemampuan SDM dan keuangan yang ada. Selain itu perlu juga adanya keterlibatan secara aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ketersediaan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada Tahun 2015 ditargetkan ada; b) Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD pada Tahun 2015 ditargetkan 95%.

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
3.	<p data-bbox="395 199 1398 293">17) Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu</p> <p data-bbox="480 315 1417 584">Data pembangunan yang disusun adalah Kabupaten Gresik dalam angka, perhitungan PDRB, pengukuran IPM dan dokumen lainnya. Data ini harus disediakan sebelum laporan pertanggungjawaban Tahunan disusun dan sebelum perencanaan Tahun berikutnya dibuat.</p> <p data-bbox="480 607 1417 819">Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Ketersediaan dokumen statistik (Kabupaten dalam Angka, PDRB Kabupaten, pengukuran IPM dan dokumen lainnya) pada Tahun 2015 ditargetkan ada;</p> <p data-bbox="395 891 1414 985">18) Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal</p> <p data-bbox="480 1008 1417 1220">Pengelolaan arsip oleh satuan kerja perangkat harus tertib, rapi dan handal. Oleh karena itu prioritas yang harus dilakukan adalah menyiapkan sistem dan sarana penyimpanan arsip sesuai standar.</p> <p data-bbox="480 1243 1417 1337">Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <p data-bbox="480 1359 1417 1460">a) Penerapan pengelolaan arsip secara baku pada Tahun 2015 ditargetkan 100%;</p> <p data-bbox="316 1536 1417 1749">3. Misis 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>– Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat</p> <p>Peningkatan perekonomian daerah merupakan indikator utama dalam usaha mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingkat pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten ke depan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat dan penurunan angka pengangguran.</p> <p>Untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam urusan Perdagangan, urusan perindustrian, urusan koperasi dan UKM, urusan penanaman modal, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan perikanan dan kelautan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan ketenagakerjaan, urusan pariwisata, urusan pekerjaan umum dan urusan energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Untuk mencapai tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat ditetapkan sasaran sebagai berikut:</p> <p>1) Meningkatkan usaha Perdagangan</p> <p>Untuk meningkatkan perekonomian daerah perlu ditingkatkan usaha Perdagangan di daerah. Oleh karena itu keberadaan pasar komoditas dan pasar umum harus tersedia di setiap wilayah. Kemudahan akses transportasi dan prasarana yang memadai menjadi suatu kebutuhan untuk meningkatkan sektor ini.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>a) Pertumbuhan penerbitan SIUP pada Tahun 2015 ditargetkan 11,80%;</p> <p>b) Pertumbuhan penerbitan TDP pada Tahun 2015 ditargetkan 10,70%;</p> <p>c) Pertumbuhan penerbitan TDG pada Tahun 2015 ditargetkan 17,40%;</p> <p>d) Pertumbuhan nilai investasi Perdagangan pada Tahun 2015 ditargetkan 1,70%;</p> <p>e) Jumlah Pameran/Ekspo yang diikuti/dilaksanakan pada Tahun 2015 ditargetkan 3 even;</p> <p>2) Meningkatnya sektor industry</p> <p>Untuk meningkatkan sektor industri perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan para pelaku industri di daerah. Beberapa produk dari industri di wilayah kabupaten perlu mendapatkan perhatian sehingga mampu meningkatkan ekonomi daerah.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <p>a) Pertumbuhan Industri pada Tahun 2015 ditargetkan 2%;</p> <p>b) Pertumbuhan Nilai Produksi pada Tahun 2015 ditargetkan 4%;</p> <p>3) Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)</p> <p>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor yang paling banyak menyerap pelaku ekonomi di kabupaten, sehingga upaya untuk memberdayakan dan melindungi kesinambungan usaha mereka harus dilakukan. Antara lain dengan meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan UKM, meningkatkan kualitas kelembagaan, meningkatkan jiwa wirausaha pelaku ekonomi serta memberikan kemudahan akses permodalan.</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Koperasi aktif pada Tahun 2015 ditargetkan 95%; b) Persentase Usaha Mikro dan Kecil pada Tahun 2015 ditargetkan 64%; c) Koperasi yang mendapatkan penilaian baik pada Tahun 2015 ditargetkan 83%; <p>4) Meningkatnya investasi di daerah</p> <p>Untuk meningkatkan investasi di daerah perlu dilakukan berbagai upaya mulai dari promosi potensi daerah, regulasi perijinan, kesiapan infrastruktur sampai dengan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha. Usaha ini harus dilakukan oleh lintas SKPD yang bersangkutan secara simultan sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kenaikan Nilai Realisasi PMDN pada Tahun 2015 ditargetkan 894 milyar rupiah; b) Persentase Penyelesaian Permohonan: Ijin Lokasi, Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Prinsip Ijin Usaha pada Tahun 2015 ditargetkan 100%; <p>5) Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>Sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura diperlukan pembinaan yang intensif.</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Produksi Pertanian pada Tahun 2015 ditargetkan 554.979 ton. b) Produksi Sayur pada Tahun 2015 ditargetkan 18.119 ton. c) Produksi Buah pada Tahun 2015 ditargetkan 528.074 Kuintal. <p>6) Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan</p> <p>Produksi perkebunan di Kabupaten Gresik cukup mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan potensi perkebunan.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Produksi hasil perkebunan pada Tahun 2015 ditargetkan 14.272 ton. <p>7) Meningkatnya produksi dan populasi peternakan</p> <p>Untuk menjaga kecukupan gizi masyarakat perlu dilakukan pembangunan di bidang peternakan. Pembangunan ini ditujukan untuk menjaga persediaan kebutuhan daging, susu dan telur serta populasi binatang ternak.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Produksi peternakan pada Tahun 2015 ditargetkan untuk daging 15.606,12 ton, telur 2.991,97 ton, dan susu 543,36 ton; b) Populasi binatang ternak dan unggas pada Tahun 2015 ditargetkan untuk sapi 54.827 ekor, kerbau 334 ekor, kambing 53.355 ekor, domba 30.749 ekor, kuda 373 ekor, ayam buras 667.109 ekor, ayam ras petelur 132.441 ekor, ayam ras pedaging 2.258.400 ekor, itik 26.034 ekor dan entok 13.710 ekor;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>8) Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan</p> <p>Untuk menjaga pemanfaatan sumber daya alam agar terjaga kelestariannya maka diperlukan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Sehingga pengawasan pada lingkungan eksploitasi alam harus dilakukan secara ketat.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada Tahun 2015 ditargetkan 1,3%; b) Jumlah Produksi hasil hutan pada Tahun 2015 ditargetkan untuk kayu jati 415 m³ dan non kayu jati 40 m³; <p>9) Meningkatnya Produksi dan produktivitas perikanan</p> <p>Agar dapat mengembangkan sektor perikanan perlu dilakukan peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan umum. Untuk itu diperlukan jumlah benih ikan yang cukup. Peningkatan perikanan budidaya dilakukan melalui budidaya kolam dan tambak sedangkan untuk produksi perairan umum dilakukan melalui penyebaran benih ikan pada perairan umum serta hasil tangkapan laut oleh nelayan.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Produksi Perikanan Budi daya pada Tahun 2015 ditargetkan untuk udang windu 3.100,00 ton, udang vannamee 4.250,00 ton, bandeng 39.000,00 ton, kerapu 12,00 ton, nila 1.200,00 ton; b) Produksi Perikanan penangkapan pada Tahun 2015 ditargetkan 17.800,00 ton; c) Produksi Perikanan perairan umum pada Tahun 2015 ditargetkan 750,00 ton;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>d) Produktivitas lahan tambak payau pada Tahun 2015 ditargetkan 106,91 ton/Ha;</p> <p>e) Produktivitas lahan tambak tawar pada Tahun 2015 ditargetkan 123,13 ton/Ha;</p> <p>10) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>Kerusakan lingkungan dapat dipicu dari perkembangan industri. Oleh karena itu setiap industri seharusnya memiliki instalasi pengolahan limbah yang baik sehingga dapat meminimalkan pencemaran lingkungan, Hal ini memerlukan ketegasan dari Pemerintah Kabupaten untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut dengan menerapkan sanksi terhadap pelaku industri yang melakukan pencemaran lingkungan.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <p>a) Luas Lahan Kritis pada Tahun 2015 ditargetkan seluas 2.873 Ha;</p> <p>b) Rasio Luas Kawasan Lindung pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 11%;</p> <p>c) Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 68 unit;</p> <p>d) Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara pada Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 200 unit;</p> <p>e) Luas RTH perkotaan ditargetkan pada Tahun 2015 ditargetkan sebanyak 718,35 Ha;</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>11) Meningkatnya penanganan persampahan</p> <p>Agar kesehatan lingkungan dapat terjaga dengan baik maka setiap sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus mampu terangkut dan terbuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Persentase Penanganan sampah pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 92%; b) Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada Tahun 2015 sebanyak 0,03 m³/penduduk; c) Jumlah tempat pengolahan sampah pada Tahun 2015 ditargetkan 115 unit; <p>12) Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau</p> <p>Agar dapat menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang di wilayah Kabupaten Gresik diperlukan pelayanan transportasi yang baik. Pelayanan dimaksud bukan hanya berupa sarana angkutan umum yang layak jalan saja tetapi juga sarana lalu lintas seperti rambu, marka, halte dan sebagainya sebagai pendukung keselamatan dan kenyamanan transportasi daerah.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Persentase Ketersediaan Angkutan darat pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%; b) Persentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 50%; c) Persentase Angkutan Umum darat dalam kondisi layak jalan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 75%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>d) Ketersediaan angkutan laut penyeberangan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 173,695%;</p> <p>e) Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%;</p> <p>f) Persentase permasalahan bidang perhubungan yang diselesaikan Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%;</p> <p>13) Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja</p> <p>Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi semua warganya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten. Sehingga melalui kebijakan publik yang terencana dan jelas harus mampu menurunkan angka pengangguran terbuka kabupaten, menciptakan lapangan kerja baik formal maupun informal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <p>a) Tingkat partisipasi angkatan kerja pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 67,84%;</p> <p>b) Pencari kerja yang ditempatkan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 31,43%;</p> <p>c) Angka pengangguran penduduk usia 15-24 Tahun pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 22,01%;</p> <p>14) Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja</p> <p>Agar dapat menjamin setiap pekerja memperoleh hak-haknya maka perlu dilakukan upaya pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan terhadap tenaga kerja, yang meliputi keselamatan kerja, kesehatan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kepatuhan terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 70,97%; b) Kepatuhan Terhadap Norma kerja pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 92,80%; c) Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Sosial Tenaga kerja pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 99,58%; d) Angka Kecelakaan Kerja pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 2,17%; e) Angka Penuntasan/ penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%; f) Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 9%; g) Kepatuhan atas ketentuan mengenai Kepemilikan Lembaga Kerjasama Bipartit pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 4,24%. <p>15) Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata</p> <p>Untuk meningkatkan pariwisata daerah salah satu ukurannya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Untuk itu perlu dikembangkan obyek-obyek pariwisata daerah yang dapat menarik kunjungan masyarakat. Disamping itu, agar kunjungan dapat meningkat perlu terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pengusaha pariwisata baik di dalam maupun luar Kabupaten.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah kunjungan wisata pada Tahun 2015 ditargetkan 1.530.000 orang;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>16) Meningkatnya sarana infrastruktur daerah</p> <p>Pemenuhan infrastuktur jalan dan jembatan dimaksudkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah. Ketersediaan jalan dan jembatan yang baik akan mampu mendorong pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu pemerintah kabupaten harus mendorong tersedianya jalan dan jembatan yang memadai terutama untuk daerah pengembangan ekonomi yang telah direncanakan.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2015 ditargetkan 74,00%; b) Jembatan kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2015 ditargetkan 96,28%; c) Persentase Panjang Jalan Poros Desa Yang Terbangun pada Tahun 2015 ditargetkan 100%; <p>17) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian. Oleh karena itu upaya prioritas dalam pengelolaan air adalah ketersediaan air untuk pertanian.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2015 ditargetkan 55%; b) Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik pada Tahun 2015 ditargetkan 95,23%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>18) Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah</p> <p>Energi dan Sumber daya mineral yang dimiliki oleh daerah merupakan karunia Tuhan yang perlu dijaga kelestariannya. Eksploitasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestariannya akan menyebabkan potensi tersebut menjadi habis dan hilang. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap pertambangan yang ada di masyarakat.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <p>a) Persentase ABT berijin yang membayar pajak pada Tahun 2015 ditargetkan 75,20%;</p>
4.	<p>Misi 4 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.</p> <p>- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya .</p> <p>Meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tugas utama pemerintah daerah. Kualitas hidup masyarakat diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga dan ketersediaan pangan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut diharapkan kualitas hidup masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.</p> <p>Untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, urusan perpustakaan, urusan ketahanan pangan, urusan kepemudaan dan olah raga.</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>Untuk mencapai tujuan Meningkatnya kualitas hidup masyarakat ditetapkan sasaran sebagai berikut :</p> <p>1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah</p> <p>Pembangunan pendidikan terfokus kepada dua hasil yang ingin dicapai yaitu pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih menekankan kepada kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah kepada kualitas hasil anak didik.</p> <p>Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan.</p> <p>Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana penunjang belajar seperti buku, laboratorium dan ruang praktek, peningkatan manajemen sekolah, peningkatan metodologi pembelajaran.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun 2015 ditargetkan 93,50%; b) Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) pada Tahun 2015 ditargetkan 100%; c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada Tahun 2015 ditargetkan 100%; d) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 77,60%; e) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C pada Tahun 2015 ditargetkan 92,90%; f) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada Tahun 2015 ditargetkan 0,02%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>g) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada Tahun 2015 ditargetkan 0,03%;</p> <p>h) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA pada Tahun 2015 ditargetkan 0,1%;</p> <p>i) Angka Kelulusan (AL) SD/MI pada Tahun 2015 ditargetkan 100%;</p> <p>j) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs pada Tahun 2015 ditargetkan 100%;</p> <p>k) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA pada Tahun 2015 ditargetkan 100%;</p> <p>l) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada Tahun 2015 ditargetkan 99,90%;</p> <p>m) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada Tahun 2015 ditargetkan 99,90%;</p> <p>n) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada Tahun 2015 ditargetkan 100%.</p> <p>2) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diharapkan usia harapan hidup masyarakat juga meningkat. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah, pelayanan imunisasi, pelayanan pengobatan/perawatan, pelayanan kesehatan jiwa, pemantauan pertumbuhan balita, pelayanan gizi, pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan komprehensif, pelayanan gawat darurat, penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa dan gizi buruk, pencegahan dan pemberantasan penyakit endemis, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan pengendalian vektor, pelayanan hygiene</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>sanitasi di tempat umum, penyuluhan perilaku sehat, penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat, pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan penggunaan obat generik, penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga miskin dan masyarakat rentan, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan lanjut usia, pelayanan gizi, pencegahan dan pemberantasan HIV-AIDS serta pelayanan dasar dan rujukan.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 95%; b) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 80%; c) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 95%; d) Cakupan Pelayanan Nifas pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 95%; e) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 80%; f) Cakupan Pelayanan Anak Balita pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 90%; g) Cakupan Kunjungan Bayi pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 90%; h) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<ul style="list-style-type: none"> i) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+) Pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 80%; j) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%; k) Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 50,00%; l) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%; m) Cakupan Balita yang Mendapat Vitamin A pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 90%; n) Persentase Rumah Sehat pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 86%; o) Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 98,46%; p) Pengadaan Obat Esensial pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 99,19%; q) Pengadaan Obat Generik pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 99,55%; r) Cakupan Rawat Jalan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 40%; s) Cakupan Rawat Inap pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 1,5%; t) Cakupan rumah tangga sehat pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 75%; u) Posyandu Purnama pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 80%; v) Pelayanan pasien jamkesmas dan jamkesda pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 6%; w) <i>Bed Occupancy Rate</i> pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 71,03%;

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>x) <i>Average Lenght Of Stay</i> pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 4 hari;</p> <p>y) <i>Turn Over Internal</i> pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 1,1 hari;</p> <p>z) <i>Bed Turn Over</i> pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 49,38 kali;</p> <p>3) Meningkatnya pelayanan keluarga berencana</p> <p>Pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan pada pelayanan peserta KB secara menyeluruh. Sebagai bagian dari program pengendalian jumlah penduduk, maka urusan ini memegang peranan penting dalam menekan pertumbuhan penduduk. Dengan didasari oleh kesadaran yang tinggi dari masyarakat tentang pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk maka pelayanan alat KB kepada pasangan usia subur harus ditingkatkan.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <p>a) Prevalensi peserta KB Aktif pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 78,55%;</p> <p>b) Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 Tahun pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 1,10%;</p> <p>c) Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>) pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 21,15%;</p> <p>d) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 21,75%;</p> <p>e) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%;</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>4) Meningkatkan minat baca masyarakat</p> <p>Untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dilakukan upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Diantaranya dengan cara meningkatkan aksesibilitas masyarakat kepada perpustakaan umum serta melakukan penambahan buku bacaan dan tempat baca yang lebih banyak di masyarakat.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada Tahun 2015 ditargetkan 179.142 buku; b) Jumlah pengunjung perpustakaan pada Tahun 2015 ditargetkan 759.805 orang; c) Jumlah anggota perpustakaan pada Tahun 2015 ditargetkan 33.300 orang; <p>5) Meningkatkan ketersediaan pangan utama masyarakat</p> <p>Dengan dijadikannya urusan pertanian menjadi prioritas pembangunan maka diharapkan surplus stok pangan daerah dapat semakin meningkat.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Keberadaan regulasi ketahanan pangan pada Tahun 2015 ditargetkan ada; b) Ketersediaan pangan pada Tahun 2015 ditargetkan 197,21 kg/kapita/Tahun; c) Rata-rata konsumsi bahan pangan utama pada Tahun 2015 ditargetkan 94,35 kg/kapita/Tahun; <p>6) Meningkatkan prestasi olah raga daerah</p> <p>Untuk meningkatkan prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda. Sedangkan untuk meningkatkan prestasi olahraga dilakukan melalui kerja sama</p>

NO.	Misi / Tujuan / Sasaran
	<p>dengan KONI kabupaten dan organisasi persatuan olahraga yang ada di daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul pemuda dan olahragawan yang berprestasi di daerah.</p> <p>Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Persentase organisasi kepemudaan yang aktif pada Tahun 2015 ditargetkan 100%; b) Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) pada Tahun 2015 ditargetkan 2 unit; c) Jumlah Lapangan Olah Raga pada Tahun 2015 ditargetkan 27 unit; d) Persentase cabang olah raga yang aktif pada Tahun 2015 ditargetkan 96,66%;

Sumber data : Perda Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

B. Strategi Daerah

Untuk mencapai tujuan daerah dalam menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan untuk menjadikan Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan Yang Berkualitas, maka strategi pembangunan Kabupaten Gresik untuk lima Tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 :

Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui fasilitasi dan bantuan kepada aktivitas keagamaan;
2. Membangun suasana yang kondusif bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam membangun kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
4. Melakukan pembinaan kepada pemuda dan masyarakat untuk meningkatkan prestasi dan olah raga di daerah;
5. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi dan pembinaan secara berkala;
6. Memelihara dan menjaga eksistensi seni dan budaya lokal.

Misi ke-2 :

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan;
2. Memperluas jangkauan pelayanan sosial dan penanganan PMKS;
3. Menyediakan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai;

4. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan secara lebih intensif;
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pada semua jenjang;
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
8. Meningkatkan proses perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada kinerja yang baik.

Misi ke-3 :

Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

1. Membangun akses yang luas kepada masyarakat dalam mengembangkan industri dan Perdagangan di daerah;
2. Mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal;
3. Meningkatkan investasi penanaman modal di daerah melalui pelayanan perijinan yang baik;
4. Meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan;
5. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan pembinaan pada bidang perikanan dan kelautan;
6. Meningkatkan infrastruktur daerah baik dalam bidang bina marga maupun pengairan.

Misi ke-4 :

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, maka strategi pembangunan yang dirtrapkan adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana serta biaya pendidikan yang murah;
2. Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pemerataan akses dan keterjangkauan biaya kesehatan bagi masyarakat;
3. Menekan pertumbuhan penduduk melalui pelayanan keluarga berencana yang terjangkau;
4. Menjaga tingkat ketersediaan pangan daerah demi terwujudnya ketahanan pangan di daerah.

C. Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan strategi pembangunan daerah, disusun arah kebijakan daerah berdasarkan misi 1 sampai dengan misi 4.

Tabel II.2
Misi dan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2011-2015

NO.	Misi	Arah Kebijakan
1.	Misi 1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati yang dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri", ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima Tahun sebagai berikut:	1) Membantu/ memfasilitasi peningkatan kegiatan keagamaan di masyarakat; 2) Meningkatkan rasa sejuk , santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 3) Mengembangkan budaya masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan;

NO.	Misi	Arah Kebijakan
		4) Meningkatkan prestasi olah raga melalui pembinaan induk organisasi dan komite olah raga; 5) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan pada lembaga pemerintah, sektor industri dan lembaga non formal; 6) Melestarikan dan mengembangkan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal.
2.	Misi 2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima Tahun ke depan sebagai berikut:	1) Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat perdesaan; 2) Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan rehabilitasi dan bantuan dasar kesejahteraan sosial 3) Meningkatkan sarana dan parasarana dasar pemukiman; 4) Mendorong percepatan pencapaian good governance melalui pengembangan produk hukum; 5) Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan dan monitoring tindak lanjut; 6) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih; 7) Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan sumberdaya penerimaan daerah; 8) Meningkatkan fungsi legislatif melalui pemberdayaan dan penampungan aspirasi masyarakat;

NO.	Misi	Arah Kebijakan
		9) Meningkatkan profesionalisme aparat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak pegawai sesuai ketentuan; 10) Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan; 11) Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI); 12) Meningkatkan pengelolaan pertanahan; 13) Meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya; 14) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan; 15) Mendokumentasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan informasi hasil-hasil pembangunan; 16) Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan arsip daerah.
3.	Misis 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	1) Mengembangkan sistem pemasaran produk unggulan/andalan; 2) Mengembangkan industri kecil dan menengah; 3) Revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi melalui pembinaan intensif; 4) Meningkatkan investasi di daerah melalui instrumentasi prosedur pelayanan investasi serta pengembangan kawasan industri dan infrastruktur;

NO.	Misi	Arah Kebijakan
		<p>5) Mengembangkan jaringan pemasaran produk pertanian;</p> <p>6) Optimalisasi sumberdaya pertanian baik penyuluh maupun petani;</p> <p>7) Mengembangkan komoditas perkebunan, melalui kimbun (kawasan industri masyarakat perkebunan);</p> <p>8) Meningkatkan wilayah pengembangan sentra-sentra produksi dan populasi peternakan serta didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan;</p> <p>9) Optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan serta pengembangan tanamannya secara berkelanjutan;</p> <p>10) Meningkatkan produksi perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap perairan umum, kolam, laut dan tambak;</p> <p>11) Meningkatkan pembinaan atas usaha/kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran pada tanah, air, dan udara;</p> <p>12) Meningkatkan penanganan sampah secara berkelanjutan dengan mendorong swadaya masyarakat;</p> <p>13) Meningkatkan kelancaran angkutan orang, barang dan jasa serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan;</p> <p>14) Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;</p> <p>15) Mengembangkan produk-produk wisata dan meningkatkan promosi</p>

NO.	Misi	Arah Kebijakan
		16) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan ; 17) Meningkatkan pelayanan irigasi; 18) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral daerah.
4.	Misi 4 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.	1) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan; 2) Meningkatkan pemerataan dan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama dengan membebaskan biaya pemeriksaan di puskesmas untuk penduduk miskin; 3) Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB kepada masyarakat; 4) Menjadikan perpustakaan sebagai sarana penambah pengetahuan; 5) Meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan dan sumber karbohidrat dan sumber protein.

Sumber data: Perda Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

D. Prioritas Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 sebagaimana Perda Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011, prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan.
2. Revitalisasi birokrasi.
3. Pembangunan ekonomi daerah dengan titik berat ekonomi kerakyatan.

4. Revitalisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah.
5. Revitalisasi pelayanan kesehatan.
6. Penanggulangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan hidup.

Pada Tahun 2015 Prioritas pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015, prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
5. Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;
6. Pemerataan dan Pertumbuhan perekonomian melalui: Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri;
7. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penanggulangan Bencana serta Tata Ruang;
8. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
9. Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata, melalui Kreativitas dan Inovasi Teknologi serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
10. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan kesalehan sosial.

Berikut ini tabel yang menjelaskan prioritas dan program pembangunan Tahun 2015:

Tabel II.3
Penjelasan Program Kabupaten Gresik
Tahun 2015

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
1.	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Pendidikan Luar Biasa 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8. Program Penyelenggaraan Pendidikan Akper 9. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.	Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengembangan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 10. Program pengadaan, rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 13. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 14. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 15. Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
3.	Perluasan Lapangan Kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Program Transmigrasi Regional
4.	Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan reproduksi Remaja 3. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 4. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 6. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh Kembang Anak 7. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 8. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 10. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 11. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 12. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 13. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 15. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo 16. Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit sosial (Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) 17. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 18. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 19. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		20. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 21. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
5.	Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6. Program Pengembangan Sarana/ Prasarana Pembangunan Pertanian/ Perkebunan 7. Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 8. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 9. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 10. Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan 11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 12. Program peningkatan produksi hasil peternakan 13. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 14. Program peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan sumberdaya laut 15. Program pengembangan budidaya perikanan 16. Program pengembangan perikanan tangkap 17. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 18. Program optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan 19. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
6.	Pemerataan dan Pertumbuhan perekonomian melalui: Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri	1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 7. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 10. Program Pembinaan PKL dan Asongan 11. Program Peningkatan Pasar 12. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 13. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 14. Program Penataan struktur Industri 15. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
7.	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penanggulangan Bencana serta Tata Ruang,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 7. Program penyediaan dan pengolahan air baku 8. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limba 10. Program pengendalian banjir 11. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 12. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 13. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 14. Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		15. Program Pengembangan dan Implementasi Kegiatan Ke-PU-an 16. Program Pembangunan Infrastruktur 17. Program Pengembangan Perumahan 18. Program Lingkungan Sehat Perumahan 19. Program Pemberdayaan Komunikasi Perumahan 20. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 21. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam /Sosial 22. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 23. Program Pengembangan data/informasi 24. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 25. Program perencanaan pembangunan daerah 26. Program perencanaan pembangunan ekonomi 27. Program perencanaan sosial budaya 28. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 29. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah 30. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 31. Program rehab Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 32. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 33. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 34. Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas 35. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 36. Program Peningkatan Komunikasi Informasi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian 37. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 38. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 39. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 40. Program Pengendalian dan Pengawasan ESDM 41. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kelistrikan, Energi dan Mineral

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		42. Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi 43. Program Pengembangan potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi 44. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 45. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 46. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 47. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 48. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 49. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 50. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 51. Program Perencanaan Tata Ruang 52. Program Pemanfaatan Ruang 53. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 54. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 55. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 56. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 57. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 58. Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dalam Tanggap Darurat 59. Program Pemulihan Pasca Bencana 60. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Bencana
8.	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7. Program Pendidikan Kedinasan

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		<p>8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</p> <p>9. Program Penelitian dan Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah</p> <p>10. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah</p> <p>11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>12. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</p> <p>13. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media</p> <p>14. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</p> <p>15. Program Penataan Administrasi Kependudukan</p> <p>16. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</p> <p>17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>18. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>19. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>20. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>21. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>22. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</p> <p>23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>24. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>25. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</p> <p>26. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>27. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</p> <p>28. Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah</p> <p>29. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip</p> <p>30. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</p> <p>31. Program Penataan Perundang-Undangan</p>

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		32. Program Perencanaan Pembangunan 33. Program Penataan Daerah otonomi Baru 34. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata, melalui Kreativitas dan Inovasi Teknologi serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga	1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 5. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 6. Program peningkatan peran serta kepemudaan 7. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 8. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 9. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga 10. Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 11. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 13. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
10.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan kesalehan sosial.	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3. Program pengembangan wawasan kebangsaan 4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat 7. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Sumber data: Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, akan timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (iii) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yang telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari segi pendapatan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola

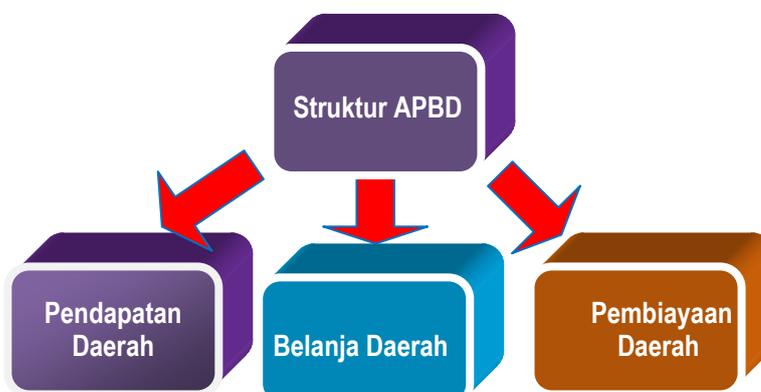


“Pengelolaan Keuangan daerah, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

jenis pendapatan tertentu melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain pembagian kewenangan perpajakan dan retribusi daerah untuk setiap tingkat pemerintahan, hubungan keuangan pusat-daerah juga ada dalam bentuk transfer dari sebagian pendapatan pemerintah pusat (pendapatan negara) kepada pemerintah daerah. Transfer dari pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fiskal pemerintah daerah yang tidak dapat dipenuhi dengan pendapatan asli daerah. Dengan demikian transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (kesenjangan vertikal). Selain itu kesenjangan antara kebutuhan daerah dengan kapasitas fiskal juga disebabkan oleh ketimpangan fiskal horisontal (ketimpangan fiskal antar daerah) yang diakibatkan oleh perbedaan potensi fiskal dan kebutuhan antar daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015 yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015 terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah (2) Belanja Daerah (3) Pembiayaan Daerah.

Gambar III.1
Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015



Pada komponen Pendapatan Daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan pada komponen Belanja terdiri atas : (1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga; (2) Belanja langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Sementara komponen pembiayaan daerah terdiri atas (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembayaran Pokok Hutang.

Gambar III.2
Komponen APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015



Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan Tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu unsur penting adalah pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan pendorong bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan kebijakan strategis serta upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara terus menerus. Kebijakan strategis serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui program dan kegiatan terukur, terkoordinasi serta berkelanjutan dengan mengedepankan optimalisasi potensi pendapatan daerah dan aspek pelayanan publik yang diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Pada dasarnya pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) Tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara brutto, dalam arti bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Dari sisi perencanaan, maka pendapatan daerah merupakan

perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

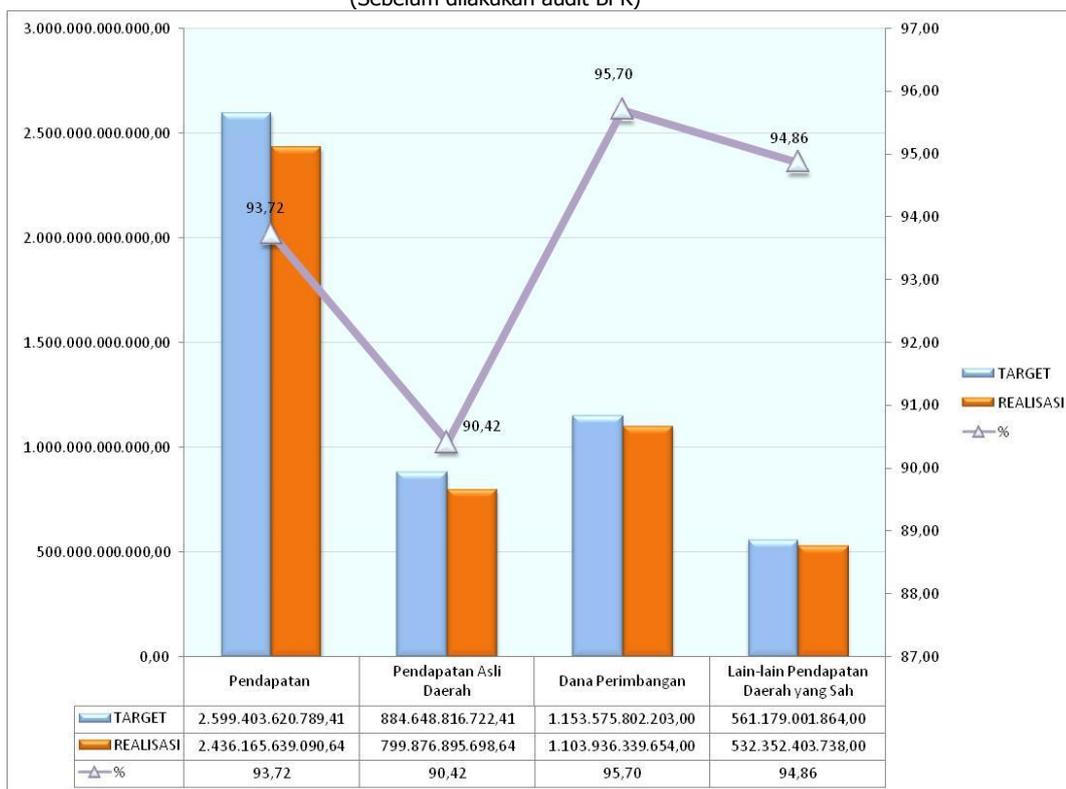
Upaya-upaya yang ditempuh dalam kaitannya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi:

- a. Peningkatan manajemen pemungutan pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya;
- c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan melalui kemudahan, ketepatan dan kecepatan sesuai dengan standar pelayanan;
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundangan terkait dengan dasar pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kondisi terkini;
- f. Peningkatan koordinasi dan dukungan pemungutan bagi hasil pajak pemerintah dan provinsi; serta
- g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp2.599.403.620.789,41, sedangkan realisasinya sampai dengan akhir Tahun anggaran sebesar 2.436.165.639.090,64 atau 93,72%, dengan rincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.1
Grafik Komposisi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2015
 (Sebelum dilakukan audit BPK)



Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD Tahun 2015 dibandingkan dengan target sebesar Rp799.876.895.698,64 atau mencapai 90,42%, sedangkan dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar Rp1.103.936.339.654,00 atau mencapai 95,70% dan sisanya sebesar Rp532.352.403.738,00 atau mencapai 94,86% diperoleh dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kontribusi PAD Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 yang mencapai 90,42% lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 31,75%. Semakin besar kontribusi PAD atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah semakin baik.

Adapun rincian dari masing-masing pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap Tahunnya.

Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self supporting).

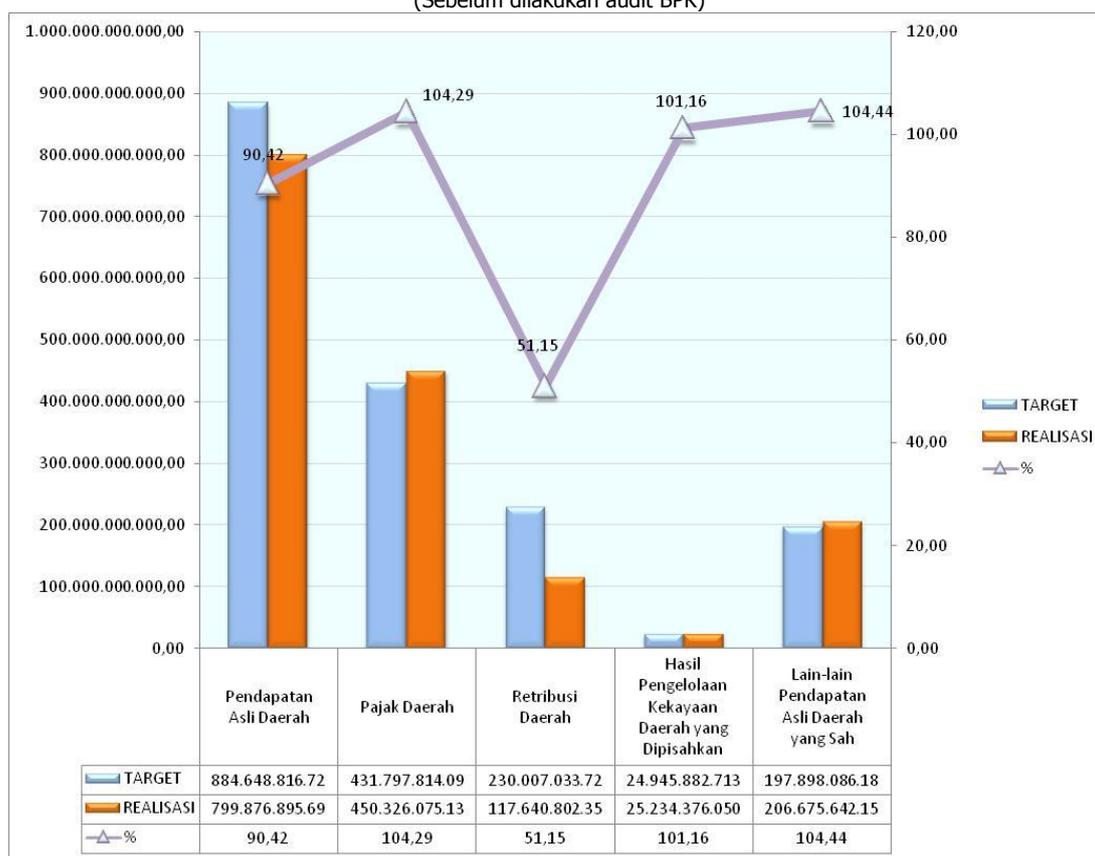
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp884.648.816.722,41 dapat direalisasikan sebesar Rp799.876.895.698,64 atau mencapai 90,42%. Sumbangan terbesar dari PAD

“Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self supporting)”

Kabupaten Gresik berasal dari Pajak Daerah yaitu mencapai 104,29%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai 101,16% dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mencapai 104,44% dari realisasi PAD yang dihasilkan pada Tahun 2015. Adapun perincian PAD Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.2
Grafik Perincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2015
 (Sebelum dilakukan audit BPK)



Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

1) Pajak Daerah

Pada era otonomi daerah, masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli daerah (PAD). Penguatan *local taxing power* kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai undang-undang tersebut pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis.

Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditargetkan dalam APBD 2015 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (9) PBB Pedesaan dan Perkotaan (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.



“Penguatan local taxing power kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terutama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009”

Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp431.797.814.095,60 dan dapat direalisasikan sebesar Rp450.326.075.139,76 atau mencapai 104,29%. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa jenis pajak daerah yang tidak dapat mencapai target yang diharapkan, sebagaimana rincian hasil penerimaan pajak daerah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.3
Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2015
(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.1.	PAJAK DAERAH	431.797.814.095,60	450.326.075.139,76	104,29
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.300.000.000,00	1.309.395.904,00	100,72
4.1.1.02	Pajak Restoran	12.300.000.000,00	12.828.199.997,09	104,29
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.212.814.095,60	877.059.953,05	72,32
4.1.1.04	Pajak Reklame	2.785.000.000,00	3.626.571.908,73	130,22
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	145.000.000.000,00	154.056.938.054,00	106,25
4.1.1.07	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	1.508.223.400,00	100,55
4.1.1.10	Pajak Air Tanah	700.000.000,00	901.892.496,89	128,84

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.000.000.000,00	8.645.702.390,00	61,76
4.1.1.12	PBB Pedesaan dan Perkotaan	75.000.000.000,00	71.899.548.387,00	95,87
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	178.000.000.000,00	194.672.542.649,00	109,37

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.



“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi : 1. Retribusi Jasa Umum terdiri (i) Retribusi Pelayanan Kesehatan (ii) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (iii) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil (iv) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan (v) Retribusi Pelayanan Pasar (vi) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (vii) retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 2. Retribusi Jasa Usaha terdiri (i) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (ii) Retribusi Tempat Pelelangan, (iii) Retribusi Terminal (iv) Retribusi Tempat Khusus Parkir, (v) Retribusi Rumah Potong Hewan, (vi) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, (vii) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (viii) Retribusi Penyeberangan di Air. 3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri (i) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (ii) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (iii) Retribusi Izin Trayek.

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah pada Tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp230.007.033.725,00, terealisasi sebesar Rp117.640.882.350,20 atau 51,15%.

Adapun perincian pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2015
(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	230.007.033.725,00	117.802.350,20	51,15
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	19.259.594.000,00	16.828.654.632,00	87,38
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.309.594.000,00	4.040.697.000,00	76,10
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	750.000.000,00	776.904.500,00	103,59
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.000.000.000,00	7.849.292.000,00	87,21
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	800.000.000,00	1.039.949.725,00	129,99
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.900.000.000,00	1.953.243.000,00	102,80
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.500.000.000,00	1.168.568.407,00	77,90
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	28.918.000.000,00	6.539.180.837,20	22,61
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pekerjaan Umum)	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perhubungan)	2.000.000.000,00	1.425.907.500,00	71,30
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan)	73.000.000,00	56.620.000,00	77,56
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)	250.000.000,00	134.734.000,00	53,89

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sekretariat Daerah)	250.000.000,00	371.798.000,00	148,72
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	330.000.000,00	153.080.430,00	46,39
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45.000.000,00	49.000.000,00	108,89
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan (Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan)	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan)	390.000.000,00	227.670.400,00	58,38
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan)	1.000.000.000,00	368.397.500,00	36,84
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan)	0,00	46.200.000,00	0,00
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan(Dinas Kelautan, Perikan dan Peternakan)	110.000.000,00	110.002.000,00	100,00
4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.000.000.000,00	955.220.507,20	15,92
4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	16.000.000.000,00	66.000.000,00	0,41
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.300.000.000,00	2.336.805.000,00	101,60
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Sekretariat Daerah)	33.000.000,00	6.396.000,00	19,38
4.1.2.02.11	Retribusi Penyeberangan di Air	125.000.000,00	219.349.500,00	175,48
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	181.829.439.725,00	94.272.966.881,00	51,85
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	175.000.000.000,00	80.490.547.449,00	45,99
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (Badan Penanaman Modal dan Perijinan)	6.817.439.725,00	13.775.384.432,00	202,06
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	12.000.000,00	7.035.000,00	58,63

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Gresik (Bank Pasar),

PT. Gresik Migas, PT. Bank Jatim, PT. BPR Jatim yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2015

(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	24.945.882.713,50	25.234.376.050,50	101,16
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	15.712.759.417,30	16.001.371.754,30	101,84
4.1.3.01.02	PD. BPR Bank Gresik (Bank Pasar)	712.759.417,30	712.759.417,30	100,00
4.1.3.01.03	PT Gresik Migas	15.000.000.000,00	15.288.612.337,00	101,92
4.1.3.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	9.233.123.296,20	9.233.004.296,20	100,00
4.1.3.02.01	PT Bank Jatim	9.218.123.296,20	9.218.123.296,20	100,00
4.1.3.02.02	PT BPR Jatim	15.000.000,00	14.881.000,00	99,21

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, pada Tahun anggaran 2015 terdiri dari : Perolehan dari bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD yaitu dari PD. BPR Bank Gresik (Bank Pasar) direncanakan sebesar Rp712.759.417,30 dapat direalisasikan sebesar Rp712.759.417,30 atau 100%, PT. Gresik Migas direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp15.288.612.337,00 atau 101,92%, perolehan laba dari PT. Bank Jatim direncanakan sebesar Rp9.218.123.296,20 dan dapat direalisasikan sebesar Rp9.218.123.296,20 atau 100%, dan dari PT. BPR Jatim direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp14.881.000,00 atau mencapai 99,21%.

Tujuan dibentuknya BUMD secara umum adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah

daerah. Dengan tercapainya target kinerja dalam Tahun 2015, diharapkan Perusahaan Daerah ini dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal di masa mendatang dalam penerimaan dan pembangunan daerah Kabupaten Gresik secara lebih luas.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pos pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas: (1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan (2) Penerimaan Jasa Giro (3) Pendapatan Bunga Deposito (4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (8) Pendapatan Denda Retribusi (9) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan (10) Pendapatan Dari Pengembalian (11) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (12) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (13) Pendapatan Bidang Perhubungan (14) Pendapatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (15) Tindak Lanjut Penghapusan Aset.

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp197.898.086.188,31 dan dapat terealisasi melampaui target yaitu sebesar Rp206.675.642.158,18 atau 104,44%. Adapun perincian dari pos pendapatan tersebut pada Tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015

(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	197.898.086.188,31	206.670.642.158,18	104,43
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	283.000.000,00	743.933.389,00	262,87
4.1.4.02	Jasa Giro	8.000.000.000,00	7.756.489.529,29	96,96
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	24.087.711.661,35	23.442.565.873,26	97,32

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.1.4.06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.034.360.775,00	4.623.411.892,90	227,27
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak1)	272.513.403,83	1.745.801.243,87	640,63
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	259.170.349,00	294.147.552,00	113,50
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	2.594.404.540,00	2.806.254.364,00	108,17
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	2.486.572.129,52	2.485.531.527,52	99,96
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	2.515.750,00	6.550.000,00	260,36
4.1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2.042.300.000,00	2.074.600.000,00	101,58
4.1.4.15	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	110.067.563.700,00	117.250.973.268,00	106,53
4.1.4.16	Pendapatan Bidang Perhubungan	10.000.000.000,00	6.667.520.518,34	66,68
4.1.4.17	Pendapatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	35.662.423.879,61	36.654.100.000,00	102,78
4.1.4.18	Tindak Lanjut Penghapusan Aset	105.550.000,00	123.763.000,00	117,26

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

b. Dana Perimbangan

Gambar III.6
Komponen Dana Perimbangan



Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah. Dana Perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak: (2) Dana Alokasi Umum: dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintahan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp1.153.575.802.203,00 terealisasi sebesar Rp.1.103.936.339.654,00 atau 95,70%. Adapun perincian penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.7
Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2015

(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.153.575.802.203,00	1.103.936.339.654,00	95,70
4.2.1	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	169.465.063.203,00	119.825.600.654,00	70,71
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	139.415.942.000,00	98.201.672.601,00	70,44
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	30.049.121.203,00	21.623.928.053,00	71,96
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	873.265.959.000,00	873.265.959.000,00	100,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	110.844.780.000,00	110.844.780.000,00	100,00

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagikan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas : (1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (2) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang (3) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau.



“Dana Bagi Hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di

Sedangkan pos penerimaan Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya Alam terdiri atas: (1) Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (2) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan (3) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi (4) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi (5) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi (6) Bagi Hasil dari Sumber Daya Kehutanan (7) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum.

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp169.465.063.203,00 terealisasi sebesar Rp119.825.600.654,00 atau 70,71%.

Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.8
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015
 (Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.2.1	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	169.465.063.203,00	119.825.600.654,00	70,71
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	139.415.942.000,00	98.201.672.601,00	70,44
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	30.049.121.203,00	21.623.928.053,00	71,96

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp873.265.959.000,00 terealisasi sebesar Rp873.265.959.000,00 atau 100%.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik daerah.

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari DAK pada Tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp110.844.780.000,00 terealisasi sebesar Rp110.844.780.000,00 atau 100%.

Adapun perincian DAK pada Tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.9
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015
 (Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	110.844.780.000,00	110.844.780.000,00	100,00
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	19.385.120.000,00	19.385.120.000,00	100,00
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00
4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi	00,00	0,00	0,00
4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Bersih	4.753.310.000,00	4.753.310.000,00	100,00
4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	5.081.690.000,00	5.081.690.000,00	100,00
4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	7.725.160.000,00	7.725.160.000,00	100,00
4.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	1.754.240.000,00	1.754.240.000,00	100,00
4.2.3.01.12	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1.624.630.000,00	1.624.630.000,00	100,00
4.2.3.01.13	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	0,00	0,00	0,00
4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi	00,00	0,00	0,00
4.2.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman	3.647.730.000,00	3.647.730.000,00	100,00
4.2.3.01.17	Dana Alokasi Khusus P3K2 Bidang Infrastruktur Irigasi	2.833.600.000,00	2.833.600.000,00	100,00
4.2.3.01.18	Dana Alokasi Khusus P3K2 Bidang Pertanian	22.073.000.000,00	22.073.000.000,00	100,00
4.2.3.01.19	Dana Alokasi Khusus P3K2 Bidang Perdagangan Sub Bidang Pasar	1.966.300.000,00	1.966.300.000,00	100,00
4.2.3.01.20	Dana Alokasi Khusus Tambahan Daerah yang disetujui DPR RI	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (2) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus; (3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp561.179.001.864,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp532.352.403.738,00 atau mencapai 94,86%,

Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.10
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015

(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	561.179.001.864,00	532.352.403.738,00	94,86
4.3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	1.246.785.000,00	780.671.260,00	62,61
4.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	198.671.764.496,00	169.826.577.478,00	85,48
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	343.021.976.000,00	343.523.352.000,00	100,15
4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	18.221.653.000,00	18.221.653.000,00	100,00

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Pendapatan Hibah dari Pemerintah dengan target sebesar Rp1.246.785.000,00 terealisasi sebesar Rp780.671.260,00 atau 62,61%.

2) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; (2) Dana Bagi Hasil Pajak Bukan dari Provinsi.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan target sebesar Rp198.688.587.864,00 terealisasi sebesar Rp169.826.577.478,00 atau 85,47%.

Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.11
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015

(Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	198.688.587.864,00	169.826.577.478,00	85,47
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	198.671.764.496,00	169.826.577.478,00	85,48
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	51.801.639.659,00	42.478.266.161,00	82,00
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	57.531.296.055,00	36.818.028.796,00	64,00
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	59.817.685.515,00	58.220.842.108,00	97,33
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	521.143.267,00	522.607.554,00	100,28
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	29.000.000.000,00	31.786.832.859,00	109,61

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.3.3.05	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dari Provinsi	16.823.368,00	0,00	0,00
4.3.3.05.01	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari RP3HH	0,00	0,00	0,00
4.3.3.05.03	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Tera	0,00	0,00	0,00
4.3.3.05.04	Sumbangan pihak ketiga dari pembelian kayu	16.823.368,00	0,00	0,00

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

3) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

Penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Tahun 2014 sebesar Rp343.021.976.000,00 terealisasi sebesar Rp343.523.352.000,00 atau 100,15%. Adapun perincian dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.12
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015
 (Sebelum dilakukan audit BPK)

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		%
		TARGET	REALISASI	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	343.021.976.000,00	343.523.352.000,00	100,15
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	343.021.976.000,00	343.523.352.000,00	100,15
4.3.4.01.15	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS	0,00	0,00	0,00
4.3.4.01.18	Dana Bantuan Pemerintah/Presiden	0,00	0,00	0,00
4.3.4.04	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
4.3.4.04.01	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
4.3.4.05	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	0,00	0,00	0,00
4.3.4.05.01	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	0,00	0,00	0,00

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun 2015 sebesar Rp18.221.653.000,00 terealisasi sebesar Rp18.221.653.000,00 atau 100%.

3. Permasalahan dan Solusi

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2015 secara keseluruhan sebesar 93,72 %. Permasalahan tersebut disebabkan komponen pendapatan daerah dari dana perimbangan, khususnya bagi hasil pajak/ bukan pajak dari pemerintah serta dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya dari Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Disamping itu masih ada beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum sesuai dengan yang direncanakan.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

1. Dengan melihat bahwa komponen dana perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah kewenangan pemerintah dan provinsi, maka dalam hal menetapkan rencana pendapatan diperlukan koordinasi intensif sehingga realisasi dari dana perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah akan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dapat mencapai target, diperlukan upaya perhitungan rasional berdasarkan data dasar jenis pendapatan secara rasional sesuai dengan kondisi terkini. Hal tersebut dipakai sebagai dasar penentuan rencana pendapatan, sehingga dalam pelaksanaan optimalisasi pendapatan akan sesuai dengan perkembangan terkini atas setiap jenis pendapatan.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gresik, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-



“Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang

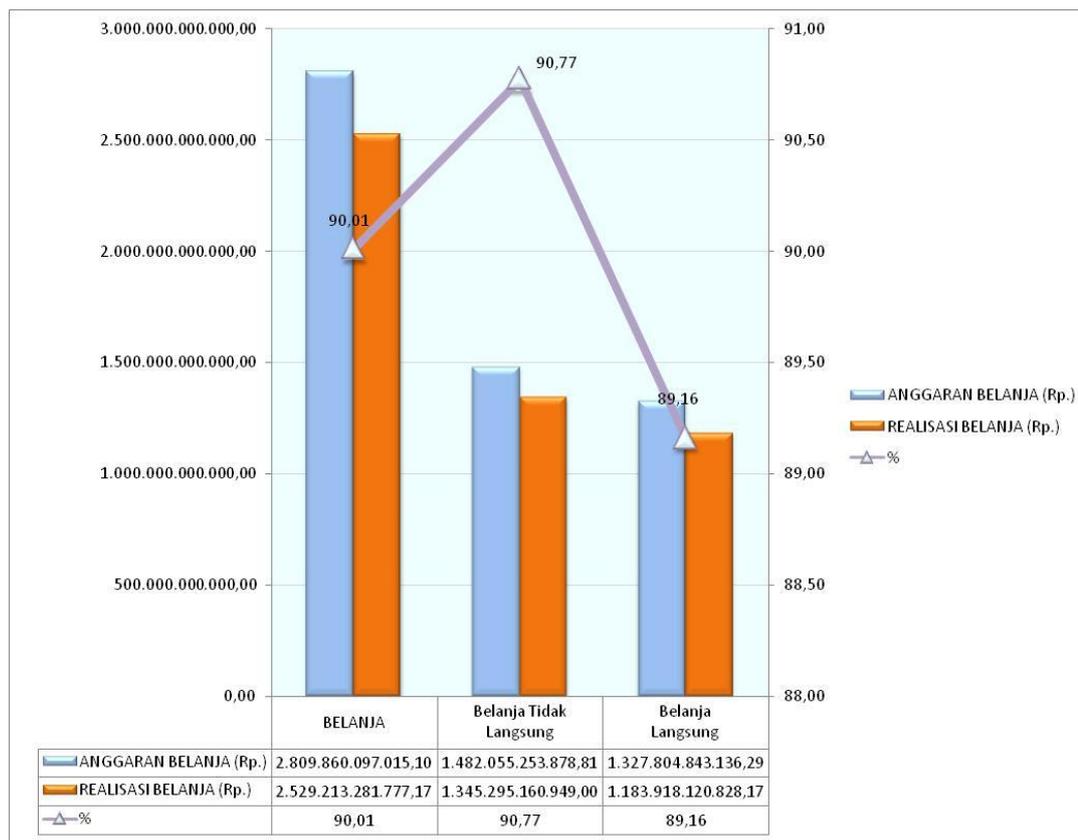
undangan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: (1) BELANJA TIDAK LANGSUNG, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) BELANJA LANGSUNG merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp2.809.860.097.015,10 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.529.213.281.777,17 atau mencapai 90,01%, yang rinciannya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.13
Grafik Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2015
 (Sebelum dilakukan audit BPK)



Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 90,77% dari realisasi belanja Kabupaten Gresik di Tahun 2015 dan sisanya sebesar 89,16% merupakan kontribusi dari belanja langsung.

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun anggaran 2015, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan jenis belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp1.482.055.253.878,81 dan dapat direalisasikan sebesar

Rp1.345.295.160.949,00 atau 90,77%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel III.14
Perincian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gresik
Tahun anggaran 2015
 (Sebelum dilakukan audit BPK)

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.482.055.253.878,81	1.345.295.160.949,00	90,77
2.1.1	Belanja Pegawai	937.030.419.465,11	833.852.461.490,00	88,99
2.1.2	Belanja Bunga	0	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	146.330.724.300,00	143.469.355.300,00	98,04
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.854.700.000,00	21.310.480.000,00	97,51
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	68.001.331.582,00	40.088.838.578,00	58,95
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	306.838.078.531,70	306.232.981.581,00	99,80
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	341.044.000,00	17,05

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 937.030.419.465,11 dan direalisasikan sebesar Rp833.852.461.490,00 atau 88,99%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik.

2 Belanja Bunga

Belanja Bunga Tahun 2015 nihil.

3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun 2015 nihil.

4 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp146.330.724.300,00 dan direalisasikan sebesar Rp143.469.355.300,00 atau 98,04%. Belanja ini diberikan pada lembaga, kelompok lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp21.854.700.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp21.310.480.000,00 atau 97,51%.

6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp68.001.331.582,00 dan direalisasikan sebesar Rp40.088.838.578,00 atau 58,95%.

7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp306.838.078.531,70 dan direalisasikan sebesar Rp306.232.981.581,00 atau 99,80%. Belanja bantuan ini diberikan kepada desa dan partai politik.

8 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp341.044.000,00 atau 17,05%.

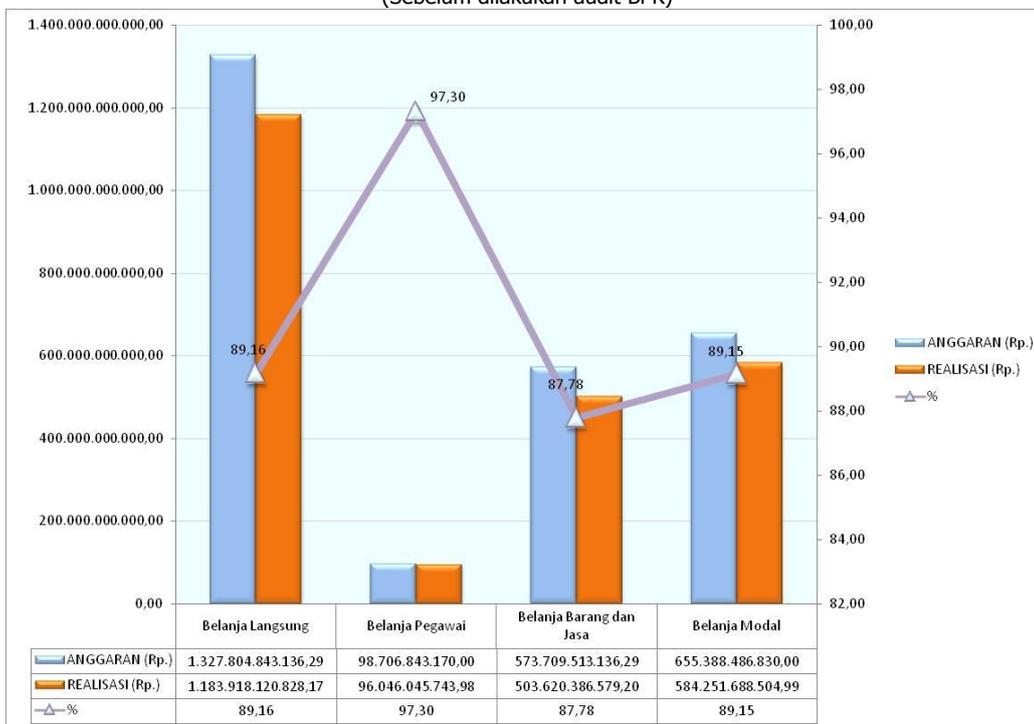
b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan jenis belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja langsung pada Tahun

2015 dianggarkan sebesar Rp1.327.804.843.136,29 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.183.918.120.828,17 atau 89,16%.

Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.15
Grafik Perincian Belanja Langsung
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015
 (Sebelum dilakukan audit BPK)



Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

2. Permasalahan dan Solusi

Penyerapan anggaran belanja di Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 cukup baik dengan indikator penyerapan secara keseluruhan mencapai 90,01%, tidak terealisasi sebesar 9,99% karena adanya efisiensi, sisa lelang, atau alasan lainnya.

Secara umum, kinerja pemerintah dapat berjalan dengan baik, program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun apabila dicermati, dalam melaksanakan program dan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Hal tersebut menyebabkan penyerapan anggaran dilakukan pada triwulan IV atau menjelang berakhirnya tahun anggaran. Oleh karena itu diharapkan setiap SKPD dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun sehingga penyerapan anggaran tidak terakumulasi pada akhir tahun anggaran, serta meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi.

C. Rencana dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk



“Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus / (defisit) anggaran ”

mengantisipasi surplus/defisit anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta menjadi kredibilitas pemerintah daerah.

Penganggaran komponen pembiayaan diarahkan untuk menutupi beban hutang Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah jatuh tempo pada Tahun anggaran 2015 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pemerintah pada Tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah disertai dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan.

Optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyeimbangkan antara Pos Penerimaan dan Pos Pengeluaran Daerah pada komponen pembiayaan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya, pencairan dan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,

penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan dalam Tahun anggaran 2015, dianggarkan sebesar Rp210.456.476.225,69 dan telah direalisasikan sebesar Rp210.479.173.125,69 atau 100,01%, dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.16
Komposisi Pembiayaan
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015
(Sebelum dilakukan audit BPK)

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	210.456.476.225,69	210.479.173.125,69	100,01
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	210.456.476.225,69	210.479.173.125,69	100,01

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Adapun perincian anggaran dan realisasi masing-masing bagian komponen pembiayaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Besarnya Penerimaan Daerah dalam pembiayaan dianggarkan sebesar Rp210.456.476.225,69 dan dapat direalisasikan sebesar Rp210.479.173.125,69 atau 100,01%, Jumlah penerimaan daerah dalam pembiayaan ini, bersumber dari (1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) (2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.17
Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2015
 (Sebelum dilakukan audit BPK)

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	210.456.476.225,69	210.479.173.125,69	100,01
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	22.696.900,00	22.696.900,00	100,00

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Dengan demikian dalam APBD 2015, SILPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD di Tahun 2014. Terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan dari SILPA sebesar Rp117.431.530.439,16.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan tahun 2015 nihil.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemandirian Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan umum merupakan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan desentralisasi. Sejalan dengan azas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015 ini, penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengelompokkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Substansi LKPJ akhir tahun anggaran 2015 menyajikan secara rinci penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan mencakup program dan kegiatan; realisasi program dan kegiatan; permasalahan dan solusi serta capaian indikator RPJMD.

Adapun penilaian capaian indikator kinerja RPJM tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sedangkan formulasi dan skala nilai peringkat kinerja dirumuskan sebagai berikut:

Persentase Capaian Kinerja

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung persentase pencapaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})\}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja dapat ditetapkan peniaian realisasasi kinerja berdasarkan kriteria sesebagai berikut:

Tabel 4.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan kondisi tersebut maka penyajian laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagai berikut:

A. Urusan Wajib

Dalam rangka penyelenggaraan 26 urusan wajib dialokasikan anggaran sebesar Rp1.260.082.517.256,29 realisasi sebesar Rp1.120.984.803.672,18 tidak terserap sebesar Rp118.364.032.072,11. Adapun penyelenggaraan masing-masing urusan wajib adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Pada Tahun 2015 Urusan Pendidikan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 13 program terdiri 130 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp107.691.775.647,00 realisasi sebesar Rp101.283.642.181,00, tidak terserap Rp6.408.133.466,00 dengan rincian sebagai berikut:



2.1 Dinas Pendidikan melaksanakan 12 program terdiri 125 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp74.463.946.750,00, realisasi sebesar Rp71.512.994.181,00, tidak terserap Rp2.950.952.569,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp1.686.586.176,00
- 2) Sisa Lelang Rp1.252.316.393,00

2.2 Dinas Kesehatan melaksanakan 1 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.681.700.000,00, realisasi sebesar Rp1.473.627.132,00, tidak terserap Rp208.072.868,00, disebabkan efisiensi Rp208.072.868,00;

2.3 Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 4 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp31.221.156.397,00, realisasi sebesar Rp27.979.888.840,00, tidak terserap Rp3.241.267.557,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi	Rp23.514.997,00
2) Sisa Lelang	Rp1.821.961.300,00
3) Lelang Gagal	Rp107.721.200,00
4) Kegiatan Yang Belum Dibayar	Rp1.288.070.060,00

2.4 Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp299.972.500,00, realisasi sebesar Rp292.132.028,00, tidak terserap Rp7.840.472,00, disebabkan adanya efisiensi Rp7.840.472,00;

2.5 Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;

2.6 Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Terselenggaranya pelaksanaan Hari Anak Nasional;
- Terlaksananya sosialisasi pembinaan dan pendampingan proses penerimaan dana BOP kepada Kepala Sekolah sebanyak 1.357 orang;
- Terlaksananya lomba gugus untuk PAUD dan Sekolah Dasar;
- Terlaksananya sosialisasi peran orang tua terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 736 orang;
- Terlaksananya pengadaan meubelair sekolah untuk meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar;
- Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan siswa berprestasi serta penyusunan kurikulum;
- Terlaksananya penyaluran dana BOS untuk 425 lembaga;
- Terlaksananya Lomba Bina Kreatifitas Anak SD/SDLB sebanyak 90 siswa;
- Terwujudnya peningkatan kualitas atlet pelajar berprestasi POR di Tingkat Provinsi;

- Terlaksananya penyelenggaraan Ujian Nasional sesuai BSNP dan Permendiknas;
- Terwujudnya inovasi pembelajaran mata pelajaran;
- Terlaksananya pengelolaan dan analisis Bantuan Bea Siswa Miskin Sekolah Dasar bagi 480 orang;
- Terlaksananya pembelajaran SMP Negeri satu atap;
- Terlaksananya penerimaan peserta didik baru secara online sebanyak 11.110 siswa;
- Meningkatnya pelayanan dan pembimbingan pada siswa inklusi sebanyak 220 orang;
- Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah sebanyak 360 orang;
- Terlaksananya Ujian Nasional SMP/MTs dengan baik sebanyak 10.000 peserta;
- Terlaksana pelatihan kompetensi atlit siswa berprestasi di Tingkat Provinsi ;
- Meningkatnya manajemen guru olahraga sebanyak 115 guru olahraga;
- Terlaksananya *Try Out* ujian SD/SMP sebanyak 19.500 siswa dan *Try Out* Ujian Nasional SMA/MA/SMK Negeri/Swasta sebanyak 14.862 sehingga kualitas lulusan menjadi semakin baik;
- Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik untuk mengidentifikasi secara dini terhadap anak berkebutuhan khusus dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sebanyak 100 orang;
- Tersedianya meubelair sekolah untuk 4 lembaga;
- Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik untuk guru berprestasi, OSN guru, forum ilmiah guru sebanyak 100 peserta;
- Terlaksananya pelatihan kurikulum 2013 sebanyak 196 orang;
- Terselenggaranya Lomba Karya Cipta dan penelitian ilmiah pelajar;
- Meningkatnya jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata sebanyak 59 sekolah;
- Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandart Nasional Pendidikan Agama Islam untuk SMA/MA/SMK sebanyak 4.500 peserta;

- Meningkatnya kualitas moral siswa;
- Terlaksananya kegiatan Pekan Olahraga Pelajar;
- Terlaksananya pembinaan kompetensi tenaga perpustakaan dan tenaga laboratorium sebanyak 153 orang;
- Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi warga Gresik kurang mampu yang memiliki potensi akademik memadai;
- Meningkatnya kemampuan manajemen bagi pengelola dan lembaga kursus;
- Tercapainya partisipasi dalam kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI);
- Meningkatnya kepedulian masyarakat tentang pendidikan dan tersusunnya rencana aksi PUG di Bidang Pendidikan;
- Tercapainya Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun;
- Meningkatnya kemampuan pembelajaran bagi tutor kesetaraan (program paket A, paket B dan paket C);
- Terpilihnya siswa SLB yang berprestasi dalam 8 jenis lomba untuk berkompetisi di Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Terwujudnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik;
- Terlaksananya Kelompok Kerja Guru sehingga kinerja guru meningkat;
- Tersusunnya data pokok pendidikan yang terpilah, valid, dan up to date;
- Terpilihnya siswa calon peserta lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Lomba Kreativitas Siswa (LKS) Tingkat Provinsi;
- Meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran bagi tenaga pengajar;
- Terselenggaranya Lomba Olimpiade Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan media pembelajaran yang atraktif berbasis TI dan berkompetisi dalam Olimpiade TIK Jawa Timur;
- Terwujudnya kompetensi tenaga pendidik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Tersedianya profil pendidikan yang lengkap dan akurat;
- Terwujudnya peningkatan validasi verifikasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- Tersalurkanya bantuan dana hibah daerah untuk rehabilitasi sekolah swasta sesuai sasaran;

- Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah dan sarana peningkatan mutu pendidikan untuk SD sebanyak 444 lembaga, SMP sebanyak 26 lembaga dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta pengadaan alat laboratorium olahraga untuk SMA dan SMK;
- Tersalurkannya bantuan keuangan Bidang Pendidikan dari provinsi.
- Terselenggaranya proses belajar mengajar bagi mahasiswa akademi keperawatan sebanyak 354 mahasiswa;
- Tersedianya literatur bagi mahasiswa akademi keperawatan sebanyak 221 buku;
- Terlaksananya penelitian, kegiatan PHBI dan pemberian reward mahasiswa akademi keperawatan terbaik;
- Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak sebanyak 4 lembaga dan SDN Negeri sebanyak 27 lembaga;
- Terlaksananya pembangunan gedung dan pagar sekolah SMA/SMK sebanyak 6 lembaga, gedung SDN Betiting Cerme Tahap III dan pembangunan ruang komputer, aula, kantin serta perpustakaan SDN 2 Sidokumpul;
- Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah sebanyak 2 lembaga;
- Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah pada 90 lembaga dari Pengelolaan Dana Insentif Daerah Bidang Pendidikan;
- Terlaksananya Rakerda UKS.

Adapun permasalahan pada Urusan Pendidikan adalah :

1. Pembangunan ruang perpustakaan SDN Sooko Kecamatan Wringinanom tidak dilaksanakan karena ketersediaan lahan tidak memenuhi syarat;
2. Dana rehabilitasi tidak jadi diberikan kepada 3 lembaga Sekolah Menengah Atas Swasta karena ada arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan bahwa dana rehabilitasi tersebut harus dimasukkan dalam Belanja Hibah, sedangkan petunjuk teknis DAK dana tersebut masuk dalam Belanja Langsung.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

1. Anggaran pembangunan ruang perpustakaan SDN Sooko Kecamatan Wringinanom dianggarkan kembali pada tahun 2016;
2. Dana rehabilitasi yang dibiayai dana DAK akan dimasukkan ke dalam Belanja Hibah.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pendidikan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			SANGAT TINGGI
	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Siswa	41488	
	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Siswa	38.856	
	a. Target	%	93,50	
	b. Realisasi	%	106,77	
	Capaian (b : a) X 100%	%	114,20	
2	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek Huruf (tidak buta aksara)			SANGAT TINGGI
	Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis	Orang	847.055	
	Penduduk usia 15 tahun ke atas	Orang	847.055	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			SANGAT TINGGI
	Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	116.288	
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Siswa	117.628	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	98,86	
	Capaian (b : a) X 100%	%	98,86	
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B			SANGAT TINGGI
	Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	Siswa	51.365	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Siswa	59.980	
	a. Target	%	77,60	
	b. Realisasi	%	85,64	
	Capaian (b : a) X 100%	%	110,36	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C			
	Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C	Siswa	39.585	
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	Siswa	53.321	TINGGI
	a. Target	%	92,90	
	b. Realisasi	%	74,24	
	Capaian (b : a) X 100%	%	79,91	
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI			
	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI	Siswa	30	
	Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI	Siswa	127.206	TINGGI
	a. Target	%	0,02	
	b. Realisasi	%	0,02	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	82,08	
	a			
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs			
	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs	Siswa	19	
	Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs	Siswa	56.602	TINGGI
	a. Target	%	0,03	
	b. Realisasi	%	0,03	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	88.11	
	a			
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA			
	Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	23	
	Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	45.423	SANGAT TINGGI
	a. Target	%	0,100	
	b. Realisasi	%	0,05	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	149,36	
	a			

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI			SANGAT TINGGI
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Siswa	20.743	
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	20.743	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs			SANGAT TINGGI
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Siswa	16.403	
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	16.403	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA			SANGAT TINGGI
	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	13.907	
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	13.907	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs			SANGAT TINGGI
	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Siswa	20.111	
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	Siswa	20.743	
	a. Target	%	99,90	
	b. Realisasi	%	96,95	
	Capaian (b : a) X 100%	%	97,05	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA			SANGAT TINGGI
	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	16.188	
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	Siswa	16.019	
	a. Target	%	99,90	
	b. Realisasi	%	101,05	
	Capaian (b : a) X 100%	%	101,16	
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV			SANGAT TINGGI
	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV	Guru	19.364	
	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Guru	19.780	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	97,90	
	Capaian (b : a) X 100%	%	97,90	

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2016

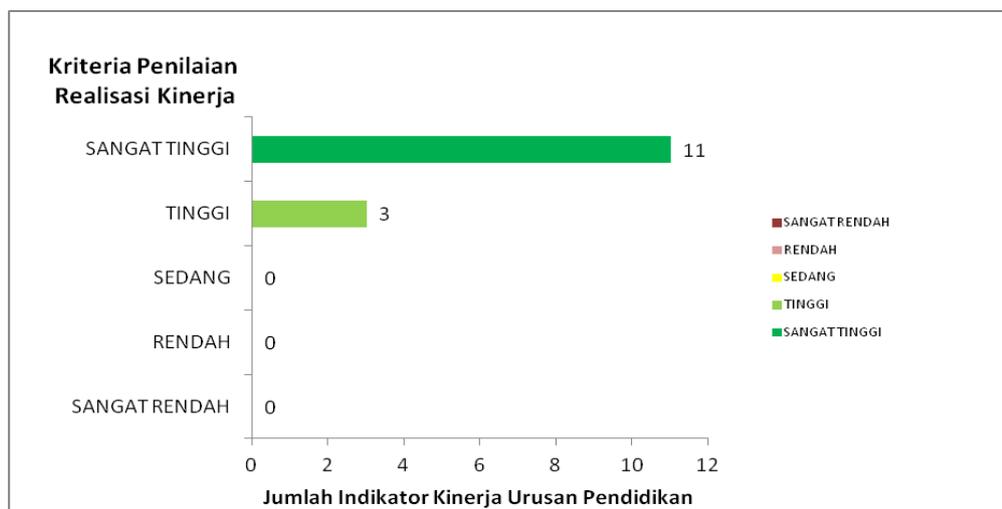
Keterangan Kriteria Penilaian :

angat Tinggi (ST)	: $91\% \leq 100\%$
Tinggi (T)	: $76\% \leq 90\%$
Sedang (SDG)	: $66\% \leq 75\%$
Rendah (R)	: $51\% \leq 65\%$
Sangat Rendah (SR)	: $\leq 50\%$

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pendidikan diketahui bahwa dari 14 indikator kinerja terdapat 11 indikator yang bernilai sangat tinggi, 3 indikator bernilai tinggi

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Pendidikan Kabupaten Gresik



Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2016

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Pendidikan adalah:

1. Juara I Sumo Autonomous An. Bryan Tito Oktavianto dari SMAN 1 GESIK Tingkat Internasional;
2. Lomba APICTA (Asia Pacific ICT Alliance) Award di Kolombo, Srilangka An. Moh. Ardika Rifqi, Al Dinar AbnarMuh. Arif dari SMAN 1 GRESIK Tingkat Internasional;
3. International Islamic School Robot Olympiad An. Moh. Ardika Rifqi Muh Heaven N Handoko dari SMP MUH 12 GKB Tingkat Internasional;
4. IMSO MATHEMATICS An. Dzubyman Ilman ramadhan dari SD IT Al Ibrah Manyar Tingkat Internasional;
5. IJSO Biologi di Korea An. Renanthera Rahmadwiningtyas dari SMPN 1 Bungah Tingkat Internasional;
6. Grandprice Platinum Word Creatyvity Festifal di Daejoen Korea Selatan An. Errizzha Arrifqi Hidayat dari SDN 2 Sidokumpul Gresik Tingkat Internasional;

7. The 16th International Robot Olympiad Competition In Singapura and Beijing China An. Aldion Harlistya Putra dan Calvin Janita Bastama dari SMAN 1 Manyar Tingkat Internasional;
8. IMSO Biologi SMP seleksi Internasional di Argentina An. Nurul Ainun Nuha dari SMP Muhammadiyah 12 GKB Tingkat Internasional.

2. Urusan Kesehatan

Pada Tahun 2015 Urusan Kesehatan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA dan Dinas Pekerjaan Umum.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 20 program terdiri 138 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp313.163.037.247,00, realisasi sebesar Rp278.234.676.960,17, tidak terserap sebesar Rp34.928.360.286,83, dengan rincian sebagai berikut:



2.1. Dinas Kesehatan melaksanakan 19 program terdiri 132 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp114.175.274.760,00, realisasi sebesar Rp85.608.858.159,99, tidak terserap Rp28.566.416.600,01, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp24.871.850.997,00
- 2) Sisa Lelang Rp1.729.147.128,00
- 3) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Rp1.965.418.475,00

2.2 Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp168.228.262.487,00, realisasi sebesar Rp164.452.783.100,18, tidak terserap Rp3.775.479.386,82, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp1.026.102.735,82,00
- 2) Sisa Lelang Rp1.964.376.651,00

2.3 Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 1 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.759.500.000,00, realisasi sebesar Rp28.173.035.700,00, tidak terserap Rp2.586.464.300,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi	Rp57.286.000,00
2) Sisa Lelang	Rp2.429.538.300,00
3) Kegiatan Yang Belum Dibayar	Rp99.640.000,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terpenuhinya obat-obatan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan;
- Terlaksananya pendistribusian obat ke 32 Puskesmas;
- Terlaksananya pelayanan kefarmasian sesuai standar pada sarana kesehatan sebanyak 91 sarana kesehatan;
- Terlaksananya pengawasan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan sebanyak pada 40 sarana usaha obat tradisional;
- Tersedianya peralatan kesehatan/kedokteran di Rumah Sakit Umar Mas'ud Bawean;
- Tersedianya fasilitas perbekalan kesehatan, reagen laboratorium dasar, reagen alat canggih, dan reagen kimia klinik;
- Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan pelayanan kesehatan khusus di Puskesmas dan jaringannya;
- Terlaksananya kegiatan puskesmas keliling dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan;
- Terlaksananya pengawasan sarana sanitasi dasar dan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan;
- Tersusunnya laporan evaluasi anggaran kesehatan Puskesmas;
- Terlaksananya pelayanan kesehatan Ibu, Anak, remaja dan KB;
- Terlaksananya rapat perencanaan akreditasi, bimbingan akreditasi, dan pemeliharaan alat laboratorium pada UPT. Laboratorium;
- Terlaksananya pemeriksaan laboratorium makanan kantin serta pengawasan dan pembinaan kantin sekolah;
- Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat di 32 puskesmas;

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat pada 30 sekolah;
- Tercapainya peningkatan kualitas Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam pengembangan Desa Siaga pada 32 puskesmas;
- Tersedianya data dan Peta Status Gizi Balita sebanyak 68.000 balita;
- Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk, gizi kurang, dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK);
- Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Zat Gizi Mikro lainnya;
- Terlaksananya pembinaan penyehatan lingkungan rumah sakit, petugas klinik sanitasi Puskesmas dan pengelola Tempat-Tempat Umum (TTU) serta validasi data kesehatan keliling;
- Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan di Puskesmas di 32 puskesmas;
- Terlaksananya sosialisasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tentang Desa Open Defecation Free (ODF) atau terbebas dari buang air besar sembarangan, pelatihan monitoring STBM berbasis website dan sms dan sosialisasi program Gresik Kabupaten Sehat;
- Terlaksananya penyemprotan sarang nyamuk untuk membatasi penularan DBD;
- Terlaksananya pelayanan pencegahan penanggulangan penyakit menular;
- Terlaksananya imunisasi bayi dan anak sekolah;
- Terlaksananya monitoring program surveilans serta tersusunnya laporan epidemiologi penyakit menular dan tidak menular;
- Terlaksananya evaluasi evaluasi SPM, MDGs dan Lokakarya *Distric Health Account*;

- Terlaksananya pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan dan penyusunan profil kesehatan;
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pemeliharaan Puskesmas *International Standar Operation (ISO)*;
- Terpeliharanya alat kesehatan/alat kedokteran di Puskesmas dan alat laboratorium;
- Terlaksananya pembangunan Rumah Sakit di Pulau Bawean;
- Tersedianya perlengkapan dan peralatan dapur gizi di Puskesmas;
- Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan masyarakat;
- Terlayannya pasien Jamkesda JKN di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya pelayanan perizinan bidang kesehatan;
- Terselenggaranya sosialisasi Puskesmas Santun Lansia dan Posyandu Lansia;
- Terlaksananya pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri;
- Terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan terhadap kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga;
- Pelayanan Kesehatan Ibu, Balita dan KB sesuai Standar di 32 Puskesmas;
- Terlaksananya sosialisasi Perda No.4 Tahun 2015 dan Perbup No.40 Tahun 2015 kepada 2.800 orang;
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- Tersedianya tenaga kesehatan di desa, tenaga kesehatan untuk pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap plus dan rawat inap standar;
- Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas se-Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya pembangunan Gedung Ponek Tahap II dan Ruang Kelas III;
- Pembelian alat kesehatan paru dan jantung untuk Rumah Sakit;

- Terbangunnya Puskesmas Manyar, Panceng, Mentaras, Bungah dan pembangunan paving Puskesmas Dapet Balongpanggang serta pembangunan paving Puskesmas Kesamben Kulon;
- Terlaksananya pembangunan 10 puskesmas pembantu yaitu pembangunan Pustu Gedangan Sidayu, Pustu Tirem Enggal Dukun, Pustu Padeg Cerme, Pustu Tambak Rejo Duduk Sampeyan, Pustu Randegansari Driyorejo, Pustu Brangkal Balongpanggang, Pustu Pelem Watu Menganti, Pustu Beton Menganti, Pustu Lebak Sangkapura dan Pustu Jati Dawang Tambak;
- Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi 10 Polindes/Poskesdes yaitu Pembangunan Pokesdes Sekarkurung Kebomas, Pokesdes Kedungrukem Benjeng, Pokesdes Pucung Balongpanggang, Pokesdes Bolo Ujungpangkah, Pokesdes Mojopetung Dukun, Ponkesdes Katimoho Kedamean, Pokesdes Sidoraharjo Kedamean, Pokesdes Pedagangan Wringinanom, Pokesdes Tanjung Ori Tambak, Pokesdes Patar Selamat Sangkapura.

Adapun permasalahan pada Urusan Kesehatan adalah:

1. Usulan Jadwal survey pada Komisi Akreditasi Tingkat Provinsi untuk 11 Puskesmas, hanya 7 Puskesmas yang mendapatkan jadwal survey karena keterbatasan jumlah surveyor;
2. Logistik untuk kegiatan sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus Untuk Merokok (DBHCHT) baru selesai di bulan Nopember 2016 karena Peraturan Daerah baru ditetapkan di Bulan Mei 2015 dan Peraturan Bupati tindak lanjutnya ditetapkan di bulan September 2015;
3. Dokter umum sudah menjadi PNS sehingga honor tidak dapat diserap.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

1. Dianggarkan dan diusulkan untuk disurvei di tahun 2016;
2. Dianggarkan di tahun 2016;
3. Mengalihkan anggaran honor dokter untuk kegiatan lain sesuai juknis di tahun 2016.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kesehatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1.	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 sesuai standar oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Ibu Hamil	20.036	SANGAT TINGGI
	Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Ibu Hamil	22.834	
	a. Target	%	95,00	
	b. Realisasi	%	87,75	
	Capaian (b : a) X 100%	%	92,36	
2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Komplikasi	4.405	SANGAT TINGGI
	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Komplikasi	4.567	
	a. Target	%	80,00	
	b. Realisasi	%	96,45	
	Capaian (b : a) X 100%	%	120,57	
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	20.128	SANGAT TINGGI
	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	21.796	
	a. Target	%	95,00	
	b. Realisasi	%	92,35	
	Capaian (b : a) X 100%	%	97,21	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
4	Cakupan pelayanan nifas Jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	19.756	SANGAT TINGGI
	Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	21.796	
	a. Target	%	95,00	
	b. Realisasi	%	90,64	
	Capaian (b : a) X 100%	%	95,41	
5	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Neonatus	2.537	SANGAT TINGGI
	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Neonatus	3.114	
	a. Target	%	80,00	
	b. Realisasi	%	81,47	
	Capaian (b : a) X 100%	%	101,84	
6	Cakupan pelayanan anak balita Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Bayi	67.894	TINGGI
	Jumlah seluruh sasaran bayi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Bayi	83.690	
	a. Target	%	90,00	
	b. Realisasi	%	81,13	
	Capaian (b : a) X 100%	%	90,14	
7	Cakupan kunjungan bayi Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Bayi	20.173	SANGAT TINGGI
	Jumlah seluruh sasaran bayi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Bayi	20.264	
	a. Target	%	90,00	
	b. Realisasi	%	99,55	
	Capaian (b : a) X 100%	%	110,61	
8	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah Desa / Kelurahan UCI	Desa	290	TINGGI
	Jumlah seluruh Desa / Kelurahan	Desa	356	
	a. Target	%	100,00	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
	b. Realisasi	%	81,46	
	Capaian (b : a) X 100%	%	81,46	
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+) Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun	Orang	797	SANGAT TINGGI
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Orang	1.344	
	a. Target	%	80,00	
	b. Realisasi	%	59,30	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$	%	125,87	
	a			
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun	Orang	572	SANGAT TINGGI
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	Orang	572	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	
11	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1	Orang	289.010	SEDANG
	Jumlah seluruh miskin di Kabupaten	Orang	441.851	
	a. Target	%	50,00	
	b. Realisasi	%	65,41	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$	%	69,18	
	a			
12	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita	137	SANGAT TINGGI
	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	Balita	137	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	
13	Cakupan balita yang mendapat vitamin A Jumlah balita 6-59 bulan yang mendapat vitamin A di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita	98.756	SANGAT TINGGI
	Jumlah seluruh balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita	103.958	
	a. Target	%	90,00	
	b. Realisasi	%	95,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	105,55	
14	Persentase Rumah Sehat Rumah yang memenuhi syarat kesehatan	Buah	232.928	SANGAT TINGGI
	Jumlah rumah yang ada	Buah	272.348	
	a. Target	%	86,00	
	b. Realisasi	%	85,53	
	Capaian (b : a) X 100%	%	99,45	
15	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan Jumlah item obat yang ketersediaannya >=100%	Buah	268,00	TINGGI
	Jumlah total item obat yang ada	Buah	310,00	
	a. Target	%	98,46	
	b. Realisasi	%	86,45	
	Capaian (b : a) X 100%	%	87,80	
16	Pengadaan obat esensial Jumlah item obat esensial yang dapat disediakan	Buah	257	SANGAT TINGGI
	Jumlah item obat esensial yang dibutuhkan	Buah	282	
	a. Target	%	99,19	
	b. Realisasi	%	91,13	
	Capaian (b : a) X 100%	%	91,88	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
17	Pengadaan obat generik			SANGAT TINGGI
	Jumlah item obat generik yang dapat disediakan	Buah	196	
	Jumlah item obat generik yang dibutuhkan	Buah	217	
	a. Target	%	99,55	
	b. Realisasi	%	90,32	
	Capaian (b : a) X 100%	%	90,73	
18	Cakupan rawat jalan			SEDANG
	Jumlah kunjungan pasien baru dan lama dilayani kesehatan	Orang	885.302	
	Jumlah penduduk Kabupaten	Orang	1.303.773	
	a. Target	%	51,00	
	b. Realisasi	%	67,90	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	66,86	
19	Cakupan rawat inap			SANGAT TINGGI
	Jumlah pasien rawat inap	Orang	11.324	
	Jumlah penduduk Kabupaten	Orang	1.303.773	
	a. Target	%	1,50	
	b. Realisasi	%	0,87	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a}$	%	142,10	
20	Cakupan Rumah Tangga Sehat			SANGAT TINGGI
	Jumlah rumah tangga sehat	RT	40.724,00	
	Jumlah rumah tangga yang dikaji	RT	57.846,00	
	a. Target	%	75,00	
	b. Realisasi	%	70,40	
	Capaian (b : a) X 100%	%	93,87	
21	Posyandu Purnama			SANGAT TINGGI
	Jumlah Posyandu Purnama	Unit	1.329	
	Jumlah Posyandu yang ada	Unit	1.487	
	a. Target	%	80,00	
	b. Realisasi	%	89,37	

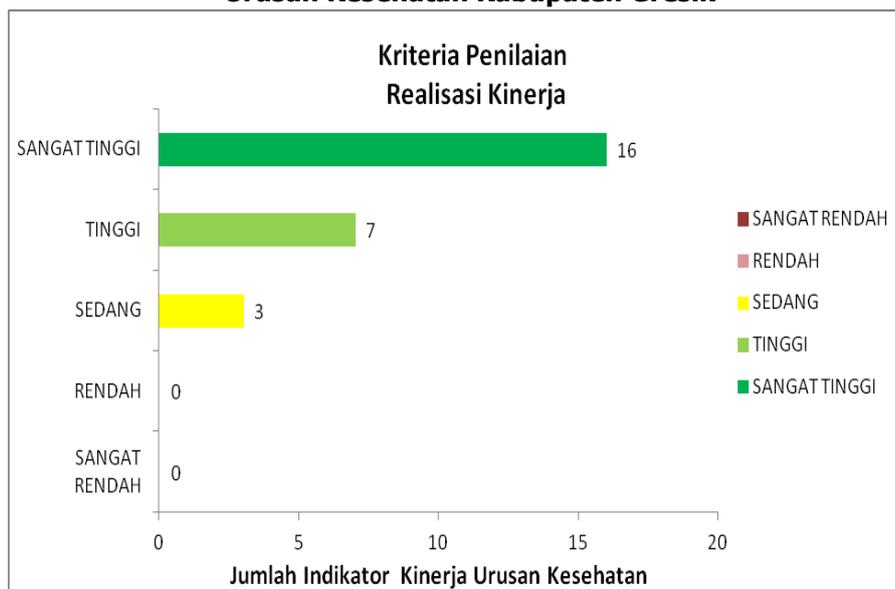
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
	Capaian (b : a) X 100%	%	111,72	
RSUD IBNU SINA				
22	Pelayanan pasien Jamkesmas dan Jamkesmasda Jumlah Pasien yang dilayani melalui Jamkesmas dan Jamkesda	Orang	30.467	TINGGI
	Jumlah seluruh peserta Jamkesmas dan Jamkesda	Orang	441.851	
	a. Target	%	6,00	
	b. Realisasi	%	6,90	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	85,08	
23	Bed Occupancy Rate Jumlah hari perawatan	Hari	66.162	SANGAT TINGGI
	Jumlah TT x hari perawatan	Hari	87.235	
	a. Target	%	71,03	
	b. Realisasi	%	75,84	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	93,22	
24	Average Length Of Stay Jumlah lama dirawat	Hari	65.446	SANGAT TINGGI
	Jumlah pasien keluar hidup + mati	Hari	16.290	
	a. Target	%	4,00	
	b. Realisasi	%	4,02	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	99,56	
25	Turn Over Internal (Jumlah TT x 365) - hari perawatan	Hari	21.789	TINGGI
	Jumlah seluruh pasien keluar hidup + mati	Hari	16.290	
	a. Target	%	1,10	
	b. Realisasi	%	1,34	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	78,40	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
26	Bed Turn Over			SEDANG
	Jumlah pasien keluar hidup + mati	Kali	16.290	
	Tempat tidur	Kali	248	
	a. Target	%	49,38	
	b. Realisasi	%	65,69	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	66,98	

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kesehatan diketahui bahwa dari 26 indikator kinerja terdapat 16 indikator yang bernilai sangat tinggi, 7 indikator bernilai tinggi, 3 indikator bernilai sedang

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Kesehatan Kabupaten Gresik



Prestasi yang diperoleh pada Urusan Kesehatan antara lain:

- Juara I Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Tingkat Nasional;
- Piala Presiden "Swasti Saba Padapa" Tingkat Nasional;

- Piala presiden "Manggala Karya Bhakti" Tingkat Nasional;
- Lulus kembali sertifikasi ISO 9001:2008 dari (*World Quality Assurance*) WQA pada Tahun 2014 Tingkat Nasional;
- Lulus Akreditasi Rumah Sakit 16 Pelayanan Tingkat Nasional
- IDSA (Indonesia Digital Society Award) Bidang kesehatan Tingkat Nasional;
- Juara harapan II Putri Lomba Dokter Kecil Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara III Lomba Baca puisi SD/MI pada Jambore Provinsi Jawa Timur;
- Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat SMP pada Jambore Provinsi Jawa Timur;
- Juara III Lomba Cerdas Cermat (LCC) pada Jambore Provinsi Jawa Timur;
- Juara Harapan II Lomba Kader Kesehatan Remaja putra tingkat SMP pada Jambore Provinsi Jawa Timur;
- Juara Harapan II Lomba Kader Tiwisada putra pada Jambore Provinsi Jawa Timur.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Pada Tahun 2015 Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 20 program terdiri 83 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp506.818.906.876,00, realisasi sebesar Rp450.499.511.739,00, tidak terserap Rp56.319.395.137,00, dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Efisiensi Rp2.398.956.786,00;
- 2) Sisa Lelang Rp39.007.846.061,00;
- 3) Lelang Gagal Rp1.300.000.000,00;
- 4) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Rp4.450.000.000,00;
- 5) Kegiatan Yang Belum Dibayar Rp9.162.592.290,00;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya Sarana Transportasi Jalan yang memadai pada 50 Ruas Jalan;
- Terlaksananya pembangunan jembatan sebanyak 18 jembatan;
- Tersedianya Perencanaan (DED) saluran drainase/gorong-gorong;
- Tersedianya Sarana dan prasarana drainase pada 74 Lokasi di 3 Kecamatan;
- Terlaksananya pengendalian dan pemantauan pembangunan saluran drainase;
- Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Kabupaten sebanyak 131 kegiatan di 18 kecamatan;
- Terlaksananya Peningkatan/pemeliharaan Infrastruktur jalan (Bantuan Keuangan Provinsi);
- Tersedianya dokumen kondisi jalan kabupaten;

- Tersedianya kendaraan operasional penunjang sarana dan prasarana kebinamargaan sebanyak 4 unit;
- Tersedianya Alat Laboratorium kebinamargaan;
- Tersedianya Data Test Laboratorium jalan dan jembatan untuk kegiatan proyek di 100 lokasi;
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat sebanyak 14 unit;
- Terlaksananya pemasangan dan perawatan PJU sebanyak 57 PJU di 16 Kecamatan;
- Terawatnya lampu penerangan jalan umum di 16 kecamatan;
- Tertatanya perijinan dan penggunaan kekayaan daerah sebanyak 5 macam perijinan;
- Tersedianya komponen jalan yang memadai di ruas jalan kabupaten;
- Terlaksananya pembangunan pintu air dan jaringannya di 5 kecamatan;
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi sebanyak 19 bangunan saluran irigasi di 12 kecamatan;
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan Pintu Air Waduk Tumapel, waduk Sekarkurung, Waduk Sidoraharjo, Waduk Katimoho, dan Waduk Nanom);
- Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi yang terbangun di 18 Jaringan;
- Terlaksananya evaluasi pengajuan ijin pemanfaatan tanah pengairan sebanyak 168 ijin;
- Terlaksananya pengamanan antara batas tanah waduk dan tanah warga sebanyak 14 lokasi di 6 Kecamatan;
- Tersedianya sajian informasi berupa papan irigasi di 2kecamatan;
- Terlaksananya pembinaan petugas dan anggota Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di bidang sumber daya air sebanyak 38 anggota HIPPA;
- Terlaksananya rehabilitasi waduk di 3 kecamatan sebanyak 5 waduk;
- Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya pada sebanyak 13 waduk;
- Terlaksananya rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau sebanyak 28 waduk di 6 kecamatan;

- Tersedianya infrastruktur pengolahan air limbah yang memadai di Randuagung, Karangkring dan Dahanrejo;
- Terlaksananya fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah;
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah;
- Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pembinaan program sanitasi berbasis masyarakat;
- Tersedianya sarana dan prasarana air bersih di 4 Kecamatan;
- Terlaksananya peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali di 34 Saluran Pembuang;
- Terlaksananya pembangunan/peningkatan infrastruktur sebanyak 9 lokasi;
- Terlaksananya revitalisasi kawasan religius di 3 lokasi;
- Terlaksananya pembangunan Stadion Olah Raga di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan perdesaan di 17 lokasi;
- Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan di 42 lokasi;
- Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih sebanyak 23 lokasi di 14 kecamatan;
- Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan di 29 lokasi;
- Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi saluran lingkungan permukiman sebanyak 15 lokasi di 2 Kecamatan;
- Terlaksananya penerbitan Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebanyak 300 sertifikat;
- Terlaksananya sosialisasi tentang regulasi dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi terhadap 13 Asosiasi;
- Tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong sebanyak 9 dokumen;
- Terlaksananya pemeliharaan drainase/gorong-gorong di 23 lokasi;
- Tersedianya Dokumen Perencanaan Program ke PU-an yang disusun dalam setahun sebanyak 5 dokumen;
- Tersedianya dokumen standar harga satuan;
- Tersedianya operasional pengamanan prasarana dan sarana ke PU-an sebanyak 5 dokumen;

- Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi penguatan kelembagaan di 5 kecamatan sasaran Program PNPM Perkotaan;
- Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi penataan lingkungan berbasis komunitas.
- Terlaksananya Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di 6 desa;
- Terlaksananya pengamanan sarana dan prasarana ke PU an UPT. Wilayah Utara, UPT. Wilayah Selatan dan UPT Wilayah Bawean.
- Terlaksananya pembangunan Infrastruktur di bidang air minum, irigasi, transportasi, sanitasi melalui dana DAK.

Permasalahan pada Urusan Pekerjaan Umum adalah Peningkatan jalan Karangandong-Kesambenkulon-Perning kondisi fisik per 31 Desember 75,86% disebabkan oleh (1) jembatan yang dilewati mengalami kerusakan sehingga rekanan butuh memperbaiki 2 s/d 3 minggu, (2) Sosialisasi warga sekitar memerlukan waktu 2 minggu. Adapun solusi atas permasalahan ini adalah pekerjaan dilanjutkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya dan dikenakan denda sesuai dalam kontrak pekerjaan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1.	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik			SANGAT TINGGI
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	m	419	
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	m	512,16	
	a. Target	%	74,00	
	b. Realisasi	%	81,81	
	Capaian (b : a) X 100%	%	110,55	
2.	Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik			SANGAT TINGGI
	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Buah	278	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
	Jumlah jembatan kabupaten di daerah tersebut	Buah	293	
	a. Target	%	96,28	
	b. Realisasi	%	94,88	
	Capaian (b : a) X 100%	%	98,55	
3.	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	m ²	7.699,49	SANGAT TINGGI
	Luas irigasi kabupaten	m ²	13.895	
	a. Target	%	55,00	
	b. Realisasi	%	55,41	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,75	
4.	Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik	m	88.850	SEDANG
	Jumlah panjang saluran drainase perkotaan seluruhnya	m	139.939	
	a. Target	%	95,23	
	b. Realisasi	%	63,49	
	Capaian (b : a) X 100%	%	66,67	
5.	Panjang jalan Poros Desa yang Terbangun a. Target	%	100,00	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	

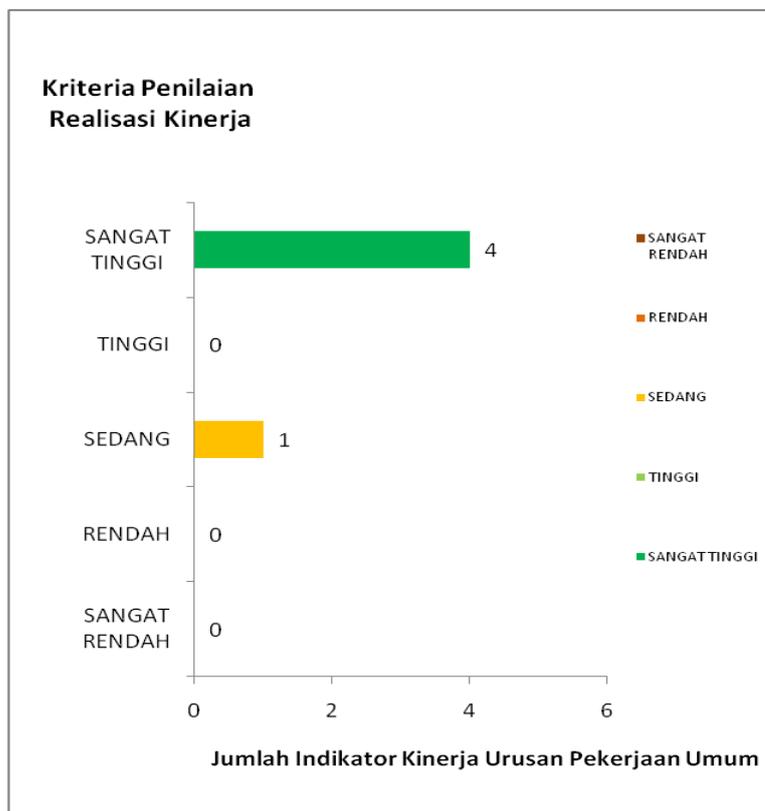
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pekerjaan Umum diketahui bahwa dari 5 indikator kinerja terdapat 4 indikator yang bernilai sangat tinggi, 1 indikator bernilai sedang.

Penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.3
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik



4. Urusan Perumahan Rakyat

Pada Tahun 2015 Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 14 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp16.465.203,00 realisasi sebesar Rp13.736.797.979,00, tidak terserap Rp2.728.405.021,00 dengan rincian sebagai berikut:



4.1. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 6 program terdiri 11 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp16.254.203.000,00, realisasi sebesar Rp13.530.416.679,00, tidak terserap Rp2.723.786.321,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp290.529.041,00;
- 2) Sisa lelang Rp1.006.338.770,00;
- 3) Kegiatan Yang Belum Rp1.426.918.510,00;
Dibayar

4.2. Dinas Sosial melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp211.000.000,00, realisasi sebesar Rp206.381.300,00 tidak terserap Rp4.618.700,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolaan rusunawa;
- Terlaksananya Operasional Bansos Pemugaran Rumah Masyarakat Kurang Mampu di 18 Kecamatan;
- Tersedianya Infrastruktur Pengolahan Limbah Komunal yang layak dan terjangkau di Desa Betoyoguci Kecamatan Manyar;
- Tersedianya sarana sanitasi yang layak di 12 lokasi lingkungan permukiman;
- Terbangunnya sarana dan prasarana dasar perumahan/permukiman di 15 lokasi;

- Terselenggaranya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran sebanyak 420 peserta;
- Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran di Wilayah Gresik Utara dan Gresik Selatan;
- Tersedianya sarana dan prasarana pemakaman meliputi pengadaan keranda, pembangunan pagar dan paving jalan makam;
- Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan PMK;
- Terbangunnya jalan dan pagar makam;
- Terlaksananya bedah rumah layak huni sebanyak 11 KK;
- Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1.	Rumah Tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Jumlah seluruh rumah tangga a. Target b. Realisasi Capaian (b : a) X 100%	RT RT % % %	232.568 272.348 80,00 85,39 106,74	SANGAT TINGGI
2.	Lingkungan permukiman kumuh Luas lingkungan permukiman kumuh Luas wilayah a. Target b. Realisasi Capaian (b : a) X 100%	m ² m ² % % %	829,33 6,014 13,00 13,78 94,00	SANGAT TINGGI
3	Rumah Layak Huni Jumlah rumah layak huni Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. a. Target b. Realisasi Capaian (b : a) X 100%	Buah Buah % % %	237.312 260.945 92,00 90,94 98,85	SANGAT TINGGI

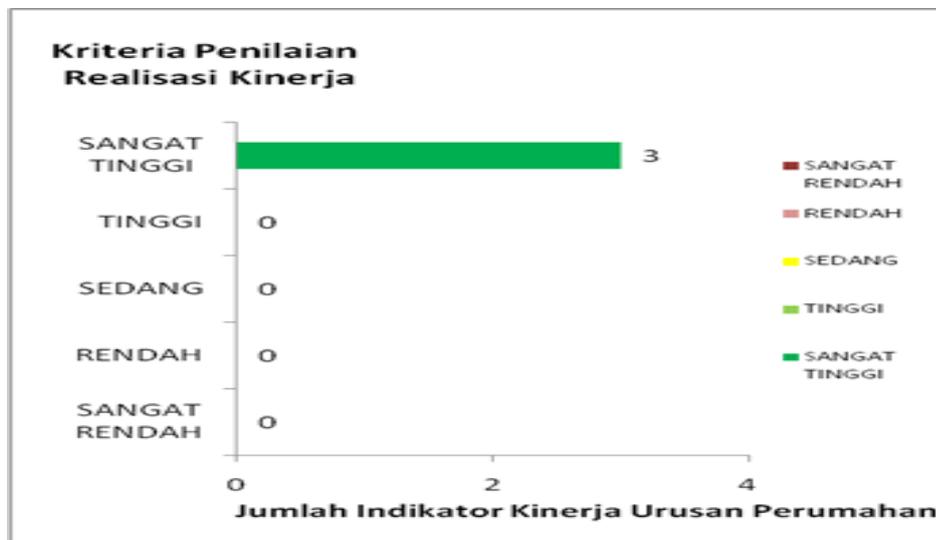
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perumahan Rakyat diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.4
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik



5. Urusan Penataan Ruang

Pada Tahun 2015 Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Badan Penanaman Modal dan Perijinan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 18 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp6.937.721.000,00, realisasi sebesar Rp5.711.346.915,00, tidak terserap Rp1.226.374.085,00 dengan rincian sebagai berikut:



5.1. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 3 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.388.480.000,00, realisasi sebesar Rp1.365.690.456,00, tidak terserap Rp22.789.544,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp. 15.196.228,00
- 2) Sisa Lelang Rp. 7.593.316,00

5.2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 2 program terdiri 9 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.493.000.000,00, realisasi Rp3.168.964.756,00, tidak terserap Rp324.035.244,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp. 109.506.344,00
- 2) Sisa Lelang Rp. 214.528.900,00

5.3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan 1 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.056.241.000,00, realisasi Rp1.176.691.703,00, tidak terserap Rp879.549.297,00, disebabkan adanya efisiensi Rp879.549.297,00;.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yaitu RTBL Kawasan Tambak Beras – Semampir, RTBL Kawasan Ambeng-Ambeng Watangrejo dan Penataan Kawasan Budidaya Pesisir Pulau Bawean;
- Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang;
- Tertatanya Kawasan Kota Lama Gresik;
- Terlaksananya pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- Tersusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Manyar dan BWP Manyar-Bungah (Kawasan Strategis Kabupaten);
- Tersedianya dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030;
- Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di 18 Kecamatan;
- Terlaksananya workshop pemetaan penataan ruang daerah sebanyak 50 orang;
- Tersedianya buku masterplan ruang terbuka hijau dan buku masterplan kawasan industri Kabupaten Gresik;
- Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Lahan Perikanan Berkelanjutan yang aspiratif dan aplikatif guna peningkatan sektor ekonomi bidang perikanan di 18 kecamatan;
- Tersusunnya buku laporan perencanaan pengendalian dan pemanfaatan ruang sebanyak 10 buku;
- Tersedianya buku laporan pengendalian pemanfaatan PSU dan Ranperda penyerahan PSU di 18 kecamatan;
- Terlaksananya pemrosesan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (SK Ijin Site Plan dan IMB) dan pembinaan sebanyak 555 ijin;
- Tersedianya laporan ketersediaan PSU perumahan sebanyak 20 buku;

- Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan IMB dan HO sebanyak 315 izin.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Penataan Ruang pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	8	9
1.	Keberadaan Perda RTRW			
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	
	Capaian (b : a) X 100%	Ada / Tidak Ada	100	
2.	Perubahan Pemanfaatan Fungsi Kawasan RTRW			
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	
	Capaian (b : a) X 100%	Ada / Tidak Ada	100	

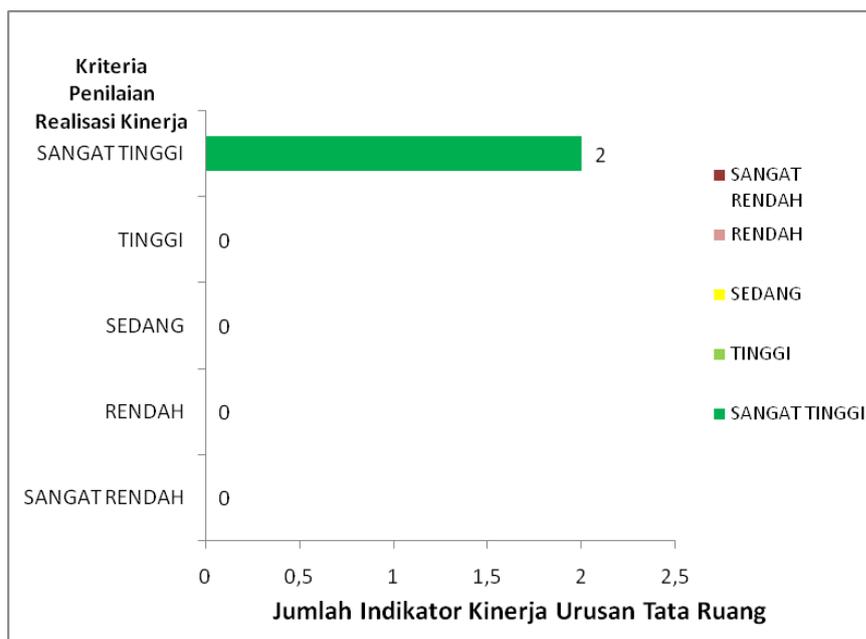
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Penataan Ruang diketahui bahwa dari 2 indikator bernilai sangat tinggi.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.5
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Penataan Ruang Kabupaten Gresik



6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pada Tahun 2015 Urusan Perencanaan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Sekretariat Daerah; dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 10 program terdiri 57 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.154.290.330,00, realisasi sebesar Rp10.580.427.917,00 tidak terserap Rp573.862.413,00 dengan rincian sebagai berikut:



6.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 9 program terdiri 49 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.743.557.000,00 realisasi sebesar Rp9.329.011.367,00 tidak terserap Rp414.545.633,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp240.047.233,00;
- 2) Sisa Lelang Rp174.498.400,00;

6.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.227.156.330,00 realisasi sebesar Rp1.070.804.550,00 tidak terserap Rp156.351.780,00 disebabkan adanya efisiensi sebesar Rp156.351.780,00.

6.3. Kecamatan Manyar melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp41.196.000,00, realisasi sebesar Rp40.596.000,00 tidak terserap Rp600.000,00 disebabkan adanya efisiensi.

6.4. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp19.381.000,00, realisasi sebesar Rp18.796.000,00 tidak terserap Rp585.000,00 disebabkan adanya efisiensi.

- 6.6. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.
- 6.7. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 6.8. Kecamatan Duduksampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.000.000,00.
- 6.9. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 6.10. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 6.11. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.
- 6.12. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp8.220.000,00 tidak terserap Rp1.780.000,00 disebabkan adanya efisiensi Rp1.780.000,00;.
- 6.13. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.000.000.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya Buku Informasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Terlaksananya pemutakhiran data spasial perencanaan pembangunan ke dalam GIS;
- Tersedianya maintenance Server dan Jaringan Internet;
- Tersedianya Laporan Study Ehra;

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi program sektor sanitasi yang sesuai dengan dokumen memorandum program sektor sanitasi sebanyak 4 sektor sanitasi;
- Tersusunnya Buku RPJMD sebanyak 100 buku;
- Tersusunnya buku Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebanyak 280 buku;
- Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2015 sebanyak 4 Tahapan Musrenbang;
- Tersusunnya Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014 sebanyak 1.400 buku;
- Tersusunnya Buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan sebanyak 180 buku;
- Terlaksananya fasilitasi penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 sebanyak 85 peserta;
- Tersedianya data hasil musyawarah perencanaan pembangunan sebanyak 330 desa 26 kelurahan;
- Tersusunnya Buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN pembangunan;
- Tersusunnya Buku KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2014 dan KUA-PPAS Tahun 2015;
- Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan integrasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Gresik sebanyak 188 orang;
- Terlaksananya semiloka Penguatan Integrasi Perencanaan Pembangunan sebanyak 435 peserta;
- Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi sebanyak 80 Buku;
- Terwujudnya sinergitas pelaksanaan Pembangunan Ekonomi;
- Tersusunnya study daya saing UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean sebanyak 50 buku;

- Tersedianya buku analisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam rangka peningkatan PAD sebanyak 50 buku;
- Buku Analisa Eksplorasi dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Usaha Ritel Waserda dan Pasar Tradisional sebanyak 20 buku;
- Terlaksananya Forum Data Peningkatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Penanggulangan Kemiskinan;
- Tersusunnya Buku laporan pengendalian program bantuan pengentasan kemiskinan;
- Tersusunnya Buku laporan penanggulangan kemiskinan daerah LP2KD Kabupaten Gresik sebanyak 30 buku;
- Terlaksananya bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran yang responsive gender sebanyak 75 orang;
- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Gender sebanyak 38 Buku;
- Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Dasar Satuan Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018 sebanyak 20 buku;
- Tersusunnya Dokumen rencana Induk Pengelolaan Irigasi;
- Tersusunnya Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum;
- Terpasangnya Pilar Batas dan Peta Kelurahan dan Desa di Kecamatan Kecamatan Manyar dan Duduksampeyan;
- Tersusunnya Buku LPPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 sebanyak 80 buku;
- Tersusunnya Laporan kinerja Pemerintah Daerah; dan
- Tercapainya Sinkronisasi Program Pembangunan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1.	Ketersediaan RPJPD			SANGAT TINGGI
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	
	Capaian (b : a) X 100%	Ada / Tidak Ada	100	
2.	Ketersediaan RPJMD			SANGAT TINGGI
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	
	Capaian (b : a) X 100%	Ada / Tidak Ada	100	
3	Ketersediaan RKPD			SANGAT TINGGI
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	
	Capaian	Ada / Tidak Ada	100	
4	Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD			SANGAT TINGGI
	Jumlah program RKPD tahun berkenaan yang diakomodasi dalam APBD	Buah	629	
	Jumlah seluruh program RKPD tahun berkenaan	Buah	628	
	a. Target	%	95,00	
	b. Realisasi	%	100,16	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	

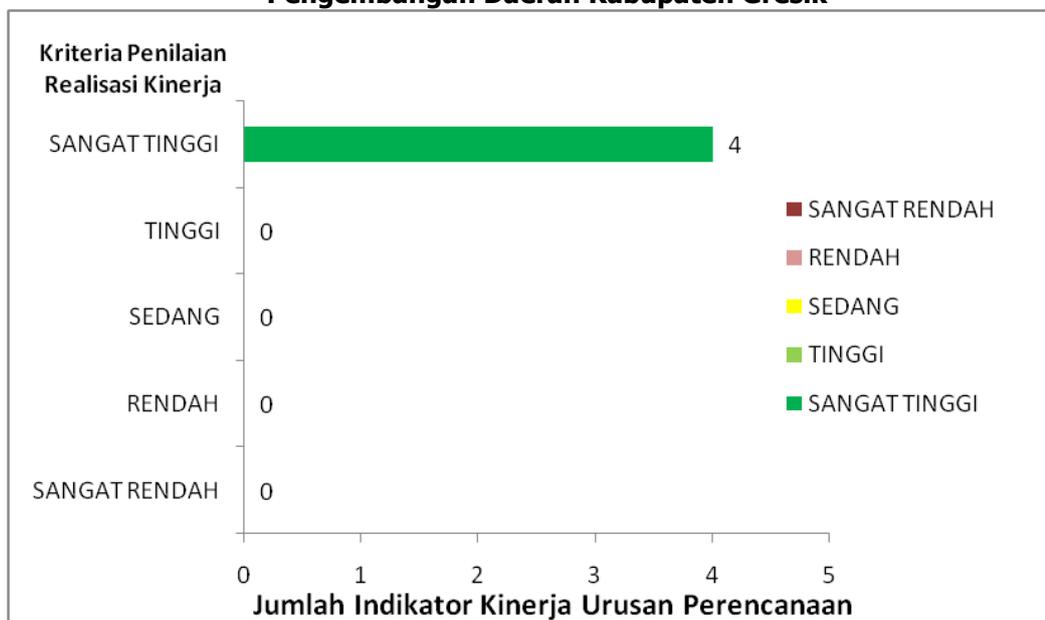
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perencanaan Pembangunan diketahui bahwa dari 4 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.6
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik



7. Urusan Perhubungan

Pada Tahun 2015 Urusan Perhubungan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 12 program terdiri 53 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp13.786.437.000,00, realisasi sebesar Rp13.098.602.438,00, tidak terserap Rp687.834.562,00 dengan rincian sebagai berikut:



7.1. Dinas Perhubungan melaksanakan 12 program terdiri 52 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.716.437.000,00, realisasi sebesar Rp13.036.654.438,00, tidak terserap Rp679.782.562,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp179.520.896,00;
- 2) Sisa Lelang Rp499.511.666,00;
- 3) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Rp750.000,00;

7.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp70.000.000,00, realisasi sebesar Rp61.948.000,00 tidak terserap Rp8.052.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pengelolaan terminal dan pemeliharaan gedung terminal;
- Terlaksananya pemeliharaan gedung balai pengujian kendaraan bermotor, terminal Gubernur Suryo dan terminal Bunder, alat pengendali isyarat lalu lintas (APILL), marka jalan, rambu – rambu lalu lintas dan halte angkutan;
- Terpilihnya awak kendaraan umum teladan Tahun 2014;
- Tersedianya fasilitas penunjang pengelolaan parkir;
- Terlaksananya pengendalian tertib lalu lintas;

- Terlaksananya operasional tertib lalu lintas, operasional pengujian kendaraan bermotor, operasional kepelabuhanan, operasional bakti perairan laut, operasional pengawasan dan pemantauan angkutan sungai dan penyeberangan, dan operasional pengawasan angkutan mineral batu bara;
- Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perkapalan sebanyak 80 orang dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Laut sebanyak 50 orang;
- Tersedianya peta wilayah perairan dan pesisir Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya Pembangunan Pintu Gerbang Terminal Bunder dan pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas meliputi Traffic Light, Flash Light, Rambu, Marka dan Guard Rail di 17 lokasi;
- Terlaksananya pemeliharaan dan operasional pengujian kendaraan bermotor;
- Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 6 Kecamatan;
- Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di 18 kecamatan;
- Terlaksananya sosialisasi Perbub No. 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Zona Lokasi Menara sebanyak 25 orang;
- Terlaksananya identifikasi potensi bandara udara bawean;
- Tersedianya Buku study kelayakan pembanguna perlintasan tidak sebidang di perlintasan kereta api Cerme dan Duduk Sampeyan sebanyak 10 buku;
- Terlaksananya identifikasi masalah-masalah Bidang Perhubungan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perhubungan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1.	Persentase ketersediaan angkutan darat			SANGAT TINGGI
	Jumlah angkutan darat	Buah		
	Jumlah penumpang angkutan darat	Buah		
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	
2.	Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas			SANGAT TINGGI
	Jumlah rambu lalu lintas	Buah	1.415	
	Jumlah rambu lalu lintas yang dibutuhkan	Buah	2.500	
	a. Target	%	50,00	
	b. Realisasi	%	56,60	
	Capaian (b : a) X 100%	%	113,20	
3.	Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan			SANGAT TINGGI
	Jumlah angkutan umum dalam kondisi layak jalan	Buah	1.000	
	Jumlah angkutan umum	Buah	1.414	
	a. Target	%	75,00	
	b. Realisasi	%	70,72	
	Capaian (b : a) X 100%	%	94,30	
4.	Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan)			SANGAT TINGGI
	Jumlah daya tampung kapal	Orang	217.668	
	Jumlah penumpang angkutan laut (penyeberangan)	Orang	120.205	
	a. Target	%	173,70	
	b. Realisasi	%	181,08	
	Capaian (b : a) X 100%	%	104,25	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
5	Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean (Pembebasan Lahan)			SANGAT TINGGI
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	
6	Persentase Permasalahan Bidang Perhubungan yang diselesaikan			TINGGI
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	83,33	
	Capaian (b : a) X 100%	%	83,33	

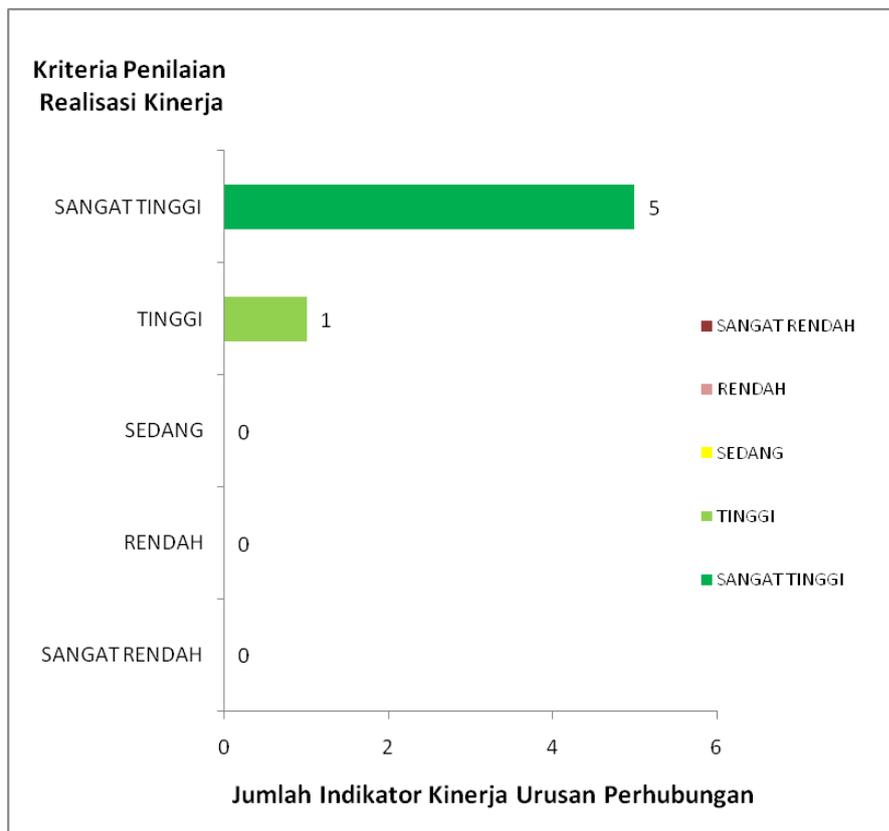
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perhubungan diketahui bahwa dari 6 indikator kinerja, 5 indikator bernilai tinggi dan 1 indikator tinggi.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.7
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Perhubungan Kabupaten Gresik



8. Urusan Lingkungan Hidup

Pada Tahun 2015 Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 11 program terdiri 56 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp26.820.255.000,00, realisasi sebesar Rp24.594.360.576,00, tidak terserap Rp2.255.894.424,00 dengan rincian sebagai berikut:



8.1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp150.000.000,00, realisasi sebesar Rp145.594.000,00, tidak terserap Rp4.406.000,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp1.140.000,00
- 2) Sisa Lelang Rp3.266.000,00

8.2. Badan Lingkungan Hidup melaksanakan 11 program terdiri 51 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp26.297.095.000,00, realisasi sebesar Rp24.098.244.036,00, tidak terserap Rp2.198.850.964,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp916.235.044,00
- 2) Sisa Lelang Rp432.615.920,00
- 3) Lelang gagal Rp800.000.000,00
- 4) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp50.000.000,00

8.3. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp373.160.000,00, realisasi sebesar Rp350.522.540,00, tidak terserap Rp22.637.460,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya sarana prasarana pengolahan persampahan di 5 Kecamatan;
- Terlaksananya pengelolaan sampah dengan volume 725 m³/hari;
- Terlaksananya pembinaan pengelolaan sampah sebanyak 30 orang di 2 Kecamatan;
- Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana TPA;
- Terlaksananya pembinaan bagi masyarakat untuk kebersihan;
- Terlaksananya penilaian Kota Sehat;
- Terlaksananya Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terawasinya kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
- Terlaksananya Workshop Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pemantauan insidentil pelaku usaha berpotensi menghasilkan limbah B3;
- Tersusunnya Buku Pedoman Penyusunan Standarisasi Pengkajian Dampak Lingkungan;
- Terlaksananya integrasi pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam dunia usaha di 35 perusahaan;
- Terlaksananya workshop penyusunan Amdal;
- Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan pemberian penghargaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata);
- Tersedianya alat laboratorium yang bersertifikat komite akreditasi nasional dan terpenuhinya persyaratan laboratorium lingkungan;
- Terlaksananya penanaman pohon pesisir pantai sebanyak 4.400 pohon;
- Terlaksananya workshop dan tersedianya buku panduan terkait pencegahan perusakan hutan dan lahan;
- Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan biopori;
- Tersedianya buku kajian dan tanaman konservasi sebanyak 1.050 pohon;

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pemulihan lahan dengan tanaman konservasi sebanyak 8.625 batang;
- Terlaksananya sosialisasi dan pameran Lingkungan Hidup;
- Tersusunnya Buku SPM Bidang Lingkungan Hidup, Inventarisasi Biomassa dan Pembuatan Peta Kerusakan Lahan;
- Tersusunnya buku Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kabupaten Gresik Tahun 2014;
- Terlaksananya uji emisi kendaraan bermotor roda empat sebanyak 230 sampel;
- terselesaikannya kasus pencemaran dan sengketa lingkungan;
- Terlaksananya workshop pengelolaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebanyak 100 orang;
- Terlaksananya penataan taman kota ruang terbuka hijau di 2 Kecamatan;
- Terlaksananya pemeliharaan taman dan jalur hijau kota di 4 Kecamatan;
- Terlaksananya penataan taman dan penambahan area Ruang Terbuka Hijai (RTH) di 3 Kecamatan;
- Tersedianya area tempat khusus merokok dan sarana penunjang tempat khusus merokok;
- Tersusunnya Buku kajian Kebijakan Sumber Daya Alam;
- Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sumber daya alam dalam rangka pengendalian kerusakan sumber-sumber air;
- Terlaksananya konservasi sumber daya alam;
- Tersusunnya Buku Laporan Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan dan Keanekaragaman hayati laut;
- Terlaksananya pembinaan terhadap perusahaan pengguna ABT dan AP.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Luas Lahan Kritis			TINGGI
	a. Target	Ha	2.873	
	b. Realisasi	Ha	3.384	
	Capaian: $\frac{b - a}{a} \times 100 \%$	%	82,21	
2	Rasio Luas kawasan lindung			SANGAT TINGGI
	luas kawasan yang dilindungi (ha)	m ²	21.670	
	luas seluruh wilayah (ha)	m ²	119.125	
	a. Target	%	11,00	
	b. Realisasi	%	18,19	
	Capaian ($b : a$) X 100%	%	165,37	
3	Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air			SANGAT TINGGI
	a. Target	Unit	68	
	b. Realisasi	Unit	65	
	Capaian ($b : a$) X 100%	Unit	96	
4	Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara			SANGAT TINGGI
	a. Target	Unit	200	
	b. Realisasi	Unit	256	
	Capaian ($b : a$) X 100%	Unit	128	
5	Luas RTH Perkotaan			SANGAT TINGGI
	a. Target	Ha	718,35	
	b. Realisasi	Ha	719,19	
	Capaian ($b : a$) X 100%	%	100,12	
6	Penanganan sampah			SANGAT TINGGI
	Volume sampah yang ditangani (m3)	m ³	764	
	Volume produksi sampah (m3)	m ³	817	
	a. Target	%	92,00	
	b. Realisasi	%	93,15	
	Capaian ($b : a$) X 100%	%	101,25	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
7	Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah daya tampung TPS (m3) Jumlah penduduk a. Target b. Realisasi Capaian (b : a) X 100%	m3 Penduduk % % %	756 1.344.649 0,030 0,056 187,41	SANGAT TINGGI
8	Jumlah tempat Pengolahan sampah (TPS) a. Target b. Realisasi Capaian (b : a) X 100%	Unit Unit Unit	115 106 92,17	SANGAT TINGGI

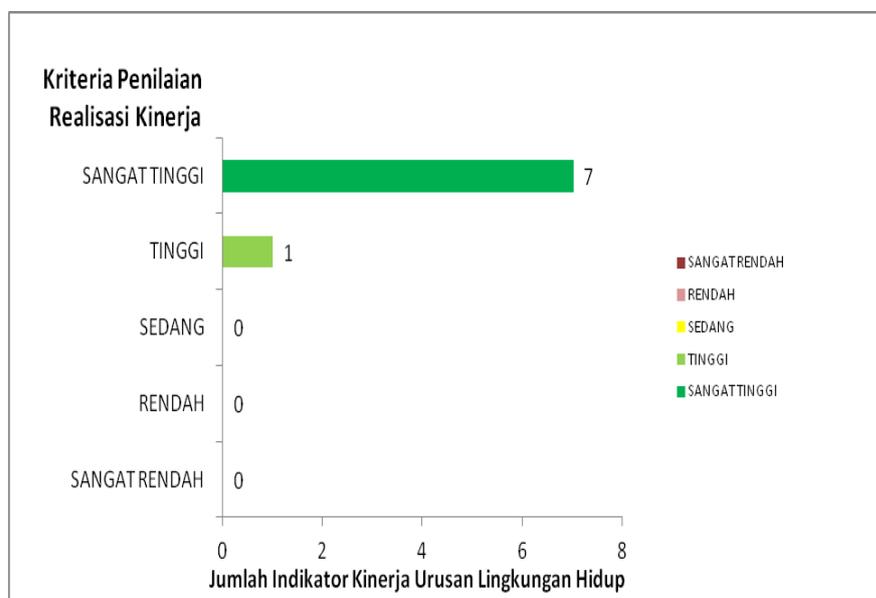
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Lingkungan Hidup diketahui bahwa dari 8 indikator kinerja, 7 indikator bernilai sangat tinggi. Sedangkan 1 indikator bernilai tinggi

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.8
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik



Prestasi yang diperoleh pada urusan lingkungan hidup adalah :

- Penghargaan Adiwiyata Provinsi untuk SDN I Sidokumpul;
- Penghargaan Adiwiyata Provinsi untuk SDN 2 Sidokumpul;
- Penghargaan Adiwiyata Provinsi untuk SDN 3 Sidokumpul;
- Penghargaan Adiwiyata Provinsi untuk SDN 2 Tlogopatut;
- Penghargaan Adiwiyata Provinsi untuk SDN 1 Cerme Kidul;
- Penghargaan Adiwiyata Provinsi untuk SDN Sukorame;
- Penghargaan Adiwiyata Provinsi untuk SMPN 2 Cerme;
- Penghargaan Adiwiyata Provinsi untuk SMPN 1 Mengant;i
- Penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk SMP Islam Manbaul Ulum mendapatkan Penghargaan;
- Penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk SMAN Kedamean.

9. Urusan Pertanahan

Pada Tahun 2015 Urusan Pertanahan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 5 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.834.705.000,00, realisasi sebesar Rp1.210.250.805,00, tidak terserap Rp624.454.195,00 dengan rincian sebagai berikut:



9.1. Dinas Kesehatan melaksanakan 1 program

terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.120.000.000,00, realisasi sebesar Rp842.339.300,00, tidak terserap Rp277.660.700,00, disebabkan adanya efisiensi.

9.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp714.705.000,00, realisasi sebesar Rp367.911.505,00, tidak terserap Rp346.793.495,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp119.088.492,00
- 2) Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan Rp227.705.000,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya sertifikasi aset Pemerintah Daerah;
- Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Tersedianya dokumen persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
- Tersedianya pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kali lamong;
- terselesaikannya konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Gresik sebanyak 24 kasus;
- Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Akper.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pertanian Tahun 2015:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Penyelesaian Kasus Tanah Negara			SANGAT TINGGI
	Jumlah Kasus Yang Diselesaikan	Perkara	0	
	Jumlah Kasus Yang Teraftar	Perkara	1	
	a. Target	%	1	
	b. Realisasi	%	0	
Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$		%	100	

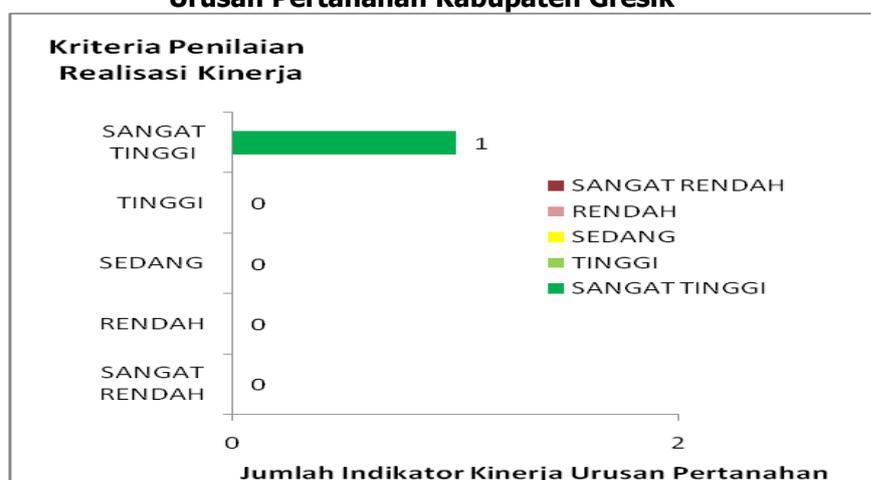
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pertanian diketahui bahwa dari indikator kinerja yang telah dilaksanakan bernilai sangat tinggi.

Penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.9
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Pertanian Kabupaten Gresik



10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada Tahun 2015 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 41 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp6.469.510.625,00, realisasi sebesar Rp5.497.151.308,00, tidak terserap Rp972.359.317,00, dengan rincian sebagai berikut:



- 10.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 4 program terdiri 37 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.296.310.625,00, realisasi sebesar Rp5.324.091.308,00, tidak terserap Rp972.219.317,00, disebabkan antara lain:
 - 1) Efisiensi Rp652.277.067,00
 - 2) Sisa Lelang Rp319.942.250,00
- 10.2. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.3. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 10.4. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.995.000,00, tidak terserap Rp5.000,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 10.5. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp14.980.000,00, tidak terserap Rp20.000,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 10.6. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.000.000,00;

- 10.7. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.8. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 10.9. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,00, realisasi sebesar Rp.15.000.000,00;
- 10.10. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.11. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00;
- 10.12. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.200.000,00, realisasi sebesar Rp10.200.000,00;
- 10.13. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.14. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.18. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.000.000,00, realisasi sebesar Rp8.885.000,00, tidak terserap Rp115.000,00, disebabkan adanya efisiensi;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya identifikasi data kependudukan penduduk rentan administrasi kependudukan sebanyak 25 buku;
- Trelaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan di 18 kecamatan;

- Terlaksananya bintek aparatur administrasi kependudukan sebanyak 70 orang;
- Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan;
- Tercapainya kesinambungan Standart ISO 9001:2008;
- Terlaksananya Program Nasional KTP-elektronik;
- Tercatat dan Tersusunnya Arsip Akta Catatan Sipil;
- Terlaksananya Sidang Pencatatan Perkawinan sebanyak 84 kutipan;
- Terlaksananya verifikasi dan validasi data kependudukan dan catatan sipil sebanyak 24.678 lembar kutipan akta;
- Terintegrasinya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sistem Informasi Manajemen Menikah (SIMKAH) Kementerian Agama;
- Terlaksananya pemeliharaan perangkat lunak (SIAK);
- Terlaksananya Sinkroisasi dan Validasi Data Kependudukan berdasarkan data SIAK dan Perekaman e-KTP;
- Tersusunnya buku Profil Kependudukan Kabupaten Gresik sebanyak 50 buku;
- Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan Jemput Bola;
- Terlaksananya alih media dokumen terkait pencatatan sipil sebanyak 40.262 data;
- Tersedianya Sistem Informasi Arsip Data Kependudukan Elektronik;
- Tersusunnya Buku Informasi Pelayanan Administasi Kependudukan sebanyak 2.300 buku;
- Terlaksananya monetoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

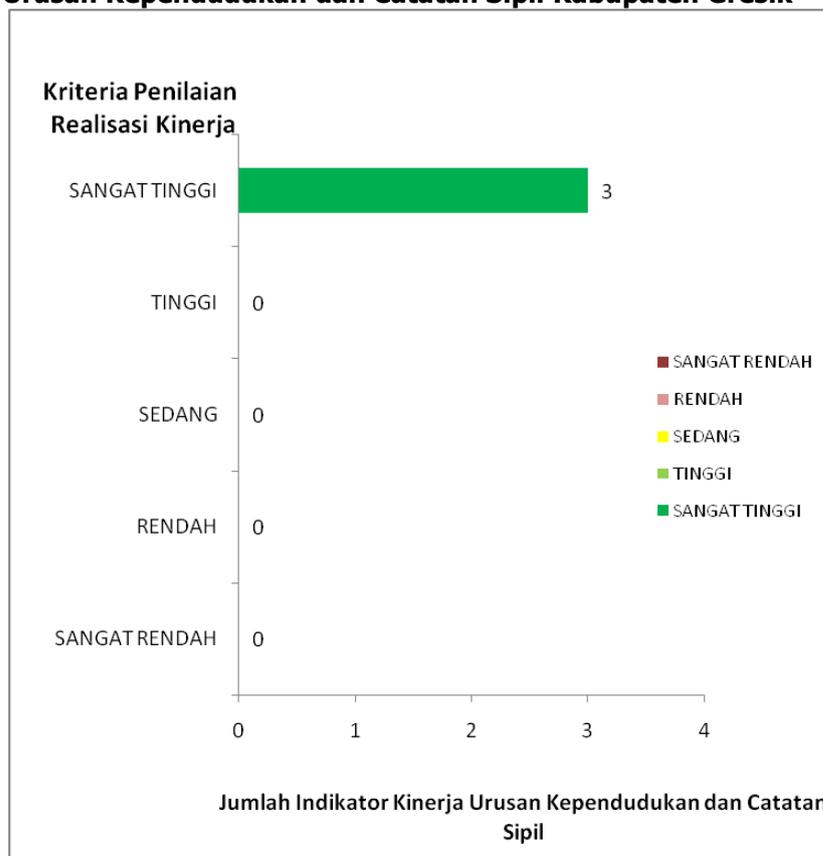
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1.	Kepemilikan KTP			SANGAT TINGGI
	Jumlah penduduk usia>17 yang ber KTP	Orang	944.813	
	Jumlah penduduk usia>17 atau telah menikah	Orang	975.981	
	a. Target	%	96,00	
	b. Realisasi	%	96,81	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	100,84	
2.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran			SANGAT TINGGI
	Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	24.678	
	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	24.454	
	a. Target	%	96,00	
	b. Realisasi	%	100,92	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	105,12	
3	Pengurusan KTP			SANGAT TINGGI
	Lama pengurusan KTP dalam PERDA	Hari		
	a. Target	%	1	
	b. Realisasi	%	1	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	100	

Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi. penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.10
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik



11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Tahun 2015 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 11 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp989.660.000,00, realisasi sebesar Rp974.784.000, tidak terserap Rp14.876.000,00, dengan rincian sebagai berikut:



- 11.1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan 5 program terdiri 10 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp747.200.000,00, realisasi sebesar Rp733.645.000,00, tidak terserap Rp13.555.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 11.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp32.300.000,00, realisasi sebesar Rp32.300.000,00.
- 11.3. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.000.000,00, realisasi sebesar Rp13.000.000,00.
- 11.4. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp29.500.000,00, realisasi sebesar Rp29.300.000,00 tidak terserap Rp200.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 11.5. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00, realisasi sebesar Rp30.000.000,00.
- 11.6. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi

sebesar Rp24.080.000,00 tidak terserap Rp920.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

- 11.7. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp40.000.000,00, realisasi sebesar Rp39.799.000,00 tidak terserap Rp201.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 11.8. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, realisasi sebesar Rp20.000.000,00.
- 11.9. Kecamatan Ujung Pangkah melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp27.660.000,00, realisasi sebesar Rp27.660.000,00.
- 11.10. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya fasilitasi perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak sebanyak 50 orang;
- Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 350 orang;
- Meningkatnya jejaring koordinasi dalam upaya pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak sebanyak 530 orang;
- Meningkatnya jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak sebanyak 100 orang;
- Terlaksananya Temu Kreatifitas Anak dalam upaya pemahaman anak tentang pemenuhan hak-hak anak sebanyak 750 anak;
- Terlaksananya fasilitasi layanan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan sebanyak 150 kasus;
- Terselenggaranya Evaluasi Gerakan Sayang Ibu dan Pembinaan P2WKSS di 18 kecamatan;

- Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi perempuan sebanyak 140 orang;
- Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebanyak 32 organisasi perempuan;
- Terlaksananya pelatihan konseling sebanyak 180 orang;
- Terselenggaranya workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan sebanyak 200 orang;
- Terlaksananya Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kecamatan Gresik;
- Terlaksananya pelatihan keterampilan tataboga dan pemanfaatan limbah rumah tangga sebanyak 46 orang;
- Terlaksananya pelatihan peran serta wanita dalam pembangunan sebanyak 52 orang.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	<p>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A</p> <p>Jml pengaduan/laporan yg ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu</p>	kasus	144	SANGAT TINGGI
	Jml laporan/pengaduan yg masuk ke unit pelayanan terpadu	kasus	144	
	a. Target	%	100	
	b. Realisasi	%	100	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
2	Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan			
	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	Orang	96	SANGAT TINGGI
	Jumlah anak korban kekerasan	Orang	103	
	a. Target	%	100	
	b. Realisasi	%	93.20	
	Capaian (b : a) X 100%	%	93.20	
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			
	Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum	Orang	93	SANGAT TINGGI
	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang	93	
	a. Target	%	100	
	b. Realisasi	%	100	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100	
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas yang mampu terlaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit			
	Jumlah Korban yang mendapat pelayanan kesehatan	Orang	20	SANGAT TINGGI
	Jumlah korban yang membutuhkan layanan kesehatan	Orang	20	
	a. Target	%	100	
	b. Realisasi	%	100	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi			SANGAT TINGGI
	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi	Orang	6	
	Jumlah korban yang membutuhkan layanan rehabilitasi	Orang	6	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	
6	Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi			SANGAT TINGGI
	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi	Unit	4	
	Jumlah lembaga perempuan dan anak	Unit	7	
	a. Target	%	50,00	
	b. Realisasi	%	57,14	
	Capaian (b : a) X 100%	%	114,29	

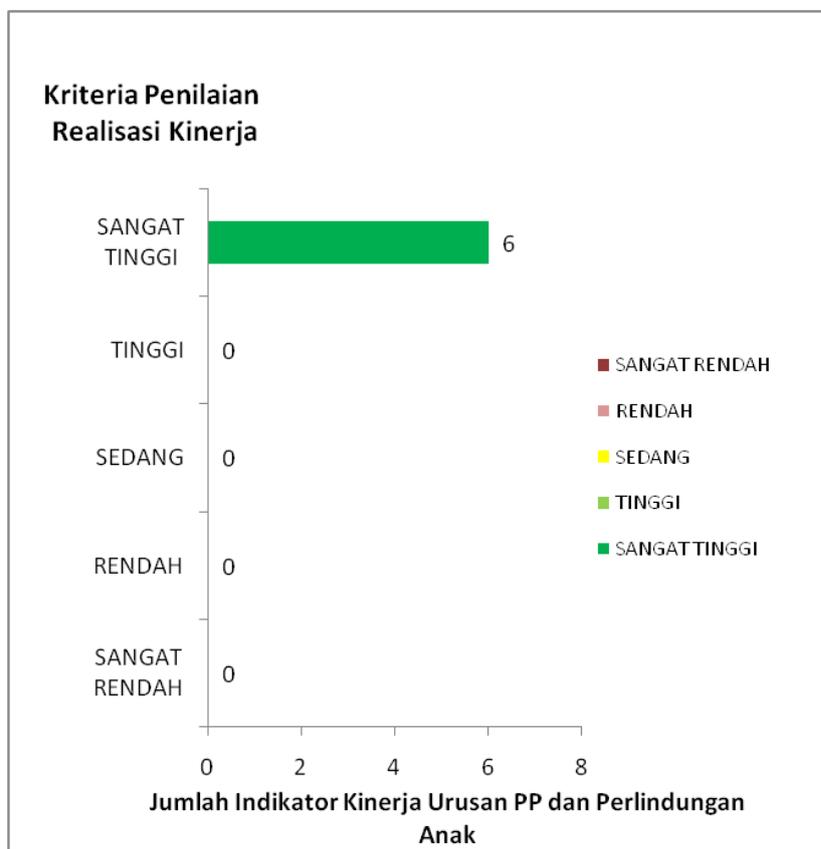
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik diketahui bahwa dari 6 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.11
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik



Prestasi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak adalah:

- Juara I dan Penghargaan Satya Lancana Pembangunan Nasional Bidang Kependudukan Dan Keluarga Berencana Dari Presiden Tingkat Nasional;
- Juara I Lomba Duta Mahasiswa Genre Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Desa Phbs Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Lomba Juara I Kader Badan Keluarga Berencana Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara II Lomba Keluarga Berencana Award Tingkat Provinsi Jawa Timur.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pada Tahun 2015 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 13 program terdiri 43 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.407.899.000,00, realisasi sebesar Rp5.210.366.056,00, tidak terserap Rp197.532.944,00, disebabkan antara lain:



- 1) Efisiensi Rp70.163.014,00
- 2) Sisa Lelang Rp127.369.930,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya pelayanan kesehatan dan KB bagi keluarga miskin sebanyak 305 unit;
- Terlaksananya pembinaan KB sesuai dengan Perkiraan Permintaan Masyarakat sebanyak 100 peserta;
- Terlaksananya penyuluhan TMKK dan PKK KB Kes sebanyak 500 orang;
- Tersusunnya buku profil Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebanyak 80 buku;
- Terlaksananya fasilitasi pembinaan klinik keluarga berencana sebanyak 25 klinik;
- Terlaksananya sosialisasi pengendalian kelahiran melalui Program Keluarga Berencana sebanyak 100 orang;
- Terlaksananya pembinaan KB Aktif sebanyak 184 orang;
- Terlaksananya kegiatan advokasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebanyak 330 orang;
- Terlaksananya pembinaan kelompok remaja tentang KIE sebanyak 80 kelompok;
- Terselenggaranya pembinaan kelompok remaja peduli KB sebanyak 20 orang;

- Terlaksananya Monitoring Pendataan Keluarga Sejahtera;
- Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat peduli KB sebanyak 3.908 petugas lapangan dan pembinaan;
- Terselenggaranya penyuluhan pada remaja sebanyak 100 remaja;
- Terlaksananya KIE keluarga sejahtera sebanyak 12 kali;
- Terlaksananya lomba KB Lestari di 16 kecamatan;
- Terbentuknya kelompok PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) sebanyak 20 kelompok;
- Peningkatan kemampuan, pengelolaan, pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebanyak 100 orang;
- Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita di Kecamatan sebanyak 96 orang;
- Terlaksananya Pelatihan Kelompok Bina Keluarga dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga bagi anggota UPPKS sebanyak 100 orang;
- Terlaksananya lomba pengembangan model BKB Posyandu, PAUD;
- Terlaksananya pembangunan Gedung Balai Penyuluh KB di Kecamatan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Prevalensi peserta KB Aktif			SANGAT TINGGI
	Jumlah peserta program KB aktif	Orang	185.122	
	Jumlah pasangan usia subur	Orang	214.145	
	a. Target	%	78,55	
	b. Realisasi	%	86,45	
	Capaian (b : a) X 100%	%	110,05	
2	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun			SANGAT TINGGI
	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Orang	2.294	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
	Jumlah Pasangan Usia Subur	Orang	214.145	
	a. Target	%	1,10	
	b. Realisasi	%	1,07	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	102,61	
	a			
3	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)			
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Orang	19.525	
	Jumlah PUS	Orang	214.145	
	a. Target	%	21,15	
	b. Realisasi	%	9,12	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	156,89	
	a			
4	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)			
	Anggota BKB ber KB		11.743	
	Seluruh PUS Anggota BKB		12.562	
	a. Target	%	21,75	
	b. Realisasi	%	93,48	
	c. Capaian (b : a)	%	429,79	
5	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan			
	Rekap Data Mikro Kelurga Desa/Kelurahan		356	
	Jumlah Desa Kelurahan		356	
	a. Target	%	100	
	b. Realisasi	%	100	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100	

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera diketahui bahwa dari 5 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan

Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.12
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Kabupaten Gresik



Prestasi yang diperoleh pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Juara I dan Penghargaan Satya Lancana Pembangunan Nasional Tingkat Provinsi Jawa Timur.

13. Urusan Sosial

Pada Tahun 2015 Urusan Sosial di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 11 program terdiri 83 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.865.718.075,00, realisasi sebesar Rp8.478.098.100,00, tidak terserap Rp387.619.324,00 dengan rincian sebagai berikut:



- 13.1. Dinas Sosial melaksanakan 9 program terdiri 38 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.495.728.200,00, realisasi sebesar Rp4.238.478.066,00, tidak terserap Rp257.250.134,00, disebabkan adanya efisiensi:
- 13.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 5 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.376.470.000,00, realisasi sebesar Rp1.303.962.585,00, tidak terserap Rp72.507.415,00, disebabkan antara lain:
 - 1) Efisiensi Rp70.366.440,00
 - 2) Sisa Lelang Rp2.140.975,00
- 13.3. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.748.269.875,00, realisasi sebesar Rp2.693.328.100,00, tidak terserap Rp54.941.775,00, disebabkan antara lain:
 - 1) Efisiensi Rp54.941.775,00
- 13.4. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 13.5. Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.

- 13.6. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp24.750.000,00, realisasi sebesar Rp24.750.000,00.
- 13.7. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.775.000,00; tidak terserap Rp225.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 13.8. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.
- 13.9. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 13.10. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.000.000,00.
- 13.11. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 13.12. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.
- 13.13. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 13.14. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 13.15. Kecamatan Sidayu melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp18.000.000,00, realisasi sebesar Rp18.000.000,00.

- 13.16. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, realisasi sebesar Rp20.000.000,00.
- 13.17. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 13.18. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 13.19. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.500.000,00, realisasi sebesar Rp5.805.000,00; tidak terserap Rp2.695.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya fasilitasi pendamping PKH dalam pembinaan RTSM yang diberi bantuan sebanyak 190 orang;
- Tersedianya bantuan bagi keluarga sangat miskin sebanyak 20 mesin jahit untuk 20 KK;
- Terlaksananya pelatihan keterampilan dan pengetahuan bagi 240 RSTM untuk 4 desa;
- Terlaksananya bantuan bagi keluarga sangat miskin sebanyak 30 KK;
- Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi penyandang PMKS serta pemberian bantuan untuk pemberdayaan sebanyak 16 orang;
- Terlaksananya seleksi, bimbingan dan bantuan bagi keluarga rentan sebanyak 40 orang;
- Tersedianya bantuan terhadap lanjut usia sebanyak 65 orang;
- Tersusunnya buku tentang pendataan masyarakat berkebutuhan khusus (disable);
- Tersusunnya validitas data 10 jenis PMKS di Kabupaten Gresik;
- Tersedianya pelayanan terhadap PMKS untuk seleksi PSBR dan Tetirah sebanyak 64 orang;

- Terlaksananya penanganan masalah-masalah yang menyangkut tanggap darurat;
- Terbinanya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sebanyak 80 orang kelompok WKSBM;
- Tersedianya bantuan bagi penyandang cacat dan eks trauma sebanyak 60 orang;
- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi panti asuhan sebanyak 5 panti asuhan;
- Tersedianya bantuan tambahan gizi bagi anak panti asuhan terhadap 18 panti asuhan;
- Tersedianya bantuan usaha bagi legiun veteran, janda veteran, dan perintis kemerdekaan sebanyak 75 orang;
- Terlaksananya rehabilitasi PMKS di sebanyak 263 orang;
- Terlaksananya penanganan kesejahteraan sosial sebanyak 339 orang;
- Terlaksananya seleksi, bimbingan dan bantuan bagi wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 65 orang;
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan sosial/santunan kematian di 18 kecamatan;
- Terlaksananya pembinaan program Raskin;
- Terlaksananya workshop dan penyaluran Raskin ke 77.751 RTS-PM;
- Terlaksananya peringatan hari Lansia.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Sosial Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1.	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi			TINGGI
	a. Target	Unit	20	
	b. Realisasi	Unit	18	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	90,00	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
2.	Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial			SANGAT TINGGI
	a. Target	PMKS	439	
	b. Realisasi	PMKS	6.064	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	1381,32	
3	Jumlah PMKS			SANGAT TINGGI
	a. Target	Jiwa	65.122	
	b. Realisasi	Jiwa	32.923	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	149,44	
4	Jumlah hari besar agama yang dirayakan			SANGAT TINGGI
	a. Target	kali	4	
	b. Realisasi	kali	5	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	125	
5	Bantuan sarana ibadah			SANGAT TINGGI
	Jumlah sarana ibadah yang telah memperoleh bantuan	Buah	342	
	Jumlah permohonan bantuan sarana ibadah	Buah	349	
	a. Target	%	90,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	111,11	
6	Bantuan Santunan Kematian			SANGAT TINGGI
	Jumlah warga meninggal yang memperoleh santunan kematian	Orang	4666	
	Jumlah warga miskin yang meninggal dunia	Orang	4666	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	
7	Penyaluran Raskin			SANGAT TINGGI
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	100,00	

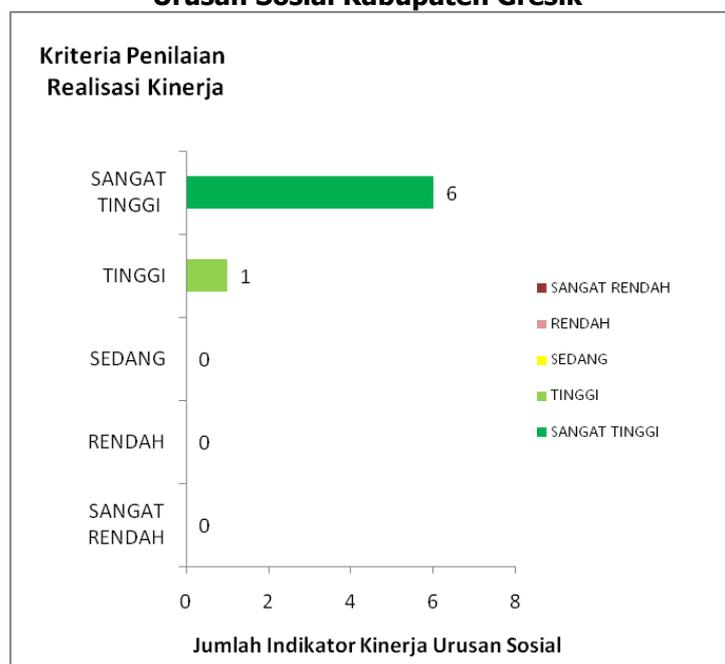
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Sosial diketahui bahwa dari 7 indikator kinerja, 6 indikator bernilai sangat tinggi dan 1 indikator bernilai tinggi.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.13
Capaian Indikator Kinerja RPJM
Urusan Sosial Kabupaten Gresik



Prestasi Urusan Sosial adalah Karang Taruna Berprestasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Pada Tahun 2015 Urusan Ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 programn terdiri 41 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp5.749.023.900,00, realisasi sebesar Rp5.485.363.134,00 tidak terserap Rp263.660.766,00 disebabkan antara lain:



- 1) Efisiensi Rp253.171.766,00
- 2) Sisa Lelang Rp10.489.000,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sejumlah 340 orang;
- Tercapainya peningkatan pemahaman dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan pencari kerja pada 50 orang pencari kerja;
- Terciptanya tenaga kerja terampil yang siap pakai sejumlah 450 orang;
- Terlaksananya kegiatan Job Fair sebanyak 1 kali;
- Terciptanya kelompok kerja yang produktif sebanyak 60 orang;
- Tersusunnya laporan bulanan Informasi Pasar Kerja;
- Terlaksananya pembinaan lanjutan dan ekspos produk kewirausahaan pada 18 Kecamatan;
- Terlaksananya pembinaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada 5 lembaga dan 200 Calon TKI;
- Terlaksananya pendataan tenaga kerja asing pada pada 60 orang;
- Terlaksananya fasilitasi pendaftaran pencari kerja penyandang cacat, pendaftaran/pencarian lowongan kerja penyandang cacat;
- Terlaksananya pencegahan perselisihan hubungan industrial sebanyak 55 kasus;
- Terlaksananya sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;

- Terwujudnya standar upah yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak;
- Tersusunnya Buku Usulan dan Saran teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan hasil kegiatan LKS Tripartit serta jumlah peserta sosialisasi LKS Bipartit;
- Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan norma-norma ketenagakerjaan sebanyak 280 kali;
- Terlaksananya sosialisasi peningkatan sumber daya manusia sebanyak 100 orang anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan dan Pengolahan LKS Bipartit di Perusahaan sebanyak 70orang;
- Terlaksananya pembinaan hubungan industrial ke perusahaan sebanyak 110 perusahaan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2015 , adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja			SANGAT TINGGI
	Jumlah penduduk Angkatan Kerja	orang	596.841	
	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)	orang	879.777	
	a. Target	%	67,84	
	b. Realisasi	%	67,84	
	Capaian: (b:a)X100	%	100,00	
2	Penempatan para pencari kerja			SANGAT TINGGI
	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang	2.317	
	jumlah pencari kerja yang mendaftar	orang	2.502	
	a. Target	%	31,43	
	b. Realisasi	%	92,61	
	Capaian: (b:a)X100	%	294,64	
3	Jumlah pengangguran penduduk usia 15 keatas yang termasuk angkatan kerja			SANGAT TINGGI
	jumlah pengangguran usia 15 tahun keatas	orang	26.346	
	jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	orang	596.841	
	a. Target	%	5,50	
	b. Realisasi	%	4,41	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	119,74	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
4	Kepatuhan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja jumlah perusahaan yang memenuhi norma K3	Buah	1.184	SANGAT TINGGI
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.308	
	a. Target	%	70,97	
	b. Realisasi	%	90,52	
	Capaian (b:a)X100	%	127,55	
5	Kepatuhan terhadap norma kerja Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan Norma Kerja	Buah	805	SEDANG
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.308	
	a. Target	%	92,80	
	b. Realisasi	%	61,54	
	Capaian (b:a)X100	%	66,32	
6	Kepatuhan terhadap norma jaminan social tenaga kerja Jumlah perusahaan yang memenuhi norma jamsostek	Buah	1.611	SANGAT TINGGI
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.308	
	a. Target	%	99,58	
	b. Realisasi	%	123,17	
	Capaian (b:a)X100	%	123,68	
7	Angka nihil kecelakaan kerja Jumlah perusahaan yang tidak mengalami kecelakaan kerja	Buah	78	SANGAT TINGGI
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.308	
	a. Target	%	2,17	
	b. Realisasi	%	5,96	
	Capaian (b:a)X100	%	274,81	
8	Penuntasan / penyelesaian perselisihan hubungan industrial Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan secara tripartit oleh Disnakertrans dengan Persetujuan Bersama maupun yang diteruskan ke lembaga P4D dan P4P	Kasus	81	TINGGI
	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Disnakertrans	Kasus	92	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	88,04	
	Capaian (b:a)X100	%	88,04	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
9	Pemberlakuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama Jumlah perusahaan yang sudah memberlakukan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Buah	110	SANGAT TINGGI
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.308	
	a. Target	%	9,00	
	b. Realisasi	%	8,41	
	Capaian (b:a)X100	%	93,44	
10	Kepatuhan atas ketentuan mengenai pembentukan lembaga kerjasama Bipartit Jumlah perusahaan yang sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit	Buah	149	SANGAT TINGGI
	Jumlah perusahaan yang wajib membentuk lembaga kerjasama Bipartit	Buah	705	
	a. Target	%	4,24	
	b. Realisasi	%	21,13	
	Capaian (b:a)X100	%	498,46	

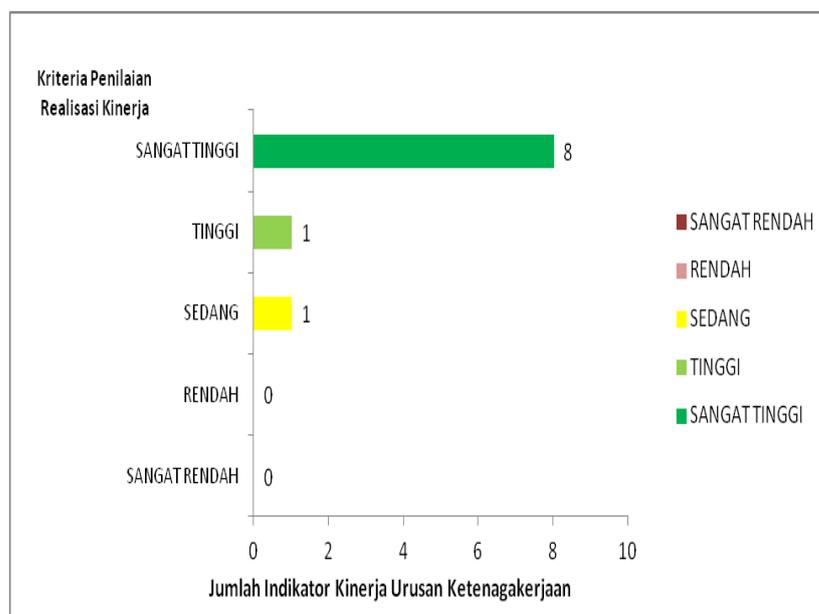
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Ketenagakerjaan diketahui bahwa dari 10 indikator kinerja, 9 indikator bernilai sangat tinggi dan 1 indikator bernilai tinggi.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.14
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik



Prestasi Urusan Ketenagakerjaan antara lain:

- Penghargaan Rangking K3 PT. Lautan Luas Tingkat Nasional;
- Penghargaan Kecelakaan Nihil PT. Liku Telaga Tingkat Provinsi Jawa Timur.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pada Tahun 2015 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 43 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp5.176.270.000,00 realisasi sebesar Rp5.062.106.653,00 tidak terserap Rp114.163.347,00 rupiah dengan rincian sebagai berikut:

1) Efisiensi Rp66.927.877,00

2) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Rp47.235.470,00

Dilaksanakan

15.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 7 program terdiri 31 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.042.270.000,00 realisasi sebesar Rp4.013.312.723,00, tidak terserap Rp28.957.277,00, disebabkan adanya efisiensi;

15.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp851.500.000,00 realisasi sebesar Rp767.713.930,00, tidak terserap Rp83.786.070,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi Rp36.550.600,00

2) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Rp47.235.470,00

Dilaksanakan

15.3. Kecamatan Gresik melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp25.000.000,00;



- 15.4. Kecamatan Kebomas melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp35.000.000,00 realisasi sebesar Rp34.655.000,00, tidak terserap Rp345.000,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 5.5. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp25.000.000,00;
- 15.6. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp25.000.000,00;
- 15.7. Kecamatan Balong Panggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp22.500.000,00 realisasi sebesar Rp22.400.000,00, tidak terserap Rp100.000,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 15.8. Kecamatan Duduk sampean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp25.000.000,00;
- 15.9. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp25.000.000,00;
- 15.10. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00 realisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 15.11. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp25.000.000,00;
- 15.12. Kecamatan Bungah Panggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp25.000.000,00;

15.13. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00 realisasi sebesar Rp15.000.000,00;

15.14. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00 realisasi sebesar Rp19.025.000,00, tidak terserap Rp975.000,00, disebabkan adanya efisiensi;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terselenggaranya Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro dan Menengah pada 50 UKM;
- Terselenggaranya fasilitas untuk memperluas jaringan pameran bagi KUKM sebanyak 4 kali pameran;
- Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan untuk peningkatan SDM bagi Wirausaha di Kabupaten Gresik sebanyak 5 kali;
- Tersusunnya Buletin Promosi Produk Unggulan sebanyak 995 buku;
- Terselenggaranya Expose Produk sebanyak 31 kali kegiatan;
- Terselenggaranya pelatihan peningkatan manajemen bagi UKM, IKM dan Koperasi untuk 100 peserta;
- Terwujudnya pembentukan dan pembinaan pengembangan Dekranasda sebanyak 30 UMKM;
- Terselenggaranya kegiatan pembinaan Koperasi berprestasi sebanyak 500 Koperasi;
- Terwujudnya Koperasi yang sehat dan akuntabel sebanyak 75 Koperasi;
- Terbinanya Koperasi yang mampu mensejahterahkan anggota Masyarakat sebanyak 150 koperasi;
- Terwujudnya Koperasi yang mandiri sebanyak 40 Koperasi;
- Tersedianya laporan hasil Pengawasan barang yang memenuhi standart mutu sebanyak 5 komoditi;
- Terselenggaranya pelatihan ekspor dan kewirausahaan sebanyak 150 orang;
- Terselenggaranya kegiatan pembinaan organisasi PKL dan Asongan;

- Terpeliharanya sarana prasarana pasar sebanyak 7 pasar;
- Terlaksananya Revitalisasi Pasar Rakyat;
- Terselenggaranya pembinaan IKM untuk memperkuat jaringan klaster sebanyak 120 orang (3 sentra);
- Tersedianya database sentra Industri Kecil Menengah;
- Terselenggaranya pelatihan standart mutu barang sebanyak 70 Industri Kecil Menengah;
- Terlaksananya sosialisasi kelengkapan legalitas industri kecil menengah sebanyak 126 Industri Kecil Menengah;
- Terlaksananya verifikasi proses produksi Industri Kecil Menengah sebanyak 50 perusahaan;
- Terlaksananya kegiatan fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah tentang pemanfaatan sumberdaya alam sebanyak 90 peserta;
- Terlaksananya pelatihan pembinaan kemampuan teknologi industri IKM sebanyak 120 orang (3 sentra);
- Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu produk IKM sebanyak 120 orang (3 sentra);
- Terselenggara Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah sebanyak 3 kali;
- Terselenggaranya Fasilitasi UMK, Nelayan dan MBR yang sudah dan yang belum memperoleh SHAT sebanyak 120 orang;
- Terlaksananya UKM Award di Kab. Gresik;
- Penyusunan Desain City Branding Kabupaten Gresik;
- Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga Keuangan Mikro di Kecamatan Kebomas;
- Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri Menengah sebanyak 75 IKM di Kecamatan Balongpanggang;
- Terlaksananya sosialisasi kader Koperasi dalam Pemahaman pengelolaan Administrasi Koperasi sebanyak 46 orang di Kecamatan Duduksampeyan;
- Pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD pada 16 desa di Kecamatan Wringinanom;

- Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi UKM di Kec. Bungah sebanyak 264 orang;
- Terlaksananya koordinasi pengurus Koperasi Wanita (Kopwan) dalam menjalankan kelembagaan koperasi di desa.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1.	Koperasi aktif			SANGAT TINGGI
	Jumlah Koperasi aktif		1143	
	Jumlah seluruh koperasi		1209	
	a. Target	%	95	
	b. Realisasi	%	95	
	c. Capaian(b : a) X 100%	%	100	
2.	Usaha mikro dan kecil			SANGAT TINGGI
	Jumlah usaha mikro dan kecil		187.052	
	Jumlah seluruh UKM		188.534	
	a. Target	%	64	
	b. Realisasi	%	99	
	c. Capaian(b : a) X 100%	%	155	
3.	Koperasi yang mendapatkan penilaian baik			SANGAT TINGGI
	Jumlah koperasi yang mendapat penilaian baik tahun ini		261	
	Jumlah seluruh koperasi		314	
	a. Target	%	83	
	b. Realisasi	%	83,12	
	c. Capaian(b : a) X 100%	%	100	

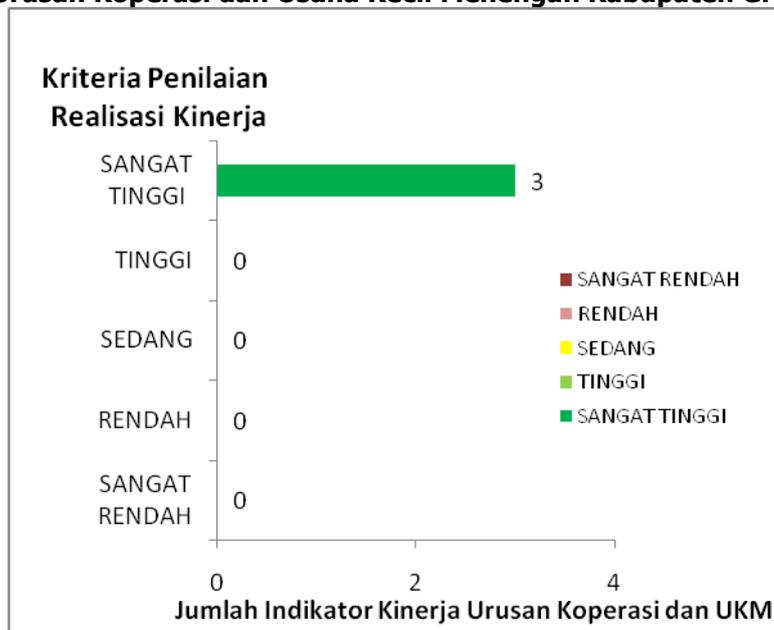
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.15
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gresik



16. Urusan Penanaman Modal

Pada Tahun 2015 Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, serta Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 44 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.317.241.500,00 realisasi sebesar Rp5.617.237.863,00 tidak terserap Rp700.003.637,00 dengan rincian sebagai berikut:



16.1. Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan 5 program terdiri 42 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.364.741.500,00, realisasi sebesar Rp4.698.288.913,00 tidak terserap Rp668.452.587,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp539.244.587,00
- 2) Sisa Lelang Rp129.208.000,00

16.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp952.500.000,00, realisasi sebesar Rp920.948.950,00 tidak terserap Rp31.551.050,00 disebabkan adanya Efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya buku pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN di Kabupaten Gresik sebanyak 10 buku;
- Terlaksananya forum komunikasi dan kerjasama bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha sebanyak 2 kali;
- Terlaksana pemeliharaan aplikasi dan perangkat lunak pelayanan;
- Tersedianya buku Laporan evaluasi kegiatan penanaman modal serta terlaksananya pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- Terwujudnya pengembangan pelayanan investasi sesuai dengan standar *International Organization for Standardization (ISO 9001:2008)*;

- Tersedianya data tata ruang investasi yang detail berdasarkan Geography Information System Potensi Investasi;
- Terlaksananya pelaksanaan promosi investasi;
- Terlaksananya fasilitasi kemitraan pengusaha daerah dengan PMA PMDN serta Sektor Migas;
- Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan regulasi sebanyak 213 izin;
- Tersedianya kajian regulasi daerah di bidang penanaman modal;
- Tersusunnya BAP realisasi investasi perusahaan sebanyak 603 BAP;
- Terlaksananya pendaftaran perusahaan di 18 kecamatan;
- Terlaksananya operasional tim percepatan pengembangan Gresik Selatan;
- Terlaksananya rekomendasi penerbitan izin Gangguan (HO) dan Izin Usaha sebanyak 331 izin;
- Terlaksananya pelayanan izin prinsip dan lokasi sebanyak 333 izin;
- Terlaksananya verifikasi perizinan usaha sebanyak 58 perusahaan;
- Terlaksananya sosialisasi perizinan di 390 orang;
- Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah penanam modal;
- Tersedianya sistem pelayanan perizinan secara online;
- Tersusunnya dokumen kajian terkait Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD);
- Tersusunnya dokumen kajian skala prioritas kebutuhan infrastruktur untuk menunjang pengembangan kawasan industri di Gresik Utara;
- Terselenggarakannya kegiatan pasar bandeng dan kontes bandeng tradisional sebanyak 2 event;
- Terfasilitasinya kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha selama 1 Tahun;
- Tercapainya peningkatan kinerja BUMD sebanyak 3 BUMD.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Penanaman Modal Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1.	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN			SANGAT TINGGI
	a. Target	Milyar Rp.	894,00	
	b. Realisasi	Milyar Rp.	4.601,53	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	514,71	
2.	Ijin Lokasi			SANGAT TINGGI
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	55	
	Jumlah permohonan ijin	Buah	59	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	93,22	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	93,22	
3.	Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)			TINGGI
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	18	
	Jumlah permohonan ijin	Buah	23	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	78,26	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	78,26	
4.	Ijin Gangguan (HO)			SANGAT TINGGI
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	275	
	Jumlah permohonan ijin	Buah	256	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	107,42	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	107,42	
5.	Ijin Mendirikan Bangunan			TINGGI
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah		

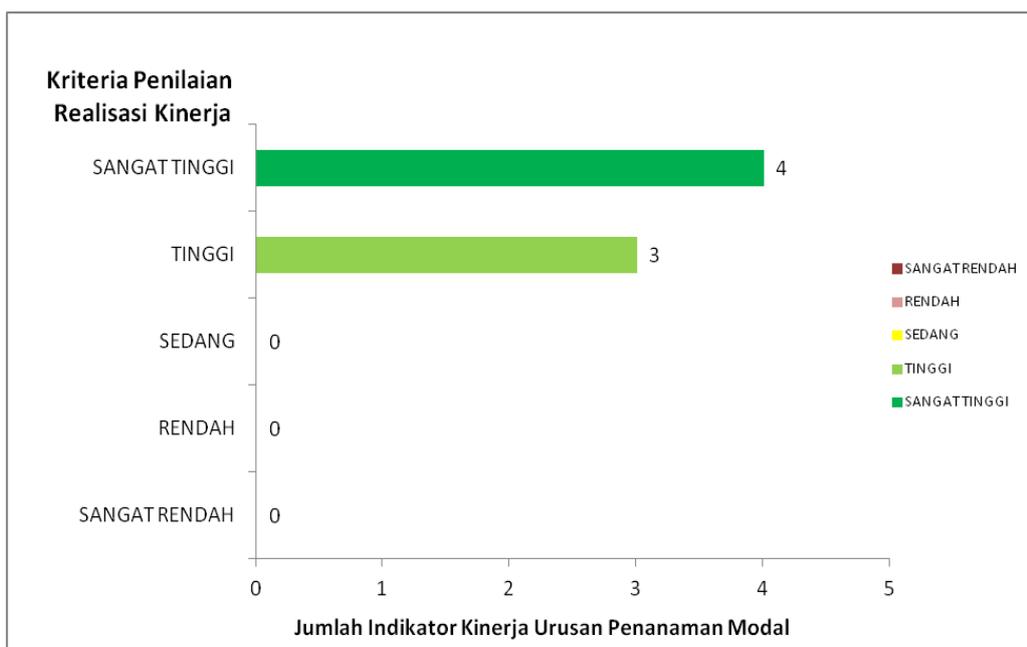
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
			495	
	Jumlah permohonan ijin	Buah	561	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	88,24	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	88,24	
6.	Ijin Prinsip			
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	278	SANGAT TINGGI
	Jumlah permohonan ijin	Buah	263	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	105,70	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	105,70	
7.	Ijin Usaha			
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	73	TINGGI
	Jumlah permohonan ijin	Buah	81	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	90,12	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	90,12	

Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Penanaman Modal diketahui bahwa dari 7 indikator kinerja, 4 indikator bernilai sangat tinggi; 2 indikator bernilai tinggi, dan 1 indikator bernilai sedang. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.16
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Penanaman Modal Kabupaten Gresik



17. Urusan Kebudayaan

Pada Tahun 2015 Urusan Kebudayaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 27 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp6.444.420.500,00,00 realisasi sebesar Rp6.090.442.943,00, tidak terserap Rp353.977.557,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp72.339.415,00
- 2) Sisa Lelang Rp39.286.800,00
- 3) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Rp242.351.342,00



Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pelestarian adat budaya daerah;
- Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air;
- Terlaksananya pengelolaan museum;
- Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Tingkat Provinsi yang diselenggarakan di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya fasilitasi Perkembangan keragaman budaya daerah;
- Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah;
- Terlaksananya pembangunan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kebudayaan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

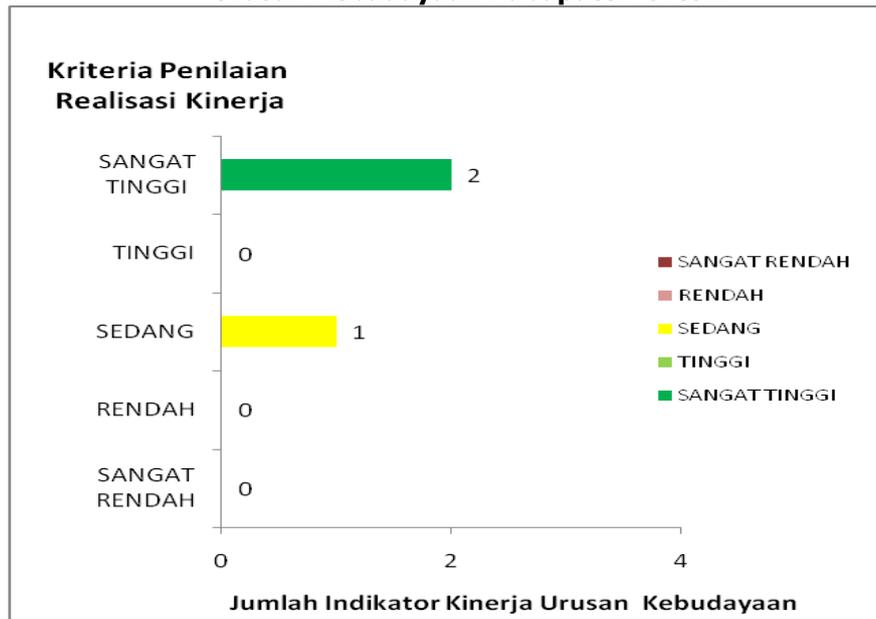
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kejadian		SANGAT TINGGI
	a. Target	kali	9	
	b. Realisasi	kali	18	
	Capaian (b:a)X100%	%	200,00	
2.	Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya			SEDANG
	a. Target	unit	9	
	b. Realisasi	unit	6	
	Capaian (b:a)X100%	%	66,67	
3.	Peninggalan/cagar budaya (situs) yang dilestarikan Jumlah peninggalan / cagar budaya (situs) yang dilestarikan	Buah	46	SANGAT TINGGI
	Total peninggalan / cagar budaya (situs) yang dimiliki daerah	Buah	46	
	a. Target	%	36,36	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b:a)X100%	%	275,03	

Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kebudayaan diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja, 2 indikator bernilai sangat tinggi; dan 1 indikator bernilai sedang. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.17
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik



Prestasi Urusan Urusan Kebudayaan antara lain:

- Juara III Stand Terbaik Majapahit Trevel Fair;
- Miss Earth Indonesia Kategori Sporty Di Jakarta;
- Finalis 25 Besar Putri Muslimah Indonesia;
- Juara III Putra Batik Indonesia Indonesia;
- Juara I Pemilihan Duta Musium Putera Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Pemilihan Duta Musium Puteri Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Harapan I Duta Lantas Jatim Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara The Cleanest Hotel Kategori Non Bintang Usaha Hotel Anugerah Wisata Jawa Timur Tingkat.

18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Tahun 2015 Urusan Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Sekretariat Daerah; dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.957.409.000,00, realisasi sebesar Rp2.650.335.680,00, tidak terserap Rp307.073.320,00 dengan rincian sebagai berikut:



18.1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan 6 program terdiri 14 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.252.100.000,00, realisasi sebesar Rp1.987.016.050,00, tidak terserap Rp265.083.950,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp59.551.650,00
- 2) Sisa lelang Rp1.754.300,00
- 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp203.778.000,00

18.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp440.140.000,00, realisasi sebesar Rp399.450.630,00, tidak terserap Rp40.689.370,00, disebabkan adanya efisiensi.

18.3. Kecamatan Gresik melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp36.375.000,00, realisasi sebesar Rp35.275.000,00 tidak terserap Rp1.100.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

18.4. Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp38.500.000,00, realisasi sebesar Rp38.500.000,00.

- 18.5. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp24.500.000,00, realisasi sebesar Rp24.300.000,00, tidak terserap Rp200.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 18.6. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.250.000,00, realisasi sebesar Rp9.250.000,00.
- 18.7. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 18.8. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,00, realisasi sebesar sebesar Rp.15.000.000,00.
- 18.9. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,00, realisasi sebesar Rp.15.000.000,00.
- 18.10. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 18.11. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.450.000,00, realisasi sebesar Rp8.450.000,00.
- 18.12. Kecamatan Ujung Pangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 18.13. Kecamatan Bungah melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp63.094.000,00, realisasi sebesar Rp63.094.000,00.
- 18.14. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terselenggaranya pembinaan generasi muda dalam hal keimanan dan ketaqwaan sebanyak 225 orang;
- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pemuda Kabupaten Gresik di bidang kepemimpinan;
- Tercapainya pembinaan dan penyeleksian pemuda pelopor;
- Terlaksananya pameran hasil ekonomi kreatif pemuda;
- Terlaksananya pembinaan pemuda antar propinsi, SP3 dan paskibraka;
- Tercapainya peningkatannya jumlah pemuda Kabupaten Gresik yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
- Terlaksananya pembinaan tenaga keolahragaan di Kabupaten Gresik;
- Meningkatnya kebugaran jasmani karyawan dan masyarakat Kabupaten Gresik;
- Terselenggaranya kompetisi olahraga di Kabupaten Gresik;
- Terselenggaranya pemasaran olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat sebanyak 5000 orang;
- Terselenggaranya olahraga rekreasi masyarakat di Kabupaten Gresik sebanyak 4000 peserta;
- Terlaksananya olahraga tradisional gerak jalan Balongpanggung-Gresik;
- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan sebanyak 300 orang;
- Terlaksananya peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya;
- Terlaksananya pembinaan karang taruna sebanyak 70 orang.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif			
	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Orang	26	SANGAT TINGGI
	Jumlah seluruh organisasi kepemudaan	Orang	26	
	a. Target	%	100	
	b. Realisasi	%	100	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100	
2	Gelandang/balai remaja (selain milik swasta)			
	Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten			SANGAT TINGGI
	a. Target	unit	2	
	b. Realisasi	unit	6	
	Capaian (b : a) X 100%	%	300	
3	Lapangan Olahraga			
	Jumlah lapangan olahraga di kabupaten			TINGGI
	a. Target	unit	27	
	b. Realisasi	unit	24	
	Capaian (b : a) X 100%	%	89	
4	Persentase Cabang olahraga yang aktif			
	Jumlah cabang olah raga yang aktif	Buah	31	SANGAT TINGGI
	Jumlah seluruh cabang olah raga	Buah	31	
	a. Target	%	96,66	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	103,46	

Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pemuda Dan Olahraga diketahui bahwa dari 4 indikator kinerja, 3 indikator bernilai sangat tinggi; dan 1 indikator bernilai tinggi.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.18
Capaian Indikator Kinerja RPJM
Urusan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gresik



Prestasi Urusan Pemuda dan Olahraga antara lain:

- Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Panjat Tebing Kategori Lead Perorangan Putri Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Panjat Tebing Kategori Boulder Perorangan Putri Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Panjat Tebing Kategori Speed Classic Perorangan Putri Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Panjat Tebing Kategori Speed World Recor Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Panjat Tebing Kategori Lead Beregu Putri Tingkat Provinsi Jawa Timur;

- Juara I Lomba Panjat Tebing Kategori Boulder Beregu Putri Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Panjat Tebing Kategori Speed Classic Beregu Putri Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Kategori Lontar Martil Putra Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Renang Kategori Boys 200 Lc Meter Butterfly Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Renang Kategori Girls 200 Lc Meter Im Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Renang Kategori Boys 200 Lc Meter Breaststroke Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Renang Kategori Boys 100 Lc Meter Breaststroke Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Renang Kategori Girls 400 Lc Meter Im Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Renang Kategori Girls 200 Lc Meter Backstroke Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Renang Kategori Girls 200 Lc Meter Freestyle Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Renang Kategori Girls 800 Lc Meter Freestyle Relay Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Tenis Lapangan Kategori Tunggal Putri Perorangan Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Tenis Lapangan Kategori Ganda Mix Perorangan Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Kategori Hoki Indoor Putra Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Kategori Hoki Outdoor Putra Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Sepak Takraw Kategori Double Event Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Senam Kategori Beregu Putra (Lantai, Meja Lompat, Palang Tunggal Dan Kuda Pelana) Tingkat Provinsi Jawa Timur;

- Juara I Lomba Senam Kategori Senam Artistik Putra (Lantai, Meja Lompat, Palang Tunggal Dan Kuda Pelana) Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Senam Kategori Senam Artistik Putra Meja Lompat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Senam Kategori Senam Artistik Putri Palang Bertingkat Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Senam Kategori Senam Artistik Putri Lantai Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Senam Kategori Rythmic Gymnastic Woman Team (Tall, Gada, Bola Dan Simpai) Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Senam Kategori Rhythmic Gymnastic Bola (Individual) Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Senam Kategori Rhythmic Gymnastic Ribbon (Individual) Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Bulutangkis Kategori Ganda Mix Perorangan Tingkat Provinsi Jawa Timur.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada Tahun 2015 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Satuan Polisi Pamong Praja; Sekretariat Daerah; Dinas Sosial dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 13 program terdiri 79 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp17,518,628,000,00 realisasi sebesar Rp16.851.574.457,00 tidak terserap Rp667.053.543,00 dengan rincian sebagai berikut:



19.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 1 program terdiri 14 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.607.684.000,00, realisasi sebesar Rp1.545.654.745,00, tidak terserap Rp62.029.255,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp58.896.455,00
- 2) Sisa Lelang Rp3.132.800,00

19.2. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 9 program terdiri 29 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.439.660.500,00 realisasi sebesar Rp5.101.488.280,00 tidak terserap Rp338.172.220,00 disebabkan adanya efisiensi;

19.3. Satuan Polisi Pamongpraaja melaksanakan 8 program terdiri 29 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.097.838.500,00, realisasi sebesar Rp4.049.896.182,00 tidak terserap Rp47.942.318,00 disebabkan adanya efisiensi;

19.4. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 11 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.319.711.100,00, realisasi sebesar Rp4.134.803.600,00 tidak terserap Rp184.907.500,00 disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp83.907.500,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp101.000.000,00 |
- 19.5. Dinas sosial melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp140.000.000,00, realisasi sebesar Rp134.200.000,00 tidak terserap Rp5.800.000,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.6. Kecamatan Gresik melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp107.300.000,00, realisasi sebesar Rp107.299.800,00 tidak terserap Rp200,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.7. Kecamatan Kebomas melaksanakan 4 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp126.900.000,00, realisasi sebesar Rp123.900.000,00 tidak terserap Rp3.000.000,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.8. Kecamatan Manyar melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp72.500.000,00, realisasi sebesar Rp72.100.000,00 tidak terserap Rp400.000,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.9. Kecamatan Cerme melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp80.000.000,00, realisasi sebesar Rp79.920.000,00 tidak terserap Rp80.000,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.10. Kecamatan Benjeng melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp128.600.000,00, realisasi sebesar Rp128.600.000,00;
- 19.11. Kecamatan Balongpanggung melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp111.000.000,00, realisasi sebesar Rp111.000.000,00;

- 19.12. Kecamatan Dudusampayan melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp97.800.000,00, realisasi sebesar Rp97.296.450,00 tidak terserap 503.550,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.13. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp116.000.000,00, realisasi sebesar Rp116.000.000,00;
- 19.14. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp70.000.000,00, realisasi sebesar Rp70.000.000,00;
- 19.15. Kecamatan Kedamean melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp130.147.600,00, realisasi sebesar Rp130.147.600,00;
- 19.16. Kecamatan Menganti melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp100.544.800,00, realisasi sebesar Rp100.544.800,00;
- 19.17. Kecamatan Sidayu melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp96.403.500,00, realisasi sebesar Rp96.403.500,00;
- 19.18. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 4 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp111.200.000,00, realisasi sebesar Rp111.200.000,00;
- 19.19. Kecamatan Panceng melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp94.502.000,00, realisasi sebesar Rp94.502.000,00;
- 19.20. Kecamatan Bungah melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp117.000.000,00, realisasi sebesar Rp117.000.000,00;
- 19.21. Kecamatan Dukun melaksanakan 4 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp100.250.000,00, realisasi sebesar Rp100.250.000,00;

- 19.22. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp129.000.000,00, realisasi sebesar Rp112.724.500,00 tidak terserap Rp16.275.500,00; disebabkan adanya efisiensi;
- 19.23. Kecamatan Tambak melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp124.586.000, realisasi sebesar Rp116.643.000,00 tidak terserap Rp7.943.000,00 disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pembinaan usaha ekonomi produktif bagi korban pasca bencana;
- Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi bencana;
- Tersedianya kebutuhan sembako dan air bersih bagi korban bencana sebanyak 1050 paket sembako dan 225 tangki air bersih;
- Terlaksananya sosialisasi mitigasi bencana kepada aparat dan masyarakat;
- Tersedianya air bersih untuk daerah rawan bencana;
- Terwujudnya petugas tanggap darurat bencana yang tangguh;
- Terselenggaranya posko siaga banjir dan tanah longsor;
- Tersusunnya sistem informasi bencana daerah pada BPBD;
- Terpeliharanya peralatan kerja logistik kebencanaan;
- Terselenggaranya operasional pelayanan bencana;
- Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan pasca bencana;
- Terlaksananya Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Saran Prasarana Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana;
- Terlaksananya pelatihan Tim Tanggap Bencana (SAR) sebanyak 60 orang;
- Terlaksananya petugas pengamanan hari-hari besar dan unjuk rasa;
- Terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Gresik) yang aman dan kondusif;

- Terlaksananya evaluasi, pengawasan dan pelaporan pemilihan Kepala Daerah;
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
- Terselenggaranya Semiloka Implementasi Rencana Aksi Nasional (HAM) sebanyak 140 orang;
- Terlaksananya tim terpadu tingkat kabupaten penanganan gangguan keamanan dalam negeri;
- Terpeliharanya kerukunan antar umat beragama;
- Terlaksananya upacara hari-hari besar Nasional;
- Terlaksananya fasilitasi pencapaian halaqoh dan forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan sebanyak 100 orang;
- Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan kepada generasi muda / murid SMA sebanyak 450 orang;
- Terlaksananya upacara bendera 17 Agustus 2015;
- Terbinanya anggota korsik;
- Terlaksananya verifikasi dan pembinaan administrasi bantuan keuangan parpol;
- Terbentuknya forum kewaspadaan dini masyarakat;
- Terlaksananya upacara hari jadi Propinsi Jawa Timur;
- Terciptanya situasi keamanan yang kondusif;
- Terciptanya kesiagaan aparat keamanan desa dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan;
- Terlaksananya penyidikan dan penindakan terhadap pelanggar PERDA;
- Terlaksananya operasi penertiban pelanggaran PERDA sebanyak 355 kali;
- Terlaksananya pembinaan mental dan jasmani anggota Satpol PP sebanyak 121 orang;
- Terciptanya kerjasama yang baik antar anggota Satpol PP se-Jawa Timur;

- Terlaksananya operasi penertiban larangan peredaran minuman keras (MIRAS) sebanyak 40 kali;
- Terlaksananya operasi penertiban pelarangan pelacuran dan perbuatan cabul /PSK sebanyak 53 kali;
- Tercapainya peningkatan kualitas dan prestasi khafilah yang dikirim mengikuti MTQ sebanyak 132 orang;
- Terselenggaranya peringatan hari besar Agama Islam;
- Terselenggaranya kegiatan pembinaan keagamaan kepada pengelola tempat ibadah dan zakat sebanyak 500 peserta;
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan operasional tempat ibadah yang mendapat bantuan sarana dan prasarana keagamaan sebanyak 350 lembaga;
- Terselenggaranya kegiatan istighosah dan khotmil Qur'an;
- Terlaksananya fasilitasi penyampaian santunan anak yatim dan fakir miskin;
- Terlaksananya pembinaan Kafilah MTQ Tingkat Provinsi sebanyak 42 orang;
- Peningkatan kualitas dan prestasi kafilah Musabaqoh Qiro'atil Kutub (MQK) sebanyak 24 orang;
- Terlaksananya penyaluran hewan qurban sebanyak 100 ekor kambing dan 25 ekor sapi;
- Terlaksananya kegiatan ramadhan;
- Terlaksananya pembinaan pengendalian keamanan lingkungan;
- Terlaksananya pembinaan LPTQ di tingkat kecamatan;
- Terlaksananya pembinaan anggota Linmas di daerah.

Adapun permasalahan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah :

- Adanya kegiatan pengamanan yang tidak dilaksanakan yaitu gerak jalan Balongpanggung Gresik;

Solusi atas permasalahan tersebut adalah:

- Dilaksanakan pengamanan yang bersifat insidental;

Adapun Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Jumlah Parpol yang dibina			SEDANG
	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap Parpol	Parpol		
	a. Target	%	11	
	b. Realisasi	%	8	
	Capaian (b:a) x 100	%	72,73	
2	Jumlah LSM / Ormas /OKP/ yang dibina			SANGAT TINGGI
	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	LSM/OKP		
	a. Target	LSM/OKP	164	
	b. Realisasi	LSM/OKP	192	
	Capaian (b:a) x 100	%	117	
3	Konflik yang dapat diselesaikan			SANGAT TINGGI
	Jumlah konflik yang diselesaikan	Perkara	8	
	Jumlah konflik yang ada	Perkara	8	
	a. Target	%	100	
	b. Realisasi	%	100	
Capaian (b:a) x 100	%	100		
4	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik			SANGAT TINGGI
	a. Target	%	80,00	
	b. Realisasi	%	99,19	
	Capaian (b:a) x 100	%	124	
5	Demo / protes terhadap Perda/Perbup			SANGAT TINGGI
	Jumlah demo yang tertib	kali	12	
	Jumlah demo	kali	12	
	a. Target	%	100	
	b. Realisasi	%	100	
	Capaian (b:a) x 100	%	100	
6	Keberadaan Perda tentang penyelenggaraan Trantibum			SANGAT TINGGI
	a. Target	ada/tidak	Ada	
	b. Realisasi	ada/tidak	Ada	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
	Capaian (b:a) x 100	ada/tidak	100	
7	Keberadaan Perda tentang PSK dan Miras			SANGAT TINGGI
	a. Target	ada/tidak	Ada	
	b. Realisasi	ada/tidak	Ada	
	Capaian (b:a) x 100	ada/tidak	100	
8	Rasio Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk (per 10.000 penduduk)			SANGAT TINGGI
	Jumlah personil Satpol PP	Orang	614	
	Jumlah penduduk	Orang	1.303.773	
	a. Target	%	0,05	
	b. Realisasi	%	0,05	
	Capaian (b:a) x 100	%	100,00	

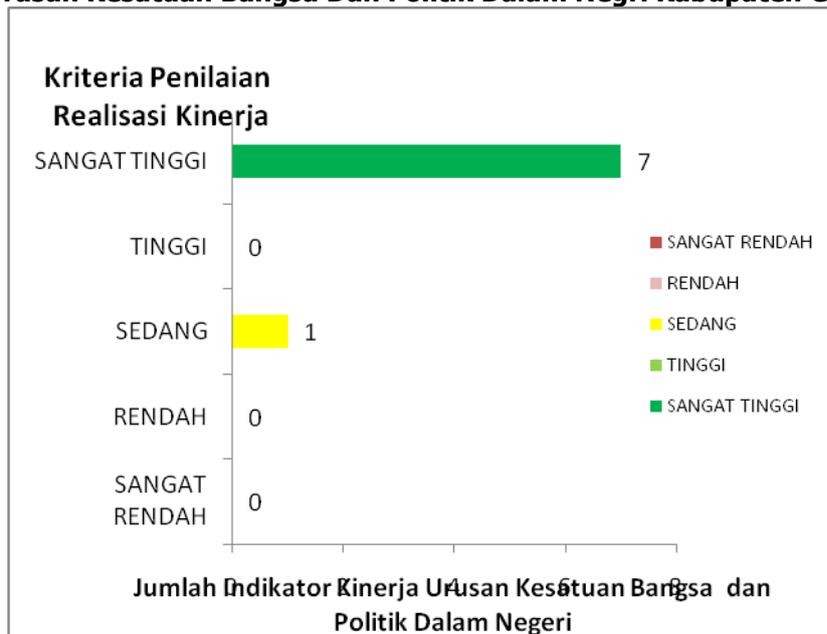
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Gresik diketahui bahwa dari 8 indikator kinerja, 7 indikator bernilai sangat tinggi; dan 1 indikator bernilai sedang.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.19
Capaian Indikator Kinerja RPJM
Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Gresik



Prestasi Urusan Pemuda dan Olahraga adalah Juara I Lomba Rangking-1 Jambore Satpol Pp XIII Se-Jawa Timur.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada Tahun 2015 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Kecamatan; dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 22 program terdiri 238 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp161.788.694.202,29, realisasi sebesar Rp136.407.550.635,00, tidak terserap Rp25.381.143.567,29, dengan rincian sebagai berikut:

20.1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 1 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.542.054.000,00, realisasi sebesar Rp1.291.415.403,00, tidak terserap Rp250.638.597,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp245.406.597,00.
- 2) Sisa Lelang Rp5.232.000,00.

20.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 15 program terdiri 88 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp73.621.624.823,29, realisasi sebesar Rp69.806.299.299,00, tidak terserap Rp3.815.325.524,29, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp3.145.865.029,00
- 2) Sisa Lelang Rp527.149.000,00
- 3) Kegiatan tidak dilaksanakan Rp875,910,800.00

- 20.3. Sekretariat DPRD melaksanakan 8 program terdiri 39 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp35.658.066.654,00, realisasi sebesar Rp22.544.820.403,00, tidak terserap Rp13.113.246.251,00, disebabkan antara lain:
- 1) Efisiensi Rp12.584.546.251,00
 - 2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp528.700.000,00.
- 20.4. Inspektorat Daerah melaksanakan 6 program terdiri 29 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.526.050.000,00, realisasi sebesar Rp3.053.424.599,00, tidak terserap Rp472.625.401,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 5 program terdiri 57 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.925.154.400,00, realisasi sebesar Rp19.949.548.827 tidak terserap Rp5.975.605.573,00, disebabkan antara lain:
- 1) Efisiensi Rp4.257.263.011,00
 - 2) Sisa Lelang Rp1.384.113.562,00
 - 1) Lelang gagal Rp207.313.000,00
 - 2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp126.916.000,00
- 20.6. Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 7 program terdiri 58 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.212.295.075,00, realisasi sebesar Rp6.961.352.385,00, tidak terserap Rp1.250.942.690,00, disebabkan antara lain:
- Efisiensi Rp1.134.026.358,00
 - Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp116.916.332,00

- 20.7. Kecamatan Gresik melaksanakan 6 program terdiri 41 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.329.472.250,00, realisasi sebesar Rp2.286.082.565,00, tidak terserap Rp43.389.685,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.8. Kecamatan Kebomas melaksanakan 7 program terdiri 35 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.627.611.000,00, realisasi sebesar Rp1.580.377.406,00, tidak terserap Rp47.233.594,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.9. Kecamatan Manyar melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp566.794.000,00, realisasi sebesar Rp531.951.290,00, tidak terserap Rp34.842.710,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.10. Kecamatan Cerme melaksanakan 5 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp536.969.000,00, realisasi sebesar Rp510.802.976,00, tidak terserap Rp26.166.024,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.11. Kecamatan Benjeng melaksanakan 5 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp532.669.500,00, realisasi sebesar Rp523.969.172,00, tidak terserap Rp8.700.328,00, disebabkan efisiensi;
- 20.12. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 6 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp483.707.500,00, realisasi sebesar Rp459.117.900,00, tidak terserap Rp24.589.600,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.13. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 5 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp504.625.000,00, realisasi sebesar Rp456.810.946,00, tidak terserap Rp47.814.054,00, disebabkan efisiensi;

20.14. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 6 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp574.200.000,00, realisasi sebesar Rp546.772.619,00, tidak terserap Rp27.427.381,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp18.001.131,00
- 2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp9.426.250,00

20.15. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 5 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp397.800.000,00, realisasi sebesar Rp394.451.676,00, tidak terserap Rp3.348.324,00, disebabkan adanya efisiensi;

20.16. Kecamatan Kedamean melaksanakan 2 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp428.852.400,00, realisasi sebesar Rp410.945.566,00, tidak terserap Rp17.906.834,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp1.726.834,00
- 2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp16.180.000,00

20.17. Kecamatan Menganti melaksanakan 5 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp536.381.600,00, realisasi sebesar Rp494.272.411,00, tidak terserap Rp42.104.189,00, disebabkan adanya efisiensi;

20.17. Kecamatan Sidayu melaksanakan 4 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp433.094.500,00, realisasi sebesar Rp428.403.707,00, tidak terserap Rp4.690.793,00, disebabkan adanya efisiensi;

20.18. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 2 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp479.950.000,00, realisasi sebesar Rp475.457.096,00, tidak terserap Rp4.492.904,00, disebabkan adanya efisiensi;

- 20.19. Kecamatan Panceng melaksanakan 5 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp539.548.000,00, realisasi sebesar Rp537.379.967,00, tidak terserap Rp2.168.033,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.20. Kecamatan Bungah melaksanakan 5 program terdiri 23 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp522.578.000,00, realisasi sebesar Rp508.446.504,00, tidak terserap Rp14.131.496,00, disebabkan antara lain:
- 1) Efisiensi Rp12.886.496,00
 - 2) Sisa lelang Rp1.245.000,00
- 20.21. Kecamatan Dukun melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp612.750.000,00, realisasi sebesar Rp600.312.800,00, tidak terserap Rp12.437.200,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.22. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp612.402.500,00, realisasi sebesar Rp527.585.688,00, tidak terserap Rp84.816.812,00, disebabkan efisiensi;
- 20.22. Kecamatan Tambak melaksanakan 5 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp550.114.000,00, realisasi sebesar Rp502.980.030,00, tidak terserap Rp47.133.970,00, disebabkan antara lain:
- 1) Efisiensi Rp25.203.970,00
 - 2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp21.930.000,00
- 20.23. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI melaksanakan 4 program terdiri 23 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp306.500.000,00, realisasi sebesar Rp306.500.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya dokumen strategi untuk pengembangan pelayanan perijinan penelitian;
- Tersusunnya rekomendasi aksi pengembangan kemitraan pembangunan yang berkelanjutan;
- Terjalannya koordinasi forum komunikasi PTS sebanyak 16 lembaga;
- Tersusunnya kebijakan Strategis Pembangunan Daerah di bidang IPTEK;
- Terintegrasinya Sistem Inovasi Daerah kedalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD);
- Tersedianya dokumen pemetaan jaringan internet.
- Meningkatnya Pelayanan Publik terhadap penerimaan Kunjungan Kerja;
- Terselenggaranya Rapat Koordinasi Unsur Muspida sebanyak 24 kali;
- Terselenggaranya pelaksanaan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah sebanyak 51 kali;
- Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah;
- Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- terselesaikannya tugas-tugas KDH dan Wakil KDH;
- Terselenggaranya Pelantikan Kepala Daerah/Serah Terima Jabatan Bupati Gresik kepada Pj Bupati Gresik;
- Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Buku Standart Satuan Harga;
- Terselenggaranya sosialisasi peraturan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebanyak 186 peserta;
- Peningkatan SDM Pengelola Aset / BMD dan pendataan Aset / BMD di Lingkup Setda untuk 15 orang dan 11 Bagian;
- Tersedianya Sistem Aplikasi Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta terlaksananya Bimtek;
- Tersusunnya Petunjuk Teknis, RAB dan Gambar Perencanaan serta terlaksananya Pengendalian Kegiatan JPD

- Tersusunnya Petunjuk Teknis, RAB dan Gambar Perencanaan Plengsengan/TPT serta terlaksananya Pengendalian Kegiatan;
- Terlaksananya pengelolaan Bantuan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- Terwujudnya kegiatan ADD sesuai petunjuk teknis;
- Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi ADD;
- Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa kepada 330 bendahara desa;
- Tersedianya Lisensi cpanel dan xitric;
- Adanya proteksi data - data virus elektronik dari virus / spyware yang terkoneksi WAN dan LAN pada 56 SKPD;
- Tersedianya data warehouse pada 58 SKPD;
- Tertanganinya pengaduan masyarakat sebanyak 95 pengaduan masyarakat;
- terselesaikannya permasalahan peraturan perundang-undangan;
- Terlaksananya penyusunan dan pembahasan Perda sebanyak 15 Perda dan Perbub sebanyak 49 Perbub;
- Ditetapkan atau diundangkannya Perda dan Perbup sesuai dengan penyusunan pembentukan Perda;
- Terlaksananya sosialisasi Desa Sadar Hukum, penyuluhan hukum dan lomba Kadarkum;
- Tersedianya buku abstrak dan katalog perundang-undangan sebanyak 800 buku;
- Terlaksananya kajian produk hukum daerah sebanyak 12 Peraturan;
- Terlaksananya penanganan pelanggaran peraturan daerah sebanyak 8 perkara;
- Tersedianya buku himpunan Perbup dan Perda sebanyak 1.200 buku;
- Terdokumentasikannya produk hukum daerah, baik secara fisik maupun elektronik;
- Terlaksananya kompetensi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Desa dan Kelurahan;

- Tersusunnya Buku Profil Inovasi Pelayanan Publik dan Otonomi Daerah sebanyak 15 buku;
- Terlaksananya Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang sesuai dengan regulasi terbaru dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan;
- Terbentuknya Kelompok Budaya Kerja (KBK) siap kompetisi sebanyak 3 KBK;
- Tersusunnya IKM 25 unit pelayanan;
- Terlaksananya Gelar Pelayanan Publik tingkat propinsi JawaTimur;
- Tersusunnya Draft Perbub Kompetensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- Tersusunnya Setandart Operasional Prosedur (SOP) untuk 2 SKPD;
- Tersusunnya 5 bidang Standart Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintah;
- Terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Daerah untuk 10 SKPD;
- Terselenggaranya Pembinaan Kinerja Aparatur Kecamatan sebanyak 190 orang;
- Tersusunnya Buku Hasil Analisa Beban Kerja (ABK) dan urusan sebanyak 112 buku;
- Tersusunnya laporan hasil hearing/dialog dan koordinasi dengan eksekutif dan tokoh masyarakat;
- Terlaksananya kegiatan reses sebanyak 3 kali;
- Terselenggaranya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah sebanyak 180 kali;
- Peningkatan pengetahuan/ketrampilan SDM bagi Anggota DPRD;
- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang – undangan;
- Meningkatnya produk - produk Peraturan Daerah yang berkualitas;
- Tersusunnya laporan kinerja Badan Kehormatan DPRD sebanyak 75 buku;
- Terlaksananya penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda);

- Tersusunnya Peraturan Daerah perhitungan APBD 2014 dan Rekonsiliasi LKPJ Kepala Daerah;
- Terlaksananya kunjungan kerja DPRD kelaur daerah;
- Terpublikasikannya kegiatan DPRD melalui website;
- Tertanganinya pengaduan sehingga terwujud kepuasan masyarakat;
- Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan sebanyak 68 LHP;
- Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus yang ditandatangani Bupati Gresik sebanyak 90 LHP;
- Tersusunnya dokumen inventarisasi temuan pengawasan selama 1 tahun;
- Terlaksananya tindaklanjut pemeriksaan terhadap temuan pengawasan sebanyak 68 obyek pemeriksaan;
- Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal;
- Terlaksananya evaluasi terhadap temuan pengawasan internal yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 432 temuan;
- Tersusunnya Laporan Hasil Review (LHR) atas laporan keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- Terlaksananya pelatihan teknis Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- Terlaksananya pelatihan teknis tenaga pemeriksa sebanyak 27 orang;
- Tersusunnya dokumen SOP Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- Tersusunnya Peraturan Daerah tentang PAPBD dan APBD;
- Terlaksananya penata usahaan keuangan SKPD dengan baik;
- Tersusunnya rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Terlaksananya pendataan obyek pajak sebanyak 30.000 obyek pajak;
- Tersusunnya laporan fungsional dan laporan posisi kas secara tepat waktu;

- Terlaksananya pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 739.668 obyek pajak;
- Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah sebanyak 5 aplikasi;
- Tersedianya data aset;
- Tercapainya peningkatan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan dari Obyek Pajak yang diverifikasi;
- Terlaksananya sosialisasi penyusunan APBD sebanyak 201 orang;
- Tersusunnya sistem dan prosedur Pajak Daerah;
- Terlaksananya Zona Nilai Tanah (NIR) sebanyak 22 desa;
- Terlaksananya sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 2.848 orang;
- Terlaksananya identifikasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah sebanyak 180 unit;
- Terlaksananya sosialisasi pajak daerah sebanyak 200 orang peserta dan pemasangan publikasi pajak daerah sebanyak 81 titik publikasi;
- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Bagi Hasil;
- Terselenggaranya bulan panutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jumlah peserta 600 orang;
- Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah sebanyak 200 orang;
- Terlaksananya pemungutan Pajak Daerah UPTD. DPPKAD di Cerme, Sidayu, Driyorejo dan Bawean;
- Terlaksananya pemutakhiran piutang PBB;
- Terlaksananya fasilitasi tukar guling aset daerah;
- Terwujudnya Pejabat Penyuluh Pertanian yang professional sebanyak 40 orang;
- Terlaksananya diklat Pim Tingkat III dan IV Tahun 2015 sebanyak 51 orang peserta;
- Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan berbasis akrual sebanyak 40 orang;

- Terlaksananya pengiriman anggota PPNS daerah untuk mengikuti Diklat PPNS sebanyak 19 orang;
- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah sebanyak 40 orang;
- Terlaksananya Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bagi PNS sebanyak 80 orang;
- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah;
- Terlaksananya Diklat Fungsional, sosialisasi, workshop, seminar dan lokakarya bagi PNS sebanyak 69 orang;
- Terlaksananya pelatihan On Job Training dalam rangka peningkatan kompetensi CPNS sebanyak 322 orang;
- Terlaksananya penilaian prestasi kerja pegawai untuk PNS di lingkungan Pemkab Gresik;
- Terselenggaranya Orientasi Manajemen Kepegawaian dan Pemerintahan bagi CPNS sebanyak 305 orang dan pelaksanaan ujian dinas 76 orang;
- Terlaksananya penempatan CPNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 321 orang;
- Terlaksananya penerimaan SK kenaikan pangkat bagi 1.302 orang;
- Terwujudnya Data Kepegawaian di Lingkungan Pemkab Gresik yang update dan valid dengan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Kab.Gresik;
- Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi sebanyak 689 orang;
- Terlaksananya sidak disiplin ke setiap SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik;
- Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS sebanyak 19 orang;
- Terlaksananya seleksi CAPRA IPDN Tahun 2015 sebanyak 30 orang;
- Tercapainya penempatan pegawai sesuai dengan formasi dan kompetensi serta kenaikan pangkat dapat diterima tepat waktu;

- Terlaksananya sosialisasi jabatan fungsional analis kepegawaian, pranata komputer dan arsiparis sebanyak 160 orang;
- Terlaksananya bimtek bagi PNS yang akan memasuki usia pensiun sebanyak 180 orang;
- Terpenuhinya kebutuhan akan tenaga PPPK di lingkungan Pemkab. Gresik;
- Terlaksananya penyusunan Formasi PNS 2015;
- Terselenggaranya sosialisasi Peraturan Kepegawaian bagi PNS sebanyak 330 orang;
- Terdokumentasinya arsip kepegawaian yang lebih rapi dan sistematis dalam rangka pengembangan dokumentasi berbasis digital (Alih Media: 20.950 lembar dokumen pegawai) dan verifikasi Ijazah PNS sebanyak 9.612 orang;
- Tersedianya database Data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang mutakhir dan akurat;
- Tercapainya Pelayanan Informasi Kepegawaian yang cepat, efisien dan akurat;
- Terlaksananya Sosialisasi dan bimbingan Teknis Dana Kelurahan;
- Terwujudnya administrasi dan pelaksanaan pengelola ADD sesuai juknis;
- Terlaksananya monitoring pelaksanaan dan pelantikan Kepala Desa pemantauan pemeliharaan Kepala Desa.

Adapun permasalahan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah :

- Pelantikan di selenggarakan di Provinsi Jawa Timur sehingga sebagian anggaran digunakan untuk penyelenggaraan serah terima jabatan bupati ke Pj Bupati;
- Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait moratorium PNS, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2015 tidak menyelenggarakan Seleksi CPNS

Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

- Tetap dianggarkan tahun berikutnya;
- Tetap koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) terkait peluang pelaksanaan rekrutmen CPNS.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Perda yang ditetapkan			
	Jumlah Perda yang yg ditetapkan dalam 1 tahun	Perda		SANGAT TINGGI
	a. Target	%	10	
	b. Realisasi	%	15	
Capaian (b : a)x100	%	150,00		
2	Jumlah Perda Yang dibatalkan			
	Jumlah Perda yang dibatalkan dalam 1 tahun	Perda		SANGAT TINGGI
	a. Target	%	0	
	b. Realisasi	%	0	
Capaian (b : a)x100	%	100,00		
3	Keputusan Bupati			
	Jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Keputusan	1324	SANGAT TINGGI
	Jumlah Keputusan Bupati dalam tahun n	Keputusan	1324	
	a. Target	%	100	
	b. Realisasi	%	100	
Capaian (b : a)x100	%	100,00		
4	Kasus hukum yang diselesaikan			
	Jumlah kasus hukum dalam 1 tahun	Kasus	2	SANGAT TINGGI
	kasusu Hukum yang diselesaikan	Kasus	2	
	a. Target	%	80	
	b. Realisasi	%	100	
Capaian (b : a)x100	%	125,00		

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
5	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti			
	Jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Keputusan	49	SANGAT TINGGI
	Jumlah Keputusan Bupati dalam tahun n	Keputusan	49	
	a. Target	%	100	
	b. Realisasi	%	100	
	Capaian (b : a)x100	%	100,00	
6	Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti			
	Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti	Kasus	435	SANGAT TINGGI
	Jumlah temuan	Kasus	495	
	a. target	%	100	
	b. realisasi	%	114	
	Capaian (b : a)x100	%	113,79	
7	Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi			
	Jumlah LAKIP SKPD yang di evaluasi	buah		SANGAT TINGGI
	jumlah LAKIP keseluruhan	buah		
	a. target	%	100	
	b. realisasi	%	100	
	Capaian (b : a)x100	%	100,00	
8	Persentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti			
	Jumlah informasi masyarakat yang ditindaklanjuti	Buah	90	SANGAT TINGGI
	Jumlah informasi masyarakat yang masuk	Buah	88	
	a. target	%	100	
	b. realisasi	%	98	
	Capaian (b : a)x100	%	98,00	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
9	Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku wakil Pemerintah			
	Jumlah Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah selama 1 Tahun	Kali		SANGAT TINGGI
	a. Target	Kali	34	
	b. Realisasi	Kali	40	
	Capaian (b:a)x100	%	117,65	
10	Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (IKK LPPD)			
	a. Target	Baik / Cukup / Kurang	Baik	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Baik / Cukup / Kurang	Baik	
	Capaian (b:a)x100	Baik / Cukup / Kurang	100,00	
11	Opini laporan keuangan			
	opini yang diberikan atas LKPD oleh BPK	WTP/WDP		SANGAT TINGGI
	a. Target	WTP/WDP	WTP	
	b. Realisasi	WTP/WDP	WDP	
	Capaian (b : a)x100	WTP/WDP	WDP	
12	Laporan keuangan tersusun tepat waktu			
	a. Target	Ya / Tidak	Ya	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Ya / Tidak	Ya	
	Capaian (b : a)x100	Ya / Tidak	100,00	
13	APBD ditetapkan tepat waktu			
	a. Target	tepat/tidak	TEPAT	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	tepat/tidak	TEPAT	
	Capaian (b : a)x100	tepat/tidak	100,00	
14	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005			
	a. Target	Ada/tidak	ADA	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Ada/tidak	ADA	
	Capaian (b : a)x100	Ada/tidak	100,00	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
15	Peningkatan PAD			
	PAD Tahun Ini		800.031.259.698,64	
	PAD Tahun n- PAD (Tahun n-1)		99.443.466.821,17	
	PAD Tahun n – 1		700.587.792.877,47	
	a. Target	%	6,68	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	%	14,19	
	Capaian (b : a)x100	%	212,49	
16	Keberadaan kemandirian daerah			
	Jumlah PAD		800.031.259.698,64	SANGAT TINGGI
	Jumlah APBD		2.436.320.003.090,64	
	a. Target	%	25,17	
	b. Realisasi	%	32,84	
	Capaian (b : a)x100	%	130,46	
17	Asset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan)			
	Aset bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan	Buah	3.529	SANGAT TINGGI
	Jumlah seluruh aset bangunan	Buah	3.529	
	a. Target	%	99,50	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a)x100	%	100,50	
18	Perusahaan daerah dalam kondisi sehat			
	a. Target	Buah	3	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Buah	3	
	Capaian (b:a)x100	%	100,00	
19	Jumlah MOU Kerjasama dengan daerah lain dengan pihak ketiga			
	a. Target	Buah	28	TINGGI
	b. Realisasi	Buah	25	
	Capaian (b:a)x100	%	89,29	
20	Voting yang dilakukan dalam sidang Paripurna			
	Jumlah pengambilan keputusan melalui voting	Kali	0	SANGAT TINGGI
	Jumlah sidang paripurna dalam tahun ini	Kali	45	
	a. Target	%	0	
	b. Realisasi	%	0	
	Capaian (b : a)x100	%	100	

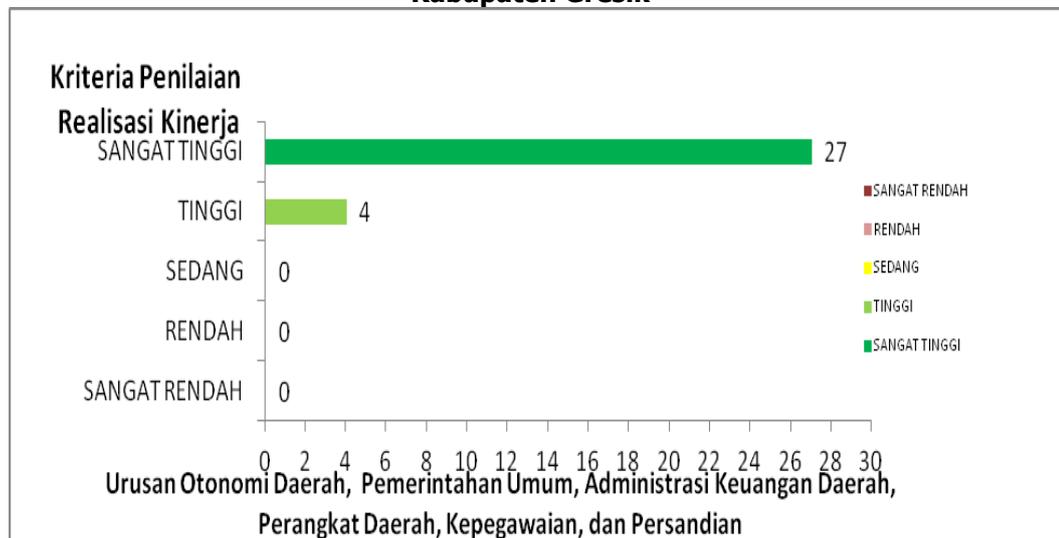
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
21	Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan Ranperda			
	Jumlah Ranperda yang melibatkan masyarakat	Perda	12	SANGAT TINGGI
	Total Ranperda	Perda	12	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a)x100	%	100,00	
22	Perda inisiatif DPRD			
	Jumlah Perda yang telah disahkan atas usul inisiatif DPRD	Perda		SANGAT TINGGI
	a. Target	Perda	5	
	b. Realisasi	Perda	5	
	Capaian (b : a)x100	%	100,00	
23	Rasio Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat PIM sesuai jenjangnya			
	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya	Orang	673	TINGGI
	Jumlah pejabat struktural yang ada	Orang	945	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	71,21	
	Capaian (b : a)x100	%	71,21	
24	Rasio Jabatan yang terisi			
	Jabatan yang terisi	Orang	945	TINGGI
	Jumlah jabatan	Orang	1.052	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	89,82	
	Capaian (b : a)x100	%	89,82	
25	Rasio pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal			
	Jumlah pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formalnya	Orang	945	SANGAT TINGGI
	Jumlah pejabat struktural yang ada	Orang	945	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a)x100	%	100,00	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
26	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan			
	Jumlah pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Orang	945	SANGAT TINGGI
	Jumlah pejabat struktural yang ada	Orang	945	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a)x100	%	100,00	
27	Kesesu-aian STOK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang STOK			
	a. Target	%	100	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	%	100	
	Capaian (b : a)x100	%	100,00	
28	Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan			
	a. Target	%	100,00	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a)x100	%	100,00	
29	Keberadaan E-procurement			
	a. Target	Ada/Tidak Ada	Ada	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Ada/Tidak Ada	Ada	
	Capaian (b:a)x100	Ada/Tidak Ada	100,00	
30	Keberadaan Unit pelayanan pengadaan			
	a. Target	Ada/Tidak Ada	Ada	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Ada/Tidak Ada	Ada	
	Capaian (b:a)x100		100,00	
31	Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah			
	a. Target	Orang	25	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Orang	44	
	Capaian (b:a)x100	%	176,00	

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diketahui bahwa dari 31 indikator kinerja terdapat 27 indikator yang bernilai sangat tinggi, dan 4 indikator yang bernilai tinggi.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.20
Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Gresik



Prestasi yang diperoleh pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain:

- Best Perform Liss UKS Tingkat Nasional;
- Juara I Lomba LSS (TK. Negeri Pembina) Desa Yosowilangun Kec. Manyar Tingkat Nasional;
- Lomba Karang Taruna Tingkat Nasional;
- Delapan Besar Lomba Bkb Tingkat Nasional;

- Juara Umum MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- *IDSA Indonesia Digital Society Award 2015 The 3st Champion of E-Health Category*, dan *Mar Plus* didukung Kementerian Kominfo dan PT. Telkom Nasional;
- Juara I Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan;
- Juara I Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara II Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIIH) Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Bkb Pada Tahun 2015 Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara Harapan I Lomba Ape Pada Tahun 2015 Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba PHBS Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara II Kategori Cita Rasa Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Jawa Timur.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Pada Tahun 2015 Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan; dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 38 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.585.084.196,00 realisasi sebesar Rp1.531.361.507,00 tidak terserap Rp53.222.689,00 dengan rincian sebagai berikut:



21.1. Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan 4

program terdiri 35 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.313.324.196,00 realisasi sebesar Rp1.259.601.507,00 tidak terserap Rp53.722.689,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp30.244.189,00
- 2) Sisa lelang Rp5.478.500,00
- 2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp18.000.000,00

21.2. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp271.760.000,00, realisasi sebesar Rp271.760.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terpenuhinya kebutuhan pangan untuk daerah yang terkena kerawanan pangan sebanyak 750 KK;
- Terselenggaranya pelatihan survey konsumsi pangan sebanyak 45 orang;
- Tersusunnya buku Neraca Bahan Makanan (NBM) sebanyak 70 buku;
- Tercapainya kecukupan pangan di tingkat rumah tangga;
- Tersusunnya data harga pangan yang akurat;
- Terpantaunya kegiatan dan permasalahan pada 20 kelompok lumbung pangan;
- Terciptanya kemandirian pangan desa;

- Terlaksananya sosialisasi dan monitoring mutu dan keamanan pangan segar, pangan olahan yang mengandung Bahan Tambah Pangan (BTP) / bahan kimia berbahaya sebanyak 40 orang;
- Terlaksananya pemantauan dan pendataan stok ketersediaan gabah dan beras dipenggilingan padi;
- Terlaksananya rapat koordinasi pemberdayaan dewan ketahanan pangan kabupaten;
- Terselenggaranya promosi konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) 16 Kecamatan se-Kab. Gresik;
- Terbentuknya kelompok usaha pangan masyarakat sebanyak 6 gapoktan;
- Terlaksananya pembinaan manajemen sistem tunda jual sebanyak 2 gapoktan;
- Terlaksananya kegiatan pembangunan lantai jemur untuk kelompok lumbung pangan Desa;
- Terselenggaranya pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
- Terlaksananya Temu Kaji Terap Budidaya Ikan Sidat Air Tawar sebanyak 45 orang;
- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pembudidaya ikan sebanyak 180 orang;
- Pelatihan Temu Aplikasi Tehnologi Hasil Perikanan sebanyak 250 orang.

Adapun permasalahan pada Urusan Ketahanan Pangan adalah :

- Gapoktan calon penerima bantuan belum berbadan hukum;

Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

- Pembangunan lantai jemur dibatalkan;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Regulasi Ketahanan Pangan			
	a. Target	ada/tidak	ada	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	ada/tidak	ada	
	Capaian (b:a)	ada/tidak	100	
2	Rata-rata konsumsi bahan pangan utama			
	a. Target	Kg/Kapita/Tahun	94,35	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Kg/Kapita/Tahun	91,26	
	Capaian (b:a)	%	96,72	
3	Ketersediaan pangan utama			
	a. Target	Kg/Kapita/Tahun	200,17	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Kg/Kapita/Tahun	193,23	
	Capaian (b:a)	%	96,53	

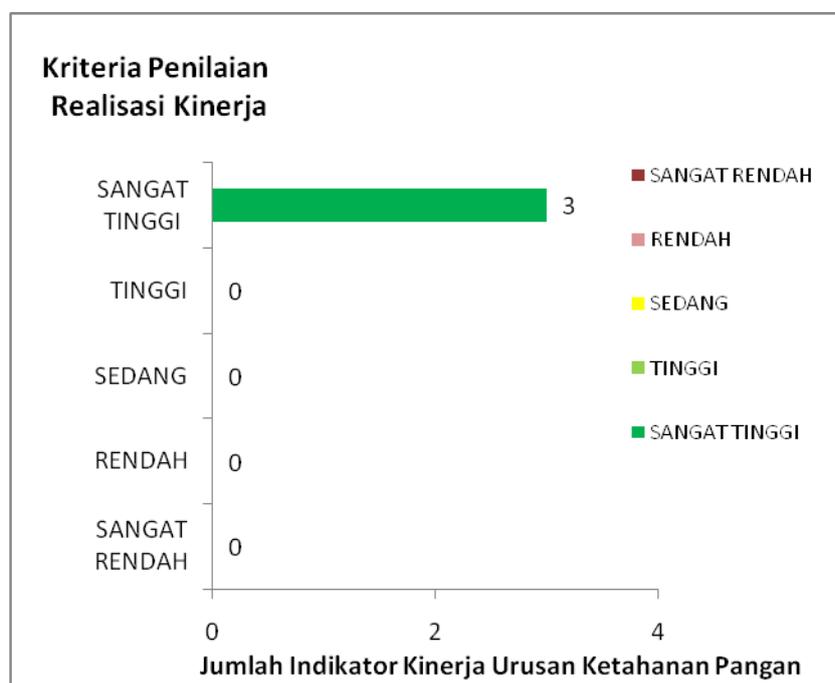
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Ketahanan Pangan diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja semua bernilai sangat tinggi.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.21
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik



Prestasi yang diperoleh pada Urusan Ketahanan Pangan adalah Juara II Kategori Cita Rasa Lomba Cipta Menu Tingkat Jawa Timur.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Tahun 2015 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 9 program terdiri 81 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp10.998.597.050,00, realisasi sebesar Rp9.788.227.465,00, tidak terserap Rp1.210.369.585,00,, dengan rincian sebagai berikut:



22.1. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.961.390.000,00, realisasi sebesar Rp2.587.977.250,00, tidak terserap Rp373.412.750,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp295.426.750,00,
- 2) Sisa Lelang Rp77.986.000,00,

22.2. Kecamatan Gresik melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp60.000.000,00, realisasi sebesar Rp Rp60.000.000,00,00.

22.3. Kecamatan Kebomas melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp75.000.000,00, realisasi sebesar Rp72.750.000,00, tidak terserap Rp2.250.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

22.4. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.

22.5. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp Rp15.000.000,00.

- 22.6. Kecamatan Balong Panggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp19.910.000,00, realisasi sebesar Rp19.840.000,00 tidak terserap Rp70.000,00,;
- 22.7. Kecamatan Duduk Sampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp Rp25.000.000,00;
- 22.8. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 5 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp105.000.000,00, realisasi sebesar Rp105.000.000,00;
- 22.9. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00, realisasi sebesar Rp30.000.000,00;
- 22.10. Kecamatan Kedamaean melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp85.000.000,00, realisasi sebesar Rp85.000.000,00;
- 22.11. Kecamatan Menganti melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp60.000.000,00, realisasi sebesar Rp60.000.000,00;
- 22.12. Kecamatan Sidayu melaksanakan 4 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp76.739.500,00, realisasi sebesar Rp76.703.500,00, tidak terserap Rp36.000,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 22.13. Kecamatan Ujung Pangkah melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp55.000.000,00, realisasi sebesar Rp55.000.000,00;
- 22.14. Kecamatan Panceng melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.886.000,00, realisasi sebesar Rp65.886.000,00;
- 22.15. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, realisasi sebesar Rp20.000.000,00;

22.16. Kecamatan Dukun melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp45.000.000,00, realisasi sebesar Rp45.000.000,00;

22.17. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 3 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp80.615.000,00, realisasi sebesar Rp66.494.500,00, tidak terserap Rp14.120.500,00, disebabkan adanya efisiensi;

22.18. Kecamatan Tambak melaksanakan 4 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp87.800.000,00, realisasi sebesar Rp80.350.000,00; tidak terserap Rp7.450.000,00, disebabkan adanya efisiensi;

22.19. Badan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 3 program terdiri 55 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp7.106.256.550,00, realisasi sebesar Rp6.293.226.215,00, tidak terserap Rp813.030.335,00 disebabkan antara lain :

- 1) Efisiensi Rp464.050.335,00
- 2) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp348.980.000,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
- Terlaksananya pelatihan pengetahuan perangkat desa, BPD, RT/RW tentang pemerintahan;
- Terlaksananya pembinaan PKK di Kelurahan dan Desa;
- Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha industri sebanyak 32 orang;
- Terselenggaranya Sosialisasi undang-undang desa;
- Terlaksananya Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif sebanyak 90 orang;
- Terselenggaranya diseminasi informasi bagi masyarakat desa;
- Terlaksananya Pembinaan Dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW) sebanyak 386 orang;

- Terlaksananya Optimalisasi Kegiatan Partisipatif Lembaga Desa sebanyak 712 orang;
- Terselenggaranya Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes, Pasar Desa, Lembaga Ekonomi Mikro);
- Terbangunnya Balai Desa, Balai Dusun dan Gapura Desa sesuai perencanaannya sebanyak 25 desa/13 kecamatan;
- Terlaksananya pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
- Terlaksananya Lomba BUM Desa dan UPKu pada 16 kecamatan;
- Tersusunnya Rekapitulasi Profil Desa/kelurahan;
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bulan Bhakti Gotong-royong sebanyak 356 desa/kel;
- Terlaksananya pembinaan administrasi BKAD;
- Terlaksananya kegiatan partisipasi kelompok dalam pendidikan kemasyarakatan dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Masyarakat Desa/Kelurahan (PKPKM);
- Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- Terlaksananya Pengenalan Produk TTG dan Produk Unggulan;
- Pemberian makanan tambahan yang sehat pada anak sekolah sebanyak 25 lembaga;
- Meningkatnya Pembangunan Desa melalui Pokmas TTG;
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat pesisir dan pantai sebanyak 360 orang;
- Terlaksananya pengembangan sumber daya lokal berbasis kawasan melalui pelatihan;
- Peningkatan kualitas permukiman dan sanitasi masyarakat;
- Terlaksananya pelatihan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan sumber mata air sebanyak 30 orang;
- Terlaksananya pembinaan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebanyak 80 orang;
- Meningkatnya pengelolaan pasar desa;
- Terlaksanakannya sosialisasi dan monitoring pembangunan wilayah terpadu antar desa sebanyak 60 orang;

- Terlaksananya Pengembangan Labsite dan Implementasi serta Pendampingan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) kepada 100 desa;
- Terlaksananya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat sebanyak 200 orang;
- Terselenggaranya Lomba Inovasi Cipta TTG Tingkat Kabupaten sebanyak 50 orang;
- Terselenggaranya penyelenggaraan lomba karya penanggulangan kemiskinan di 18 Kecamatan;
- Terlaksananya Tilik Warga;
- Terlaksananya Pemberian Bantuan Sosial untuk kegiatan Jalan Jalin Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) sebanyak 650 KRTP;
- Terlaksananya Bimtek Peningkatan Peran Serta Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di 18 kecamatan;
- Terlaksananya Program Kerja dan Kegiatan PKK, DWP dan Organisasi Wanita;
- Meningkatkan kapasitas SDM Wanita Kader Desa;
- Terlaksananya Pembinaan Posyandu di Desa sebanyak 120 orang.

Adapun permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- Narasumber dari kementerian dan buku Administrasi Desa tidak terserap karena perubahan pedoman terkait buku Adm. Desa;
- Pada Kegiatan Penyusunan Profil SKPD terdapat Pengalihan anggaran pada Perubahan Anggaran karena ada kegiatan dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Kegiatan Pusat Pertumbuhan Terpadu antar Desa (P2TAD) yang memerlukan dukungan dana.
- Bahwa PNPM MPd berakhir pada Tahun 2014, pada Tahun 2015 adalah Proses pengakhiran dan Pengalihan kepemilikan dari Pengelolaan Program kepada Pemerintah Desa bagi Aset berupa sarana dan

Prasarana, sedangkan Aset Berupa Dana Bergulir menunggu kebijakan Pemerintah Pusat.

- Program PNPM MPd telah berubah menjadi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), yang kegiatannya berupa penyiapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang kegiatannya antara lain Pendampingan Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan desa, Pengelolaan Keuangan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kecamatan dan desa dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kegiatan lainnya. Satuan Kerja (Satker) P3MD Pusat terdapat pada Dirjen P3MD Kemendes, Satker P3MD Propinsi terdapat pada Bapemas Propinsi, dan Satker P3MD Kabupaten berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- Sesuai Permendagri 18 Tahun 2011, Belanja Pengadaan Makanan Tambahan Anak Aekolah seharusnya dilakukan oleh Kepala Sekolah;
Solusi atas permasalahan tersebut adalah :
 - Membuat perencanaan Anggaran yang sesuai dengan undang -undang;
 - Pengalihan anggaran kegiatan pada perubahan APBD 2015;
 - Sambil menunggu kebijakan pengaturan dari Pemerintah Pusat, saat ini Pengelolaan Dana bergulir hasil PNPM MPd tetap dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
 - Perlu dialokasikan anggaran untuk membiayai Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) agar program-program dan kegiatan dapat dilaksanakan;
 - Program Pengadaan PMT-AS dialihkan ke SKPD Dinas Pendidikan;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1.	PKK aktif			
	Jumlah PKK aktif	Orang	43.762	SANGAT TINGGI
	Jumlah PKK	Orang	43.762	
	a. target	%	85,61	
	b. realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	116,81	
2.	Posyandu			
	Jumlah Posyandu Aktif	Buah	1.444	SANGAT TINGGI
	Total Posyandu	Buah	1.444	
	a. target	%	99,30	
	b. realisasi	%	100,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100,70	
3.	Persentase keluarga miskin			
	Jumlah keluarga miskin	Orang	166,950	Data 2014
	Jumlah seluruh keluarga	Orang	19.67	Hasil Susenas untuk 2015 belum keluar
	a. target	%	13.41	
	b. realisasi	%	131.83	
	Capaian: $\frac{a - (b - a)}{a} \times 100 \%$	%	166,950	

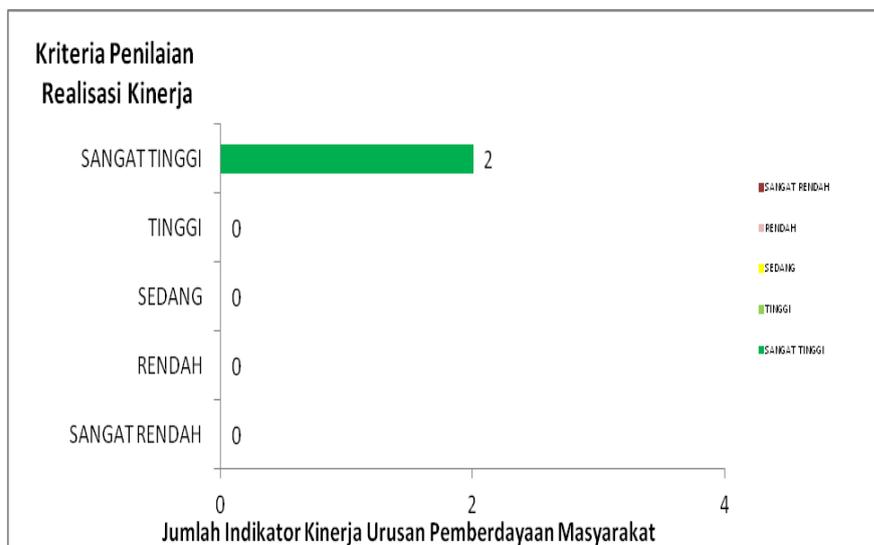
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat diketahui bahwa dari 2 indikator kinerja yang bernilai sangat tinggi, dan 1 indikator tidak dapat di ukur.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.22
Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik



Prestasi yang diperoleh pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat adalah Juara III Lomba BumDes Tingkat Propinsi di serahkan Sekapuk Kec. Ujungpangkah Tingkat Provinsi Jawa Timur.

23. Urusan Statistik

Pada Tahun 2015 Urusan Statistik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 3 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp580.000.000, realisasi sebesar Rp572.906.500,00, tidak terserap Rp7.093.500,00, disebabkan adanya efisiensi.



Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya buku Data Informasi dan Statistik Daerah Kabupaten Gresik sebanyak 250 Buku Gresik Dalam Angka dan 450 Buku Kecamatan Dalam Angka;
- Tersusunnya buku Analisa Indikator Pembangunan Manusia dalam kegiatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebanyak 100 buku.
- Tersusunnya buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebanyak 200 buku.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Statistik Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	8	9
1.	Keberadaan Dokumen "Gresik Dalam Angka"			
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	
	Capaian (b : a)	Ada / Tidak Ada	100	
2.	Keberadaan Dokumen PDRB			
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	

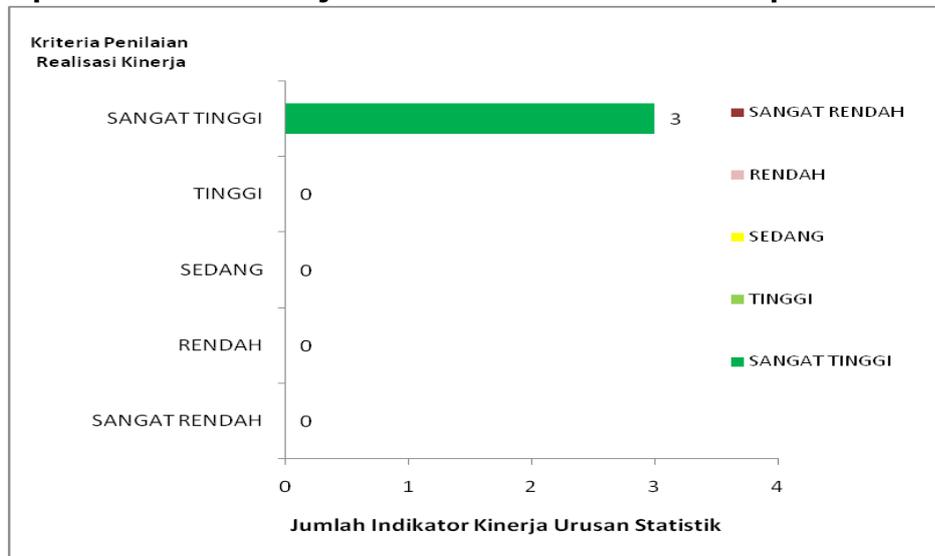
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	8	9
	Capaian (b : a)	Ada / Tidak Ada	100	
3.	Keberadaan Dokumen IPM			
	a. Target	Ada / Tidak Ada	Ada	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	Ada / Tidak Ada	Ada	
	Capaian (b : a)	Ada / Tidak Ada	100	

Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMDD untuk Urusan Statistik diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja yang bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.23
Capaian Indikator Kinerja RPJMDD Urusan Statistik Kabupaten Gresik



24. Urusan Kearsipan

Pada Tahun 2015 Urusan Kearsipan di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip serta Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp336.415.500,00 realisasi sebesar Rp331.837.000,00 tidak terserap sebesar Rp4.578.500,00 dengan rincian sebagai berikut:



- 24.1. Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp253.432.000, realisasi sebesar Rp252.264.800,00 tidak terserap Rp1.167.200,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 24.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp82.983.500,00 realisasi sebesar Rp79.572.200,00 tidak terserap Rp3.411.300,00 disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Meningkatnya arsip yang tertata, tertib dan Rapi sebanyak 50.000 arsip/dokumen;
- Memperpanjang umur dan menjaga kelestarian dokumen/arsip daerah;
- Meningkatnya kemampuan pengelolaan arsip di 40 desa;
- Tersedianya Data Base Informasi Kearsipan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kearsipan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara baku			
	jumlah instansi yang telah menerapkan arsip secara baku	Unit	452	SANGAT TINGGI
	jumlah SKPD dan Desa	Unit	413	
	a. Target	%	100,00	
	b. Realisasi	%	109,44	
Capaian (b : a) X 100%	%	109,44		

Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST) : 91% ≤ 100%

Tinggi (T) : 76% ≤ 90%

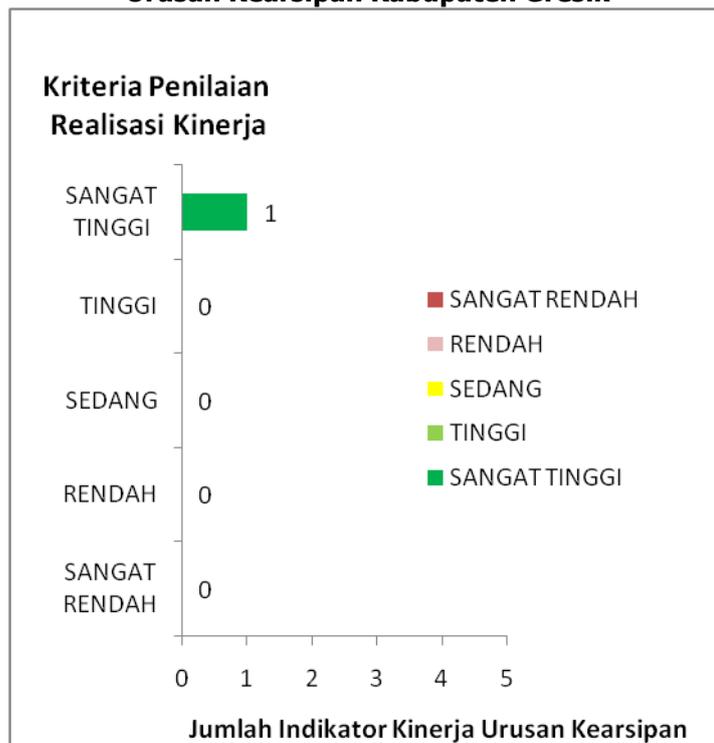
Sedang (SDG) : 66% ≤ 75%

Rendah (R) : 51% ≤ 65%

Sangat Rendah (SR) : ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kearsipan diketahui bahwa dari 1 indikator kinerja bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.24
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik



25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada Tahun 2015 Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 23 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp12.607.946.608,00 realisasi sebesar Rp11.569.729.849,00 tidak terserap Rp1.038.216.759,00 dengan rincian sebagai berikut:



25.1. Sekretariat Daerah melaksanakan 5 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.766.247.608,00 realisasi sebesar Rp6.211.495.808,00 tidak terserap Rp554.751.800,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp442.758.770,00
- 2) Sisa Lelang Rp80.161.030,00
- 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp31.832.000,00

25.2. Sekretariat DPRD melaksanakan 1 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.831.699.000,00 realisasi sebesar Rp5.348.234.041,00 tidak terserap Rp483.464.959,00 disebabkan adanya efisiensi.

25.3. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00 realisasi sebesar Rp10.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya Proxy Server; Router Load Balancing; CCTV, back Up backbone Jaringan WAN Pemkab Gresik dan terselenggaranya pelatihan teleconference;

- Terpeliharanya peralatan kerja, dan terbarujinya peralatan komunikasi di SKPD Kabupaten Gresik, demi kelancaran komunikasi dan pengembangan peralatan yang ada di Kab. Gresik;
- Terselenggaranya lomba dan seminar TIK;
- Terbangunnya database terpusat dan Dashboard Sytem pada 58 SKPD;
- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pemanfaatan TIK;
- Terlaksananya pengembangan administrasi desa/kelurahan berbasis teknologi informasi;
- Terbangunnya jaringan CCTV Kantor Pemda;
- Tersedianya system sekuriti data;
- Meningkatnya pelayanan publik di Bidang TIK;
- Peningkatan layanan komunikasi yang cepat diseluruh SKPD yang memiliki komunitas satuan radio;
- Terlaksananya fasilitasi operasional komite teknologi informasi dan komunikasi sebanyak 30 orang;
- Tersedianya administrator troubleshooting jaringan sebanyak 65 orang;
- Termuatnya berita dan informasi pembangunan daerah di media massa;
- Terlaksananya pendampingan Pemanfaatan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Bagi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan;
- Tersedianya website DPRD dan media center untuk mempublikasikan kegiatan DPRD;
- Termuatnya berita dan informasi di media massa sebanyak 560 advetorial dan 200 iklan;
- Tersedianya Media untuk mempublikasikan kegiatan DPRD;
- Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Pemerintahan Kabupaten Gresik dan wartawan;
- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang kehumasan dan jurnalistik sebanyak 24 orang;

- Informasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Benjeng tersebar luas melalui media internet.

Adapun permasalahan pada Urusan Komunikasi dan Informatika adalah :

- Kegiatan pembinaan dan biaya operasional pembangunan Telecenter belum ada berita acara serah terima Hibah dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, sehingga Honor Pengelola belum dapat diberikan;

Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

- Menunggu berita acara serah terima hibah Telecenter, diperkirakan pada bulan Maret 2016;

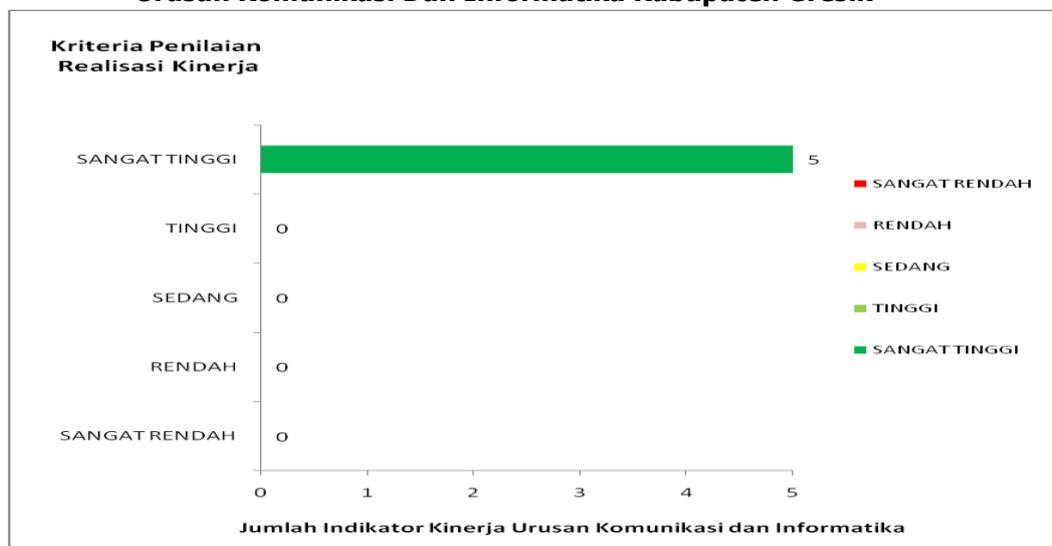
Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Keberadaa n Website Pemerintah Daerah			
	a. Target	ada/Tidak	ada	SANGAT TINGGI
	b. Realisasi	ada/Tidak	ada	
	Capaian (b : a) X 100%	ada/Tidak	100	
2	Pengunjung Website setiap tahun			
	Jumlah kunjungan ke website selama 1 tahun (netter)			SANGAT TINGGI
	a. Target	Netter	665.113	
	b. Realisasi	Netter	761.474	
	Capaian (b : a) X 100%	%	114,49	
3	Sistim informasi yang tersedia			
	Jumlah sistem informasi yang tersedia selama 1 tahun			SANGAT TINGGI
	a. Target	Buah	27	
	b. Realisasi	Buah	25	
	Capaian (b : a) X 100%	%	92,59	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN	
1	2	3	4	5	
4	Jumlah pemberitaan di media massa				
	Jumlah pemberitaan di media selama 1 tahun			SANGAT TINGGI	
	a. Target	Kali	420		
	b. Realisasi	Kali	710		
Capaian (b : a) X 100%	%		169		
5	Persuratan secara elektronik				
	a. Target	Ada / tidak	Ada	SANGAT TINGGI	
	b. Realisasi	Ada / tidak	Ada		
	Capaian (b : a) X 100%	Ada / tidak			100
Jumlah Total Capaian Kinerja	%		492,59		
	Rata-Rata Capaian Kinerja	%		98,52	

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Komunikasi Dan Informatika diketahui bahwa dari 5 indikator kinerja terdapat 5 indikator yang bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.25
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik



26. Urusan Perpustakaan

Pada Tahun 2015 Urusan Perpustakaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kecamatan Manyar dan Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 29 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.617.668.000,00 realisasi sebesar Rp1.604.203.556,00 tidak terserap Rp13.464.444,00 dengan rincian sebagai berikut:



- 26.1. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 26.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan 4 program terdiri 28 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.602.668.000,00, realisasi sebesar Rp1.589.203.556,00 tidak terserap Rp13.464.444,00 disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Meningkatnya jumlah pengunjung dan anggota perpustakaan sebanyak 92.000 orang;
- Terselenggaranya lomba perpustakaan SMP dan Story Telling;
- Bertambahnya khazanah pustaka di perpustakaan daerah;
- Terlaksananya bimtek pengelolaan perpustakaan sebanyak 46 orang.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perpustakaan Tahun 2015 sebagai berikut:

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pendidikan diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja terdapat 1 indikator yang bernilai sangat tinggi, dan 2 indikator bernilai tinggi. Adapun penilaian Capaian

Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.26
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Perpustakaan Kabupaten Gresik

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah			
	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	buku		TINGGI
	a. Target	buku	179.142	
	b. Realisasi	buku	140.256	
	Capaian (b : a) X 100%	%	78,29	
2	Pengunjung Perpustakaan			
	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan selama 1 Tahun			SANGAT TINGGI
	a. Target	Orang	759.805	
	b. Realisasi	Orang	1.267.193	
	Capaian (b : a) X 100%	%	166,78	
3	Jumlah Anggota Perpustakaan			
	Jumlah Anggota Perpustakaan			TINGGI
	a. Target	Orang	33.300	
	b. Realisasi	Orang	25.430	
	Capaian (b : a) X 100%	%	76,37	

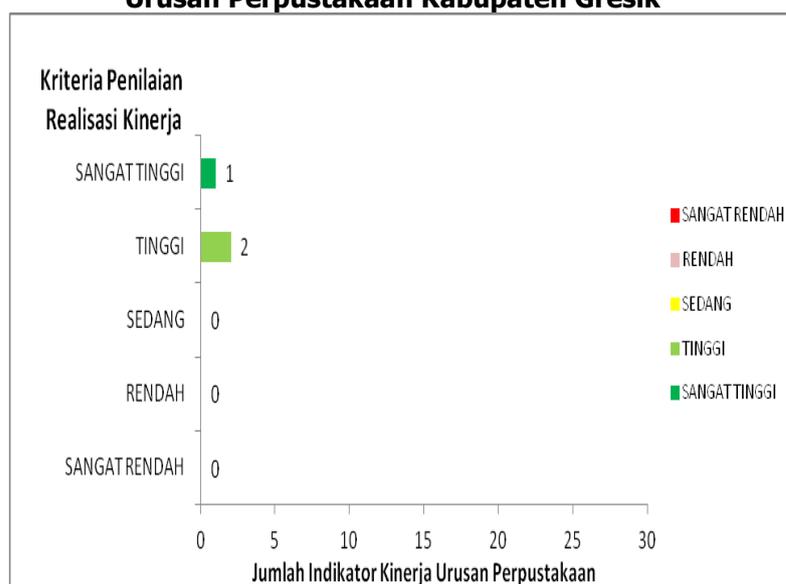
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pendidikan diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja terdapat 1 indikator yang bernilai sangat tinggi, dan 2 indikator bernilai tinggi.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.26
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Perpustakaan Kabupaten Gresik



B. URUSAN PILIHAN

Pada Tahun 2015 penyelenggaraan 7 urusan pilihan dialokasikan anggaran sebesar Rp67.722.325.880,00 realisasi sebesar Rp61.257.174.151,00 tidak terserap sebesar Rp6.465.151.729,00 Adapun penyelenggaraan masing-masing Urusan Pilihan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pertanian

Pada Tahun 2015 Urusan Pertanian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 14 program terdiri 87 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp41.943.584.480,00 realisasi sebesar Rp39.083.904.432,00 tidak terserap Rp2.859.680.048,00 dengan rincian sebagai berikut:



1.1. Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp605.580.000,00 realisasi sebesar Rp577.368.700,00 tidak terserap Rp28.211.300,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp26.044.300,00
- 2) Sisa Lelang Rp2.167.000,00

1.2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 10 program terdiri 58 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp34.454.061.000,00 realisasi sebesar Rp32.624.786.302,00 tidak terserap Rp1.829.274.698,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp379.156.148,00
- 2) Sisa Lelang Rp448.365.550,00
- 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp1.001.753.000,00

1.3. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 10 program terdiri 38 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.274.808.480,00 realisasi sebesar Rp5.046.293.430,00 tidak terserap Rp228.515.050,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp18.938.050,00
- 2) Sisa Lelang Rp9.577.000,00
- 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp200.000.000,00

1.4. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melaksanakan 3 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.609.135.000,00 realisasi sebesar Rp835.456.000,00 tidak terserap Rp773.679.000,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp13.215.000,00
- 2) Sisa Lelang Rp20.902.000,00
- 3) Lelang gagal Rp739.562.000,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersalurkannya Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) yang diadakan untuk korban bencana banjir, kekeringan dan Puso sebanyak 10.000 Kg Benih Padi dan 40.000 Kg Pupuk Organik;
- Terlaksananya sosialisasi asuransi usaha tani padi sebanyak 425 orang;
- Terwujudnya tertib administrasi pada Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) untuk 17 kecamatan;
- Terjalinnya kerjasama petani kacang hijau dan pengusaha dalam pemasaran hasil produksi kacang hijau yang dihasilkan;
- Terlaksananya promosi yang dapat dilaksanakan terhadap jumlah produk unggulan daerah;
- Tersedianya peralatan pasca panen yang dihibahkan kepada kelompok tani sebanyak 4 unit;
- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Kelompok Tani/Kelompok Usaha dalam pengolahan hasil pertanian;

- Tersedianya sarana alat mesin pertanian yang diperlukan petani dan peningkatan ketrampilan dalam pengoperasian dan mekanisasi alat mesin pertanian
- Terlaksananya pemberdayaan bagi kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang sudah berbadan hukum dan dapat memahami tentang pengoperasian tata kelola air sebanyak 2 kelompok HIPPA dan 1 kelompok HIPPA/Gabungan HIPPA;
- Tercapainya Gerakan Pengendalian Hama Tanaman (GPHT) terhadap jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sebesar 75%;
- Tersedianya data pertanian/perkebunan/kehutanan yang akurat dan update;
- Terlaksananya pelatihan bagi petani tanaman palawija;
- Terlaksananya sosialisasi tentang peningkatan produksi hortikultura dalam rangka peningkatan produksi tanaman sayuran sebanyak 100 Orang dan sosialisasi pengembangan kawasan hortikultura sebanyak 220 Orang;
- Terbinanya petani tanaman perkebunan;
- Terlaksananya pelatihan peningkatan produksi tanaman pangan bagi petani;
- Terlaksananya pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani sereal serta peningkatan produksi, produktivitas mutu tanaman sereal;
- Terlaksananya pelatihan pengetahuan dan keterampilan Petani dalam penataan varietas tanaman tebu dan penggunaan pupuk organik/hayati serta an organik;
- Tersedianya peralatan pembudidaya pertanian (handspayer) sebanyak 59 unit dan bahan obat-obatan pertanian sebanyak 250 liter;
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengembangan pupuk organik;

- Terselenggaranya pembinaan petani dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman perkebunan sebanyak 225 Orang;
- Terselenggaranya pelatihan peningkatan produksi tanaman hias sebanyak 100 orang dan pengadaan bibit tanaman hias sebanyak 1.220 batang;
- Terlaksananya sosialisasi pengembangan tanaman cengkeh serta penanaman bibit cengkeh;
- Terselenggaranya Jumlah peserta pelatihan pengembangan buah unggul daerah yaitu buah sawo dan buah mentega;
- Terlaksananya kegiatan perencanaan, sosialisasi, monitoring dan pengendalian bantuan keuangan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT);
- Terlaksananya kegiatan perencanaan, sosialisasi, monitoring dan pengendalian bantuan keuangan pembangunan jaringan irigasi;
- Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pertanian yang dibutuhkan petani yaitu embung, sumur bor, jalan usaha tani dan jaringan irigasi air permukaan;
- Terlaksananya pelatihan tentang penggunaan pupuk sesuai anjuran dan terpenuhinya kebutuhan air;
- Peningkatan prasarana pengembangan sumber air untuk irigasi untuk sumur bor, irigasi air permukaan, embung dan dam parit;
- Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 42 unit;
- Terlaksananya bimbingan teknis bagi Gapoktan tentang manajemen PUAP (LKM) sebanyak 40 Orang;
- Terlaksananya pertemuan rutin penyuluh pertanian dan Gapoktan sebanyak 120 pertemuan;
- Terjalannya kerjasama, antara Gapoktan dan Pelaku Usaha;
- Tersusunnya program kerja Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sebanyak 210 Orang;
- Terselenggaranya kontes ternak unggulan sebanyak 250 Peserta;
- Tersusunnya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

- Terselenggaranya pelatihan urban farming dalam pemanfaatan pekarangan;
- Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan petani tentang cara tanam jajar legowo;
- Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan dan tenaga penyuluh swadaya;
- Terlaksananya percontohan ternak kambing unggulan;
- Terlaksananya demplot budidaya ayam buras;
- Meningkatnya kesehatan dan produktivitas ternak serta pencegahan penyakit menular ternak;
- Terlaksananya pengawasan ternak korban;
- Tersedianya bibit sapi, kambing beserta kandang bagi para peternak;
- Terlaksananya sosialisasi hibah ternak kepada 195 orang penerima hibah;
- Pengadaan kendaraan pengangkut daging roda tiga sebanyak 10 unit.

Adapun permasalahan pada Urusan Perpustakaan adalah :

- Penerima hibah alsintan bagi peserta sosialisasi tidak dapat tersalurkan, karena ada aturan yang berkaitan dengan Hibah yang mensyaratkan adanya Badan Hukum bagi penerima Hibah, para calon penerima hibah masih belum memiliki Badan Hukum.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

- Anggaran hibah alsintan tidak diserap, dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Gresik.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pertanian Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Produksi Pertanian			SANGAT TINGGI
	a. Target	ton	554.979	
	b. Realisasi	ton	548.166	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	98,77	
2	Produksi Sayur :			SANGAT TINGGI
	a. Target	ton	18.121	
	b. Realisasi	ton	17.990	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	99,28	
3	Produksi Buah :			SANGAT TINGGI
	a. Target	kuintal	528.073	
	b. Realisasi	kuintal	857.427	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	162,37	
4	Produksi Perkebunan			SANGAT TINGGI
	a. Target	ton	13.254	
	b. Realisasi	ton	142.274	
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	1.073,44	
5	Produksi Peternakan :		13.694,72	53.751,05
	- Daging (Jumlah produksi selama 1 tahun)			SEDANG
	a. Target	ton	15.606,12	
	b. Realisasi	ton	10.586,24	
c. Capaian (b : a)	%	67,83		
6	- Telur (Jumlah produksi selama 1 tahun)			SANGAT TINGGI
	a. Target	ton	2.991,97	
	b. Realisasi	ton	2.798,52	
	c. Capaian (b : a)	%	93,53	
7	- Susu (Jumlah produksi selama 1 tahun)			SEDANG
	a. Target	ton	543,36	
	b. Realisasi	ton	366,00	
	c. Capaian (b : a)	%	67,36	
8	Populasi Ternak		14.604.313,00	SANGAT TINGGI
	Populasi Sapi :			
	a. Target	ekor	54.827	
	b. Realisasi	ekor	50.514	
c. Capaian (b : a) X 100%	%	92,13		

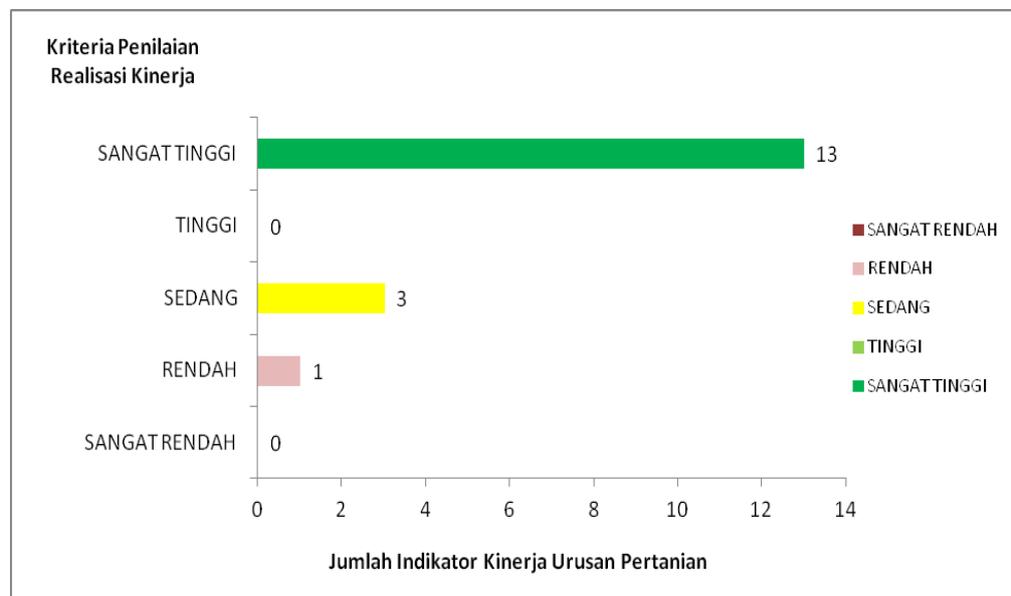
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
9	- Kerbau (populasi binatang selama 1 tahun)			RENDAH
	a. Target	ekor	334	
	b. Realisasi	ekor	189	
	Capaian (b : a) X 100%	%	56,59	
10	- Kambing (populasi binatang selama 1 tahun)			SANGAT TINGGI
	a. Target	ekor	53.355	
	b. Realisasi	ekor	67.602	
	Capaian (b : a) X 100%	%	126,70	
11	- Domba (populasi binatang selama 1 tahun)			SANGAT TINGGI
	a. Target	ekor	30.749	
	b. Realisasi	ekor	32.533	
	Capaian (b : a) X 100%	%	105,80	
12	- Kuda (populasi binatang selama 1 tahun)			SEDANG
	a. Target	ekor	373	
	b. Realisasi	ekor	248	
	Capaian (b : a) X 100%	%	66,49	
13	- Ayam Buras (populasi binatang selama 1 tahun)			SANGAT TINGGI
	a. Target	ekor	667.109	
	b. Realisasi	ekor	680.930	
	Capaian (b : a) X 100%	%	102,07	
14	- Ayam Ras Petelur (populasi binatang selama 1 tahun)			SANGAT TINGGI
	a. Target	ekor	132.441	
	b. Realisasi	ekor	152.300	
	Capaian (b : a) X 100%	%	114,99	
15	- Ayam Ras Pedaging			SANGAT TINGGI
	a. Target	ekor	2.258.400	
	b. Realisasi	ekor	13.560.000	
	Capaian (b : a) X 100%	%	600,43	
16	- Itik (populasi binatang selama 1 tahun)			SANGAT TINGGI
	a. Target	ekor	26.034	
	b. Realisasi	ekor	29.145	
	Capaian (b : a) X 100%	%	111,95	
17	- Entok (populasi binatang selama 1 tahun)			SANGAT TINGGI
	a. Target	ekor	13.710	
	b. Realisasi	ekor	30.882	
	Capaian (b : a) X 100%	%	225,25	

Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pertanian diketahui bahwa dari 17 indikator kinerja terdapat 13 indikator yang bernilai sangat tinggi, 3 indikator bernilai sedang, dan 1 indikator bernilai rendah. Adapun 1 indikator sangat rendah penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.27
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Pertanian Kabupaten Gresik



Adapun capaian indikator RPJM pada Urusan Pertanian yang tidak mencapai target yaitu indikator Populasi Ternak Kerbau karena kurangnya minat masyarakat petani terhadap kerbau, hal ini disebabkan dalam pengolahan tanah lahan pertanian sudah beralih menggunakan hand traktor. Solusi dari permasalahan ini adalah kedepan untuk Populasi ternak kerbau dialihkan kepopulasi ternak yang lain.

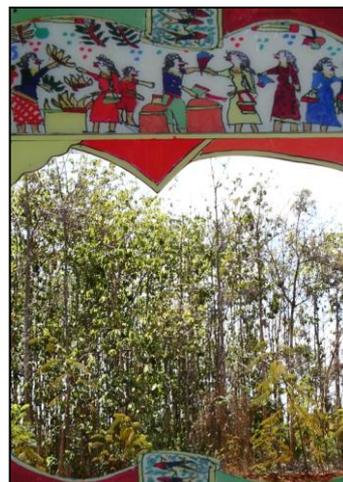
Prestasi yang diperoleh pada Urusan Pertanian antara lain:

- Juara III Kontes Buah Nusantara Kategori Jeruk Kepruk Siem IPB Bogor oleh Gabungan Kelompok Tani Agung Ujungpangkah Tingkat Nasional;
- Peringkat II Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum oleh HIPPA Subur Makmur Tingkat Badan Koordinasi Wilayah Pamekasan;

2. Urusan Kehutanan

Pada Tahun 2015 Urusan Kehutanan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.733.367.500,00, realisasi sebesar Rp2.130.937.000,00 tidak terserap Rp602.430.500,00 disebabkan antara lain:



- 1) Efisiensi Rp7.621.500,00
- 2) Sisa Lelang Rp594.809.000,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pembinaan pengelolaan penatausahaan hasil hutan bagi petugas teknis;
- Meningkatnya populasi tanaman penghijauan lingkungan dan pengadaan bibit sengon, mangga, jambu biji merah, sawo, nangka, daun pucuk merah, bibit bougenvile, melati, luntas dan toga;
- Terbangunnya hutan rakyat;
- Meningkatnya pengetahuan kelompok tani tentang budidaya bambu sebanyak 200 orang, pengadaan bibit bambu sebanyak 6.000 batang dan pengadaan pupuk organik sebanyak 12.000 kg;
- Meningkatnya ketertiban pelaksanaan industri kayu;
- Terlaksananya sosialisasi dan penetapan pejabat penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebanyak 30 orang;
- Tersedianya bibit bambu untuk ditanam sebanyak 11.000 batang dan pupuk organik sebanyak 33.000 Kg;
- Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan untuk penanaman bibit jabon sebanyak 7.500 batang, rambutan sebanyak 2.000 batang, jati sebanyak 4.000 batang dengan pupuk organik sebanyak 12.000 Kg dan penanaman bibit segon sebanyak 5.000 batang, trembesi sebanyak 1.000 batang, mahoni 1.000 batang, glodokan tiang sebanyak 1.000 batang, sono

kembang sebanyak 500 batang, matoa sebanyak 500 batang, rambutan sebanyak 500 batang, belimbing sebanyak 500 batang, sirsak sebanyak 500;

- Tersedianya sarana dan prasarana kehutanan berupa Mesin Pengolah Kayu dan Chainsaw;
- Terselenggaranya pelatihan bagi petani dalam penggunaan Alat Pemotong Bambu, Mesin serut penipis bambu, Mesin Pembelah Kayu sebanyak 30 orang;
- Terlaksananya penanaman dan pengkayaan hutan rakyat dengan menanam bibit sengon sebanyak 25.000 batang dengan pupuk organik sebanyak 75 Kg.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kehutanan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis			
	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi		73,68	SANGAT TINGGI
	Luas total hutan dan lahan kritis		5.897,00	
	a. Target	%	0,013	
	b. Realisasi	%	0,0125	
	Capaian (b : a) X 100%	%	96,11	
2	Produksi hasil Hutan :			
	- Kayu Jati (Jumlah produksi kayu selama 1 tahun)			
	a. Target	m3	415	Tidak Dapat Di Ukur
	b. Realisasi	m3		
	Capaian (b : a) X 100%	%	0,00	
3	- Non Kayu Jati			
	a. Target	m3	40	Tidak Dapat Di Ukur
	b. Realisasi	m3		
	Capaian (b : a) X 100%	%	0,00	

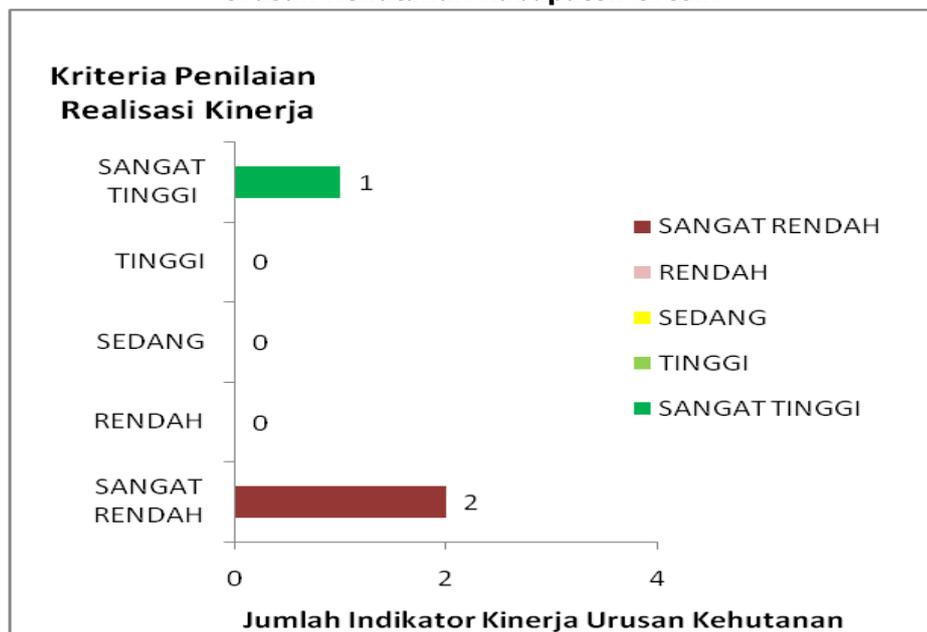
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kehutanan diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja 1 inikator bernilai sangat tinggi dan 2 indikator tidak dapat di ukur, hal ini disebabkan dengan diberlakukannya P.30/Menhut II/2012 tentang penataan hasil hutan HAK, dimana untuk kegiatan penebangan pohon jati/non jati tidak memerlukan izin lagi.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.28
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Kehutanan Kabupaten Gresik



3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Pada Tahun 2015 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan serta Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 12 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.074.520.000,00, realisasi sebesar Rp893.180.614,00 tidak terserap Rp181.339.386,00 dengan rincian sebagai berikut:



- 3.1. Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp225.000.000,00, realisasi sebesar Rp81.907.100,00 tidak terserap Rp143.092.900,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 3.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 6 program terdiri 10 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp849.520.000,00, realisasi sebesar Rp811.273.514,00 tidak terserap Rp38.246.486,00 disebabkan disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertambangan sesuai regulasi sebanyak 5 ijin;
- Tersedianya data produksi pertambangan dan pasca tambang;
- Tersusunnya study kelayakan terhadap penataan dan pengembangan Kelistrikan tenaga matahari sebanyak 10 buku;
- Tersedianya buku laporan pengendalian dan pengawasan energi ketenagalistrikan di kabupaten Gresik sebanyak 40 buku;
- Meningkatnya pemahaman masyarakat atas pentingnya penghematan energi;
- Terlaksananya lomba Energi Baru Terbarukan, Konversi Energi dan Penghematan Energi sekolahan di Kabupaten Gresik;

- Terlaksananya pengendalian, pemanfaatan dan perindustrian BBM bagi pengusaha SPBU dan Instansi terkait;
- Terjalannya koordinasi yang baik antara pelaku usaha migas dengan kabupaten Gresik;
- Terlaksananya Pembinaan dan Pemahaman terhadap masyarakat pemanfaat dan pengguna energi tentang program hemat energi sebanyak 400 orang;
- Terlaksananya Penetapan daerah geologi air tanah kawasan karst.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

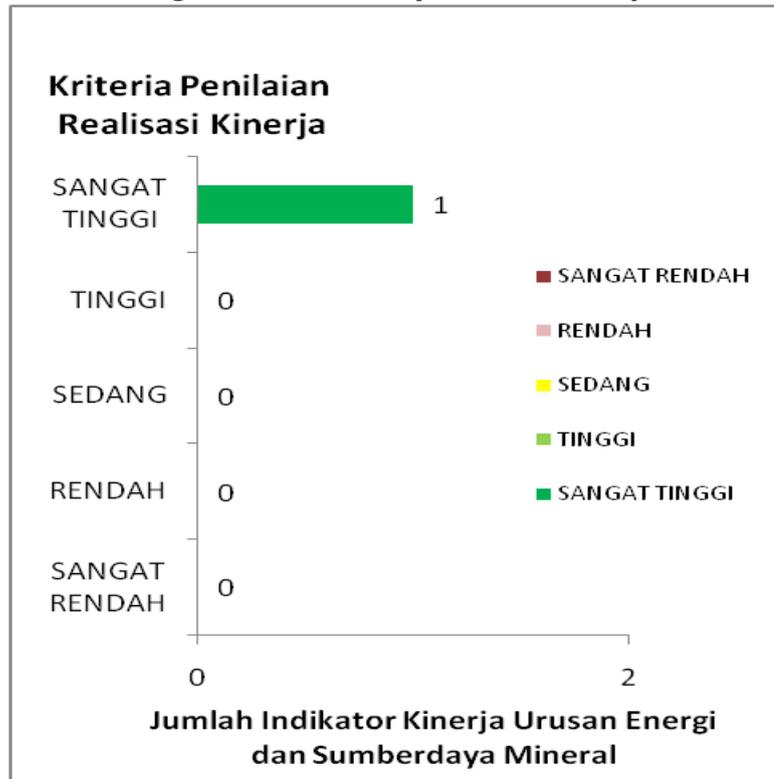
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Presentase ABT berijin yang membayar pajak			
	Jumlah sumur yang berijin	Buah	220,00	SANGAT TINGGI
	Jumlah sumur seluruhnya	Buah	290,00	
	a. Target	%	75,20	
	b. Realisasi	%	75,86	
	Capaian (b:a)	%	100,88	

Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMDD untuk Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral diketahui bahwa dari 1 indikator kinerja bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.29
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gresik



4. Urusan Pariwisata

Pada Tahun 2015 Urusan Pariwisata di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 12 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.115.160.700,00, realisasi sebesar Rp1.914.902.000,00, tidak terserap Rp200.258.700,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp87.908.520,00
- 2) Sisa lelang Rp20.270.180,00
- 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp92.080.000,00



Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pembuatan profil materi wisata Kabupaten Gresik melalui teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
- Terlaksanaannya Pemilihan Duta Wisata Cak Yuk;
- Terlaksanaannya Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri;
- Terlaksananya pemilihan Cak yuk yang berkualitas dan berwawasan tentang pariwisata;
- Terlaksananya sosialisasi bagi usaha jasa pariwisata dan perawatan sarana prasarana di kawasan obyek wisata sebanyak 40 orang;
- Terbangunnya sarana dan prasarana dikawasan wisata Giri dan Malik Ibrahim;
- Terlaksananya pembuatan *Billboard* Pariwisata dan penghijauan di Kawasan Wisata Giri;
- Dikenalnya potensi pariwisata Gresik khususnya dalam bidang kuliner dan berbagai souvenir khas Gresik;
- Tercapainya presentase peningkatan wawasan duta wisata untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan pariwisata Kabupaten Gresik;
- Terlibatnya masyarakat dalam pelestarian kawasan wisata.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pariwisata Tahun 2015 adalah:

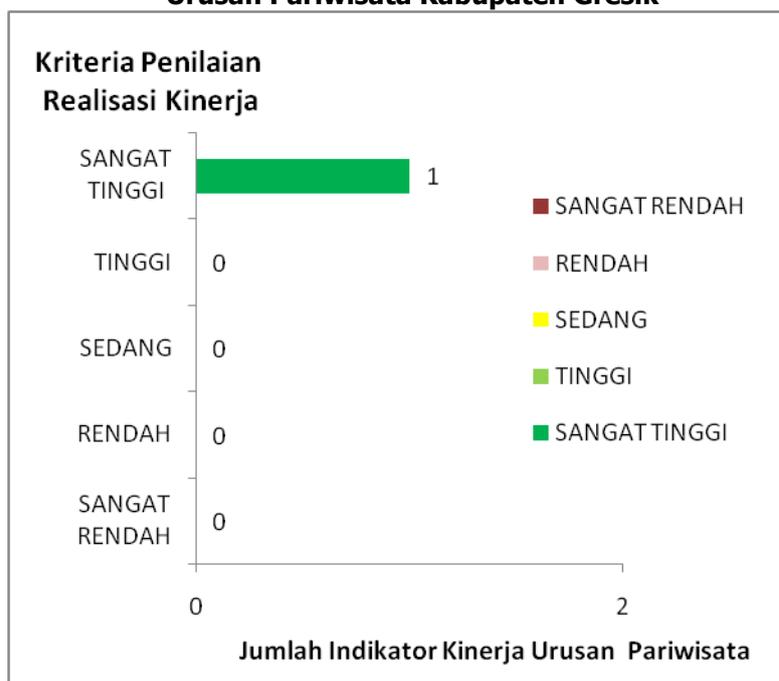
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	8	9
1.	Jumlah kunjungan wisata			
	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	Orang		SANGAT TINGGI
	a. Target	%	1.530.000	
	b. Realisasi	%	3.107.278	
	Capaian (b : a) X 100%	%	203,09	

Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pariwisata diketahui bahwa dari 1 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.30
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Pariwisata Kabupaten Gresik



5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun 2015 Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 10 program terdiri 57 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp13.376.739.700,00 realisasi sebesar Rp11.719.296.692,00 tidak terserap Rp1.657.443.008,00 disebabkan antara lain:



- 1) Efisiensi Rp138.559.156,00
- 2) Sisa Lelang Rp1.518.883.852,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan perikanan tangkap sebanyak 60 orang;
- Terlaksananya pembinaan pasca peserta SEHAT nelayan sebanyak 50 orang;
- Pelatihan Teknis Penangkapan Ikan
- Terlaksananya sosialisasi dan lomba masak ikan Tingkat Kabupaten dan Provinsi;
- Terlaksananya Sosialisasi Program Usaha Mina Perdesaan (PUMP) sebanyak 80 orang dan Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) sebanyak 76 orang;
- Tersedianya sarana pemasaran hasil perikanan dan Balai Benih Ikan (BBI);
- Terlaksananya rehabilitasi saluran tambak tersier di 5 desa;
- Terpeliharanya sarana dan prasarana pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
- Terlaksananya Pengadaan jaring bagi nelayan;
- Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan sebanyak 15 unit dan sarana pemasaran produk perikanan;

- Terlaksananya pembangunan infrastruktur dan tersedianya sarana prasarana Balai Benih Ikan (BBI);
- Terbangunnya dermaga PPI Campurejo;
- Terlaksananya pembangunan jalan produksi perikanan di 4 kecamatan;
- Terlaksananya pembangunan docking perahu nelayan dan pengadaan peralatan bengkel dan mesin bagi nelayan;
- Tersedianya sarana dan prasarana nelayan berupa mesin perahu sebanyak 10 unit;
- Terpantaunya kelestarian ekosistem di kawasan pesisir dan perairan;
- Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- Tersedianya data potensi peternakan di Kabupaten Gresik;
- Meningkatnya kesehatan dan produktivitas ternak serta pencegahan penyakit menular ternak;
- Terlaksananya pengawasan ternak qurban;
- Pengadaan bibit sapi, kambing beserta kandang bagi peternak;
- Meningkatnya pengetahuan peternak akan hibah ternak dan cara memanfaatkannya;
- Terlaksananya pemeliharaan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dan pengadaan kendaraan pengangkut daging roda 3 sebanyak 10 unit.

Permasalahan pada Urusan Kelautan dan perikanan adalah Kegiatan rehabilitasi/renovasi rumah potong hewan Ruminansia tidak dilaksanakan karena adanya konflik dengan masyarakat sekitar. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah perlu dicarikan tempat untuk relokasi Rumah Potong Hewan (RPH).

Capaian indikator Urusan Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Produksi Perikanan :			SANGAT TINGGI
a	Budi Daya :		98.367,87	
a.1	- Udang Windu (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton))			
	a. Target	ton	3.100,00	
	b. Realisasi	ton	3.346,85	
	Capaian (b : a) X 100%	%	107,96	
a.2	- Udang Vannamae (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton))			
	a. Target	ton	4.250,00	
	b. Realisasi	ton	6.181,54	
	Capaian (b : a) X 100%	%	145,45	
a.3	- Bandeng (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton))			SANGAT TINGGI
	a. Target	ton	39.000,00	
	b. Realisasi	ton	67.998,24	
	Capaian (b : a) X 100%	%	174,35	
a.4	- Kerapu (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton))			SANGAT TINGGI
	a. Target	ton	12,00	
	b. Realisasi	ton	125,89	
	Capaian (b : a) X 100%	%	1.049,08	
a.5	- Nila (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton))			SANGAT TINGGI
	a. Target	ton	1.200,00	
	b. Realisasi	ton	2.106,89	
	Capaian (b : a) X 100%	%	175,57	
b	Penangkapan (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton))			SANGAT TINGGI
	a. Target	ton	17.800,00	
	b. Realisasi	ton	18.122,28	
	Capaian (b : a) X 100%	%	101,81	
C	Perairan Umum (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton))			SEDANG
	a. Target	ton	750,00	
	b. Realisasi	ton	496,00	
	Capaian (b : a) X 100%	%	66,13	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
2	Produktivitas Lahan Tambak :			
a	Payau			SANGAT TINGGI
	a. Target	ton/Ha	106,91	
	b. Realisasi	ton/Ha	286,76	
	Capaian (b : a) X 100%	%	268,23	
b	Tawar			SANGAT TINGGI
	a. Target	ton/Ha	123,13	
	b. Realisasi	ton/Ha	332,52	
	Capaian (b : a) X 100%	%	270,06	

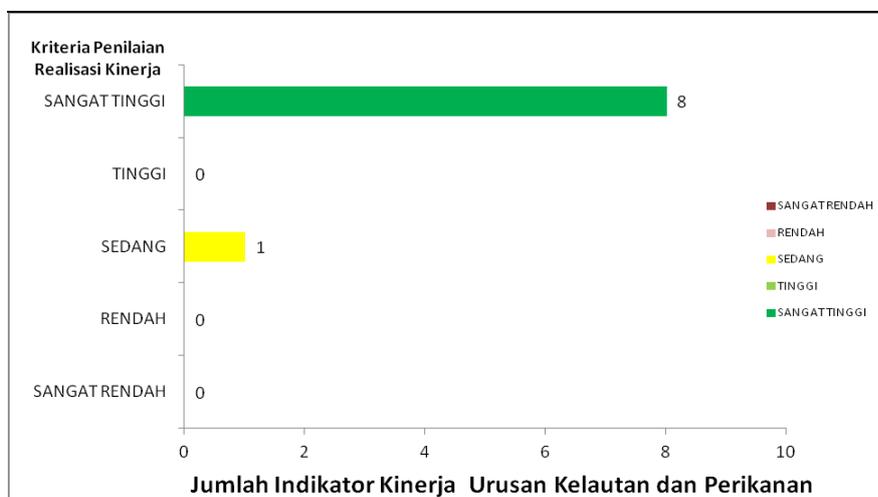
Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kelautan dan Perikanan diketahui bahwa dari 9 indikator kinerja 8 indikator bernilai sangat tinggi 1 indikator bernilai sedang.

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.31
Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik



Prestasi yang diperoleh pada Urusan Urusan Pariwisata antara lain:

- Juara I Evaluasi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Bidang Pelestarian Sumberdaya Perairan Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara II Kontes Katagori Bakalan Kereman Sapi Persilangan Hasil IB An. Parji Kec. Panceng Tingkat Provinsi Provinsi Jawa Timur;
- Juara III Kontes Katagori Calon Pejantan Sapi PO Provinsi An. Herman Kec. Panceng Tingkat Jawa Timur.

6. Urusan Perdagangan

Pada Tahun 2015 Urusan Perdagangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 10 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp5.360.034.500,00 realisasi sebesar Rp4.393.135.473,00 tidak terserap Rp966.899.027,00 dengan rincian sebagai berikut:



6.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 6 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.857.732.350,00 realisasi sebesar Rp3.916.535.713,00 tidak terserap Rp941.196.637,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp65.362.587,00
- 2) Sisa lelang Rp875.834.050,00

6.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp502.302.150,00 realisasi sebesar Rp476.599.760,00 tidak terserap Rp25.702.390,00, disebabkan efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya laporan hasil pengawasan barang yang memenuhi standart mutu 5 komoditi;
- Terselenggaranya pelatihan ekspor dan wirausaha;
- Terlaksananya operasi pasar murah 5hari;
- Terselenggaranya kegiatan pembinaan Organisasi PKL dan Asongan;
- Terpeliharanya sarana prasarana pasar pada 7 pasar kabupaten;
- Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Informasi hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan Tidak Dilekati Pita Cukai;
- Revitalisasi Pasar Rakyat;
- Tersusunnya kebijakan untuk pengendalian inflasi daerah sebanyak 15 buku;

- Teridentifikasinya peredaran sembako, BBM dan bahan penting lainnya di 16 kecamatan
- Sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian pada 400 orang.

Adapun permasalahan pada Urusan Perdagangan adalah :

- Rencana Pembangunan Pujasera GKB Gresik sebesar Rp. 1.435.495.000,- tidak terserap, sehingga digunakan untuk pendampingan Pembangunan Pasar dana APBN (TP dan DAK) namun, keterbatasan waktu menyebabkan pagu tidak terserap seluruhnya.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

- Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana awal.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perdagangan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan Penerbitan SIUP			
	Jumlah Penerbitan SIUP Tahun ini	Buah	1.612	SANGAT TINGGI
	Jumlah penerbitan SIUP pada th. ini – jmlh Penerbitan SIUP th. Lalu	Buah	264	
	Jumlah Penerbitan SIUP s.d. th. lalu	Buah	1.348	
	a. Target	%	11,80	
	b. Realisasi	%	19,58	
	Capaian (b : a)X100	%	165,97	
2.	Pertumbuhan penerbitan TDP			
	Jumlah Ijin Tahun ini	Buah	1.981	SANGAT TINGGI
	Jumlah penerbitan TDP pada th. ini – jmlh Penerbitan TDP th. Lalu	Buah	231	
	Jumlah Penerbitan TDP s.d. th. lalu	Buah	1.750	
	a. Target	%	10,7	
	b. Realisasi	%	13,2	
	Capaian (b : a)X100	%	123,36	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
3.	Pertumbuhan penerbitan Tanda Daftar Gudang TDG			
	TDG Tahun ini	Buah	122	SANGAT TINGGI
	Jumlah penerbitan TDG pada th. ini – jmlh Penerbitan TDG th. Lalu	Buah	64	
	Jumlah Penerbitan TDG s.d. th. lalu	Buah	58	
	a. Target	%	17,4	
	b. Realisasi	%	110,34	
	Capaian (b : a)X100	%	634,17	
4.	Pertumbuhan nilai investasi perdagangan			
	Jumlah Nilai Investasi Tahun ini	Rp.	19.766.408.000	SANGAT TINGGI
	Jumlah nilai Investasi pd Th ini - Jumlah investasi pd tahun lalu	Rp.	12.829.886.000	
	Jumlah nilai investasi pd tahun lalu	Rp.	6.936.522.000	
	a. Target	%	1,70	
	b. Realisasi	%	1,85	
	Capaian (b : a)X100	%	108,80	
5.	Jumlah Pameran /Ekspo Per Tahun			
	Jumlah pameran/ event yang diikuti pada tahun ini	Buah		SANGAT TINGGI
	a. Target	kali	3	
	b. Realisasi	kali	20	
	Capaian (b : a)X100	%	666,67	

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perdagangan diketahui bahwa dari 5 indikator bernilai sangat. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.32

**Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Perdagangan Kabupaten Gresik**



7. Urusan Industri

Pada Tahun 2015 Urusan Perindustrian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 8 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.118.919.000,00 realisasi sebesar Rp1.109.869.750,00 tidak terserap Rp9.049.250,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terbentuknya Jaringan Kluster Industri 3 Sentra IKM (120 Orang);
- Tersedianya Data base Sentra IKM;
- Tersusunnya Standar Mutu Kabupaten;
- Terlaksananya Sosialisasi Kelengkapan Legalitas IKM bagi 126 IKM;
- Terlaksananya verifikasi proses produksi IKM pada 50 perusahaan;
- Terlaksananya kegiatan fasilitas bagi IKM 90 peserta;
- Terlaksananya pembinaan kemampuan teknologi industri di 3 sentra sebanyak 120 peserta;
- Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Produk IKM sebanyak 3 Sentra/ 120 Orang.



Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perindustrian Tahun 2015
adalah sebagai berikut:

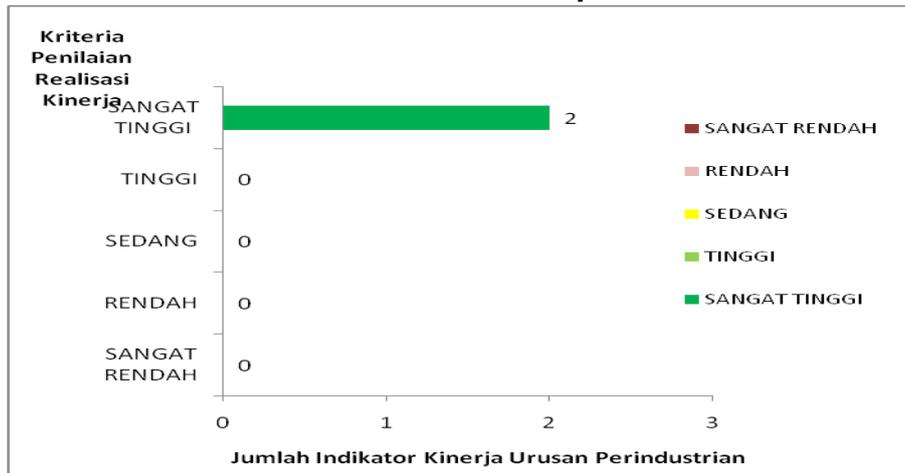
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2015	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan industri Jumlah Industri tahun ini- Jumlah Industri tahun lalu	Buah	128	SANGAT TINGGI
	Jumlah Industri s.d. tahun lalu	Buah	6.525	
	a. Target	%	2	
	b. Realisasi	%	1,96	
	Capaian (b : a) X 100%	%	98,08	
2	Pertumbuhan nilai produksi Jumlah Nilai produksi th ini - jumlah nilai produksi th lalu	Buah	969	SANGAT TINGGI
	jumlah nilai produksi th lalu	Buah	24.242	
	a. Target	%	4,0	
	b. Realisasi	%	4,0	
	Capaian (b : a) X 100%	%	100	
	Jumlah Total Capaian Kinerja		198,08	
	Rata-Rata Capaian Kinerja		99,04	

Keterangan Kriteria Penilaian :

Sangat Tinggi (ST)	: 91% ≤ 100%
Tinggi (T)	: 76% ≤ 90%
Sedang (SDG)	: 66% ≤ 75%
Rendah (R)	: 51% ≤ 65%
Sangat Rendah (SR)	: ≤ 50%

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMDD untuk Urusan Perindustrian diketahui bahwa dari 2 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.33
Capaian Indikator Kinerja RPJMD
Urusan Perindustrian Kabupaten Gresik



C. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pada Tahun 2015 dialokasikan anggaran untuk belanja Hibah sebesar Rp146.330.724.300,00 realisasi sebesar Rp143.469.355.300,00, tidak terserap Rp2.861.369.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

dengan rincian sbb:

a. Hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp37.175.301.300,00 realisasi sebesar Rp37.175.301.300,00 tidak terserap sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. KPUD. Kabupaten Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp30.000.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
2. Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilu Kab. Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.175.301.300,00 realisasi sebesar Rp0,00;
3. Hibah Kepada Polres Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
4. Hibah kepada Kodim Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,00 realisasi sebesar Rp0,00;

b. Hibah kepada badan/lembaga/organisasisebesar Rp15.836.155.000,00 realisasi sebesar Rp15.816.155.000,00 tidak terserap sebesar Rp20.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 realisasi sebesar Rp20.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp6.000.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
3. Kwarcab Pramuka Kab. Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp936.155.000,00 realisasi sebesar Rp936.155.000,00 tidak terserap Rp0,00;

4. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.000.000,00 realisasi sebesar Rp120.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
5. Pemuda Muhammadiyah dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
6. Gerakan Pemuda Ansor dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.000.000,00 realisasi sebesar Rp 120.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
7. KPA (Komisi Penanggulangan Aids) dengan alokasi anggaran sebesar Rp175.000.000,00 realisasi sebesar Rp 175.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
8. Persatuan Guru Nahdatul Ulama Kabupaten Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
9. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama Kabupaten Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
10. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kabupaten Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
11. Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
12. Lembaga Dakwa Islam Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 realisasi sebesar Rp75.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
13. Panti Asuhan Al Amin dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp20.000.000,00;

14. Hibah Kepada Koperasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000,00 realisasi sebesar Rp300.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
 15. Hibah Kepada SD sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.525.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.525.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
 16. Hibah Kepada SMP Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.025.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.025.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
 17. Hibah Kepada SMA Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp610.000.000,00 realisasi sebesar Rp610.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
 18. HIBAH KEPADA TPQ/TPA/MADIN/RA/TK/KB/PG/PAUD SEDERAJAT dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.255.000.000,00 realisasi sebesar Rp3.255.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
 19. HIBAH KEPADA PONDOK PESANTREN dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.000.000,00 realisasi sebesar Rp 155.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
- c. Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp9.936.500.000,00 realisasi sebesar Rp9.611.500.000,00 tidak terserap sebesar Rp 325.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Hibah kepada kelompok keswadayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp220.000.000,00 realisasi sebesar Rp220.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
 2. Hibah kepada kelompok / gabungan kelompok ternak dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.695.000.000,00 realisasi sebesar Rp 2.515.000.000,00 tidak terserap Rp180.000.000,00;
 3. Hibah kepada ukm dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.057.500.000,00 realisasi sebesar Rp2.007.500.000,00 tidak terserap Rp 50.000.000,00;

4. Hibah kepada masjid dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.840.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.785.000.000,00 tidak terserap Rp55.000.000,00;
 5. Hibah kepada musholla dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.064.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.024.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp 40.000.000,00;
 6. Hibah kepada tempat ibadah Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000,00 realisasi sebesar Rp60.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
- d. Belanja Hibah Dana Bos Daerah sebesar Rp70.816.488.000,00 realisasi sebesar Rp68.361.349.000,00 tidak terserap Rp2.455.139.000,00.
1. BOP SD Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.626.867.000,00 realisasi sebesar Rp7.624.767.000,00 tidak terserap sebesar Rp2.100.000,00;
 2. BOP SMP Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.185.606.000,00 realisasi sebesar Rp13.179.334.500,00 tidak terserap Rp 6.271.500,00;
 3. BOP SMA Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.354.365.000,00 realisasi sebesar Rp19.354.365.000,00 tidak terserap Rp0,00;
 4. BOP TPA/TPQ/MADIN/TK/RA/PAUD/KOBER dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.488.600.000,00 realisasi sebesar Rp17.285.200.000,00 tidak terserap sebesar R 203.400.000,00;
 5. BOP Ponpes dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.937.400.000,00 realisasi sebesar Rp1.792.500.000,00 tidak terserap sebesar Rp144.900.000,00;
 6. BOP Paket ABC (21 Lbg) dengan alokasi anggaran sebesar Rp609.950.000,00 realisasi sebesar Rp559.705.000,00 tidak terserap sebesar Rp50.245.000,00.

7. BOP Kober,PAUD,RA,taman Posyandu,TK,TPA dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.613.700.000,00 realisasi sebesar Rp9.246.800.000,00 tidak terserap sebesar Rp1.366.900.000,00;
- d. Belanja Hibah Dana Bos Provinsi sebesar Rp12.566.280.000,00 realisasi sebesar Rp12.505.050.000,00 tidak terserap sebesar Rp61.230.000,00.
1. BPPDGS (BK Propinsi) dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.376.000.000,00 realisasi sebesar Rp11.314.770.000,00 tidak terserap sebesar Rp 61.230.000,00;
 2. BOS SMA(BKSM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.190.280.000,00 realisasi sebesar Rp1.190.280.000,00 tidak terserap Rp0,00;

Adapun Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp21.854.700.000,00 realisasi sebesar Rp21.310.480.000,00 tidak terserap Rp544.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.854.700.000,00 realisasi sebesar Rp21.310.480.000,00 tidak terserap Rp 544.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Rumah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.946.500.000,00 realisasi sebesar Rp3.782.500.000,00 tidak terserap Rp164.000.000,00;
 - Bantuan Kuliah Untuk Siswa Kurang Mampu dengan alokasi anggaran sebesar Rp255.000.000,00 realisasi sebesar Rp210.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp 45.000.000,00;
 - Bantuan Sosial Untuk Janda Kurang mampu dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.755.400.000,00 realisasi sebesarRp6.755.400.000,00 tidak terserap sebesar Rp0,00;
 - Bantuan Sosial Untuk Anak yatim dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.897.800.000,00 realisasi sebesar Rp1.897.800.000,00 tidak terserap sebesar Rp0,00;

- Santunan Kematian dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp6.999.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp 1.000.000,00;
- Bantuan Sosial Tidak di Rencanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.923.380.000,00 tidak terserap sebesar Rp76.620.000,00.

Adapun Belanja Bantuan Bagi Hasil pada Tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp68.001.331.582,00 realisasi sebesar Rp40.088.838.578,00 tidak terserap Rp27.912.493.004,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bagi hasil PBB kepada Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.080.497.000,00 realisasi sebesar Rp38.352.047.378,00 tidak terserap sebesar Rp27.728.449.622,00;
- Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.920.834.582,00 realisasi sebesar Rp 1.736.791.200,00 tidak terserap sebesar Rp184.043.382,00

D. Pelaksanaan Bantuan Keuangan

Pada Tahun 2015 Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp306.838.078.531,70 realisasi sebesar Rp306.232.981.581,00, tidak terserap Rp605.096.950,70 dengan rincian sebagai berikut:
dengan rincian sbb:

1. Bantuan Keuangan Kepada Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp305.836.776.092,00 realisasi sebesar Rp305.231.679.331,00 tidak terserap sebesar Rp605.096.761,00 yang dipergunakan untuk:
 - ADD (APBD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp139.562.090.932,00 realisasi sebesar Rp139.562.044.331,00 tidak realisasi sebesar Rp46.601,00;
 - Dana Desa (APBN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp91.691.495.000,00 realisasi sebesar Rp91.691.495.000,00 tidak terserap sebesar Rp0,00;

- Balai Desa / Balai Dusun dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.320.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.320.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp0,00;
- Bantuan Pilkades dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.872.290.000,00 realisasi sebesar Rp2.675.440.000,00 tidak terserap sebesar Rp196.850.000,00;
- Gapuro dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp50.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp50.000.000,00;
- Jalan Desa/Jalan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.352.500.000,00 realisasi Rp6.352.500.000,00 tidak terserap sebesar Rp0,00;
- Jalan Poros Desa/Penunjang Jalan Poros Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.483.000.000,00 realisasi sebesar Rp45.279.800.000,00 tidak terserap sebesar Rp 203.200.000,00;
- Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp850.000.000,00 realisasi sebesar Rp850.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp0,00;
- Lampu jalan alokasi anggaran sebesar Rp690.000.000,00 realisasi sebesar Rp690.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp0,00;
- Makam dengan alokasi anggaran sebesar Rp680.000.000,00 realisasi sebesar Rp680.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp0,00;
- Pasar Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00 terserap sebesar Rp0,00;
- Plengsengan/TPT dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.275.000.160,00 realisasi sebesar Rp10.275.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp160,00;

- Sanitasi/Saluran Air/Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.345.400.000,00 realisasi sebesar Rp5.335.400.000,00 tidak terserap sebesar Rp10.000.000,00;
- Sarana/Prasarana Olahraga dengan alokasi anggaran sebesar Rp295.000.000,00 realisasi sebesar Rp 150.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp145.000.000,00;
- Situs makam dengan alokasi anggaran sebesar Rp220.000.000,00 realisasi sebesar Rp220.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp0,00.

E. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik pada Tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp1.001.302.439,70 realisasi sebesar Rp1.001.302.250,00 tidak terserap Rp189,70 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Partai Politik Gerakan Indonesia raya dengan alokasi anggaran sebesar Rp122.934.645,63 realisasi sebesar Rp 122.934.600,00 tidak terserap sebesar Rp45,63;
2. Belanja Bantuan Partai Politik Amanat nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.561.630,95 realisasi sebesar Rp79.561.600,00 tidak terserap sebesar Rp30,95;
3. Belanja Bantuan Partai Politik Kebangkitan Bangsa dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.486.314,00 realisasi sebesar Rp 199.486.300,00 tidak terserap sebesar Rp14,00;
4. Belanja Bantuan Partai Politik Golongan Karya dengan alokasi anggaran sebesar Rp239.833.304,40 realisasi sebesar Rp 239.833.300,00 tidak terserap sebesar Rp 4,40;
5. Belanja Bantuan Partai Politik Persatuan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp103.000.469,76 realisasi sebesar Rp 103.000.450,00 tidak terserap sebesar Rp19,76;

6. Belanja Bantuan Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.914.076,56 realisasi sebesar Rp115.914.050,00 tidak terserap sebesar Rp26,56;
7. Belanja Bantuan Partai Politik Demokrat dengan alokasi anggaran sebesar Rp91.829.557,41 realisasi sebesar RP 91.829.550,00 tidak terserap sebesar Rp7,41;
8. Belanja Bantuan Partai Politik Nasional Demokrat alokasi anggaran sebesar Rp48.742.440,99 realisasi sebesar Rp 48.742.400,00 tidak terserap sebesar Rp40,99;

F. Pelaksanaan Bantuan Belanja Tidak Terduga

Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp341.044.000,00 tidak terserap sebesar Rp1.658.956.000,00.

Adapun rincian pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPD di Kabupaten Gresik sebagaimana dalam Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015 (Buku I dan Buku II), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sehingga tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan lebih efisien dan efektif.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Gresik menerima tugas pembantuan dari Pemerintah sebanyak 5 (lima) urusan pemerintahan sebagai berikut:

- A. Urusan Kelautan dan Perikanan;
- B. Urusan Tenaga Kerja;
- C. Urusan Kesehatan;
- D. Urusan Pertanian;
- E. Urusan Perdagangan.
- F. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1. Dasar Hukum
 - a. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-032.04.4.059116/2015;
 - b. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-032.07.4.059041/2015;
- 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan: Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik;

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

1.1. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp47.010.000,00

- Realisasi : Rp43.027.500,00 (91,53%)

Keluaran : Laboratorium HPI dan Residu yang memenuhi standar teknis

- Target : 1 Unit

- Realisasi : 1 Unit

Hasil Peningkatan pelayanan laboratorium HPI dan Residu

- Target : 12 bln

- Realisasi : 12 bln

1.2. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan

Lokasi : Kecamatan Sidayu

Realisasi Fisik : 100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp67.390.000,00

- Realisasi : Rp58.360.000,00 (86,60%)

Keluaran : Kabupaten/Kota Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya
 - Target : 1 kabupaten
 - Realisasi : 1 kabupaten
 Hasil : Terwujudnya koordinasi dan Perencanaan Kelompok Pembudidaya Ikan di Kawasan Minapolitan dengan baik
 - Target : 100%
 - Realisasi : 100%

1.3. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

Lokasi : Kecamatan Ujungpangkah
 Realisasi Fisik : 100%
 Tolok Ukur Kinerja
 Masukan : Jumlah Dana
 - Target : Rp800.570.000,00
 - Realisasi : Rp745.185.580,00 (93,08%)
 Keluaran : Kelompok budidaya yang siap untuk disertifikasi CBIB
 - Target : 1 kelompok
 - Realisasi : 1 kelompok
 Hasil : Bertambahnya jumlah kelompok pembudidaya yang telah bersertifikat CBIB
 - Target : 1 kelompok
 - Realisasi : 1 kelompok

1.4. Kegiatan : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya

Lokasi	: Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp143.940.000,00
- Realisasi	: Rp119.667.100,00 (83,14%)
Keluaran	: Perencanaan, Kerjasama, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran Berdasarkan Data Terkini dan Akuran
- Target	: 1 dokumen
- Realisasi	: 1 dokumen
Hasil	: Terselenggaranya ketertiban dalam pengadministrasian dan pelayanan
- Target	: 100%
- Realisasi	: 100%

2. Program Pengelolaan Sumber Daya laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

2.1. Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

Lokasi	: Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp998.000.000,00
- Realisasi	: Rp905.773.779,00 (90,76%)
Keluaran	: Kelompok petambak garam yang diberdayakan

- Target : 62 kelompok
- Realisasi : 62 kelompok
- Hasil : Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat
- Target : 80%
- Realisasi : 80%

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp2.056.910.000,00
- APBD : -
- Jumlah : Rp2.056.910.000,00**

B. Urusan Ketenagakerjaan

1. Dasar Hukum:

DIPA Nomor: 026.04.4.059454/2015 Tanggal 14 November 2015

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan:

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaanya:

1. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1.1 Kegiatan : Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp519.904.000,00

- Realisasi : Rp516.053.234,00 (99,26)

Keluaran	:	1. Padat Karya Infrastuktur 2. Layanan Perkantoran
- Target	:	1. 176 Orang 2. 12 Bulan
- Realisasi	:	1. 127 Orang 2. 8 Bulan
Hasil	:	Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembuatan infrastruktur

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

- APBN	:	Rp519.904.000,00
- APBD	:	-
Jumlah	:	Rp519.904.000,00

1. Urusan Kesehatan

a. 1. Dasar Hukum:

DIPA Nomor: SP DIPA-024-03.4.059455/2015 Tanggal 14 November 2015

2. Instansi pemberi tugas pembantuan: KEMENKES RI

3. Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang diterima dan Pelaksanaanya:

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan ibu dan Anak

1.1 Kegiatan : Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp 3.919.761.000,00

- Realisasi : Rp3.859.015.600,00 (98,45%)

Keluaran : Bantua Operasional Kesehataan

- Target : 32 Puskesmas
- Realisasi : 32 Puskesmas
- Hasil : Peningkatan Kegiatan Operasional dan pelayanan kesehatan di Puskesmas
- Target : 100%
- Realisasi : 100%

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp 3.919.761.000,00
- APBD : -
- Jumlah** : Rp 3.919.761.000,00

b. 1. Dasar Hukum:

DIPA Nomor: SP DIPA-024.04.4.050150/2015 Tanggal 25 Juni 2015

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementerian Kesehatan RI

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan: RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaanya:

- 1. Program : Pembinaan Upaya Kesehatan**
- 1.1 Kegiatan : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan**
- Lokasi : RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik
- Realisasi Fisik : 100%
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah dana
- Target : Rp18.000.000.000,00
- Realisasi : Rp18.000.000.000,00 (100%)
- Keluaran : 1. Alat Kesehatan RS Rujukan Regional
- 2. Layanan Perkantoran
- 3. Output Cadangan

- Target : 1. 147 Unit
2. 6 bulan layanan
3. 1 cadangan
 - Realisasi : 1. 147Unit
2. 6 bulan layanan
3. 1 cadangan
 - Hasil : Pengadaan alat kesehatan sesuai dengan rencana
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran
- APBN : Rp18.000.000.000,00
 - APBD : -
 - Jumlah : Rp18.000.000.000,00**

2. Urusan Pertanian

a. 1. Dasar Hukum:

DIPA Nomor: SP DIPA-018.04.4.059453/2015 Tanggal 1 Juli 2015

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jendral Hortikultura

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan:

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya:

1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan

1.1. Kegiatan : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan

Lokasi : Kec. Panceng

Realisasi Fisik : 100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp1.180.011.000,00

- Realisasi : Rp1.162.114.200,00

Keluaran	:	1. Pengembangan Kawasan Tanaman Buah
		2. Sekolah Lapangan GAP
		3. Sasaran Prasarana Budidaya
		4. Sasaran Prasarana Pascapanen
- Target	:	1. 89 Ha
		2. 5 Kelompok
		3. 125 Unit
		4. 277 Unit
- Realisasi	:	1. 89 Ha
		2. 5 Kelompok
		3. 125 Unit
		4. 277 Unit
Hasil	:	Telah dilaksanakan pengembangan kawasan buah 89 Ha dan sekolah lapang GAP pada 5 Kelompok Telah didistribusikan sarana dan prasarana budidaya 125 unit dan sarana dan prasarana pasca panen 277 unit.
- Target	:	100%
- Solusi	:	100%

1.2. Kegiatan : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan

Lokasi	:	
Realisasi Fisik	:	100%
Tolok Ukur Kinerja		
Masukan	:	Jumlah Dana
- Target	:	Rp2.816.134.000,00
- Realisasi	:	Rp2.761.469.800,00

Keluaran	:	1. Pengembangan Kawasan Tanaman sayur
		2. Sekolah Lapangan GAP
		3. Sasaran Prasarana Budidaya
		4. Sasaran Prasarana Pascapanen Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat
- Target	:	1. 15 Ha
		2. 4 Kelompok
		3. 60 Unit
		4. 360 Unit
- Realisasi	:	1. 15 Ha
		2. 4 Kelompok
		3. 60 Unit
		4. 360 Unit
Hasil	:	Telah dilaksanakan pengembangan kawasan tanaman sayuran 15 Ha dan sekolah lapang GAP pada 4 Kelompok Telah didistribusikan sarana dan prasarana budidaya 60 unit dan sarana dan prasarana pasca panen 386 unit.
- Target	:	100%
- Realisasi	:	100%

**1.3. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya pada Ditjen
Hortikultura**

Lokasi	:	Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik	:	100%
Tolok Ukur Kinerja		
Masukan	:	Jumlah Dana

- Target : Rp114.970.000,00
- Realisasi : Rp74.306.600,00
- Keluaran : 1. Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura
- 2. Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura
- 3. Layanan Perkantoran
- Target : 1. 1 Laporan
- 2. 2 Dokumen
- 3. 12 bulan Layanan
- Realisasi : 1. 1 Laporan
- 2. 2 Dokumen
- 3. 12 bulan Layanan
- Hasil : Telah dilaksanakan penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura dan telah dilaksanakan penataan dan pengelolaan perencanaan, keuangan dan perlengkapan kepegawaian kegiatan hortikultura
- Target : 100%
- Realisasi : 100%

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp8.222.230.000,00
- APBD : -
- Jumlah : Rp8.222.230.000,00**

E. Urusan Perdagangan

1. Dasar Hukum:

DIPA Nomor: SP DIPA-090.02.4.050149/2015

2. Instansi Pemberi Tugas: Kementerian Perdagangan

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya:

1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

1.1 Kegiatan : Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp7.500.000.000,00

- Realisasi : Rp1.799.801.000,00 (24%)

Keluaran : Pasar Rakyat (Type A/B)

- Target : 1 Unit

- Realisasi : 1 Unit

Hasil : Terlaksananya Pembangunan Pasar Rakyat yang layak

- Target : 100%

- Realisasi : 24%

Permasalahan dan :

Solusi

- Permasalahan : Keterlambatan DIPA menyebabkan terbatasnya waktu pelaksanaan, dimulai dari konsultasi perencanaan, konstruksi fisik serta konsultasi pengawasan.

- Solusi : DIPA turun lebih awal. Diharapkan awal tahun anggaran sudah turun

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN	:	Rp7.500.000.000,00
- APBD	:	-
Jumlah	:	Rp7.500.000.000,00

F. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Dasar Hukum:

DIPA Nomor: SP DIPA-010.08.4.050151/2015

2. Instansi Pemberi Tugas: Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.1 Kegiatan : Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp2.201.348.000,00

- Realisasi : Rp1.337.412.740,00

Keluaran : Pengembangan sistem administrasi Kependudukan

- Target : 18 Kecamatan

- Realisasi : 18 Kecamatan

Hasil : Terlaksananya Penataan administrasi Kependudukan di Kabupaten Gresik

- Target : 100%

- Realisasi : 100%

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp 2.201.348.000,00

- APBD : Rp 6.296.310.625,00

Jumlah : Rp 8.497.658.625,00

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu substansi penting sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, untuk diinformasikan dan merupakan bagian keterangan pertanggungjawaban Bupati Gresik kepada DPRD Kabupaten Gresik, sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat.

Adapun bidang penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:

- A. Kerjasama antar daerah;
- B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- D. Pembinaan batas wilayah;
- E. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- F. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Memenuhi amanat ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kabupaten Gresik pada tahun 2015 dapat dilaporkan sebagai berikut:

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan

Kebijakan kerjasama daerah di Kabupaten Gresik secara eksplisit merupakan bagian dari Misi kedua pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2011-2015, yaitu "Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik".

Kebijakan ini mengacu dan atau sejalan dengan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan

kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Oleh karena itu untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

2.5. Kegiatan : Kerjasama Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah

Daerah yang bekerjasama : **Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 180/ 6155 /437.12/2013
Nomor : PRJ-1204/ PW13 /3/2013

SKPD yang melaksanakan : Inspektorat Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Pelaksanaan asistensi atas pemanfaatan anggaran daerah dan menjalankan peraturan yang terkait pengelolaan keuangan daerah antara lain:

- Pengelolaan keuangan daerah;
- Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Akutandi Keuangan Daerah;
- Pengembangan dan penyelenggaraan sistem akutanbilitas kinerja instansi pemerintah;
- Penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah;

- Pengembangan dan penyelenggaraan SPIP.
- outcome/Hasil : Meningkatnya manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
- Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan

Seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki peluang yang sangat besar untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kerjasama dengan pihak ketiga meliputi:

- a. Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- c. Kerjasama investasi; dan
- d. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

2.1. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik

Nomor : 180/ 6 /437.12/2015

Nomor : 053/127.a/C. Grs

Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan
Dana Deposito Berjangka

SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik dalam bentuk Deposito Berjangka

- outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah

Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu deposito berjangka

2.2. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Nomor : 180/ 5 /437.12/2015
Nomor : 8/BR/GRK/026/II/2015
Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

- outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah

Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu deposito berjangka

2.3. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Nomor : 180/ 7 /437.12/2015

Nomor : B.01/KC-IX/PKS/02/2015

Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

- outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah

Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu deposito berjangka

2.4. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surabaya

Nomor : 180/ 390 /437.12/2015

Nomor : 002/PKS-GRS/III/2015

Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten
Gresik pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang
Surabaya
- outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah
Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu deposito berjangka

**2.5. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana
Deposito Berjangka**

Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Negara Indonesia (persero), Tbk.
Kantor Cabang Gresik

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara
Pemerintah Kabupaten Gresik PT. Bank
Negara Indonesia (persero), Tbk. Kantor
Cabang Gresik

Nomor : 180/ 391 /437.12/2015

Nomor : GRK/5/0738/2015

Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan
Dana Deposito Berjangka

SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten
Gresik pada PT. Bank Negara Indonesia
(persero), Tbk. Kantor Cabang Gresik

- outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah

Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu deposito berjangka

2.6. Kegiatan : Pelayanan Angkutan Penyeberangan Gresik - Bawean Dengan Kapal Penumpang Cepat

- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur
- Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur
Nomor : 180/8615/437.12/2012
Nomor : 012/sim/CB/GRSK/XII-2012
- SKPD yang melaksanakan : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:
- Output/Keluaran : Pelayanan angkutan penyeberangan laut Gresik-Bawean
 - Outcome/Hasil : Meningkatkan kelancaran transportasi laut Gresik - Bawean
- Jangka Waktu : 3 Tahun (berakhir 25 November 2015)

2.7. Kegiatan : Pengiriman Surat Pos Dalam Negeri

- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Pos Indonesia
- Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Regional VII Jawa Timur
Nomor:3097/Ratket/Adm Penjualan/6/0115/2015
Nomor:
- SKPD yang melaksanakan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

- Output/Keluaran : Kartu Keluarga yang tercetak dalam jangka waktu lebih cepat \pm 3-4 hari dan dapat sampai kepada masyarakat melalui desa dengan jasa pengiriman paket PT. POS
- Outcome/Hasil : Peningkatan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat untuk mempermudah pengambilan hasil cetak Kartu Keluarga tanpa perlu pengambilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Jangka Waktu : 1 Tahun (2 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015)

2.8. Kegiatan : Gresik *Digital Society*

Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Nomor: 188/6559 /437.12/KB/2013
Nomor:K.TEL/HK.840/DTT-GD200000/2013

SKPD yang melaksanakan : Bagiab Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

- Output/Keluaran : -Meningkatan Capacity Building
- Impelementasi e-Government pada pemerintah Kabupaten Gresik; dan
- Social Learning (Pembelajaran Sosial)

- Outcome/Hasil : Mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui penerapan dan pemasyarakatan teknologi digital guna mendukung pembangunan kabupaten Gresik
- Jangka Waktu : 2 Tahun (28 November 2013 s/d 28 November 2015)

2.9. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Unit Kesehatan Sekolah Oleh Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Gresik

- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Ikatan Bidan Indonesia Cabang Gresik
- Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Ikatan Bidan Indonesia Cabang Gresik
Nomor: 180 / 11 / 437.12 / 2015
Nomor:
- SKPD yang melaksanakan : Dinas Kesehatan
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:
 - Output/Keluaran : Pembinaan dan Pengembangan Program Usaha Kesehatan Sekolah
 - Outcome/Hasil : Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya secara maksimal dan Kesehatan Sekolah serta mewujudkan keberhasilan GRESIK SEBAGAI USAHA KESEHATAN SEKOLAH
- Jangka Waktu : 3 Tahun (30 Januari 2015 s/d 30 Januari 2018)

- 2.10. Kegiatan : Peran Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Gresik Sebagai Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Gresik**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Gresik
- Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Gresik
Nomor: 180 / 12 / 437.12 / 2015
 Nomor: / TP-UKS GSK.13 / d / I / 2015
- SKPD yang melaksanakan : Dinas Kesehatan
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:
- Output/Keluaran : Pembinaan dan Pengembangan Program Usaha Kesehatan Sekolah
 - Outcome/Hasil : Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya secara maksimal dan Pengembangan Program UKS serta mewujudkan keberhasilan
- Jangka Waktu : 3 Tahun (30 Januari 2015 s/d 30 Januari 2018)

- 2.11. Kegiatan : Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Gresik Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station Microcell dan Fiber Optik Dengan Metode Kamufase**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk
Nomor: 180 / 6403 / 437.12 / 2015
 Nomor: 390 / BTS-DIR / IX /15

SKPD yang melaksanakan : Dinas Pemerintahan Umum

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

- Output/Keluaran : Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Penempatan Jaringan Base Transceiver Station (BTS) microcell dan Fiber Optik sebanyak 135 titik tiang microcell

- Outcome/Hasil : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Jangka Waktu : 5 Tahun (Desember 2015 s/d Desember 2020)

2.12. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Unit Kesehatan Sekolah Oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Pihak Ketiga yang bekerjasama : Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Gresik

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Gresik
Nomor: 180 / 10 / 437.12 / 2015
 Nomor:

SKPD yang melaksanakan : Dinas Kesehatan

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

- Output/Keluaran : Pembinaan dan Pengembangan Program Usaha Kesehatan Sekolah
- Outcome/Hasil : Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya secara maksimal dan Pengembangan Program UKS serta mewujudkan keberhasilan
- Jangka Waktu : 3 Tahun (27 Januari 2015 s/d 27 Januari 2018)

2.13. Kegiatan : Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Penyediaan Air Curah Kapasitas 200 Liter/Detik

Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Dewata Bangun Tirta

Dasar Hukum : 1. Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik dan PT. Dewata Bangun Tirta tentang Bangunan, Guna, dan Serah tanggal 25 Mei 2012

Nomor: 690 / 27 / 437.82.207 / 2012

Nomor: 001 / BGS / V / 2012

2. Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik dan PT. Dewata Bangun Tirta tentang Jual Beli Air Curah tanggal 25 Mei 2012

Nomor: 690 / 28 / 437.82.207 / 2012

Nomor: 001 / PJB / V / 2012

SKPD yang melaksanakan : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik

Lokasi : Desa Legundi, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

- Output/Keluaran : Peningkatan kapasitas produksi melalui KPS Bangun, Guna, Serah (BOT) Instalasi Pengolahan Air Kapasitas 200 liter/detik
 - Outcome/Hasil : Meningkatnya penyediaan air bersih kepada masyarakat dan mengembangkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat di kabupaten Gresik
- Jangka Waktu : 25 Tahun (25 Mei 2012 s/d 25 Mei 2036)

2.14. Kegiatan : Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Penyediaan Air Curah Kapasitas 400 Liter / Detik

Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Drupadi Agung Lestari

Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik dan PT. Drupadi Agung Lestari tentang Peningkatan, Bangunan, Guna, dan Serah tanggal 1 Oktober 2012

Nomor: 690 / 41 / 437.82.207 / 2012

Nomor: 05 / PPBGS-PDAM / DAL / X /2012

SKPD yang melaksanakan : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik

Lokasi : Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

- Output/Keluaran : Peningkatan kapasitas produksi melalui KPS Peningkatan, Bangun, Guna, Serah (RUOT) Instalasi Pengolahan Air Kapasitas 400 Liter / detik

- Outcome/Hasil : Meningkatkan penyediaan air bersih kepada masyarakat dan mengembangkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Gresik

Jangka Waktu : 25 Tahun (1 Oktober 2012 s/d 1 Oktober 2036)

2.15 Kegiatan : Pengoprasian Kapal Cepat Penumpang Natuna Express Gresik- Bawean

Pihak Ketiga yang bekerjasama PT. Gresik Samudra

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama antara PT. Gresik Samudra dengan PT Pelayanan Mitra Kalindo Samudra tanggal 14 Agustus 2014
Nomor: 03 / GS / PK / VIII / 2014

Nomor: 88 / VIII / 2014

SKPD yang melaksanakan PT. Gresik Samudra

Lokasi Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 245, Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

- Output/Keluaran Tersedianya kapal cepat penumpang Natuna Expres Gresik-Bawean dan Bawean-Gresik

- Outcome/Hasil Terlaksananya kelancaran transportasi angkutan laut Gresik-Bawean dan Bawean-Gresik

Jangka Waktu 5 Tahun (21 Juli 2014 s/d 20 Juli 2019)

2.16 Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Unit Kesehatan Sekolah Oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Gresik

Pihak Ketiga yang bekerjasama : Persatuan Dokter Gigi Nasional Indonesia Cabang Gresik

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara
Pemerintah Kabupaten Gresik dan Persatuan
Dokter Gigi Indonesia Cabang Gresik
Nomor: 180 / 9 / 437.12 / 2015
Nomor:

SKPD yang melaksanakan : Dinas Kesehatan

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

- Output/Keluaran : Pembinaan dan Pengembangan Program
Usaha Kesehatan Sekolah

- Outcome/Hasil : Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya
secara maksimal dan Pengembangan
Program UKS serta mewujudkan
keberhasilan

Jangka Waktu : 3 Tahun (30 Januari 2015 s/d 30 Januari
2018)

C. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan

Kebijakan dalam pembinaan batas wilayah adalah mengupayakan pemasangan patok batas wilayah kelurahan/desa, terutama untuk batas terluas wilayah Kabupaten Gresik yang bebatasan langsung dengan daerah lain.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

2.1. Kegiatan : Survey Dan Pemetaan Batas Daerah

Instansi yang dikoordinasikan : Topografi Komando Daerah Militer V/ Brawijaya

Dasar Hukum : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Top Dam V Brawijaya Nomor 050/1355/437.12/2015 dan Nomor B/30/IV/2015 tentang Survey dan Penataan Batas Daerah

SKPD Yang Melaksanakan : Bagian Administrasi pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

Realisasi Kegiatan

- Materi : Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Penegasan Batas Daerah (PBD), Yaitu : Batas Desa di Kecamatan Duduksampean dan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

- Manfaat : Untuk Membantu Menentukan Penegasan Batas Daerah Yaitu Batas Desa di Kecamatan Duduksampean dan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

- Tindaklanjut : -

Jangka Waktu : 1 Tahun

Sumber Dan Jumlah Dana

- APBD : Rp. 237.090.000,00

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik merupakan bencana dalam skala kecil atau lokal yang meliputi:

a. Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan di Kabupaten Gresik pada tahun 2015 terjadi tanggal 10 Juli 2015 s/d 15 November 2015. Adapun desa yang ditetapkan dalam status keadaan darurat bencana kekeringan kategori kering kritis di Kabupaten Gresik tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel VI.1
Daftar Desa Yang Ditetapkan Dalam Status
Keadaan Darurat Bencana Kekeringan Katagori Kering Kritis
Di Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2015

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN		JUMLAH DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
1	Benjeng	1	Gluranploso	4	560	1.836
		2	Munggugianti	2	681	1.951
		3	Bulurejo	6	1.240	4.098
		4	Kedungrukem	4	887	2.540
		5	Deliksumber	4	868	2.540
		6	Kalipadang	5	946	3.316
		7	Klampok	4	937	3.076
		8	Sirnoboyo	5	1.621	5.540
		9	Metatu	3	1.462	5.023
		10	Banter	2	778	2.623
		11	Jogodalu	3	1.235	3.904
		12	Jatirembe	1	812	2.717
		13	Pundutrate	3	820	2.778
2	Cerme	1	Dampaan	1	362	1.470
		2	Pandu	3	586	2.110
		3	Lengkong	1	275	1.089
		4	Jono	2	450	1.504
		5	Kandangan	4	1.051	3.805
		6	Dungus	3	766	2.846
		7	Gedangkulud	3	1.112	4.800
		8	Wedani	2	888	3.639
3	Duduksampeyan	1	Betis Benen	3	861	3.391
		2	Sumari	3	1.141	4.363
		3	Tambakrejo	3	1.383	5.032

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN		JUMLAH DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
		4	Setrohadi	2	538	2.045
		5	Kramat	1	245	995
		6	Wadak Kidul	1	665	2.545
4	Kedamean	1	Cerme	4	375	1.698
		2	Tulung	2	714	2.380
		3	Lampah	7	1.054	3.817
		4	Turirejo	6	1.203	4.018
5	Balongpanggung	1	Kedungpring	4	650	2.629
		2	Balongpanggung	5	1.289	5.156
		3	Pucung	4	243	825
6	Sidayu	1	Pengulu	0	134	755
		2	Mojoasem	0	130	750
		3	Randuboto	4	754	3.750
7	Bungah	1	Penggundan	0	341	1.285
		2	Gumeng	1	469	2.144
	JUMLAH		39	115	30.526	110.783

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Penanggulangan Bencana Kekeringan dilakukan dengan tindakan pembuatan sumur bor di Desa Randubotu Kecamatan sidayu dan desa Wedani kecamatan Cerme, pipanisani di Desa Metatu Kec. Cerme dan Desa Klampok Kecamatan Benjeng, dan pendistribusian yang air bersih di 39 desa terdampak yang menjadi prioritas, dilaporkan juga dari polres Gresik, PMI Gresik, PT Petrokimia Gresik, dll juga melakukan distribusi air.

b. Bencana Banjir

Bencana banjir di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten terjadi pada tanggal 1 Januari 2015 S/D 16 Pebruari 2015, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.2
Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Gresik Tahun 2015

NO.	DESA	KETINGGIAN AIR (Cm)	RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH JIWA	SAWAH (Ha)	TAMBAK (Ha)
1	Pucung Kec. Balongpanggang	60	150	476	55	
2	Wotansari Kec. Balongpanggang	50	200	635	45	
3	Dapet Kec. Balongpanggang	30	85	270	20	
4	Kedungpring Kec. Balongpanggang	40	94	305	50	
5	Brangkal Kec. Balongpanggang	40	70	245	65	
6	Balongpanggang Kec. Balongpanggang	30	90	285	54	
7	Karangsemanding Kec. Balongpanggang	50	95	298	48	
8	Banjaragung Kec. Balongpanggang	40	80	265	62	
9	Lundo Kec. Benjeng	80	57	171	52	
10	Bulangkulon Kec. Benjeng	80	41	123	55	
11	Munggugianti Kec. Benjeng	15	300	900	87	
12	Kedunrukem Kec. Benjeng	15	450	1425	83	
13	Deliksumber Kec. Benjeng	10	300	900	117	
14	Sedapurklagen Kec. Benjeng	15	260	790	78	
15	Gluranploso Kec. Benjeng	65	100	325	46	
16	Bulurejo Kec. Benjeng	65	300	900	41	
17	Dermo Kec. Benjeng	30	100	300	51	
18	Klampok Kec. Benjeng	20	50	150	54	
19	Sirnoboyo Kec. Benjeng	20	400	1200	92	
20	Kalipadang Kec. Benjeng	30	73	219	51	
21	Balungtunjung Kec. Benjeng	30	40	132	68	
22	Balungmojo Kec. Benjeng	40	48	164	76	5
23	Munggegebang Kec. Benjeng	40	10	53	50	
24	Cermen Kec. Kedamean	90	200	700	40	
25	Glindah Kec. Kedamean	70	120	350	30	
26	Tulung Kec. Kedamean	50	89	286	43	
27	Lampah Kec. Kedamean	40	79	254	36	
28	Turirejo Kec. Kedamean	30	56	182	47	
29	Boboh Kec. Menganti	80	400	1200	64	20
30	Gadingwatu Kec. Menganti	70	135	400	80	20
31	Putatlor Kec. Menganti	15	40	120	205	5
32	Pranti Kec. Menganti	20	60	150	50	15
33	Beton Kec. Menganti	90	150	450	30	5

NO.	DESA	KETINGGIAN AIR (Cm)	RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH JIWA	SAWAH (Ha)	TAMBAK (Ha)
34	Beringkang Kec. Menganti	10	-	-	75	15
35	Kepatihan Kec. Menganti	40	87	288	20	-
36	Hendrosari Kec. Menganti	40	76	147	24	-
37	Dadapkuning Kec. Cerme	10	15	45	64	20
38	Ngembung Kec. Cerme	20	40	120	80	10
39	Sukoanyar Kec. Cerme	15	40	100	205	5
40	Dampaan Kec. Cerme	15	15	45	50	15
41	Dooro Kec. Cerme	10	5	15	30	5
42	Guranganyar Kec. Cerme	15	50	150	75	15
43	Morowudi Kec. Cerme	65	700	1300	123	65
44	Iker-iker Geger Kec. Cerme	80	315	945	50	150
45	Dungus Kec. Cerme	30	100	300	100	15
46	Lengkong Kec. Cerme	20	50	150	80	10
47	Pandu Kec. Cerme	20	50	150	100	105
48	Cerme Kidul Kec. Cerme	30	30	150	110	105
49	Kandangan Kec. Cerme	10	5	15	100	20
50	Betiting Kec. Cerme	-	-	-	20	10
51	Gedang Kulud Kec. Cerme	-	-	-	30	5
52	Tambakberas Kec. Cerme	25	25	22	-	-
53	Padeg Kec. Cerme	-	-	-	-	150
54	Jono Kec. Cerme	30	30	35	-	60

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Gresik antara lain:

- Pendirian posko bencana;
- Menyiapkan perahu karet dan tenda vakuasi;
- Memberikan paket sembako;
- Pendirian dapur umum;
- Pendirian Pos Kesehatan.

c. Kebakaran

Bencana banjir di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten terjadi pada tanggal 1 Januari s/d 29 Desember 2015, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.3
Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Gresik Tahun 2015

NO	TANGGAL KEJADIAN	DESA	RUMAH TERDAMPAK	KERUGIAN	BANTUAN KERUGIAN
1	04-Feb-15	Pacuh Kec. Balongpanggung	1	150000000	15000000
2	09-Feb-15	sidogedung batu Kec. Sangkapura	1	200000000	-
3	14-Feb-15	Watestanjung Kec. Wringinanom	1	50000000	7500000
4	20-Feb-15	Jombang Delik Kec. Balongpanggung	1	70200000	10530000
5	17-Mar-15	Kalipadang Kec. Benjeng	1	150000000	22500000
6	20 Mei 15	Kedungpring Kec. Balongpanggung	1	55000000	8250000
7	05-Jul-15	Tlogobedah Kec. Menganti	1	50000000	1500000
8	08-Jul-15	Karangandong Kec. Driyorejo	1	200000000	30000000
9	29-Jul-15	Setro Kec. Menganti	3	215000000	32250000
		Bedanten Kec. Bungah	2	750000000	112500000
10	02-Sep-15	Tanjungan Kec. Driyorejo	1	40000000	6000000
11	11-Sep-15	Radegansari Kec. Driyorejo	2	250000000	-
12	07 Okt 2015	Mojopuro Gede Kec. Bungah	1	300000000	-
13	08 Okt 2015	Pangkah wetan Kec. Ujung Pangkah	1	200000000	-
14	13 Okt 2015	Menganti Kec. Menganti	1	50000000	-
15	26 Okt 2015	Mojowuku Kec. Kedamean	1	175000000	-
16	25 Okrt 2015	Lampah Kec. Kedamean	1	105000000	-
		Wringinanom Kec. Wringinanom	1	-	-
17	02-Nop-15	Gunung Teguh Kec. Sangkapura	1	50000000	-
18	14-Nop-15	Krikilan Kec. Driyorejo	1	-	-

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Penanganan Bencana Kebakaran yang di lakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui BPBD anyara lain:

1. Surve Lokasi saat ada laporan masuk;
2. Memberikan Paket sembako;
3. Menindaklanjuti Proposal ganti rugi rumah;
4. Memberikan paket kebutuhan pokok.

d. Angin Puting Beliung

Bencana banjir di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten terjadi pada tanggal 1 Januari s/d 29 Desember 2015, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.3
Kejadian Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Gresik
Tahun 2015

NO	TANGGAL KEJADIAN	KECAMATAN	DESA	RUMAH TERDAM PAK	KERUGIAN	BANTUAN KERUGIAN
1	20-Feb-15	Driyorejo	Wedoroanom	1	35.000.000,00	10.530.000,00
2	20-Feb-15	Kedamean	Banyuurip	35	51.450.000,00	-
3	27-Apr-15	Driyorejo	Kesamben wetan	1	50.000.000,00	-
4		Kebomas	Kelurahan Sidomoro	1	60.000.000,00	9.000.000,00
5	10-Nov-15	Balompanggung	SMAN 1 Balompanggung	1	30.000.000,00	-
6		Kedamean	Mojowuku	1	22.500.000,00	-
7	28-Nov-15	Duduk sampeyan	Tambak rejo	1	50.000.000,00	-

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Penanganan Bencana Angin puting Beliung di Kab Gresik antara lain:

1. Pendirian Posko Siaga Bencana;
2. Menyiapkan peralatan pemotongan untuk pohon tumbang;
3. Koordinasi dengan Dinas dan Instansi Terkait (Dinas PU, BLH, PLN dan Telkom);
4. Surve lokasi saat terjadi Pasca Bencana;
5. Menindaklanjuti Proposal ganti rugi rumah yang tertimpa;
6. Pemberian paket sembako;
7. Memberikan paket kebutuhan pokok.

e. Tanah Longsor

Bencana banjir di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten terjadi pada tanggal 1 Januari s/d 29 Desember 2015, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.3
Kejadian Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Gresik Tahun 2015

NO	TANGGAL KEJADIAN	KECAMATAN	DESA	RUMAH TERDAMPAK	KERUGIAN	BANTUAN KERUGIAN
1	27- Agt 2015	Kedamean	Kedamean	1	15.000.000,00	5.000.000,00

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik dalam kurun waktu tahun 2014 masih merupakan bencana lokal.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran untuk penanggulangan bencana terdiri dari:

Sumber dan Jumlah Anggaran untuk Penanggulangan Bencana Terdiri dari:

- APBN sebesar Rp. 1.392.980.450,00 digunakan untuk bencana kekeringan pipanisasi 2 Desa, Desa Metatu an Desa Klampok Rp. 397.475.100,00. Sumur Bor 2 Desa Randuboto dan Wedani Rp. 468.364.600,00. Dan distribusi air bersih Rp. 62.790.750,00. Untuk bencana Banjir Pengadaan Gedek dan Bongkotan Rp. 175.000.000,00. Pengadaan Sembako Rp. 109.350.000,00. Dan Pengadaan Karung Plastik Rp.75.000.000,00;
- APBD Prov Jatim. Sebesar Rp. 350.322.000,00. Untuk bencana kekeringan Pngadaan air Rp. 245.322.00,00. Untuk pengadaan sembako Rp. 105.000.000,00;
- APBD Gresik sebesar Rp. 1.607.684.000,00.

4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di Kabupaten Gresik dilakukan antara lain:

1. Mengkoordinasikan dengan Dinas dan Instansi terkait Penanggulangan Bencana;
2. Mengupayakan pembuatan tanggul untuk mengantisipasi luapan Bengawan Solo dan Kali Lamong;

3. Mengusulkan Kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan normalisasi sungai Kali Lamong agar aliran air menuju muara jadi lancar;
4. Mengusulkan pembuatan Sumur bor dan Normalisasi Telaga/embung pada tiap-tiap Daerah yang mengalami Kekeringan;
5. Menyediakan bantuan Tandon dan Air bersih;
6. Mempersiapkan Pelatan Penanggulangan Bencana;
7. Menyediakan stok bantuan paket sembako.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bencana

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik berkerjasama dengan:

- Dinas Pekerjaan Umum;
- Dinas Sosial;
- Dinas Kesehatan;
- Satuan Polisi Pamong Praja;
- Kecamatan dan Desa;
- TNI-POLRI;
- Ormas/LSM/RAPI;
- dan lain-lain.

E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi

Gangguan yang terjadi adalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti Gepeng, PKL dan bangunan liar, pelanggaran IMB, penambangan Galian Gol C tidak berizin, pemasangan Reklame Ilegal, Miras, PSK dan lain-lain.

2. SKPD yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Adapun dasar hukum penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah:

- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul;
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Larangan 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras;
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

NO	URAIAN Pangkat / Golongan Ruang	PENDIDIKAN							JML
		SD	SMP	SMA	D1	D2	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	1	-	-	-	-	-	-	1
	Juru (Ic)	-	-	1	-	-	-	-	1
	Juru Tingkat I (Id)	-	-	1	-	-	-	-	1
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	9	-	-	-	-	9
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	87	1	2	11	-	101
	Pengatur (IIc)	-	-	10	-	-	7	-	17
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	1	-	-	-	-	1
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	3	-	-	5	-	8
	Penata (IIIc)	-	-	-	-	-	-	2	2
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	-	-	-	1	1	2
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH	1	0	112	1	2	24	5	145

Sumber Data: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2016

Jumlah Pegawai Fungsional SKPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan Fungsional	PENDIDIKAN								JML
		SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	PPNS	-	-	-	-	-	3	3	-	6
	JUMLAH	0	0	0	0	0	3	3	-	6

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran untuk penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum berasal dari dana APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 yaitu:

- Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp1.258.279.000,00 (satu milyar duaratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Operasi Penertiban Larangan Peredaran Minuman Keras/Miras sebesar Rp204.820.000,00;
- Operasi Penertiban Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul atau PSK sebesar 276.748.000.

5. Penanggulangan

Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan melalui kegiatan operasi penertiban secara rutin maupun berkala, antara lain:

- Operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah (Perda);
- Operasi penertiban larangan peredaran minuman keras (miras);
- Operasi penertiban pelarangan pelacuran dan perbuatan cabul;
- Penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya dilaksanakan pembinaan terhadap pelanggar bekerjasama dengan instansi terkait.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Keikutsertaan aparat keamanan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Gresik yaitu bantuan dari aparat kepolisian melalui operasi-operasi gabungan maupun dengan melibatkan personil dari TNI.

BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015 ini, pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebagai Penjabaran Tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Bhakti 2010-2015 hingga Purna Bhakti pada 27 September 2015 yang dilanjutkan oleh Penjabat Bupati sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

Penyampaian LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan atas ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2015 merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun demikian, Saya menyadari bahwa masih ada hal-hal yang belum memenuhi harapan dan memuaskan semua pihak.

Selanjutnya, sebagai implementasi hubungan kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD maka diharapkan adanya saran konstruktif berupa rekomendasi dari DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gresik pada masa mendatang. Dengan demikian,

hubungan timbal balik yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjalin secara harmonis dan konstruktif.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015 ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan hidayah dan meridhloi usaha kita bersama untuk menghadirkan Gresik yang telah baik menjadi semakin baik guna mewujudkan "*Gresik yang Agamis, Adil, Makmur, dan Sejahtera untuk Mencapai Kehidupan yang Berkualitas*".

Gresik, Maret 2016

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

